



Pemerintah Kota
Surakarta



LAPORAN AKHIR

Kajian Identifikasi Ketimpangan Kesejahteraan Di Kota Surakarta

Pemerintah Kota Surakarta
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surakarta



bridasurakarta@gmail.com

(0271) 636426



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Ruang Lingkup.....	9
1.5. Hasil yang Diharapkan	10
 BAB II KERANGKA TEORI DAN METODE PELAKSANAAN.....	 11
2.1. Konsep Kesejahteraan.....	11
2.2. Ketimpangan Kesejahteraan	12
2.2.1. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi.....	15
2.2.2. Ketimpangan Kesejahteraan Antar Wilayah	18
2.2.3. Kelompok Rentan	21
2.2.4. Pelayanan Dasar Masyarakat	25
2.3. Kerangka Pikir	31
 BAB III METODE.....	 34
3.1. Pendekatan Ketimpangan Kesejahteraan Kota Surakarta.....	34
3.2. Jenis dan Tipe Penelitian.....	44
3.3. Pengumpulan Data	48
3.4. Teknik Pengolahan Data	48
3.5. Teknik Analisis Data	50
 BAB IV ANALISIS SITUASI	 56
4.1. Situasi Umum.....	56
4.2. Situasi Makro Ekonomi	63
4.3. Situasi Sosial Budaya.....	72

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	86
5.1 Identifikasi Tingkat Ketimpangan Kesejahteraan	86
5.1.1 Dimensi Ekonomi	86
5.1.1.1 Distribusi Pendapatan dan Pengeluaran Keluarga	87
5.1.1.2 Kepemilikan Aset Produktif (Tanah, Usaha, Tabungan)	89
5.1.1.3 Kepemilikan Rumah: Aset Tempat Tinggal dan Ketahanan Ekonomi	90
5.1.1.4 Aset Tanah: Potensi Ekonomi yang Belum Tergarap	91
5.1.1.5 Aset Usaha Sampingan: Penyangga Ekonomi yang Rentan.....	92
5.1.1.6 Aset Keuangan: Tabungan dan Dana Darurat.....	92
5.1.1.7 Ketimpangan Aset dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan	93
5.1.1.8 Akses terhadap Pekerjaan Layak dan Perlindungan Sosial (BPJS).	94
5.1.1.9 Pemetaan Jenis Pekerjaan dan Status Sosial.....	96
5.1.1.10 Jangkauan dan Efektivitas Jaminan Sosial	96
5.1.1.11 Strategi Bertahan Rumah Tangga Rentan	97
5.1.1.12 Perbandingan antar Wilayah Kecamatan dan Kelompok Masyarakat	98
5.1.1.13 Kelurahan Pajang (Kecamatan Laweyan): Wilayah Stabil dengan Akses Baik.....	99
5.1.1.14 Kelurahan Karangasem (Kecamatan Laweyan): Stabil, Tapi Masih Ada Tantangan Pendidikan	100
5.1.1.15 Kelurahan Mojosongo (Kecamatan Jebres): Titik Rentan dengan Tantangan Berlapis	100
5.1.1.16 Kelurahan Panularan: Rendah Aset, Minim Sanitasi, dan BPJS Tidak Optimal	101
5.1.1.17 Kelurahan Kadipiro (Kecamatan Banjarsari): Cukup Baik, tapi Hadapi Risiko Lingkungan	101
5.1.2 Ketimpangan Ekonomi Wilayah	103
5.1.2.1 Distribusi Aset dan Pekerjaan: Fondasi Ketimpangan Struktural	104
5.1.2.2 Akses terhadap Layanan Dasar dan Sanitasi: Ketimpangan yang	

Kasat	105
5.1.2.3 Kesenjangan Internal dalam Satu Kelurahan.....	105
5.1.2.4 Pengaruh Sosial dan Budaya	106
5.1.2.1 Distribusi Aset dan Pekerjaan: Fondasi Ketimpangan Struktural	104
5.1.2.1 Distribusi Aset dan Pekerjaan: Fondasi Ketimpangan Struktural	104
5.1.2.1 Distribusi Aset dan Pekerjaan: Fondasi Ketimpangan Struktural	104
5.1.3 Dimensi Pendidikan	107
5.1.3.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS dan APM)	107
5.1.3.2 Rata-rata Lama Sekolah Dan Tingkat Putus Sekolah	110
5.1.3.3 Akses ke Lembaga Pendidikan (Jarak, Transportasi, Kualitas Fasilitas).....	116
5.1.3.4 Tantangan dan Kendala Akses Pendidikan	119
5.1.3.5 Analisis Spasial terhadap Disparitas Pendidikan.....	123
5.1.4 Dimensi Kesehatan	129
5.1.4.1 Akses Layanan Kesehatan dan Status Kepesertaan JKN/BPJS.....	129
5.1.4.2 Status Gizi Anak dan Prevelensi Stunting/Gizi Buruk	130
5.1.4.3 Ketersediaan Tenaga Medis dan Fasilitas Kesehatan	132
5.1.4.4 Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Layanan Kesehatan.....	133
5.1.5 Dimensi Sosial dan Lingkungan	134
5.1.5.1 Partisipasi Sosial (Kegiatan Warga, Gotong Royong, Forum RT/RW)	134
5.1.5.2 Keamanan Lingkungan.....	135
5.1.5.3 Kualitas Lingkungan (Akses Sanitasi, Air Bersih, Drainase).....	136
5.1.5.4 Akses dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	137
5.1.6 Dimensi Kebebasan dan Pilihan Hidup	138
5.1.6.1 Persepsi Warga Dalam Kebebasan Mengambil Keputusan Hidup	138
5.1.6.2 Ekspektasi Masa Depan Keluarga dan Anak-anak	142
5.1.6.3 Tingkat Optimisme Sosial Ekonomi Antar Kelompok Responden ...	146
5.1.7 Ketimpangan Antar Wilayah Administrasi	149
5.1.7.1 Perbandingan Indikator Kesejahteraan Antar Kecamatan	149
5.1.7.2 Ketimpangan Akses dan Tingkat Kemiskinan.....	152
5.1.7.3 Identifikasi Klaster Wilayah Tertinggal Secara Sosial-Ekonomi	155
5.1.8 Kelompok Rentan dan Ketimpangan Sosial	157

5.1.9 Analisis Tematik dan Refleksi Teoritis	160
5.2 Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan	169
5.2.1 Ketimpangan Ekonomi dan Aset Produktif	169
5.2.2 Ketimpangan Pendidikan	171
5.2.3 Ketimpangan Akses Pekerjaan dan Perlindungan Sosial.....	173
5.2.4 Ketimpangan Akses terhadap Layanan Dasar dan Sanitasi	175
5.2.5 Ketimpangan Partisipasi Sosial dan Politik	177
5.2.6 Ketimpangan Gender dan Relasi Kekuasaan dalam Rumah Tangga dan Komunitas.....	179
5.2.7 Ketimpangan Akses terhadap Masa Depan dan Aspirasi Sosial.....	181
5.3 Alternatif Kebijakan Mengurangi Ketimpangan	183
5.4 Strategi Jangka Panjang Menjaga Kestinambungan Program-Program Pengurangan Ketimpangan Kesejahteraan	187
5.5 Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan.....	191
BAB VI PENUTUP	195
6.1. Kesimpulan	195
6.2. Saran	196
DAFTAR PUSTAKA	DP

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Indikator yang Digunakan.....	46
Tabel 4.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta	57
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2021 – 2025	58
Tabel 4.3	Persebaran Penduduk Kota Surakarta	58
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk menurut Kelurahan di Kota Surakarta Tahun 2023-2024.....	59
Tabel 4.5	Kepadatan Penduduk menurut Kelurahan Kota Surakarta Tahun 2022-2023	61
Tabel 4.6	PDRB ADHB Kota Surakarta Tahun 2020-2024 (miliar rupiah)	65
Tabel 4.7	Distribusi Persentase PDRB ADHB Kota Surakarta Tahun 2024.....	67
Tabel 4.8	Jumlah PPKS Kota Surakarta Tahun 2024.....	73
Tabel 4.9	Jumlah Penerima PKH menurut Kelurahan Kota Surakarta Tahun 2023-2025.....	83
Tabel 5.1	Perbandingan Kepemilikan dan Pengelolaan Aset Produktif Rumah Tangga di Kota Surakarta.....	94
Tabel 5.2	Perbandingan Jenis Pekerjaan, Akses Jaminan Sosial, dan Ketahanan Sosial -Ekonomi Rumah Tangga.....	98
Tabel 5.3	Perbandingan Karakteristik Sosial-Ekonomi Antar Wilayah Kelurahan di Kota Surakarta.....	102
Tabel 5.4	Ketimpangan Ekonomi Wilayah Kota Surakarta	106
Tabel 5.5	Perbandingan APS dan APM antar Kecamatan di Kota Surakarta (Berdasarkan Temuan Lapangan).....	109
Tabel 5.6	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Surakarta Tahun 2020–2024 Berdasarkan Jenis Kelamin	111
Tabel 5.7	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) per Kecamatan Kota Surakarta Tahun 2024 (dalam Tahun)	111
Tabel 5.8	Jumlah Anak Putus Sekolah Tahun 2024	112
Tabel 5.9	Faktor Penyebab Putus Sekolah Berdasarkan Kecamatan di Kota Surakarta.....	115
Tabel 5.10	Kategori Akses Pendidikan	118
Tabel 5.11	Jumlah Anak Belum Pernah Sekolah Menurut Kecamatan dan Kelompok Umur di Kota Surakarta	118
Tabel 5.12	Tematik Ketimpangan Akses Pendidikan di Kota Surakarta	120
Tabel 5.13	Sintesis Tantangan Sosial dan Dampak Jangka Panjang terhadap Akses	

	Pendidikan.....	123
Tabel 5.14	Ringkasan Spasial Akses dan Partisipasi Pendidikan di Kota Surakarta	126
Tabel 5.15	Pola Spasial Ketimpangan Akses Pendidikan di Kota Surakarta.....	128
Tabel 5.16	Analisis Persepsi Warga terhadap Kebebasan Mengambil Keputusan Hidup	139
Tabel 5.17	Implikasi Kebijakan Berbasis Temuan Lapangan	141
Tabel 5.18	Analisis Ekspektasi Masa Depan Keluarga dan Anak-anak.....	144
Tabel 5.19	Analisis Tingkat Optimisme Sosial-Ekonomi Antar Kelompok Responden	149
Tabel 5.20	Implikasi Kebijakan Ketimpangan Kesejahteraan di Kota Surakarta.....	168
Tabel 5.21	Ringkasan Ketimpangan Pendidikan per Wilayah.....	173
Tabel 5.22	Ringkasan Ketimpangan Akses Pekerjaan dan Perlindungan Sosial	175
Tabel 5.23	Ringkasan Ketimpangan Layanan Dasar dan Sanitasi.....	177
Tabel 5.24	Ringkasan Ketimpangan Partisipasi Sosial dan Politik	179
Tabel 5.25	Ringkasan Ketimpangan Gender dan Relasi Kuasa.....	181
Tabel 5.26	Ringkasan Ketimpangan Aspirasi Masa Depan dan Mobilitas Sosial	183
Tabel 5.27	Kebijakan Lintas Dimensi Ketimpangan Kota Surakarta	185
Tabel 5.28	Alternatif Kebijakan Mengurangi Ketimpangan Berdasarkan Dimensi	186
Tabel 5.29	Strategi Jangka Panjang Pengurangan Ketimpangan Kesejahteraan	191
Tabel 5.30	Rekomendasi Alternatif Berdasarkan Dimensi Ketimpangan.....	193

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Kerangka Pikir Identifikasi Ketimpangan Kesejahteraan di Kota Surakarta	33
Gambar 4.1	Peta Kota Surakarta.....	56
Gambar 4.2	Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024	69
Gambar 4.3	Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta dan Wilayah Sekitarnya 2024	70
Gambar 4.4	PDRB Per Kapita Kota Surakarta 2020-2024.....	71
Gambar 4.5	PDRB Per Kapita Kota Surakarta dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2024	72
Gambar 4.6	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK) di Kota Surakarta Tahun 2024.....	77
Gambar 4.7	Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Surakarta Tahun 2024	79
Gambar 5.1	Peta Sebaran Bayi Stunting Perkelurahan Bulan Januari Tahun 2025	132
Gambar 5.2	Ketimpangan Spasial Surakarta.....	161
Gambar 5.3	Kebijakan Pembangunan	163
Gambar 5.4	Kaitan Antara Ketimpangan dan Eksklusi Sosial	165
Gambar 5.5	Relevansi Indikator dengan Realitas Lokal Surakarta.....	168

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu dimensi utama dalam paradigma pembangunan berkelanjutan. Lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial mencerminkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh meliputi akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan perumahan yang memadai. Dalam pembangunan kota, kesejahteraan sosial menjadi fondasi penting bagi terbentuknya masyarakat yang inklusif, adil, dan resilien terhadap tantangan global seperti urbanisasi cepat, krisis iklim, serta transformasi digital. Oleh karena itu, pembangunan kota yang tidak disertai pemerataan kesejahteraan berpotensi menciptakan polarisasi sosial, ketimpangan spasial, hingga eksklusi sistemik terhadap kelompok-kelompok rentan.

Kota Surakarta sebagai salah satu kota budaya dan pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, mengalami transformasi signifikan dalam dua dekade terakhir. Perkembangan infrastruktur, sektor pariwisata, serta peningkatan layanan publik telah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, dinamika pertumbuhan tersebut tidak berjalan paralel dengan pemerataan kesejahteraan antar wilayah dan kelompok sosial. Berbagai studi menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan akses terhadap sumber daya pembangunan, di mana kelompok dan wilayah tertentu menikmati manfaat pembangunan secara lebih dominan dibandingkan yang lain.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta tahun 2023 menunjukkan adanya disparitas kesejahteraan yang cukup tajam antar kecamatan. Meskipun capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surakarta meningkat dari 83,54 pada 2023 menjadi 84,41 pada 2024, ketimpangan kesejahteraan tetap nyata di lapangan. Kecamatan Banjarsari, misalnya, menampilkan indikator pembangunan yang lebih unggul dibandingkan wilayah seperti Serengan atau Pasar Kliwon, terutama dalam akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kreatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis mendorong pemerataan kesejahteraan sosial. Ketimpangan tersebut diperparah oleh fakta bahwa indikator kesejahteraan seperti tingkat pengangguran, kualitas pendidikan, serta akses terhadap layanan publik masih menunjukkan disparitas spasial yang mencolok. Angka kemiskinan Kota Surakarta pada tahun 2024 tercatat sebesar 8,31% dengan jumlah penduduk miskin mencapai 43.280 jiwa.

Meski menurun dibandingkan tahun sebelumnya, disparitas kesejahteraan antar wilayah dalam kota tetap menjadi tantangan mendasar. Di sisi lain, peningkatan garis kemiskinan dari Rp 600.953 pada tahun 2023 menjadi Rp 638.102 per kapita per bulan pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa kebutuhan dasar hidup masyarakat juga mengalami peningkatan yang tidak selalu diimbangi dengan daya beli yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penelitian Suryanto (2020)¹ mengungkapkan bahwa penurunan angka kemiskinan di Kota Surakarta tidak selalu mencerminkan distribusi pendapatan yang membaik. Dalam banyak kasus, penurunan kemiskinan terjadi karena kenaikan pendapatan kelompok menengah, sedangkan kelompok bawah tetap mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran dalam kemampuan ekonominya. Hal ini juga diperkuat oleh analisis Gini Ratio yang menunjukkan tren fluktuatif dan cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ketimpangan ini semakin diperparah dengan adanya urbanisasi dan komersialisasi ruang kota yang menekan kelompok rentan secara sosial dan ekonomi. Pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan dan intervensi pemerintah daerah agar tidak hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan inklusi sosial yang menyeluruh.

Studi geospasial oleh Safira et al. (2023)² menunjukkan bahwa Ketimpangan kesejahteraan juga tidak lepas dari aspek spasial dan struktural. Distribusi fasilitas publik dan infrastruktur dasar, sebagaimana ditunjukkan dalam sangat terkonsentrasi di wilayah pusat kota. Hal ini mengakibatkan wilayah-wilayah pinggiran seperti Jebres mengalami hambatan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan transportasi publik. Ketimpangan digital dan penetrasi teknologi yang rendah di daerah tertentu juga turut memperluas kesenjangan, terutama dalam konteks ekonomi digital dan akses informasi yang kini menjadi elemen vital dalam pembangunan inklusif.

Mujiburrohman dan Putri (2024)³ menekankan bahwa Pendidikan, sebagai salah satu jalur utama mobilitas sosial vertikal, menjadi bidang yang juga memperlihatkan ketimpangan. Disparitas kualitas pendidikan antar wilayah di Kota Surakarta cukup

¹ Suryanto, A. (2020). Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kota Surakarta. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(2), 145–160. <https://jurnal.surakarta.go.id>

² Safira, N., Hidayat, A., & Wicaksono, B. (2023). Spatial Inequality and Service Access in Solo City.

³ Mujiburrohman, A., & Putri, D. (2024). Ketimpangan Pendidikan dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Sosial di Surakarta. *Jurnal Sosiologi dan Pendidikan*, 9(1), 21–35. <https://journal.ar-raniry.ac.id>

signifikan. Sekolah-sekolah yang berada di kawasan ekonomi rendah umumnya memiliki sarana dan prasarana terbatas, kurangnya tenaga pengajar berkualitas, serta tingkat partisipasi pendidikan yang rendah. Ketimpangan dalam dunia pendidikan ini berujung pada kesenjangan kompetensi sumber daya manusia, yang pada gilirannya menciptakan eksklusi dalam dunia kerja dan ekonomi.

Upaya pemerintah daerah dalam mengatasi ketimpangan kesejahteraan sudah dilakukan melalui berbagai program seperti pemberdayaan UMKM, bantuan sosial, dan pengembangan kapasitas masyarakat. Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Surakarta (2022)⁴ menyatakan bahwa efektivitas program-program ini masih rendah, disebabkan oleh lemahnya sistem evaluasi, kurangnya integrasi kebijakan lintas sektor, dan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan program.

Fenomena ketimpangan kesejahteraan yang terjadi di Kota Surakarta memperlihatkan kecenderungan pembangunan yang terpusat pada wilayah-wilayah yang secara historis telah berkembang, seperti pusat kota dan kawasan komersial utama. Kawasan-kawasan ini umumnya memiliki infrastruktur yang lebih baik, aksesibilitas yang lebih tinggi, serta tingkat pelayanan publik yang lebih lengkap dan efisien (Putri & Yuliani, 2021)⁵. Sebaliknya, wilayah-wilayah pinggiran dan perbatasan kota menunjukkan gejala keterbelakangan relatif, baik dari segi akses terhadap layanan dasar maupun dari segi integrasi dalam arus pembangunan ekonomi lokal. Ketimpangan ini tidak hanya bersifat fisik dan geografis, tetapi juga merefleksikan ketimpangan dalam alokasi sumber daya pembangunan, perhatian kebijakan, dan akses terhadap peluang sosial-ekonomi (Sukmono, 2020)⁶. Kondisi ini menciptakan situasi di mana segmen tertentu dari masyarakat kota mengalami marginalisasi yang semakin dalam.

Fenomena ini sejalan dengan kerangka teori core-periphery yang dikemukakan oleh Friedmann, di mana wilayah inti memiliki kapasitas lebih besar dalam menyerap manfaat pembangunan karena akses terhadap jaringan, teknologi, dan modal yang lebih baik. Sebaliknya, wilayah perifer, terutama yang berada di zona transisi urban-rural, mengalami stagnasi akibat keterbatasan akses terhadap sumber daya pembangunan. Ketimpangan semacam ini jika dibiarkan berlarut-larut akan memperbesar jurang

⁴ BRIDA Kota Surakarta. (2022). *Laporan Akhir Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah*. <https://brida.surakarta.go.id>

⁵ Putri, N. P., & Yuliani, T. (2021). *Disparitas Akses Infrastruktur Perkotaan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan*. *Jurnal Sosial Humaniora*, 14(1), 85–97.

⁶ Sukmono, A. (2020). *Pemetaan Ketimpangan Wilayah di Kota Surakarta Menggunakan Indeks Pembangunan Berbasis Kelurahan*. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 8(2), 191–202.

kesejahteraan, memperlemah kohesi sosial, dan memicu konflik sosial yang berakar pada ketidaksetaraan struktural (Paundra et al., 2020)⁷. Kesenjangan kesejahteraan di Kota Surakarta juga diperburuk oleh terbatasnya studi-studi berbasis spasial dan indikator kesejahteraan multidimensi yang dapat menjadi basis kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Kajian yang hanya mengandalkan angka agregat sering kali menutupi disparitas mikro yang sesungguhnya jauh lebih kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan baru yang lebih mendalam, terintegrasi, dan mempertimbangkan dimensi sosial, spasial, dan struktural dalam memetakan ketimpangan kesejahteraan di tingkat lokal (Putri & Wahyuni, 2023)⁸.

Pemerintah Kota Surakarta telah menunjukkan kesadaran terhadap isu ini, sebagaimana tercermin dalam berbagai dokumen perencanaan strategis daerah, seperti RPJMD Kota Surakarta 2021–2026. Upaya penanganan ketimpangan kesejahteraan masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal basis data spasial dan metodologi analisis yang digunakan. Studi-studi ilmiah yang memetakan ketimpangan secara sistematis dan mendalam, khususnya di tingkat kelurahan, masih sangat terbatas, baik dari sisi jumlah maupun cakupan analisis multidimensi (Nugroho et al., 2022)⁹. Padahal pendekatan berbasis spasial dan indikator kesejahteraan komposit sangat penting untuk memberikan gambaran yang komprehensif dalam mendukung kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Kajian akademik yang tidak hanya mengidentifikasi ketimpangan secara numerik, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial spasial dan dinamika lokal secara menyeluruh sangat dibutuhkan.

Ketimpangan kesejahteraan di Kota Surakarta mencerminkan adanya perbedaan signifikan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi, pelayanan publik, dan kualitas hidup antar wilayah. Meskipun kota ini telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, manfaat dari pembangunan tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surakarta tahun 2024 mencapai 84,41. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,87 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 83,54, dengan pertumbuhan rata-rata 1,04%

⁷ Paundra, J., Arifin, H. S., & Setiawan, D. (2020). *Core-Periphery Model and Urban Growth in Java: Empirical Evidence from Spatial Econometric Models*. Indonesian Journal of Geography, 52(1), 23–34. <https://doi.org/10.22146/ijg.46768>

⁸ Putri, S., & Wahyuni, D. (2023). *Urban Exclusion and the Threat to Social Cohesion in Secondary Cities: A Case Study of Surakarta*. Journal of Urban Social Development, 6(3), 112–130.

⁹ Nugroho, H. A., Wulandari, D., & Putra, A. (2022). *Spatial Analysis of Urban Welfare Inequality in Central Java: A Micro-Level Approach*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 33(2), 145–158. <https://doi.org/10.14710/jpwk.v33i2.28497>

selama tahun 2024. Peningkatan IPM ini terjadi pada semua komponen, termasuk kualitas kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Perekonomian Kota Surakarta pada tahun 2024 tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 5,61 persen, pertumbuhan ini lebih cepat dibandingkan capaian tahun 2023 yang tumbuh 5,57 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 9,87 persen.

Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa indikator kesejahteraan seperti tingkat pengangguran, pemerataan pendidikan, kualitas layanan kesehatan, serta distribusi pendapatan masih memperlihatkan disparitas antar wilayah dalam kota. Angka kemiskinan di Kota Surakarta pada tahun 2024 adalah 8,31% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 43.280 orang. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, yaitu turun 0,13%. Garis Kemiskinan 2024 adalah Rp 638.102 per kapita per bulan, naik dari Rp 600.953 pada tahun 2023. Terdapat penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,61 ribu orang dibandingkan tahun 2023. Persentase penduduk miskin di Kota Surakarta lebih rendah dibandingkan dengan angka kemiskinan di Jawa Tengah, yaitu 10,47%. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif dan berkelanjutan, yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) (BPS Kota Surakarta, 2023)¹⁰.

Sebagai salah satu kota strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, Surakarta memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan regional. Akselerasi pembangunan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan ini dapat memicu berbagai persoalan sosial, seperti meningkatnya urbanisasi tanpa perencanaan, kemiskinan yang bersifat struktural, dan marginalisasi kelompok tertentu. Studi oleh Safira et al. (2023)¹¹ menunjukkan bahwa wilayah Banjarsari memiliki potensi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi karena kelengkapan fasilitasnya, sementara daerah lain seperti Serengan masih tertinggal dalam hal aksesibilitas dan fasilitas. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam perencanaan pembangunan kota.

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. (2023). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Surakarta 2023*. [https://surakartakota.bps.go.id/publication/2023/12/28/899c1629ab70c779ebd61250/statistik-kesejahteraan-rakyat-kota-surakarta-2023.html:contentReference\[oaicite:2\]{index=2}](https://surakartakota.bps.go.id/publication/2023/12/28/899c1629ab70c779ebd61250/statistik-kesejahteraan-rakyat-kota-surakarta-2023.html:contentReference[oaicite:2]{index=2})

¹¹ Safira, L., Samudro, B. R., & Mulyanto. (2023). *Determination of the Center for Economic Growth in Surakarta City, Indonesia: Geospatial Approach*. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(9), 2801–2810. [https://doi.org/10.18280/ijstdp.180918:contentReference\[oaicite:5\]{index=5}](https://doi.org/10.18280/ijstdp.180918:contentReference[oaicite:5]{index=5})

Faktor-faktor struktural seperti distribusi ekonomi, urbanisasi yang tidak merata, serta perbedaan akses terhadap sumber daya dan peluang menjadi isu yang perlu ditelaah lebih lanjut. Penelitian oleh Setyono et al. (2016)¹² mengungkapkan bahwa pola urbanisasi di wilayah Semarang-Yogyakarta-Surakarta menunjukkan adanya konsentrasi pertumbuhan di wilayah tertentu, yang dapat memperlebar kesenjangan antar wilayah. Dengan pendekatan analisis berbasis data, diharapkan dapat ditemukan pemetaan yang jelas mengenai wilayah-wilayah yang membutuhkan intervensi lebih besar, serta identifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang paling terdampak oleh ketimpangan tersebut.

Penelitian ini menjadi sangat relevan dalam rangka mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama tujuan ke-10 tentang pengurangan ketimpangan dan tujuan ke-11 tentang kota dan komunitas yang berkelanjutan. Dengan memetakan ketimpangan secara lebih sistematis dan menyeluruh, baik dari aspek geografis maupun sosial-ekonomi, pemerintah daerah diharapkan dapat merancang kebijakan dan intervensi pembangunan yang lebih adil, tepat sasaran, dan inklusif. Pemetaan ini juga dapat mendukung proses perencanaan yang lebih partisipatif, di mana kebutuhan dan potensi lokal dari tiap wilayah dapat diakomodasi secara kontekstual.

Sebagai kota strategis yang memiliki peran penting dalam jaringan metropolitan Semarang–Surakarta–Yogyakarta, Kota Surakarta dituntut untuk menjadi model pembangunan kota yang bukan hanya maju secara ekonomi, tetapi juga adil dan merata secara sosial. Ketimpangan yang bersifat struktural dan spasial perlu didekati melalui kajian akademik yang berbasis data dan mampu menggambarkan realitas lokal secara jujur dan kritis. Dengan begitu, pembangunan kota dapat diarahkan untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjamin kesejahteraan kolektif bagi seluruh warga.

Berdasarkan penjelasan di atas, kajian yang berfokus pada identifikasi ketimpangan kesejahteraan di Kota Surakarta menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai dasar perumusan kebijakan berbasis bukti, tetapi juga sebagai upaya mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah secara lebih efektif. Melalui pemetaan ketimpangan secara komprehensif, diharapkan pemerintah daerah dapat merancang

¹² Setyono, J. S., Yunus, H. S., & Giyarsih, S. R. (2016). *The Spatial Pattern of Urbanization and Small Cities Development in Central Java: A Case Study of Semarang-Yogyakarta-Surakarta Region*. *Geoplanning: Journal of Geomatics and Planning*, 3(1), 53–66. <https://doi.org/10.14710/geoplanning.3.1.53-66>

intervensi kebijakan yang lebih adil, efisien, dan mampu menjangkau kelompok serta wilayah yang selama ini belum tersentuh secara optimal. Dari kajian tersebut diharapkan Kota Surakarta dapat terus berkembang sebagai kota yang mampu menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayahnya.

Kajian ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam penyusunan strategi pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong penguatan kapasitas kelembagaan dalam merespons tantangan sosial-ekonomi perkotaan yang semakin kompleks. Pendekatan multidimensi dan berbasis bukti yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh di seluruh wilayah Kota Surakarta.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam melaksanakan pekerjaan Kajian Identifikasi Ketimpangan Kesejahteraan di Kota Surakarta adalah :

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 67);

7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 11; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 160; 18 hlm);
11. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 23);
12. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 hlm; 139).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah untuk menyediakan hasil Kajian Identifikasi Ketimpangan Kesejahteraan di Kota Surakarta adalah memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat di Kota Surakarta dengan menyoroti aspek-aspek ketimpangan yang ada. Adapun tujuan Kajian Identifikasi Ketimpangan Kesejahteraan di Kota Surakarta adalah:

1. Mengidentifikasi tingkat ketimpangan kesejahteraan;
2. Menganalisis faktor-faktor penyebab ketimpangan;
3. Menyediakan data dan analisis berbasis bukti sebagai acuan bagi Pemerintah Kota Surakarta dalam merancang kebijakan yang efektif untuk mengurangi ketimpangan;
4. Merumuskan strategi jangka panjang yang dapat menjaga kesinambungan program-program pengurangan ketimpangan kesejahteraan;
5. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran, berbasis data, dan aplikatif untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pelaksanaan pekerjaan Kajian Identifikasi Ketimpangan Kesejahteraan di Kota Surakarta mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan analisis menyeluruh terhadap perbedaan kondisi sosial-ekonomi antar individu, kelompok masyarakat, dan wilayah administratif di dalam kota. Kajian ini bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif bentuk dan penyebab ketimpangan kesejahteraan, serta merumuskan strategi kebijakan yang dapat mengatasi disparitas tersebut secara efektif. Lingkup kegiatan yang dirancang mencakup lima aspek utama sebagai berikut:

1. Pemetaan Ketimpangan Kesejahteraan Wilayah yaitu melakukan identifikasi dan pemetaan ketimpangan kesejahteraan secara spasial berdasarkan wilayah administrasi di Kota Surakarta. Pemetaan ini akan mencakup berbagai indikator kesejahteraan, seperti pendapatan, tingkat pendidikan, akses terhadap layanan dasar, dan kualitas permukiman.
2. Identifikasi Faktor Struktural yaitu menganalisis faktor-faktor struktural yang berkontribusi terhadap ketimpangan kesejahteraan, seperti distribusi sumber daya dan infrastruktur, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta kesenjangan dalam peluang ekonomi dan lapangan kerja antar wilayah atau kelompok sosial.
3. Analisis Dampak Ketimpangan yaitu mengkaji implikasi ketimpangan kesejahteraan terhadap aspek-aspek pembangunan kota, termasuk dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, integrasi sosial, kualitas hidup masyarakat, dan stabilitas sosial wilayah perkotaan.
4. Identifikasi Program Pembangunan yang telah dilaksanakan yaitu melakukan penilaian terhadap efektivitas program-program pembangunan dan kebijakan intervensi sosial-ekonomi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi capaian, keterbatasan, serta area yang memerlukan perbaikan atau inovasi kebijakan.
5. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan yaitu merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat solutif dan berbasis data, berdasarkan hasil analisis ketimpangan dan evaluasi kebijakan yang telah ada. Rekomendasi ini akan diarahkan untuk mendukung perumusan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan di Kota Surakarta.

1.5 Hasil yang Diharapkan

Dokumen Laporan Kajian Identifikasi Ketimpangan Kesejahteraan di Kota Surakarta.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Konsep Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan konsep yang bersifat multidimensi dan mencerminkan keadaan di mana individu maupun kelompok masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok serta meraih standar hidup yang layak. Ukuran kesejahteraan tidak semata-mata dilihat dari tingkat pendapatan, melainkan juga mencakup keterjangkauan terhadap pendidikan, layanan kesehatan, tempat tinggal yang memadai, serta lingkungan hidup yang aman dan sehat. Pandangan ini sejalan dengan pendekatan multidimensi ini sejalan dengan pandangan Alkire dan Foster (2011)¹³, yang menegaskan bahwa baik kesejahteraan maupun kemiskinan harus dipahami melalui beragam dimensi kehidupan manusia dan tidak hanya dibatasi pada aspek ekonomi semata.

Pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, air bersih, dan sanitasi yang memadai merupakan prasyarat untuk mencapai kesejahteraan. Akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan layanan kesehatan yang terjangkau juga berperan penting dalam meningkatkan kapasitas individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Menurut laporan Indikator Kesejahteraan Rakyat 2023¹⁴ oleh Badan Pusat Statistik, terdapat korelasi positif antara tingkat pendidikan dan kesehatan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Kesejahteraan mencakup aspek perlindungan sosial dan keamanan, yang memungkinkan individu untuk menghadapi risiko dan guncangan kehidupan, seperti kehilangan pekerjaan, bencana alam, atau krisis kesehatan. Sistem jaminan sosial yang efektif dapat membantu masyarakat untuk tetap mempertahankan kualitas hidupnya dalam menghadapi berbagai tantangan. Studi oleh Bustamam et al. (2021)¹⁵ menunjukkan bahwa keberadaan program perlindungan sosial yang tepat sasaran dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Pekanbaru. Pengukuran kesejahteraan

¹³ Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and Multidimensional Poverty Measurement. *Journal of Public Economics*, 95(7-8), 476–487

¹⁴ Badan Pusat Statistik. (2023). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2023*.

<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/11/06/7807339c2d4aed0ca8e0beaa/indikator-kesejahteraan-rakyat-2023.html> Badan Pusat Statistik Indonesia+1Badan Pusat Statistik Indonesia+1

¹⁵ Bustamam, N., Yulyanti, S., & Dewi, K. S. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indikator Kesejahteraan Masyarakat di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 32(1), 85–9

memerlukan serangkaian indikator yang mampu merepresentasikan berbagai dimensi kehidupan secara menyeluruh. Salah satu alat ukur yang umum digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP), di mana unsur pendidikan, kesehatan, dan taraf hidup dikombinasikan untuk memberikan gambaran umum mengenai tingkat kesejahteraan suatu negara. Meskipun demikian, pendekatan ini belum sepenuhnya mampu menggambarkan keragaman dan kompleksitas kesejahteraan di level individu maupun rumah tangga. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) yang dikembangkan oleh *Oxford Poverty and Human Development Initiative* (OPHI) hadir sebagai alternatif yang lebih mendalam dalam menilai kesejahteraan masyarakat melalui berbagai dimensi non-moneter.

Memahami kesejahteraan secara menyeluruh menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan publik yang responsif dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Pendekatan yang mempertimbangkan berbagai dimensi dalam pengukuran kesejahteraan memberikan ruang bagi pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya untuk lebih akurat dalam mengenali kelompok rentan dan menyusun langkah-langkah intervensi yang tepat guna. Prinsip ini selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat memperoleh manfaat dari proses pembangunan tanpa ada yang tertinggal.

2.2 Ketimpangan Kesejahteraan

Ketimpangan dalam kesejahteraan mencerminkan kondisi ketika penyebaran sumber daya, pendapatan, dan akses terhadap layanan penting seperti pendidikan, fasilitas kesehatan, dan tempat tinggal tidak terjadi secara adil antar individu maupun antarkelompok masyarakat. Masalah ini tidak semata berkaitan dengan aspek ekonomi, melainkan juga melibatkan faktor sosial dan spasial yang saling berkelindan secara kompleks. Ketimpangan tersebut sering kali disebabkan oleh pertumbuhan kota yang tidak merata, di mana sebagian wilayah berkembang pesat, sementara wilayah lain tertinggal dalam infrastruktur dan layanan dasar (UN-Habitat, 2020)¹⁶. Ketimpangan yang terakumulasi dari waktu ke waktu berkontribusi pada perbedaan kualitas hidup

¹⁶ UN-Habitat. (2020). *World Cities Report 2020: The Value of Sustainable Urbanization*. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme. <https://unhabitat.org>

yang signifikan, serta memperbesar jurang sosial antara kelompok masyarakat yang berada di pusat kota dan di kawasan pinggiran.

Ketimpangan kesejahteraan mencerminkan adanya ketidakharmonisan dalam pola pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah perkotaan. Jika proses perencanaan pembangunan lebih menitikberatkan pada aspek pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan prinsip pemerataan dan keadilan sosial, maka hasil pembangunan cenderung terpusat hanya pada kelompok atau kawasan tertentu, sementara kelompok lainnya tertinggal. Hal ini diamini oleh Nugroho et al. (2023)¹⁷, yang menemukan bahwa di Kota Surakarta terdapat disparitas antar-kelurahan dalam hal akses layanan kesehatan dan pendidikan dasar, yang berdampak pada kualitas kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan infrastruktur inilah yang kemudian memperparah kesenjangan dalam pembangunan ekonomi, karena kelompok marginal tidak memiliki sarana untuk meningkatkan kapasitas dan mobilitas sosial mereka.

Ketimpangan dalam kesejahteraan membawa konsekuensi yang luas, mulai dari penurunan taraf hidup masyarakat, munculnya potensi konflik sosial, hingga melemahnya kestabilan ekonomi di tingkat lokal. Apabila ketimpangan ini tidak ditangani secara memadai, hal tersebut dapat mendorong terjadinya perpindahan penduduk secara tidak terkendali, perluasan kawasan perkotaan yang tidak terstruktur (*urban sprawl*), serta mengakibatkan pengucilan sosial terhadap kelompok masyarakat miskin di wilayah perkotaan. World Bank (2022)¹⁸ menegaskan bahwa ketimpangan di wilayah urban menjadi salah satu penyebab melemahnya produktivitas kota dan meningkatnya tekanan pada sistem pelayanan publik. Masyarakat yang tidak memperoleh akses terhadap layanan dasar akan kesulitan meningkatkan taraf hidupnya, dan cenderung terperangkap dalam siklus kemiskinan yang berulang dari generasi ke generasi.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, dibutuhkan kebijakan yang tidak hanya bersifat redistributif, tetapi juga transformatif. Kebijakan yang inklusif dan berbasis data memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang paling tertinggal, serta merancang intervensi yang bersifat spesifik dan terukur. Azzahra et al.

¹⁷ Nugroho, H. A., Wulandari, D., & Santoso, B. (2023). Mapping Urban Inequality using Spatial Welfare Indicators: Case of Surakarta. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 34(1), 45–59. <https://doi.org/10.14710/jpwk.v34i1.31570>

¹⁸ World Bank. (2022). *Reducing Inequalities for Shared Prosperity in Cities*. Washington, D.C.: World Bank Group. <https://www.worldbank.org>

(2022)¹⁹ dalam kajiannya menekankan pentingnya pemanfaatan data spasial dalam mengembangkan strategi pembangunan yang lebih adil, terutama di kota-kota sekunder seperti Surakarta. Dengan pemetaan yang presisi, alokasi sumber daya dapat dilakukan secara efektif dan efisien, menghindari pendekatan yang seragam untuk wilayah dengan karakteristik yang berbeda.

Mengatasi ketimpangan kesejahteraan memerlukan pendekatan sistemik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan: pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta. Ketimpangan bukan hanya sebuah gejala yang kasat mata, melainkan juga cerminan dari sistem tata kelola yang perlu diperbaiki. Jika ketimpangan terus dibiarkan, maka upaya pembangunan kota yang berkelanjutan dan inklusif akan mengalami stagnasi. Komitmen untuk mengurangi ketimpangan bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan keharusan moral dan strategis untuk memastikan bahwa seluruh warga kota memiliki peluang yang setara untuk hidup sejahtera.

Dampak Ketimpangan Kesejahteraan di Tingkat Kota bukan sekadar cerminan dari perbedaan kondisi sosial-ekonomi antar kelompok masyarakat, melainkan merupakan gejala struktural yang berdampak langsung terhadap stabilitas sosial, kualitas hidup warga, dan kesinambungan pembangunan kota secara keseluruhan. Ketika ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, perumahan layak, serta kesempatan ekonomi terus berlanjut, maka akan terjadi penguatan segmentasi sosial yang memicu eksklusi dan marginalisasi terhadap kelompok masyarakat miskin dan rentan. Dalam jangka panjang, ketimpangan ini dapat melemahkan ikatan sosial, menurunkan partisipasi warga dalam proses pembangunan, serta meningkatkan potensi konflik horizontal. Selain itu, disparitas kesejahteraan juga menimbulkan ketimpangan spasial dalam distribusi fasilitas kota, yang pada akhirnya menciptakan wilayah-wilayah tertinggal di tengah pertumbuhan urban yang cepat. Ketidakseimbangan ini tidak hanya memperburuk beban infrastruktur dan pelayanan publik, tetapi juga menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang menekankan prinsip inklusivitas dan keadilan sosial. Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan kebijakan publik yang dirancang secara partisipatif dan berbasis data, guna memastikan setiap lapisan masyarakat terutama yang selama ini

¹⁹Azzahra, R., Nurmandi, A., & Supriyati, Y. (2022). Spatial Inequality and Urban Service Delivery: Evidence from Secondary Cities in Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 45(7), 610–623.
<https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1868503>

terpinggirkan mendapatkan hak dan kesempatan yang setara dalam mengakses sumber daya pembangunan.

2.2.1. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

A. Pengertian Ketimpangan Sosial Ekonomi

Ketimpangan sosial menggambarkan situasi di mana distribusi sumber daya, wewenang, dan peluang dalam masyarakat berlangsung secara tidak merata. Ketidaksetaraan ini dapat dilihat dalam berbagai bidang, seperti perbedaan penghasilan, akses pendidikan dan kesehatan, serta keterjangkauan layanan publik. Di kawasan perkotaan, ketimpangan tersebut terlihat dalam bentuk jurang ekonomi antar kelompok, terbatasnya akses terhadap sarana umum, serta adanya praktik diskriminasi sosial. Ketimpangan semacam ini umumnya muncul akibat pendekatan pembangunan yang lebih menitikberatkan pada pencapaian ekonomi, namun mengabaikan aspek sosial. Akibatnya, pembagian sumber daya dan kesempatan tidak berlangsung secara adil. Selain itu, dalam konteks globalisasi, pola pembangunan yang tidak inklusif juga turut memperbesar ketimpangan, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh ranah sosial dan budaya.²⁰

Ketimpangan ekonomi merupakan realitas yang lazim ditemui di banyak negara, termasuk Indonesia, yang ditandai dengan perbedaan signifikan dalam kondisi ekonomi antar kelompok masyarakat. Ketidakmerataan ini muncul akibat berbagai penyebab, di antaranya terbatasnya akses terhadap lapangan pekerjaan, kualitas pendidikan dan keterampilan yang belum memadai, tingginya angka pengangguran, serta kondisi kerja yang belum layak. Selain itu, keterbatasan infrastruktur juga turut memperburuk situasi. Di Indonesia sendiri, ketimpangan ekonomi diperkuat oleh minimnya kesempatan kerja yang layak, rendahnya tingkat kompetensi tenaga kerja, serta ketimpangan pembangunan infrastruktur antarwilayah.²¹ Teori Konflik Sosial Karl Marx menjelaskan bahwa ketimpangan sosial ekonomi adalah konsekuensi dari struktur kapitalisme, di mana alat produksi dikuasai oleh sekelompok kecil individu atau entitas, yang menciptakan kelas-kelas sosial berbeda dan ketimpangan dalam distribusi

²⁰ Choiri, A., Wibowo, W., Arifa, I., & Aminuddin, A. (2025). Dampak Pengangguran dan Ketimpangan Sosial Terhadap Stabilitas Ekonomi, Sosial, dan Politik di Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 947-955.

²¹ Nurrohim, M. D., Aghil, M. S., Alazhari, M. A., Fahrezi, M. H., & Fadilla, A. (2024). Analisis Dinamika Ketimpangan Ekonomi terhadap Era Globalisasi di Indonesia. *Journal of Regional Economics and Development*, 1(3), 1-7.

kekayaan. Teori ini relevan dengan konteks Indonesia, di mana sektor informal masih menjadi penopang utama ekonomi bagi sebagian besar penduduk, memperlihatkan adanya ketimpangan yang signifikan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan.²²

B. Dimensi Ketimpangan Sosial Ekonomi

1) Perbedaan Tingkat Penghasilan Antar Kelompok

Ketimpangan pendapatan merujuk pada distribusi pendapatan yang tidak merata antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Fenomena ini dapat disebabkan oleh perbedaan dalam tingkat pendidikan, keterampilan, dan akses terhadap peluang ekonomi.²³ Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Semakin tinggi tingkat kemiskinan, semakin besar ketimpangan pendapatan, dan sebaliknya. Kemiskinan terjadi karena kebutuhan dasar tidak tercapai. Ketika kemiskinan berkurang, ini menunjukkan bahwa masyarakat mampu memenuhi kebutuhan minimumnya, yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan. Peningkatan pendapatan ini akan mengurangi perbedaan pendapatan antar masyarakat, sehingga ketimpangan pendapatan pun menurun.²⁴

2) Ketimpangan Kualitas dan Kesempatan Pendidikan

Ketidakseimbangan dalam akses terhadap pendidikan yang bermutu mengakibatkan kesenjangan signifikan dalam kemampuan dan pengetahuan antarindividu. Mereka yang memperoleh pendidikan yang lebih baik umumnya memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan dengan penghasilan tinggi serta prospek karier yang lebih menjanjikan. Sebaliknya, individu dengan akses terbatas pada pendidikan cenderung terjebak dalam pekerjaan dengan upah rendah atau bahkan mengalami pengangguran. Ketimpangan ini semakin diperparah oleh disparitas mutu pendidikan antarwilayah, terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang, yang cenderung memiliki kualitas layanan pendidikan yang jauh tertinggal dibandingkan wilayah perkotaan.

3) Perbedaan Pelayanan Kesehatan

²² Ningsih, U., Alpendi, A., & Dewi, A. S. (2024). Kesenjangan Sosial Ekonomi di Indonesia: Penyebab, Dampak, dan Solusi Kebijakan. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 5(3), 426-445.

²³ Hababil, M. P., Firdaus, M. K., Nazhmi, N., Hamdani, M. D., Alghifary, M. R., & Fadilla, A. (2024). Analisis Pengaruh Pemerataan Ekonomi Dalam Upaya Menghapus Ketimpangan Sosial-Ekonomi Antar Masyarakat. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1-9.

²⁴ Farhan, M. & Sugianto. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa, *Sibatik Journal*, 1(4), 243-257.

Kesehatan berperan penting dalam ketimpangan sosial-ekonomi. Akses terbatas terhadap layanan kesehatan berkualitas membuat kelompok berpendapatan rendah lebih rentan terhadap penyakit, yang menghambat kemampuan mereka untuk bekerja dan memperoleh pendapatan layak. Biaya kesehatan yang tinggi dan kurangnya asuransi kesehatan memperburuk situasi ini, membuat orang miskin terjebak dalam siklus kemiskinan.²⁵

4) Akses terhadap Pekerjaan dan Kewirausahaan

Akses yang tidak merata terhadap pendidikan berkualitas menyebabkan perbedaan besar dalam keterampilan dan pengetahuan individu. Mereka yang memiliki akses lebih baik cenderung mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih tinggi dan peluang karier yang lebih baik, sementara mereka yang kurang beruntung sering terjebak dalam pekerjaan bergaji rendah atau menganggur. Selain itu, kualitas pendidikan yang bervariasi di berbagai daerah, terutama di pedesaan atau daerah tertinggal, memperburuk ketimpangan ini.

5) Akses terhadap Perumahan dan Infrastruktur

Ketimpangan dalam akses terhadap perumahan dan infrastruktur menyebabkan perbedaan kualitas hidup antar kelompok sosial. Wilayah miskin seringkali kekurangan akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, dan transportasi, yang memperburuk ketimpangan sosial ekonomi.

C. Penyebab Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Ketimpangan sosial dan ekonomi di lingkungan perkotaan merupakan masalah yang sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dinamika kota modern, urbanisasi, serta ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan. Perkembangan kota sering kali menghasilkan perbedaan signifikan antara kelompok sosial dan ekonomi yang ada, serta menimbulkan tantangan besar dalam upaya untuk mencapai inklusivitas dan keadilan sosial. Menurut Watif et al. (2024), terdapat beberapa aspek utama

²⁵ Hababil, M. P., Firdaus, M. K., Nazhmi, N., Hamdani, M. D., Alghifary, M. R., & Fadilla, A. (2024). Analisis Pengaruh Pemerataan Ekonomi Dalam Upaya Menghapus Ketimpangan Sosial-Ekonomi Antar Masyarakat. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1-9.

yang berperan dalam ketimpangan sosial dan ekonomi di wilayah perkotaan antara lain sebagai berikut.²⁶

- 1) Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Merata
- 2) Kesenjangan Akses Terhadap Layanan Dasar
- 3) Tingkat Pengangguran dan Pekerjaan yang Tidak Layak
- 4) Ketimpangan Pendapatan dan Kekayaan
- 5) Perbedaan Akses Terhadap Infrastruktur dan Fasilitas Umum
- 6) Urbanisasi yang Cepat dan Pertumbuhan Tidak Terkendali
- 7) Peran Perubahan Sosial dan Budaya

D. Dampak Ketimpangan Sosial Ekonomi

Dampak ketimpangan sosial ekonomi sangat signifikan dan dapat mempengaruhi stabilitas serta kesejahteraan masyarakat secara luas. Ketimpangan yang tinggi sering dikaitkan dengan peningkatan tingkat kriminalitas, ketidakstabilan politik, serta ketidakpuasan sosial.²⁷ Selain itu, ketimpangan sosial-ekonomi juga menghambat mobilitas sosial, di mana individu yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung memiliki kesempatan lebih terbatas untuk meningkatkan status ekonomi mereka. Kondisi ini menciptakan siklus kemiskinan antar generasi yang sulit untuk dipecahkan. Dalam upaya mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah dan organisasi internasional sering mengimplementasikan kebijakan redistributif, seperti program bantuan sosial, pendidikan yang inklusif, dan penyediaan layanan kesehatan yang merata.²⁸

2.2.2. Ketimpangan Kesejahteraan Antar Wilayah

A. Konsep Ketimpangan Antar Wilayah

Ketimpangan kesejahteraan antar wilayah merupakan fenomena yang umum terjadi dalam proses pembangunan ekonomi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Ketimpangan ini mencerminkan perbedaan tingkat kesejahteraan antara wilayah yang lebih maju dengan wilayah yang tertinggal, yang dapat terlihat dari disparitas dalam pendapatan, akses terhadap

²⁶ Watif, M., JT, A. R., Tahir, L. S. A., & Hikmah, N. (2024). Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan Pada Masyarakat Perkotaan. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3(4), 536-547.

²⁷ Sastiono, P., & Nuryakin, C. (2019). Inklusi Keuangan Melalui Program Layanan Keuangan Digital dan Laku Pandai. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 19(2), 242-262.

²⁸ Dwiningwarni, S. (2020). Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 4(1), 1-20.

layanan publik, dan kualitas hidup masyarakat. Douglas C. North mengemukakan teori ketimpangan antar wilayah dalam konteks pertumbuhan ekonomi Neoklasik. Menurut hipotesis tersebut, ketimpangan akan meningkat di negara berkembang selama tahap awal pembangunan. Hal ini terjadi karena wilayah yang sudah memiliki kondisi pembangunan yang lebih baik akan memanfaatkan peluang yang ada, sementara wilayah yang masih tertinggal tidak dapat mengoptimalkan kesempatan tersebut akibat keterbatasan infrastruktur dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Selain faktor ekonomi, hambatan sosial dan budaya juga turut berkontribusi sehingga pertumbuhan ekonomi berkembang pesat di wilayah yang sudah maju, sedangkan wilayah tertinggal mengalami kemajuan yang terbatas.²⁹

B. Faktor Penyebab Ketimpangan Antar Wilayah

Menurut Nababan et al. (2024), ketimpangan antar wilayah disebabkan oleh sejumlah faktor yang saling terkait, antara lain adalah sebagai berikut.

1) Akses Infrastruktur

Kurangnya ketersediaan infrastruktur yang memadai menyebabkan sejumlah wilayah tidak dapat mengakses layanan dasar secara optimal, seperti transportasi, pasokan listrik, dan air bersih. Kondisi ini berdampak langsung pada terhambatnya aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Daerah yang memiliki keterbatasan dalam fasilitas umum umumnya mengalami kesulitan dalam memaksimalkan potensi ekonomi yang dimiliki, sehingga proses pembangunan berlangsung lebih lambat dibandingkan wilayah yang infrastrukturnya lebih lengkap.

2) Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal yang diterapkan tanpa pertimbangan kesetaraan distribusi cenderung menimbulkan perbedaan signifikan antar wilayah. Dana bantuan atau transfer dari pusat yang dialokasikan secara tidak merata membuat daerah yang sudah maju mendapatkan dukungan finansial lebih besar, sementara daerah tertinggal tetap kekurangan sumber daya yang mendukung pembangunan.

3) Distribusi Investasi

²⁹ Nababan, T. J. A., & Robertus, M. H. (2024). Pengaruh Aglomerasi, Jumlah Penduduk, Dana Perimbangan, dan Belanja Pemerintah terhadap Ketimpangan antar Wilayah di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 -2022. *Diponegoro Journal of Economics*, 13(2), 41-51.

Investasi yang terkonsentrasi di wilayah tertentu memacu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut secara pesat, namun pada saat yang sama menimbulkan kesenjangan dengan daerah lainnya yang kurang mendapatkan aliran investasi. Konsentrasi modal ini mengakibatkan wilayah yang tidak menjadi pusat investasi tidak memperoleh manfaat pertumbuhan yang setara.

4) **Kualitas Sumber Daya Manusia**

Rendahnya mutu pendidikan dan keterampilan di beberapa daerah menghambat pengembangan potensi ekonomi mereka. Kekurangan dalam kualitas sumber daya manusia mengurangi kemampuan daerah untuk beradaptasi dengan dinamika pasar dan inovasi teknologi, sehingga membatasi percepatan pembangunan.

5) **Faktor Geografis dan Sumber Daya Alam**

Letak geografis yang kurang strategis dan keterbatasan sumber daya alam berdampak pada daya saing ekonomi suatu daerah. Sementara wilayah yang memiliki keunggulan lokasi serta kekayaan alam cenderung mengalami perkembangan yang lebih cepat, daerah dengan kondisi geografis yang tidak menguntungkan menghadapi tantangan signifikan dalam mencapai kemajuan ekonomi.

C. Dampak Ketimpangan Antar Wilayah

1) **Migrasi dan Urbanisasi Berlebih**

Ketimpangan pembangunan mendorong migrasi penduduk dari daerah tertinggal ke wilayah yang lebih maju, terutama kota-kota besar.¹⁹ Fenomena ini memicu urbanisasi berlebih yang berujung pada peningkatan kepadatan penduduk, munculnya kawasan permukiman kumuh, tekanan terhadap layanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih), dan tingginya angka pengangguran di wilayah perkotaan. Prima dan Khoirunurrofik (2019) menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi antarprovinsi di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola migrasi internal, yang berdampak langsung terhadap tekanan sosial di wilayah tujuan migrasi.³⁰

³⁰ Prima, I. T., & Khoirunurrofik. (2019). *Economic Inequality, Regional Development, and Internal Migration in Indonesia. Economics and Finance in Indonesia*, 65(1), 53–66

2) Ketegangan Sosial dan Ketidakstabilan Politik

Ketimpangan yang tinggi dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan perasaan ketidakadilan di kalangan masyarakat daerah tertinggal, yang berisiko menimbulkan konflik sosial dan ketidakstabilan politik lokal. Ketimpangan juga dapat menggerus kohesi sosial dan memperkuat sentimen ketidakpuasan terhadap pemerintah. Studi SMERU (2018) menyatakan bahwa dinamika ketimpangan ekonomi telah memicu kerentanan sosial di daerah pedesaan, terutama di luar Pulau Jawa, yang berpotensi mengganggu stabilitas lokal.³¹

3) Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Optimal

Ketimpangan pembangunan menyebabkan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam menjadi tidak merata, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.³² Daerah yang tertinggal tidak mampu berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan karena keterbatasan infrastruktur, investasi, dan akses terhadap pasar.

2.2.3. Kelompok Rentan

A. Definisi Kelompok Rentan

Kelompok rentan merujuk pada individu atau sekelompok orang dalam masyarakat yang mengalami berbagai hambatan atau keterbatasan, sehingga lebih berisiko menghadapi ketidaksetaraan dalam aspek sosial, ekonomi, maupun kesehatan. Kerentanan tersebut dapat muncul akibat faktor-faktor struktural, sosial, atau ekonomi yang membatasi kemampuan mereka dalam mengakses layanan dasar dan sumber daya penting yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Kelompok ini umumnya mencakup anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan dalam kondisi rentan seperti ibu tunggal atau korban kekerasan penduduk miskin, komunitas adat, serta mereka yang terdampak konflik atau bencana. Kondisi seperti keterbatasan fisik, tekanan ekonomi, diskriminasi, dan terbatasnya akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan semakin memperburuk posisi mereka dalam sistem sosial.

Lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan bahwa baik negara maupun masyarakat memiliki kewajiban moral

³¹The SMERU Research Institute. *Dinamika Ketimpangan dan Penghidupan di Pedesaan Indonesia*. Working Paper, 2018. Diakses dari https://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/wptifa1ketimpangandesa_id.pdf

³² Mu'minah, S., & Tjenreng, M. Z. (2025). Desentralisasi dan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(1), 342-351

dan hukum untuk memberikan perlindungan kepada kelompok rentan. Tanggung jawab ini diwujudkan melalui penerapan kebijakan yang bersifat inklusif, pelaksanaan program jaminan sosial, serta penguatan perlindungan hak asasi manusia guna memastikan setiap individu memiliki akses yang setara dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam ranah kesejahteraan sosial, pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) menjadi fondasi utama dalam merespons persoalan yang dihadapi kelompok rentan. Pendekatan ini menekankan bahwa seluruh individu, tanpa kecuali, termasuk mereka yang berada dalam situasi kerentanan, memiliki hak-hak yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara serta komunitas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan sosial yang adil, merata, dan menjamin partisipasi seluruh lapisan masyarakat guna menciptakan tatanan sosial yang setara dan berdaya.

Konteks ketimpangan kesejahteraan, kelompok rentan merujuk pada individu atau komunitas yang berada dalam posisi lemah secara sosial, ekonomi, maupun politik, sehingga berpotensi lebih besar mengalami ketidakadilan dalam mengakses sumber daya, pelayanan publik, serta kesempatan ekonomi. Kelompok ini rentan terhadap dampak dari kemiskinan, pengangguran, keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka. Kategori kelompok rentan yang terdampak oleh ketimpangan kesejahteraan meliputi:

1. Masyarakat berpenghasilan rendah,
2. Lanjut usia,
3. Penyandang disabilitas, dan
4. Kelompok minoritas.

Mereka menjadi kelompok yang paling merasakan dampak dari ketimpangan sosial karena keterbatasan dalam memperoleh akses terhadap sumber daya yang tersedia. Ketimpangan sosial itu sendiri mengacu pada ketidaksetaraan dalam memperoleh dan memanfaatkan sumber daya, baik yang bersifat mendasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, kesempatan berusaha dan bekerja, maupun yang bersifat pelengkap seperti akses terhadap fasilitas pengembangan usaha, partisipasi politik, serta saluran untuk memperjuangkan hak-hak dasar. Ketimpangan sosial mencerminkan adanya ketidakseimbangan atau jarak sosial dalam masyarakat yang muncul akibat

perbedaan tingkat ekonomi, status sosial, atau latar belakang budaya. Ketimpangan ini menjadi akar dari beragam persoalan yang dihadapi kelompok rentan, dan harus ditangani melalui kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Menurut Karl Marx, (2000) ketimpangan sosial menjelaskan bagaimana distribusi sumber daya, kekuasaan, dan status dalam masyarakat tidak merata. ketimpangan terjadi akibat struktur ekonomi kapitalistik yang menempatkan kelompok tertentu dalam posisi dominan, sementara kelompok lainnya terpinggirkan. Dalam konteks ini, kelompok rentan muncul sebagai akibat dari sistem sosial yang tidak adil yang membatasi akses mereka terhadap kekayaan dan peluang. Kelompok rentan dalam ketimpangan kesejahteraan merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang paling terdampak atau paling sulit keluar dari lingkaran kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi. Mereka seringkali memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya, layanan dasar, dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup.

Dampak ketimpangan kesejahteraan terhadap kelompok rentan terdapat kelompok-kelompok yang memiliki kerentanan lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya, salah satunya adalah masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok minoritas. Kerentanan ini dapat disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, maupun fisik yang membuat mereka lebih rentan terhadap diskriminasi, eksploitasi, serta keterbatasan akses terhadap hak-hak dasar mereka. Ketimpangan kesejahteraan dapat memberikan dampak yang sangat besar terhadap kelompok rentan. Beberapa faktor dari dampak ketimpangan kesejahteraan terhadap kelompok rentan yaitu:

- a) Akses Terbatas terhadap Layanan Dasar
- b) Keterpinggiran Sosial dan Diskriminasi
- c) Kerentanan terhadap Eksploitasi dan Kekerasan

Akses terbatas terhadap layanan dasar adalah suatu kondisi di mana individu atau kelompok masyarakat terutama mereka yang tergolong dalam kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas tidak mampu atau kesulitan mendapatkan pelayanan publik yang penting dan mendasar bagi kelangsungan hidup dan pengembangan diri secara layak. Layanan dasar ini mencakup pendidikan, kesehatan, pangan, air bersih dan sanitasi, serta perumahan. Akses terbatas

terhadap layanan dasar kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang terutama dari kelompok rentan tidak bisa dengan mudah atau layak mendapatkan kebutuhan pokok yang penting untuk hidup yang sehat, aman, dan bermartabat. Selain itu kelompok rentan terkena dampak keterpinggiran sosial dan diskriminasi.

Keterpinggiran sosial dan diskriminasi adalah kondisi di mana individu atau kelompok masyarakat tertentu tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Mereka terpinggirkan dari pusat-pusat kekuasaan, pengambilan keputusan, serta akses terhadap berbagai kesempatan dan sumber daya yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dalam konteks ketimpangan kesejahteraan, keterpinggiran dan diskriminasi ini kerap terjadi terhadap kelompok-kelompok yang sudah rentan secara ekonomi seperti masyarakat miskin, perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok minoritas agama atau etnis, serta komunitas terpencil. Bentuk dari keterpinggiran sosial dari kelompok rentan antar lain adanya keterbatasan partisipasi, dimana kelompok rentan sering tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan publik.

Akses yang tidak setara terhadap hak sipil karena kelompok rentan dapat mengalami kesulitan dalam mengakses tersebut. Hal tersebut akan berdampak pada kelompok rentan menjadi terhambat mobilitas sosialnya, rendahnya kesejahteraan dan kualitas hidup, dan ketegangan sosial.

Kerentanan terhadap eksploitasi dan kekerasan merujuk pada kondisi di mana individu atau kelompok terutama yang hidup dalam kemiskinan atau marginalisasi sosial lebih mudah menjadi korban perlakuan tidak adil, penindasan, pemaksaan, dan kekerasan. Kondisi ini terjadi karena mereka tidak memiliki daya tawar, akses terhadap perlindungan hukum, atau dukungan sosial yang cukup untuk membela diri dan hak-haknya. Ketimpangan kesejahteraan memperbesar risiko ini karena memperlebar jurang antara mereka yang memiliki kekuasaan dan sumber daya dengan mereka yang tidak. Dalam relasi yang timpang ini, kelompok rentan menjadi sasaran mudah untuk dimanfaatkan demi keuntungan pihak lain. Bentuk eksploitasi yaitu adanya eksploitasi tenaga kerja, perdagangan manusia dan eksploitasi seksual. Kerentanan terhadap eksploitasi dan kekerasan bukanlah masalah individual semata, tapi persoalan struktural yang berkaitan erat dengan ketimpangan sosial dan ekonomi.

Penanganannya membutuhkan pendekatan lintas sektor: perlindungan hukum, kebijakan afirmatif, pemberdayaan ekonomi, dan pendidikan kesadaran masyarakat.

2.2.4. Pelayanan Dasar Masyarakat

A. Definisi Pelayanan Dasar

Moenir (2006) mengemukakan bahwa pelayanan merupakan bentuk tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, yang dilandasi oleh aspek material dan dijalankan melalui sistem, tata cara, dan metode tertentu. Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan pihak lain berdasarkan hak yang melekat pada mereka. Pada hakikatnya, pelayanan terdiri atas sejumlah aktivitas yang saling berkaitan dan membentuk suatu proses yang berkelanjutan. Sebagai sebuah proses, pelayanan berlangsung secara terus-menerus dan mencakup berbagai dimensi dalam kehidupan sosial masyarakat. Pelayanan dasar masyarakat merujuk pada jenis layanan pokok yang wajib disediakan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang guna memastikan terpenuhinya standar hidup masyarakat secara merata dan adil. Layanan ini menjadi elemen fundamental dalam pemenuhan hak-hak dasar setiap warga dan memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan sosial.

Tujuan dari penyediaan pelayanan dasar adalah untuk menjamin bahwa seluruh masyarakat dapat mengakses layanan penting yang mencakup sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, serta jaminan sosial. Pelayanan dasar bukan sekadar bagian dari penyelenggaraan pelayanan publik, tetapi juga merupakan wujud nyata dari tanggung jawab negara dalam menegakkan keadilan sosial dan mewujudkan kesejahteraan kolektif. Oleh karena itu, pemenuhan layanan dasar menjadi pijakan utama dalam perumusan kebijakan pembangunan, alokasi anggaran, dan pelaksanaan program sosial lintas sektor. Salah satu tujuan mendasar dari penyediaan layanan dasar adalah menjamin bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk menikmati hak-hak fundamentalnya, seperti hak atas kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, serta hidup dalam lingkungan yang layak huni. Layanan dasar berperan dalam menciptakan kualitas hidup yang lebih baik, terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Ketersediaan akses terhadap pendidikan, fasilitas

kesehatan, air bersih, serta hunian yang memadai memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pelayanan dasar juga berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong pemerataan. Dengan menjamin akses yang setara bagi seluruh warga terlepas dari kondisi ekonomi maupun status sosial mereka—pelayanan dasar mampu mempersempit kesenjangan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah. Dalam jangka panjang, tujuan dari pelayanan dasar adalah membangun generasi yang sehat, berpendidikan, produktif, dan kompetitif. Tak kalah penting, pelayanan dasar juga menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelayanan dasar juga menjadi instrumen penting dalam menjaga ketertiban dan stabilitas sosial. Ketika kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, potensi konflik, ketegangan sosial, dan radikalisasi akan menurun.

B. Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar merupakan bentuk layanan yang menjadi kewajiban pemerintah dalam rangka menjamin terpenuhinya kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh penduduk. Melalui penyediaan layanan ini, negara memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses kebutuhan pokok yang penting bagi terciptanya kehidupan yang bermartabat. Pelayanan dasar mencerminkan komitmen negara dalam menegakkan hak-hak dasar warganya, sejalan dengan prinsip keadilan sosial, perlindungan hak asasi, dan peningkatan kesejahteraan. Dengan menyediakan layanan dasar, pemerintah menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu hidup layak, terlindungi, dan berdaya dalam masyarakat. Layanan dasar ini meliputi berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan ketenagakerjaan yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di negara tersebut. Tujuan pemerintah memberikan layanan dasar terhadap masyarakat yaitu:

- 1.) Menjamin Hak Asasi Manusia
- 2.) Pemerataan Kesejahteraan
- 3.) Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

- 4.) Pencegahan dan Perlindungan Sosial
- 5.) Mendorong Partisipasi dalam Pembangunan Nasional
- 6.) Pembangunan yang Berkelanjutan

Terdapat beberapa jenis pelayanan dasar yang disediakan oleh pemerintah yaitu:

a) Layanan Dasar Pendidikan

Layanan dasar pendidikan adalah bentuk pelayanan publik yang bersifat mendasar dan wajib disediakan oleh negara guna menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak, merata, dan berkualitas. Layanan ini bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, serta mewujudkan keadilan sosial di bidang pendidikan. Dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1), disebutkan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan." Oleh karena itu, penyediaan layanan pendidikan dasar merupakan tanggung jawab konstitusional pemerintah. Tujuan layanan dasar pendidikan yaitu untuk meningkatkan akses pendidikan untuk semua; meningkatkan kualitas pendidikan; mengurangi ketimpangan pendidikan; dan mewujudkan pemerataan kesempatan belajar.

b) Layanan Dasar Kesehatan

Layanan dasar kesehatan bentuk pelayanan publik yang bersifat paling mendasar dan wajib disediakan oleh negara untuk memenuhi hak setiap warga negara atas hidup sehat. Layanan ini mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang mudah diakses, terjangkau, dan merata untuk seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, lansia, dan masyarakat miskin. Layanan dasar ini tidak hanya berbicara soal pengobatan, tetapi juga soal pencegahan penyakit, peningkatan gizi, kesehatan lingkungan, serta edukasi masyarakat. Tujuan layanan dasar kesehatan yaitu: meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh; mencegah penyebaran penyakit dan kematian dini, terutama penyakit menular dan gizi buruk; memberikan perlindungan kesehatan bagi kelompok rentan; mengurangi kesenjangan layanan kesehatan antarwilayah dan antar kelompok sosial; menjamin hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang berkualitas dan manusiawi³³.

c) Layanan Dasar Infrastruktur

Layanan dasar infrastruktur merupakan bentuk pelayanan publik yang berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana fisik yang penting untuk mendukung kehidupan masyarakat sehari-hari dan menunjang pembangunan sosial, ekonomi, serta lingkungan. Infrastruktur ini mencakup segala fasilitas dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, listrik, perumahan, dan transportasi umum yang dibutuhkan agar masyarakat bisa hidup dengan aman, sehat, dan produktif. Penyediaan layanan infrastruktur adalah tanggung jawab pemerintah sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak dasar warga negara dan perwujudan keadilan sosial. Jenis layanan dasar infrastruktur yaitu: Jalan dan Transportasi; Air Bersih dan Sanitasi; Listrik; Perumahan dan Permukiman Layak; Drainase dan Pengelolaan Bencana; dan Sarana Publik dan Ruang Terbuka. Layanan dasar infrastruktur bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi merupakan penopang utama kehidupan masyarakat. Tanpa infrastruktur yang baik, layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi tidak akan berjalan optimal. Maka, pembangunan infrastruktur harus bersifat inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas, khususnya kelompok rentan dan daerah tertinggal.

d) Layanan Dasar Sosial

Layanan dasar sosial adalah bentuk pelayanan publik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial dasar masyarakat, terutama untuk kelompok yang rentan atau kurang mampu. Layanan ini fokus pada penyediaan bantuan atau dukungan yang memastikan setiap individu, terlepas dari kondisi sosial, ekonomi, atau fisik mereka, dapat hidup dengan layak dan aman dalam masyarakat. Layanan sosial mencakup berbagai bentuk bantuan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan, dan memberikan perlindungan sosial bagi kelompok yang membutuhkan, seperti anak yatim, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat miskin. Jenis layanan dasar sosial diantaranya: Bantuan Sosial dan Subsidi; Program Jaminan Sosial; Pelayanan Sosial

³³ Supardi, H., & Jacky, M. (2019). Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan. *Paradigma*, 7(3).

bagi Kelompok Rentan; Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat; Pelayanan Perlindungan Sosial. Layanan dasar sosial komponen penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan memastikan hak-hak sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan atau kurang mampu. Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program sosial berusaha memberikan perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan peluang untuk meningkatkan kualitas hidup bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Keberhasilan layanan dasar sosial sangat bergantung pada keefektifan distribusi bantuan, partisipasi masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil³⁴.

e) Layanan Dasar Tenaga Kerja

Layanan dasar tenaga kerja merupakan layanan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja atau tenaga kerja, baik di sektor formal maupun informal, guna memastikan mereka dapat bekerja dalam kondisi yang layak, aman, dan terlindungi secara sosial dan ekonomi. Layanan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan lapangan pekerjaan, perlindungan hak-hak pekerja, hingga akses kepada jaminan sosial dan pelatihan keterampilan yang diperlukan agar tenaga kerja dapat berkembang dan berkontribusi secara optimal dalam perekonomian³⁵. Layanan dasar tenaga kerja bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan berkualitas, serta memberikan perlindungan bagi pekerja agar dapat bekerja dengan aman, produktif, dan sejahtera. Jenis layanan dasar tenaga kerja diantaranya: Penyediaan Lapangan Pekerjaan; Pelatihan dan Pendidikan Keterampilan; Jaminan Sosial Tenaga Kerja; Perlindungan Hukum untuk Pekerja; Pengaturan Upah dan Kondisi Kerja; Layanan bagi Pekerja Migran; dan Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan. Layanan dasar tenaga kerja jaminan negara bagi setiap individu agar bisa memperoleh pekerjaan yang layak, aman, dan terlindungi secara sosial.

³⁴ Pratama, M. R., & Pramono, T. (2021). Pelayanan Publik di Daerah: Menguk Kesenjangan Pelayanan Dasar. *Jurnal Mediasosian*, 3(2).

³⁵ Rianto, A. (2018). Pelayanan Publik dalam Konteks Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat. *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat dan Komunikasi*, 12(2).

C. Evaluasi Kebijakan Pengentasan Ketimpangan

Evaluasi kebijakan merupakan langkah penting untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan suatu kebijakan serta menilai apakah kebijakan tersebut berhasil menghasilkan dampak yang diharapkan. Oleh karena itu, evaluasi tidak hanya dilakukan di akhir pelaksanaan, tetapi juga dapat dilaksanakan secara berkelanjutan di setiap tahap proses kebijakan. Proses evaluasi umumnya mencakup tahap-tahap seperti perumusan indikator, pengukuran, analisis, hingga penyusunan rekomendasi. Evaluasi terhadap kebijakan pengurangan ketimpangan dilakukan secara sistematis guna menilai sejauh mana kebijakan tersebut efektif, efisien, adil, responsif, mencukupi, dan tepat sasaran dalam mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi. Tujuan utama dari evaluasi ini adalah memastikan bahwa strategi yang diterapkan benar-benar mampu mengurangi ketimpangan dan memberikan manfaat yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Indiahono (2009), evaluasi kebijakan publik merupakan kegiatan pengukuran tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator tersebut mencakup dua dimensi utama, yakni proses pelaksanaan dan hasil akhir. Evaluasi ini menjadi penting untuk menilai apakah suatu kebijakan secara nyata mampu menurunkan kesenjangan antar kelompok masyarakat. Tujuan evaluasi kebijakan pengentasan ketimpangan diantaranya:

- a) **Efektivitas:** Menilai sejauh mana kebijakan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam mengurangi ketimpangan.
- b) **Efisiensi:** Mengukur sejauh mana sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan dapat menghasilkan hasil yang maksimal.
- c) **Kecukupan:** Menilai apakah kebijakan memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat yang menjadi sasaran.
- d) **Pemerataan:** Memastikan bahwa manfaat dari kebijakan dirasakan secara adil oleh semua kelompok masyarakat, tanpa terkecuali.
- e) **Responsivitas:** Menilai sejauh mana kebijakan dapat menanggapi perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang dinamis.
- f) **Ketepatan:** Mengukur sejauh mana kebijakan sesuai dengan konteks lokal dan karakteristik spesifik dari kelompok sasaran.

Berikut ini langkah-langkah evaluasi kebijakan: melakukan identifikasi terhadap tujuan program, analisis permasalahan, deskripsi dan standarisasi kegiatan, melakukan pengukuran pada setiap tahap perubahan, menetapkan penyebab yang menciptakan perubahan, dan indikator-indikator penentu kemunculan dampak. Dari keenam tahap tersebut, menurutnya melakukan identifikasi terhadap masalah adalah tahap paling krusial. Sementara itu, dampak dari sebuah kebijakan memiliki lima dimensi. Kelima dimensi itu di antaranya: dampak pada masalah publik dan pada orang-orang yang terkait di dalamnya, dampak pada keadaan kelompok lain di luar sasaran sebuah kebijakan, dampak terhadap keadaan saat ini dan juga masa depan, dan biaya yang secara tidak langsung ditanggung masyarakat.

2.3 Kerangka Pikir

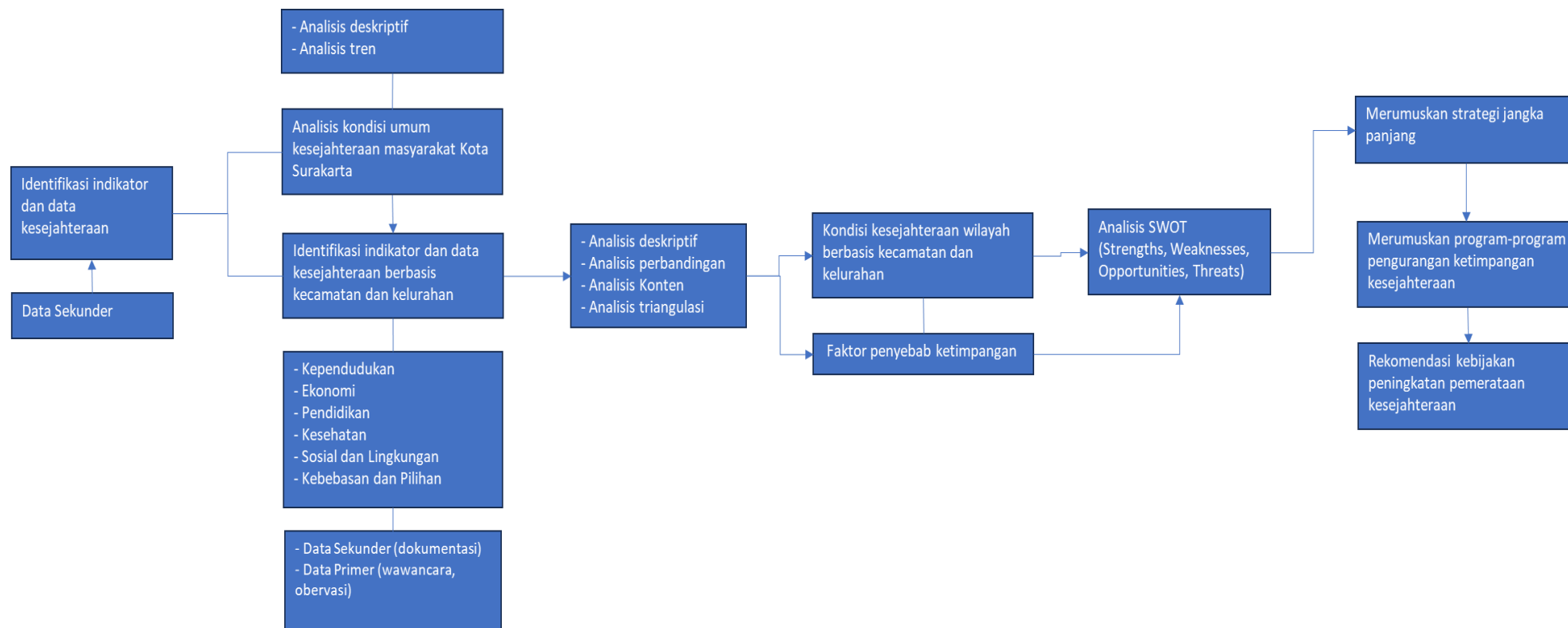
Studi mengenai ketimpangan kesejahteraan di Kota Surakarta dirancang dengan pendekatan terstruktur, yang diawali dengan proses pengenalan terhadap indikator-indikator kesejahteraan. Data yang digunakan dalam kajian ini bersumber dari informasi sekunder yang terpercaya, termasuk publikasi statistik resmi dan laporan dari berbagai sektor terkait. Indikator yang dikaji meliputi sejumlah aspek penting, seperti demografi, kondisi ekonomi, akses pendidikan, status kesehatan, lingkungan sosial, serta kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidup. Proses identifikasi dilakukan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan guna memperoleh gambaran yang lebih terperinci terhadap perbedaan kesejahteraan antarwilayah. Setelah itu, gambaran umum kondisi kesejahteraan di Kota Surakarta dianalisis secara deskriptif, termasuk dengan melihat tren yang berkembang, guna memperoleh pemahaman awal yang menyeluruh. Tahapan ini dilanjutkan dengan penelusuran data kesejahteraan per wilayah administratif, menggunakan kombinasi data sekunder dari dokumentasi dan data primer melalui wawancara serta observasi di lapangan.

Data yang terkumpul dianalisis dengan sejumlah metode, antara lain pendekatan deskriptif, analisis perbandingan antarwilayah, penelaahan isi (konten), dan teknik triangulasi. Pendekatan ini menghasilkan pemetaan kondisi kesejahteraan serta identifikasi faktor-faktor yang menjadi pemicu ketimpangan, baik dari sudut pandang data kuantitatif maupun hasil temuan kualitatif. Langkah berikutnya adalah menyusun gambaran ketimpangan kesejahteraan berdasarkan kecamatan dan kelurahan, yang kemudian dianalisis lebih lanjut melalui pendekatan SWOT (*Strengths, Weaknesses,*

Opportunities, Threats). Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara mendalam keunggulan, hambatan, peluang, dan tantangan yang ada dalam konteks pemerataan kesejahteraan di wilayah tersebut. Temuan dari analisis SWOT digunakan sebagai dasar dalam penyusunan strategi jangka panjang guna menurunkan ketimpangan kesejahteraan di Kota Surakarta. Strategi ini dikembangkan menjadi sejumlah program yang aplikatif dan solutif, yang diarahkan untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat dan wilayah secara adil.

Sebagai bagian akhir dari kajian, dirumuskan rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada pemerintah daerah. Rekomendasi ini mengarah pada peningkatan pemerataan kesejahteraan secara berkelanjutan, dengan memperkuat sinergi lintas sektor, menyempurnakan sistem pendataan, serta meningkatkan kapasitas pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan.

Gambaran proses penyusunan Kajian Identifikasi Ketimpangan Kesejahteraan di Kota Surakarta dituangkan ke dalam kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir Identifikasi Ketimpangan Kesejahteraan di Kota Surakarta

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Ketimpangan Kesejahteraan Kota Surakarta

1. Pendekatan Multidimensional dan Integratif

Pendekatan multidimensi dan integratif merupakan dua kerangka analisis yang banyak digunakan dalam memahami suatu fenomena secara utuh dan menyeluruh. Pendekatan multidimensi mendorong analisis dari berbagai sudut pandang, seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya, yang saling berkaitan satu sama lain. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menghindari pemahaman yang terbatas dan linier, serta mendorong penelaahan yang lebih dalam terhadap kompleksitas masalah yang dihadapi. Seperti yang dijelaskan oleh Soekanto (2010), pendekatan ini membantu mengkaji permasalahan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang saling memengaruhi, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kaya dan kontekstual. Sementara itu, pendekatan integratif lebih menitikberatkan pada proses penyatuan berbagai elemen atau komponen yang sebelumnya berdiri sendiri menjadi satu sistem analisis yang utuh. Dalam konteks tertentu, pendekatan ini mendorong keterpaduan berbagai bidang atau keahlian agar proses analisis atau pembelajaran menjadi lebih menyeluruh dan bermakna. Dengan kata lain, pendekatan integratif berupaya merangkai potongan informasi menjadi struktur pemahaman yang koheren dan saling melengkapi.

Menurut Arikunto (2013)³⁶, menyatakan bahwa pendekatan integratif memungkinkan pemahaman yang lebih utuh terhadap suatu materi, karena mampu menyatukan berbagai komponen pembelajaran yang sebelumnya berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang terpadu dan masuk akal. Dalam konteks kajian ketimpangan kesejahteraan, penerapan pendekatan multidimensional dan integratif sangat sesuai dan memberikan hasil analisis yang lebih menyeluruh. Pendekatan multidimensional memungkinkan peneliti melihat suatu fenomena dari beragam perspektif, sementara pendekatan integratif berperan dalam menyatukan aspek-aspek tersebut ke dalam suatu analisis yang terstruktur dan saling berhubungan.

³⁶ Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Melalui pendekatan multidimensional, ketimpangan kesejahteraan tidak cukup ditinjau hanya dari sisi ekonomi, seperti besaran pendapatan atau tingkat konsumsi. Sebaliknya, ketimpangan perlu dianalisis melalui berbagai dimensi yang saling terkait, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta kualitas kehidupan secara umum. Dengan cara ini, analisis yang dihasilkan akan lebih mencerminkan realitas sosial yang kompleks dan kontekstual.

Konteks kajian ketimpangan kesejahteraan, pendekatan integratif bertujuan untuk menyatukan beragam dimensi ke dalam satu kerangka analisis yang menyeluruh. Alih-alih memandang setiap aspek secara terpisah, pendekatan ini berusaha menghubungkan berbagai data dan hasil analisis dari beragam sektor agar dapat membentuk pemahaman yang utuh dan rasional terhadap permasalahan ketimpangan. Pendekatan ini juga mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan mulai dari instansi pemerintah, komunitas masyarakat, hingga kalangan swasta dalam proses identifikasi masalah dan perumusan solusi. Dengan mengakui pentingnya sinergi antar dimensi serta peran lintas sektor, pendekatan ini mendukung perancangan kebijakan yang lebih adaptif, responsif, dan tepat sasaran. Kolaborasi antara pendekatan integratif dan multidimensional memungkinkan analisis yang lebih realistis dan menyeluruh terhadap kondisi ketimpangan kesejahteraan, sekaligus memperkuat arah kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan sosial.

2. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif adalah suatu metode yang mengedepankan keterlibatan langsung dan aktif dari masyarakat atau pemangku kepentingan dalam setiap tahap, mulai dari pengumpulan informasi, proses analisis, hingga pengambilan keputusan. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi potensi, harapan, serta kebutuhan masyarakat secara autentik, sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih kontekstual, aplikatif, dan berkelanjutan. Widyaningsih menyatakan bahwa bentuk keterlibatan dalam observasi partisipatif bisa beragam, mulai dari keterlibatan yang bersifat pasif hingga keterlibatan penuh, di mana peneliti benar-benar menjadi bagian dari dinamika sosial yang diamati. Pendekatan ini, kualitas data yang dihimpun cenderung lebih kaya dan mendalam karena diperoleh dari pengalaman langsung serta keterlibatan dalam lingkungan sosial yang sedang dikaji. Hal tersebut

memungkinkan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap realitas sosial dan memperkuat validitas temuan.

Penyusunan kajian mengenai ketimpangan kesejahteraan, pendekatan partisipatif memegang peranan strategis dengan mengikutsertakan masyarakat secara langsung dalam seluruh tahapan, mulai dari identifikasi isu, perumusan rencana, implementasi program, hingga proses evaluasi. Melalui pendekatan ini, masyarakat diposisikan sebagai aktor utama yang memiliki suara dalam menentukan prioritas kebutuhan serta solusi atas persoalan ketimpangan yang mereka alami. Keterlibatan masyarakat menjadi krusial dalam memetakan berbagai bentuk ketimpangan yang mereka hadapi sehari-hari, seperti keterbatasan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, maupun fasilitas sosial lainnya. Selain memperkaya informasi yang diperoleh, partisipasi aktif warga juga dapat memperkuat rasa kebersamaan serta mencegah munculnya konflik sosial. Nilai-nilai kolaboratif ini penting untuk menciptakan upaya penanggulangan ketimpangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pendekatan partisipatif turut berkontribusi dalam memperkuat kapasitas masyarakat melalui pelatihan keterampilan, peningkatan akses terhadap sumber daya, serta dukungan terhadap pengembangan ekonomi lokal. Langkah-langkah ini tidak hanya berpotensi meningkatkan pendapatan dan taraf hidup warga, tetapi juga mendorong tumbuhnya rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap keberlangsungan program yang dilaksanakan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembangunan yang berbasis pada komunitas, di mana pemberdayaan dan keterlibatan langsung masyarakat menjadi unsur utama dalam merancang dan menjalankan pembangunan yang inklusif. Pendekatan partisipatif dalam kajian ketimpangan kesejahteraan tidak hanya bertumpu pada data kuantitatif eksternal, tetapi juga mengakomodasi kondisi riil di lapangan serta aspirasi masyarakat itu sendiri. Hal ini membuat hasil kajian menjadi lebih akurat, relevan, dan mampu mendorong solusi yang berkelanjutan dalam mengatasi ketimpangan sosial.

3. Pendekatan Spasial

Pendekatan spasial, atau sering disebut juga sebagai pendekatan keruangan, berfokus pada analisis fenomena berdasarkan dimensi lokasi atau ruang geografis di permukaan bumi. Dalam pendekatan ini, ruang dipandang sebagai elemen utama yang menampung berbagai aktivitas manusia maupun gejala alam, sehingga kajian utamanya diarahkan pada bagaimana pola, struktur, distribusi, serta proses-proses berlangsung dalam ruang tersebut. Lebih lanjut, pendekatan ini mengkaji penyebaran fenomena seperti populasi, aktivitas ekonomi, sosial, hingga pemanfaatan sumber daya alam dalam konteks geografis serta interaksinya antarwilayah.

Elemen-elemen seperti letak, fungsi lahan, hubungan antar lokasi, dan skala keterkaitan menjadi unsur penting dalam pendekatan ini. Teknologi pemetaan digital seperti Sistem Informasi Geografis (GIS) sering digunakan untuk mendukung pendekatan spasial, karena mampu menyajikan visualisasi dan analisis data berbasis lokasi secara lebih presisi. Melalui pendekatan ini, pola sebaran, klusterisasi fenomena, serta hubungan spasial dapat diidentifikasi dengan lebih baik, dan sangat bermanfaat dalam proses perencanaan tata ruang, pengelolaan potensi wilayah, serta penyusunan kebijakan yang mempertimbangkan dimensi lokasi secara strategis.

Jenis-jenis pendekatan spasial meliputi pendekatan topik yang mengamati gejala berdasarkan pokok permasalahan di wilayah tertentu, serta pendekatan komoditas yang berfokus pada distribusi dan pemanfaatan sumber daya atau produk tertentu di ruang geografis. Dalam menyusun kajian ketimpangan kesejahteraan, pendekatan spasial sangat penting karena dapat menganalisis distribusi dan pola ketimpangan berdasarkan aspek lokasi dan ruang geografis. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman bagaimana ketimpangan kesejahteraan tersebar di berbagai wilayah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi tersebut secara spasial. Dalam studi Sugiri dan Nuraini (2013)³⁷, ketimpangan spasial dapat memperburuk ketidakseimbangan interaksi antar wilayah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tidak optimal dan ketidakberlanjutan. Pendekatan spasial membantu mengidentifikasi faktor-faktor determinan ketimpangan yang berkaitan dengan lokasi geografis,

³⁷ Sugiri, A., & Nuraini. (2013). Kesenjangan spasial dan kegagalan keadilan pada fungsi distribusi manfaat pembangunan di Wilayah Blitar. Neliti.

seperti akses terhadap sumber daya, infrastruktur, dan peluang ekonomi. Dengan pemetaan dan analisis pola spasial, kebijakan pembangunan dapat dirancang secara lebih tepat sasaran. Seperti halnya dengan menempatkan prioritas pada wilayah-wilayah tertinggal yang membutuhkan perhatian lebih agar ketimpangan dapat dikurangi secara efektif. Pendekatan ini sangat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan.

4. Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan

Pendekatan pembangunan berkelanjutan merupakan suatu cara pandang dalam pembangunan yang menitikberatkan pada perlunya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Inti dari pendekatan ini terletak pada keberlangsungan tiga dimensi utama pembangunan yakni ekonomi, sosial, dan ekologi yang saling terkait dan mendukung satu sama lain. Penerapan pendekatan ini mencakup prinsip bahwa setiap aspek pembangunan harus dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan, keberlanjutan sumber daya, serta pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Praktiknya, pendekatan ini mengedepankan pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab agar dapat digunakan tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Upaya ini juga harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan sosial, serta penciptaan keadilan dalam akses dan distribusi hasil pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat bersama seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam memastikan proses pembangunan berjalan secara adil, transparan, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak.

Dalam menyusun kajian ketimpangan kesejahteraan, pendekatan pembangunan berkelanjutan memberikan kerangka kerja yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Pendekatan ini melihat ketimpangan tidak hanya dari sisi ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan yang saling terkait untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Pendekatan pembangunan berkelanjutan mendorong perumusan kebijakan yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan dengan memperhatikan distribusi sumber daya yang adil kesempatan yang merata, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Pendekatan ini juga menekankan

pentingnya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Pembangunan berkelanjutan mengharuskan adanya kebijakan yang menghindari konflik antara eksploitasi sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan, sehingga pembangunan tidak merusak ekosistem yang menjadi basis kehidupan masyarakat. Dalam kajian ketimpangan kesejahteraan karena kerusakan lingkungan seringkali memperparah ketimpangan, terutama bagi kelompok masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya alam. Dengan demikian, pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam kajian ketimpangan kesejahteraan menuntut analisis yang komprehensif dan integratif, yang tidak hanya mengukur disparitas pendapatan atau akses ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial budaya dan lingkungan. Pendekatan ini mendukung perumusan strategi pembangunan yang inklusif, adil, dan ramah lingkungan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

5. Pendekatan Holistik

Pendekatan holistik merupakan pendekatan yang memandang individu, sistem, atau fenomena sebagai kesatuan utuh yang terdiri dari berbagai aspek yang saling terkait dan berinteraksi secara dinamis. Prinsip utama dari pendekatan holistik meliputi kesatuan dan interkoneksi. Semua bagian saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, keseimbangan dan harmoni, yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antar aspek serta pengakuan terhadap keunikan setiap individu atau sistem, sehingga solusi yang diambil harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing.

Pendekatan holistik menekankan pentingnya melihat dan memahami seluruh aspek secara bersamaan, bukan secara terpisah, agar dapat mencapai solusi yang komprehensif, efektif, dan berkelanjutan dalam berbagai konteks kehidupan dan pembangunan. Dalam menyusun kajian ketimpangan kesejahteraan, pendekatan holistik sangat penting karena menekankan pemahaman dan penanganan masalah secara menyeluruh dengan mengintegrasikan berbagai aspek yang saling terkait, seperti ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya melihat ketimpangan dari satu dimensi saja, melainkan mengkaji keseluruhan faktor yang memengaruhi kesejahteraan

masyarakat secara simultan sehingga solusi yang dihasilkan lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Pendekatan holistik dalam kajian ketimpangan kesejahteraan mengintegrasikan berbagai program dan intervensi sosial yang saling melengkapi, seperti bantuan pangan, pemberdayaan ekonomi, layanan kesehatan, dan pendidikan. Dengan menggabungkan berbagai program ini, pendekatan holistik mampu mengatasi akar permasalahan ketimpangan dan kerentanan secara lebih efektif, sehingga masyarakat rentan dapat keluar dari siklus kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara menyeluruh³⁸.

Selain itu, pendekatan holistik dalam kajian ketimpangan kesejahteraan meliputi peningkatan efisiensi dan efektivitas program bantuan sosial, pengurangan duplikasi upaya, serta peningkatan keberlanjutan hasil pembangunan sosial. Pendekatan holistik memberikan kerangka analisis dan intervensi yang komprehensif dalam mengatasi ketimpangan kesejahteraan, dengan fokus pada integrasi berbagai aspek kehidupan dan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Pendekatan ini sangat relevan untuk menghasilkan solusi yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berdampak jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial.

6. Pendekatan Tematik

Pendekatan tematik merupakan pendekatan yang merencanakan pembangunan dengan fokus pada masalah-masalah penting yang membutuhkan perhatian khusus. Dalam pendekatan ini, pembangunan tidak dilakukan secara acak atau merata di semua bidang, tetapi diarahkan untuk menyelesaikan tema atau masalah utama yang menjadi prioritas daerah maupun nasional. Dengan pendekatan ini, program dan kegiatan pembangunan dirancang agar saling mendukung dalam mengatasi masalah utama.

³⁸ Panda.id. (2025). Pendekatan Holistik dalam Mengintegrasikan Program Bantuan Sosial untuk Masyarakat Rentan di Desa.

Pendekatan tematik juga membantu penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien karena semua upaya diarahkan pada sasaran yang sudah diprioritaskan. Selain itu, pendekatan ini fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing, sehingga setiap daerah bisa menentukan tema pembangunan yang paling sesuai dengan kondisi lokalnya. Dalam menyusun kajian ketimpangan kesejahteraan, pendekatan yang digunakan mampu memahami berbagai faktor dan dimensi yang memengaruhi distribusi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam melakukan kajian tentang ketimpangan kesejahteraan, pendekatan tematik berperan sebagai kerangka utama yang memudahkan penyusunan analisis yang lebih terarah, mendalam, dan bermakna. Pendekatan ini dilakukan dengan menentukan isu atau tema utama sebagai pokok kajian, sehingga semua data, analisis, dan rekomendasi diarahkan untuk menggali dan menyelesaikan permasalahan terpenting terkait ketimpangan kesejahteraan. Selain itu, pendekatan tematik juga memudahkan penentuan indikator dan data yang tepat, sehingga analisis menjadi lebih efektif dan efisien. Setelah tema ditentukan, indikator yang digunakan dapat dipilih secara selektif sesuai dengan kebutuhan kajian. Hal ini membuat hasil analisis menjadi lebih tajam, lebih praktis, dan lebih mudah diaplikasikan. Di sisi lain, pendekatan ini juga meningkatkan kualitas rekomendasi yang dihasilkan, karena dimulai dari tema yang jelas, rumusan kebijakan yang diusulkan akan lebih spesifik, terarah, dan berorientasi pada solusi.

7. Pendekatan Meta Analisis

Pendekatan meta analisis merupakan pendekatan statistik yang digunakan untuk menggabungkan dan menganalisis hasil dari beberapa studi atau penelitian yang membahas topik yang sama. Tujuannya adalah untuk memperoleh kesimpulan yang lebih kuat dan akurat dibandingkan dengan hasil dari satu penelitian tunggal. Meta analisis digunakan untuk mengintegrasikan data dari berbagai studi sehingga dapat memberikan estimasi efek yang lebih tepat dan mengatasi ketidakpastian atau perbedaan hasil antar penelitian³⁹. Meta analisis biasanya dilakukan dengan langkah-langkah sistematis, termasuk identifikasi pertanyaan penelitian, pengumpulan dan seleksi studi yang relevan dan berkualitas, ekstraksi data, serta analisis statistik untuk mengukur besaran efek (*effect size*) dan signifikansi hasil.

Pendekatan meta analisis dalam menyusun kajian ketimpangan kesejahteraan berfungsi sebagai pendekatan yang menggabungkan dan menganalisis hasil dari berbagai studi atau penelitian sebelumnya yang membahas ketimpangan sosial dan ekonomi. Dengan mengintegrasikan data dari berbagai sumber, pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan valid tentang faktor-faktor penyebab, dampak, serta solusi ketimpangan kesejahteraan secara nasional maupun regional. Melalui meta analisis, dapat mengidentifikasi pola-pola umum dan variabel kunci yang memengaruhi ketimpangan, seperti ketimpangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, peluang ekonomi, dan teknologi digital. Pendekatan ini juga memungkinkan evaluasi efektivitas berbagai kebijakan dan program pengentasan ketimpangan, seperti redistribusi kekayaan melalui pajak progresif, investasi di sektor pendidikan dan infrastruktur digital, serta pemberdayaan komunitas di daerah tertinggal.

Dengan mengkaji hasil-hasil penelitian yang ada, meta analisis dapat memberikan rekomendasi berbasis bukti yang lebih kuat dan komprehensif untuk perumusan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan dalam mengurangi ketimpangan kesejahteraan. Selain itu, meta analisis mendukung pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antar faktor penyebab ketimpangan dan dampaknya dalam berbagai konteks wilayah dan kelompok masyarakat. Hal ini sangat penting untuk merancang intervensi yang tepat sasaran dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Dengan demikian, pendekatan meta analisis dalam kajian ketimpangan kesejahteraan memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terintegrasi untuk memahami fenomena ketimpangan secara luas, mengidentifikasi faktor-faktor kunci, serta mengevaluasi dan merekomendasikan kebijakan yang efektif berdasarkan bukti empiris dari berbagai studi terdahulu.

³⁹ Hidayat, S. A. (2020). Kajian Pustaka Meta Analisis. IAIN Kendari Repository.

8. Pendekatan Institusi Inklusif

Pendekatan institusi inklusif menekankan pentingnya menciptakan sistem dan organisasi yang terbuka, adil, dan memberikan kesempatan yang setara kepada semua anggota masyarakat untuk mengakses sumber daya, peluang, dan hak-hak. Pendekatan ini berfokus pada keberagaman dan kesetaraan, memastikan setiap individu merasa diterima dan diakomodasi dalam berbagai aspek kehidupan. Pendekatan inklusif bertujuan untuk membangun lingkungan yang terbuka bagi siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda, termasuk karakteristik fisik, kepribadian, status, suku, dan budaya. Penerapan pendekatan institusi inklusif membutuhkan upaya untuk menempatkan diri dalam cara pandang orang lain atau kelompok lain dalam memahami suatu masalah.

Pendekatan institusi inklusif dalam menyusun kajian ketimpangan kesejahteraan menekankan pentingnya menciptakan sistem dan lembaga yang menjamin akses setara terhadap sumber daya, peluang, dan hak bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan institusi yang inklusif, ketimpangan kesejahteraan dapat dikurangi karena proses pembangunan dan pengambilan keputusan melibatkan partisipasi aktif berbagai kelompok masyarakat, termasuk yang selama ini terpinggirkan atau kurang beruntung. Kajian ketimpangan yang menggunakan pendekatan institusi inklusif akan fokus pada bagaimana institusi baik pemerintah, sektor bisnis, maupun organisasi masyarakat dapat dirancang dan dikelola agar transparan, adil, dan akuntabel. Hal ini termasuk memperkuat birokrasi yang bersih dan disiplin, menghindari konsentrasi kekayaan dan kekuasaan di tangan segelintir golongan atas, serta memastikan distribusi manfaat pembangunan berlangsung secara merata. Pendekatan ini juga menyoroti pentingnya kebijakan yang mendorong partisipasi luas dan menghilangkan hambatan struktural yang menyebabkan ketimpangan⁴⁰.

Selain itu, kajian dengan pendekatan ini akan mengkaji bagaimana transformasi institusi dapat memperbaiki akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan perlindungan sosial. Pendekatan ini juga menilai efektivitas strategi pembangunan inklusif yang mengintegrasikan kebijakan lintas sektor dan mendorong kolaborasi antara

⁴⁰ The Prakarsa. (2024). Mengintegrasikan Negara Pembangunan dan Institusi Inklusif.

pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan peluang ekonomi yang merata dan berkelanjutan⁴¹. Dengan demikian, pendekatan institusi inklusif memberikan kerangka analisis yang menekankan peran fundamental lembaga dan kebijakan dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Kajian ketimpangan kesejahteraan yang menggunakan pendekatan ini tidak hanya melihat disparitas hasil pembangunan, tetapi juga bagaimana struktur dan proses institusional dapat diubah untuk menghilangkan ketimpangan secara sistemik dan berkelanjutan.

3.2 Jenis dan Tipe Penelitian

Untuk menunjukkan bahwa Kajian Identifikasi Ketimpangan Kesejahteraan di Kota Surakarta menggunakan pendekatan ilmiah, maka dijelaskan mengenai pencapaian tersebut dengan menunjukan jenis data yang akan digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data.

1. Jenis data

Terdapat 2 jenis data yang digunakan dalam Kajian Identifikasi Ketimpangan Kesejahteraan di Kota Surakarta, yaitu:

a. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berbasis angka atau statistik. Kajian Identifikasi Ketimpangan Kesejahteraan di Kota Surakarta menggunakan metode ilmiah dalam rangka menjelaskan variabel dan biasanya bersifat objektif dan sistematis. Menurut Sinambela (2020) penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan angka-angka dalam memproses data untuk menghasilkan informasi yang terstruktur. Karakteristik penelitian kuantitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang menggambarkan karakteristik objek, peristiwa, atau situasi (Sekaran & Bougie, 2016: 43). Jenis data kuantitatif dalam Kajian Identifikasi Ketimpangan Kesejahteraan adalah indikator pada masing-masing variabel penelitian yang angkanya diterbitkan oleh BPS, Perangkat Daerah Kota Surakarta, kementerian atau lembaga vertikal yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan angka atas indikator yang menjadi ukuran dalam kajian ini.

⁴¹ Khatima, K. (2024). Strategi Pembangunan Inklusif untuk Mengurangi Kesenjangan Sosial dan Ekonomi di Indonesia. Universitas Air langga.

b. Data Kualitatif

Data kualitatif merupakan jenis data yang sifatnya bukan angka atau non-numerik, yang dihasilkan dari berbagai informasi atas berbagai pengamatan, observasi atau lainnya. Sugiyono (2017) data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat atau gambar. Data kualitatif dalam Kajian Identifikasi Ketimpangan Kesejahteraan di Kota Surakarta dihasilkan berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan pada obyek yang akan diteliti, baik pada masyarakat umum, penerima manfaat program maupun hasil pengamatan pada kondisi fisik/ lingkungan.

2. Sumber Data

Terdapat 2 sumber data yang digunakan dalam Kajian Identifikasi Ketimpangan Kesejahteraan di Kota Surakarta, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti atau pihak yang terlibat dalam penyusunan Kajian Identifikasi Ketimpangan Kesejahteraan di Kota Surakarta. Data ini diperoleh dari sumber pertama atau langsung dari objek yang diteliti. Data primer dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian spesifik atau untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu yang belum tersedia dari sumber lain.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain atau yang sudah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data ini biasanya diambil dari laporan, publikasi, database, atau dokumen yang sudah ada dan digunakan kembali untuk tujuan penelitian atau analisis tertentu.

Berdasarkan ruang lingkup yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja, bahwa pekerjaan Kajian Identifikasi Ketimpangan Kesejahteraan di Kota Surakarta salah satunya adalah melakukan pemetaan ketimpangan kesejahteraan berdasarkan wilayah administrasi di Kota Surakarta mulai kecamatan hingga kelurahan. Untuk itu data yang dibutuhkan dalam kajian ini berada pada skala kecamatan dan kelurahan, sehingga indikator yang ditentukan diklasifikasikan kembali berdasarkan pada kemungkinan data tersedia ditingkat kecamatan dan kelurahan. Untuk itu komponen dan indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Indikator yang Digunakan

Aspek	Komponen	Indikator	Sumber Data
Ekonomi	Pendapatan rumah tangga	Rata-rata pendapatan penduduk	BPS, survei lokal
	Tingkat kemiskinan	Persentase penduduk miskin	BPS
	Kepemilikan aset produktif	• Tanah • Rumah • Usaha • Tabungan	P3KE, DTKS, observasi
	Akses terhadap pekerjaan layak	• Jenis pekerjaan • Rata-rata upah, • Kepemilikan jamsostek	Disnaker, BPS
Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Jumlah anak tidak sekolah	Disdik, BPS
	Rata-rata lama sekolah	Tingkat pendidikan penduduk	Susenas
	Akses ke lembaga pendidikan	• Jarak terjauh ke layanan pendidikan dasar; • Ketersediaan satuan pendidikan dengan akses transportasi umum; • Jumlah persebaran SD, SMP, SMA	GIS, data pemda
	Tingkat literasi	• Jarak ke perpustakaan umum • Jumlah perpustakaan masyarakat; • Koleksi perpustakaan (umum dan masyarakat) • Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan umum/perpus masyarakat, perpustakaan yang dibina sesuai SNP.	Survei literasi

Kesehatan	Harapan hidup saat lahir	- Jumlah kematian ibu - Jumlah kematian bayi - Jumlah kematian balita	BPS, Dinkes
	Status gizi anak	- Jumlah balita stunting - Jumlah balita gizi buruk - Jumlah balita gizi kurang	Dinkes
	Akses terhadap layanan kesehatan	- Jarak ke puskesmas - Rasio tenaga medis	GIS, Dinkes
	Cakupan JKN/BPJS	Jumlah penduduk yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan	BPJS Kesehatan
Sosial dan Lingkungan	Partisipasi sosial/warga	Jumlah kegiatan kerja bakti/gotong royong dalam satu tahun	Survei kualitatif/kuantitatif
	Keamanan lingkungan	Jumlah kasus kriminal	Polri, FGD
	Ketersediaan RTH	- Jumlah RTH - Luas RTH	DLH, observasi
	Kualitas lingkungan	- Rumah tangga memiliki akses sanitasi layak - Jumlah rumah tangga memiliki akses air minum layak - Volume sampah - Jumlah kelompok Pengelola sampah (3R)	DLH, survei lingkungan
Kebebasan & Pilihan (<i>Capability Approach</i>)	Persepsi terhadap peluang hidup	Wawancara/kuesioner tentang harapan masa depan	Kualitatif (IDIs, FGD)
	Ketersediaan pilihan kerja/pendidikan	Jumlah opsi di sekitar wilayah tinggal	Survei wilayah
	Otonomi individu	Persepsi terhadap kebebasan mengambil keputusan hidup	Wawancara, kuesioner

3.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam Kajian Identifikasi Ketimpangan Kesejahteraan di Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang melibatkan percakapan langsung antara peneliti dan responden. Wawancara dapat bersifat terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur. Diharapkan dalam wawancara ini mendapatkan wawasan dari para ahli dan pemangku kepentingan tentang tantangan dan peluang dalam pengembangan Iptek di daerah dan menggali pengalaman dan perspektif dari pelaku industri, akademisi, dan masyarakat terkait implementasi teknologi.
- b. *Focus Group Discussion* (FGD), yaitu metode pengumpulan data yang melibatkan diskusi terfokus dengan sekelompok orang yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. FGD bertujuan untuk mengumpulkan pandangan, pendapat, dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. FGD mengumpulkan masukan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat, tentang kondisi kesejahteraan berdasarkan kewilayahan.
- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen yang sudah ada, seperti laporan tahunan, arsip, publikasi ilmiah, dan catatan administratif.

3.4 Teknik Pengolahan Data

a. Pengolahan Data Kuantitatif

Pengolahan data kuantitatif dalam kajian Identifikasi Ketimpangan Kesejahteraan di Kota Surakarta menggunakan beberapa alat analisis, yaitu:

- 1) Analisis Deskriptif, yaitu analisis untuk mendeskripsikan keadaan dari data yang dimiliki oleh praktisi data. Biasanya analisis ini akan dibantu oleh beberapa perhitungan statistik yang sederhana, seperti menghitung rata-rata, median, maksimum, minimum, dll. Dengan melakukan analisis ini, praktisi data akan lebih mudah menemukan pattern yang tersedia sehingga dapat menentukan apakah akan dianalisis lebih lanjut atau cukup sampai analisis deskriptif saja.
- 2) Analisis Tren, yaitu untuk mengidentifikasi pola atau kecenderungan dalam data dari waktu ke waktu, membantu memprediksi arah masa depan dan menganalisis perubahan ekonomi daerah atau tingkat adopsi teknologi selama beberapa tahun terakhir.
- 3) Analisis Perbandingan, yaitu teknik analisis dengan melibatkan perbandingan

antara berbagai set data untuk mengidentifikasi perbedaan atau kesamaan dan membandingkan kinerja daerah dalam penerapan teknologi dengan daerah lain atau standar nasional.

- 4) Analisis Konten, yaitu untuk menganalisis isi dari dokumen, laporan, atau publikasi, mengidentifikasi tema utama, frekuensi istilah tertentu, dan pola dalam teks serta menganalisis laporan kebijakan atau publikasi industri untuk menentukan fokus utama dalam pengembangan IPTEK.
- 5) Triangulasi, yaitu menggunakan berbagai sumber data, metode pengumpulan, dan teknik analisis untuk memastikan validitas dan keandalan temuan dan mengonfirmasi hasil survei dengan wawancara kualitatif atau data sekunder dari laporan resmi.

b. Pengolahan data kualitatif

Pengolahan data kualitatif menggunakan pendekatan Model Miles dan Huberman. Metode analisis data ini dimaksudkan untuk menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2017:244). Miles dan Huberman mengenalkan tiga tahapan dalam menganalisis data kualitatif, di antaranya:

1) Reduksi data.

Tahap pertama dalam melakukan metode analisis data kualitatif adalah mereduksi data (*data reduction*). Dalam hal ini, data yang ada perlu disederhanakan sehingga menjadi himpunan informasi sederhana dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pasalnya, kumpulan data dari berbagai sumber yang diperoleh tentu sangat kompleks. Maka dari itu, penting untuk mengelompokkannya ke dalam kategori data penting dan tidak.

2) Penyajian data.

Setelah tahap reduksi, tahap berikutnya dalam teknik analisis data kualitatif adalah menyajikan data (*data display*). Bentuk penyajiannya pun beragam, entah itu berupa chart, grafik, pictogram, dan lain-lain. Tujuannya adalah agar kumpulan data tersebut dapat tersampaikan dengan baik kepada orang lain. Tak hanya rapi, metode ini juga membantu untuk menyajikan data secara sistematis.

3) Penarikan kesimpulan.

Tahap selanjutnya dalam metode analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Saat susunan data telah disajikan, maka dibuatlah suatu kesimpulan yang akan menjadi informasi penutup dalam laporan penelitian.

4) Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*)

Analisis SWOT merupakan pendekatan analisis dalam perencanaan strategi yang meliputi kekuatan, peluang, kelemahan, serta ancaman yang menjadi dasar untuk evaluasi. Analisis SWOT ini akan menjadi dasar dalam penentuan strategi ke depan terkait strategi penurunan Ketimpangan Kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta ke depan.

3.5 Teknik Analisis Data

a. Analisis Data Deskriptif

Data deskriptif merupakan bagian penting dalam penelitian kajian Identifikasi Ketimpangan Kesejahteraan di Kota Surakarta. Data ini membantu peneliti untuk memahami dan menggambarkan keadaan ketimpangan secara objektif dan sistematis. Berikut adalah beberapa kegunaan utama data deskriptif dalam penelitian ini:

1) Memberikan Gambaran Umum

Data deskriptif memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran umum tentang kondisi kesejahteraan ketimpangan. Dengan menggunakan data deskriptif, peneliti dapat menunjukkan berapa banyak dari populasi masyarakat miskin yang memiliki akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan. Analisis tersebut dapat menggambarkan bagaimana cara masyarakat mengakses layanan tersebut.

2) Mengidentifikasi Pola dan Tren

Data deskriptif membantu dalam mengidentifikasi pola dan tren dalam ketimpangan kesejahteraan. Ini bisa mencakup tren penggunaan layanan dari waktu ke waktu. Peneliti dapat menemukan bahwa seberapa besar ketipangan yang terjadi di Kota Surakarta.

3) Menyediakan Informasi untuk Pengambilan Keputusan

Data deskriptif memberikan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Pembuat kebijakan dapat menggunakan data ini untuk memahami sejauh mana masalah aksesibilitas mempengaruhi disabilitas dan menentukan prioritas tindakan yang perlu diambil. Jika data deskriptif menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas publik di suatu daerah tidak memiliki ramp, pembuat kebijakan dapat memprioritaskan pembangunan ramp di semua bangunan publik sebagai langkah awal untuk meningkatkan aksesibilitas.

4) Mendukung Analisis Lanjutan

Data deskriptif seringkali menjadi dasar untuk analisis statistik lanjutan. Ini mencakup analisis inferensial yang dapat menguji hipotesis dan menentukan hubungan antara variabel yang berbeda. Setelah mengumpulkan data deskriptif tentang frekuensi penggunaan layanan kesehatan maupun pendidikan, peneliti dapat melakukan analisis regresi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi penggunaan tersebut.

Data deskriptif memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian Kajian Ketimpangan Kesejahteraan. Dengan memberikan gambaran umum, mengidentifikasi pola dan tren, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, mengevaluasi efektivitas program, mengidentifikasi kebutuhan spesifik, dan mendukung analisis lanjutan, data deskriptif membantu peneliti dan pembuat kebijakan untuk memahami dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh masyarakat miskin. Dengan demikian, data deskriptif berkontribusi secara signifikan dalam upaya meningkatkan inklusivitas dan kualitas layanan publik bagi semua anggota masyarakat.

Tahapan dalam analisis data deskripti yaitu :

- 1) Memastikan bahwa data bebas dari kesalahan dan duplikasi. Data yang tidak lengkap atau tidak relevan harus dihapus atau diperbaiki.
- 2) Mengonversi data kualitatif menjadi format yang dapat dianalisis secara kuantitatif (misalnya, mengubah jawaban terbuka dalam survei menjadi kategori yang dapat dihitung).
- 3) Visualisasi data membantu menyajikan temuan dalam bentuk yang mudah dipahami. Beberapa teknik visualisasi yang dapat digunakan adalah Grafik Batang (Bar Chart), Diagram Lingkaran (Pie Chart), Histogram atau Box Plot.
- 4) Setelah data dianalisis dan divisualisasikan, langkah selanjutnya adalah interpretasi hasil. Peneliti harus menjelaskan temuan utama dan menarik kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian.
- 5) Mengidentifikasi Pola dan Tren untuk menemukan pola umum atau tren dalam data yang dapat memberikan wawasan tentang ketimpangan kesejahteraan.

b. Analisis Data Kualitatif

Data kualitatif memainkan peran penting dalam penelitian Kajian Ketimpangan Kesejahteraan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami pengalaman, perspektif, dan konteks sosial yang mendasari masalah ekonomi, kesehatan, maupun pendidikan. Berikut adalah beberapa kegunaan utama data kualitatif dalam penelitian ini:

1) Mendalami Pengalaman Individu

Data kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendalami pengalaman masyarakat miskin dan tidak miskin dalam mengakses layanan umum. Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat menggali informasi yang kaya dan detail mengenai bagaimana kesulitan dalam kehidupan sehari-hari.

2) Mengidentifikasi Hambatan dan Kendala

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi hambatan dan kendala spesifik yang tidak dapat diungkapkan oleh data kuantitatif. Ini mencakup hambatan fisik, sosial, dan psikologis yang dihadapi oleh disabilitas dalam mengakses layanan publik. Melalui *focus group discussion* (FGD).

3) Memahami Konteks Sosial dan Kultural

Data kualitatif membantu peneliti memahami konteks sosial dan kultural yang mempengaruhi permasalahan dalam aspek ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan. Ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin tidak terlihat dalam data kuantitatif tetapi sangat mempengaruhi pengalaman ketimpangan kesejahteraan.

4) Menggali Persepsi dan Sikap

Data kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali persepsi dan sikap baik dari masyarakat miskin maupun dari penyedia layanan publik. Memahami persepsi dan sikap ini penting untuk merancang intervensi yang efektif dan berkelanjutan.

5) Mengembangkan untuk Penelitian Lebih Lanjut

Data kualitatif seringkali digunakan untuk mengembangkan hipotesis yang dapat diuji dalam penelitian kuantitatif lebih lanjut. Temuan kualitatif memberikan wawasan awal yang dapat dibangun menjadi studi yang lebih terstruktur dan terukur. Hasil wawancara mendalam yang menunjukkan bahwa ketimpangan kesejahteraan menghadapi diskriminasi dalam sistem pendidikan atau sosial dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan survei yang lebih luas untuk mengukur prevalensi diskriminasi ini di berbagai sekolah dan lingkungan.

Data kualitatif sangat berharga dalam penelitian ketimpangan kesejahteraan karena memberikan pemahaman mendalam tentang pengalaman, hambatan, dan konteks sosial yang mempengaruhi kehidupan. Melalui wawancara mendalam, focus group discussion, dan observasi lapangan, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang kaya dan detail, yang tidak dapat diungkapkan oleh data kuantitatif saja. Data kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk menggali persepsi dan sikap, mengembangkan hipotesis untuk penelitian lebih lanjut, memberikan suara kepada masyarakat miskin, dan mengidentifikasi solusi yang praktis dan dapat diimplementasikan. Dengan demikian, pendekatan kualitatif memainkan peran penting dalam upaya meningkatkan inklusivitas dan kualitas layanan publik. Berikut adalah tahapan analisis data kualitatif dalam penelitian ini:

1) Pengumpulan Data Kualitatif

- 2) Transkripsi Data yaitu mentranskripsikan rekaman wawancara dan FGD ke dalam teks tertulis untuk menjaga akurasi dan detail selama proses transkripsi.
- 3) Familiarisasi dengan data yaitu membaca ulang transkrip secara mendalam untuk memahami keseluruhan konten, menandai poin-poin penting dan ide-ide utama yang muncul dalam data dan identifikasi tema umum seperti hambatan fisik, sikap petugas layanan, dan kebutuhan masyarakat miskin.

Analisis Tematik meliputi :

- 1) Identifikasi Tema Utama yaitu mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari proses pengodean.
- 2) Penelaahan Tema yaitu menelaah tema-tema untuk memastikan konsistensi dan relevansi. Memastikan bahwa tema-tema yang diidentifikasi mencerminkan data secara akurat.
- 3) Definisi dan Penamaan Tema yaitu mendefinisikan dan memberikan nama yang jelas untuk setiap tema.
- 4) Penyusunan Narasi yaitu menyusun narasi yang menjelaskan temuan dari analisis tematik. Menggunakan kutipan langsung dari transkrip untuk mendukung dan mengilustrasikan temuan.
- 5) Validasi dan Triangulasi meliputi: (1) validasi yaitu membandingkan dan mengontraskan temuan dari berbagai sumber data untuk memastikan validitas. Meminta umpan balik dari responden mengenai interpretasi data dan temuan. Misal meminta peserta wawancara untuk meninjau dan memberikan tanggapan terhadap interpretasi temuan. Validasi dapat juga membandingkan hasil wawancara dengan temuan dari FGD dan observasi lapangan; (2) Triangulasi adalah proses menggabungkan data dari berbagai sumber untuk meningkatkan validitas temuan. Dengan membandingkan dan mengintegrasikan temuan dari data kuantitatif dan kualitatif, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam tentang aksesibilitas layanan publik bagi disabilitas.
- 6) Interpretasi hasil melibatkan penafsiran data dalam konteks penelitian dan tujuan yang telah ditetapkan. Peneliti harus mempertimbangkan temuan dari kedua jenis data (kuantitatif dan kualitatif) untuk memberikan rekomendasi yang holistik dan dapat diimplementasikan.

- 7) Menyusun laporan penelitian yang mencakup temuan utama, interpretasi, dan rekomendasi.

Tahapan analisis data kualitatif dalam penelitian kajian ketimpangan kesejahteraan Kota Surakarta mencakup pengumpulan data, transkripsi, familiarisasi, analisis tematik, penyusunan narasi, validasi, dan penyusunan laporan. Proses ini membantu mengungkapkan pengalaman, hambatan, dan kebutuhan masyarakat miskin secara mendalam dan komprehensif.

BAB IV

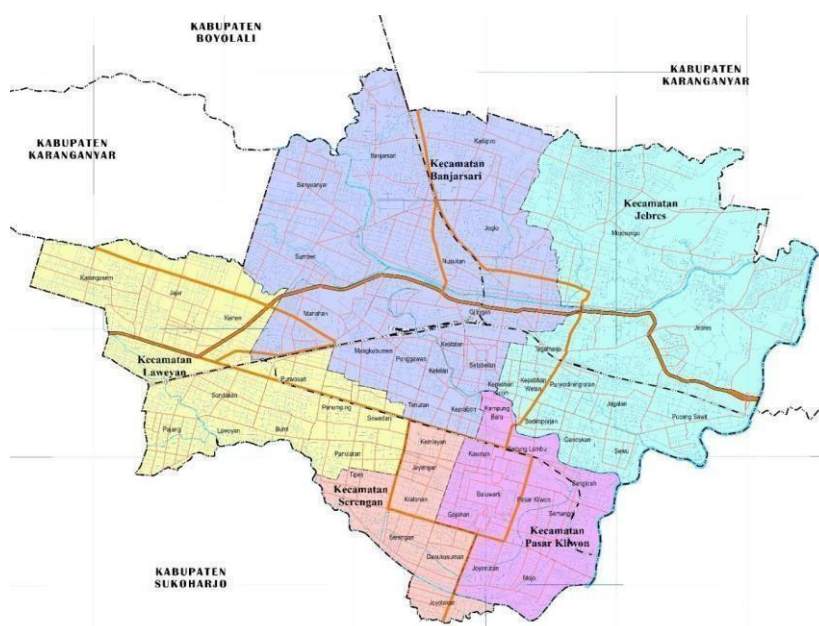
ANALISIS SITUASI

4.1 Situasi Umum

1. Aspek Geografi

Kota Surakarta secara geografis terletak pada koordinat antara $110^{\circ}45'15''$ hingga $110^{\circ}45'35''$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ}36'$ hingga $7^{\circ}56'$ Lintang Selatan. Kota ini merupakan salah satu pusat perkotaan penting di Provinsi Jawa Tengah yang berperan sebagai penopang pertumbuhan wilayah sekitarnya, termasuk Kota Semarang, Kota Yogyakarta, serta kabupaten-kabupaten di kawasan Subosukawonosraten (yang mencakup Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten). Adapun batas-batas wilayah administratif Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali dan Karanganyar.
- Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo.
- Sebelah Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar.



Gambar 4.1. Peta Kota Surakarta

Kota Surakarta memiliki luas wilayah sebesar 46,72 km². Secara administratif, wilayah kota ini terbagi menjadi 5 kecamatan dan 54 kelurahan, yang selanjutnya terdiri atas 626 Rukun Warga (RW) dan 2.786 Rukun Tetangga (RT). Rincian lebih lanjut mengenai pembagian wilayah administrasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1

Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta

Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	RW	RT
Laweyan	11	9,13	105	458
Serengan	7	3,08	72	313
Pasar Kliwon	10	4,88	101	437
Jebres	11	14,38	153	651
Banjarsari	15	15,26	195	930
Kota Surakarta	54	46,72	626	2789

Sumber : BPS, 2025

2. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kota Surakarta mengalami peningkatan dari 522.728 jiwa pada tahun 2021 menjadi 529.079 jiwa pada tahun 2025. Sementara itu, rasio jenis kelamin pada tahun 2025 tercatat sebesar 96,90, yang berarti terdapat 96 hingga 97 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa komposisi penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki di wilayah Kota Surakarta.

Jika ditinjau berdasarkan tren demografis Kota Surakarta selama periode 2021 hingga 2025, terdapat kecenderungan peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 0,09%, dan mengalami peningkatan hingga mencapai 0,20% pada tahun 2025. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk tersebut, tingkat kepadatan penduduk juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2025, kepadatan penduduk tercatat sebesar 11.324 jiwa per kilometer persegi, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 11.302,31 jiwa per kilometer persegi.

Data mengenai jumlah penduduk, laju pertumbuhan, rasio jenis kelamin, serta kepadatan penduduk Kota Surakarta selama tahun 2021 hingga 2025 dapat dilihat secara lebih terperinci pada tabel berikut.

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2021 – 2025

No	Variabel	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah penduduk	522.728	523.008	526.870	528.004	529.079
	Laki-laki	257,171	257,257	259.305	268.177	260.347
	perempuan	265.557	265.751	267.565	259.867	268.732
2.	Laju pertumbuhan (%)	0,09	0,05	0,25	0,22	0,20
3.	Rasio jenis kelamin	96,80	96,80	96,90	96,90	96,90
4.	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)	11.187,52	11.193,51	11.277,18	11.302,31	11.324

Sumber : BPS Kota Surakarta, 2025

Distribusi jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan bahwa Kecamatan Banjarsari merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi, yaitu mencapai 171.645 jiwa pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 172.241 jiwa pada tahun 2025. Sebaliknya, Kecamatan Serengan tercatat sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk terendah, yaitu sebanyak 48.437 jiwa pada tahun 2024 dan sedikit meningkat menjadi 48.567 jiwa pada tahun 2025. Informasi lebih lanjut mengenai jumlah penduduk dan kepadatan penduduk per kecamatan selama periode tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3

Persebaran Penduduk Kota Surakarta

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Kepadatan	
		2024	2025	2024	2025
1	Laweyan	88.941	88.978	9.741,62	9.746
2	Serengan	48.437	48.567	15.726,30	15.769

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Kepadatan	
		2024	2025	2024	2025
3	Pasar Kliwon	79.726	79.972	16.337,30	16.388
4	Jebres	139.295	139.321	9.686,72	9.689
5	Banjarsari	171.645	172.241	11.248,03	11.287
Surakarta		528.044	529.079	11.302,31	11.324

Sumber : BPS Kota Surakarta, 2025

Jumlah penduduk di Kota Surakarta tersebar di 54 kelurahan dengan sebaran yang tidak merata, di mana konsentrasi tertinggi berada di Kecamatan Banjarsari dan Jebres wilayah yang menjadi pusat aktivitas pendidikan, perdagangan, dan permukiman. Salah satu contohnya adalah Kelurahan Mojosongo di Kecamatan Jebres yang pada tahun 2023 tercatat memiliki jumlah penduduk terbanyak, yakni mencapai 55.730 jiwa. Sebaliknya, Kelurahan Laweyan menjadi kelurahan dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu hanya 2.121 jiwa, yang kemungkinan dipengaruhi oleh keterbatasan ruang dan karakter kawasan sebagai area heritage dan perdagangan. Kelurahan di wilayah seperti Pasar Kliwon juga cenderung memiliki jumlah penduduk lebih rendah meskipun padat aktivitas.

Tabel 4.4

Jumlah Penduduk menurut Kelurahan di Kota Surakarta Tahun 2023-2024

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Penduduk	
		2023	2024
Laweyan	Pajang	25.813	25.927
	Laweyan	2120	2.121
	Bumi	6369	6.352
	Panularan	9679	9.758
	Sriwedari	3929	3.969
	Penumping	3951	3.881
	Purwosari	10.302	10.354
	Sondakan	12.380	12.374
	Kerten	9490	9.568
	Jajar	9451	9.491
	Karangasem	10.602	10.658

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Penduduk	
		2023	2024
Serengan	Joyotakan	8130	8.141
	Danukusuman	10180	10.180
	Serengan	10987	10.982
	Tipes	12355	12.395
	Kratonan	5499	5.456
	Jayengan	3935	3.924
	Kemlayan	3762	3.754
Pasar Kliwon	Joyosuran	10723	10.702
	Semanggi	23435	23.540
	Pasar Kliwon	5631	5.565
	Baluwarti	6525	3.888
	Gajahan	3884	6.539
	Kauman	2650	2.986
	Kampung Baru	3054	5.482
	Kedung Lumbu	5483	12.826
	Sangkrah	12756	2.692
	Mojo	14535	14.574
Jebres	Kepatihan Kulon	2516	2.578
	Kepatihan Wetan	2619	2.626
	Sudiroprajan	3803	3.787
	Gandekan	9108	9.158
	Sewu	7213	7.145
	Pucangsawit	14495	14.482
	Jagalan	12198	12.247
	Purwodiningratan	4985	4.971
	Tegalarharjo	5089	5.104
	Jebres	33933	34.053
	Mojosongo	55158	55.730
Banjarsari	Mangkubumen	9914	25.090
	Timuran	2875	31.400
	Keprabon	3003	20.828
	Ketelan	3490	4.174
	Punggawan	4335	2.850

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Penduduk	
		2023	2024
	Kestalan	2880	2.995
	Setabelan	4108	2.879
	Gilingan	20888	3.482
	Manahan	11914	4.315
	Sumber	19026	9.875
	Nusukan	31449	11.702
	Kadipiro	24990	19.054
	Banyuanyar	15708	15.890
	Joglo	13926	20.695
	Banjarsari	20413	14.053

Sumber : BPS Kota Surakarta, 2025

Kepadatan penduduk di Kota Surakarta pada tahun 2023 menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antar kelurahan. Kelurahan Sangkrah yang berada di Kecamatan Pasar Kliwon, menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi, yaitu mencapai 27.730,43 jiwa per kilometer persegi. Angka ini menggambarkan Sangkrah sebagai salah satu pusat permukiman dan aktivitas yang sangat padat di kota tersebut. Posisi berikutnya ditempati oleh Kelurahan Gandekan, yang juga memiliki kepadatan tinggi sebesar 26.476,74 jiwa per kilometer persegi. Sebaliknya, Kelurahan Sriwedari di Kecamatan Laweyan mencatat kepadatan terendah, hanya 7.343,93 jiwa per kilometer persegi, yang menunjukkan area ini memiliki ruang terbuka lebih luas dan tingkat kepadatan permukiman yang relatif rendah.

Tabel 4.5

Kepadatan Penduduk menurut Kelurahan Kota Surakarta Tahun 2022- 2023

Kelurahan	Kepadatan Penduduk per km2	
	2022	2023
Pajang	16.700,78	16.827,25
Laweyan	10.218,45	10.291,26
Bumi	17.834,73	17.840,34
Panularan	17.087,34	17.253,12

Kelurahan	Kepadatan Penduduk per km ²	
	2022	2023
Sriwedari	7.564,49	7.343,93
Penumping	7.849,50	7.823,76
Purwosari	12.666,26	12.687,19
Sondakan	15.382,02	15.455,68
Kerten	7.587,52	7.690,44
Jajar	8.128,58	8.211,12
Karangsem	7.335,20	7.419,17
Kecamatan Laweyan	11.341,92	11.406,68
Joyotakan	18.613,95	18.906,98
Danukusuman	19.096,23	19.207,55
Serengan	21.115,61	21.169,56
Tipes	19.198,44	19.304,69
Kratonan	16.420,12	16.269,23
Jayengan	13.040	13.116,67
Kemlayan	11.607,36	11.539,88
Kecamatan Serengan	17.715,54	17.790,46
Joyosuran	20.111,95	20.347,25
Semanggi	25.931,92	26.155,13
Pasar Kliwon	14.925,93	14.896,83
Baluwarti	12.016,61	12.38,75
Gajahan	12.665,59	12.488,75
Kauman	12.849,51	12.864,08
Kampung Baru	10.207,21	9.573,67
Kedung Lumbu	11.336,76	11.258,73
Sangkrah	27.569,57	27.730,43
Mojo	18.830,24	19.277,19
Kecamatan Pasar Kliwon	18.079,48	18.163,87
Kepatihan Kulon	177.594,74	13.242,11
Kepatihan Wetan	53.267,54	11.486,84
Sudiroprajan	60.839,66	16.046,41

Kelurahan	Kepadatan Penduduk per km ²	
	2022	2023
Gandekan	14.569,77	26.476,74
Sewu	10.748,40	15.379,53
Pucangsawit	5.688,68	11.395,44
Jagalan	14.551,61	19.674,19
Purwodiningratan	9.784,97	12.914,51
Tegalharjo	136.426,07	12.754,39
Jebres	613,13	7.842,15
Mojosongo	420,97	9.344,06
Kecamatan Jebres	10.432,49	10.512,49
Mangkubumen	11.932,06	11.816,45
Timuran	8.641,40	8.381,92
Keprabon	9.738,71	9.687,10
Ketelan	14.651,26	14.663,87
Punggawan	12.925,60	12.901,79
Kestalan	11.763,27	11.755,10
Setabelan	9.291,20	9.273,14
Gilingan	16.221,61	16.357,09
Manahan	7.653,16	7.916,28
Sumber	12.884,20	12.960,49
Nusukan	15.375,55	15.438,88
Kadipiro	13.495,92	13.588,91
Banyuanyar	10.619,76	10.627,88
Joglo	15.923,61	16.118,06
Banjarsari	9.845,85	10.021,11
Kecamatan Banjarsari	12.295,56	12.380,82

Sumber : BPS Kota Surakarta, 2025

4.2 Situasi Makro Ekonomi

1. Struktur Perekonomian

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surakarta berdasarkan lapangan usaha menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, terutama

setelah masa pandemi. Tahun 2020, nilai PDRB tercatat sebesar Rp47.621,82 miliar. Pada saat itu, pandemi COVID-19 sangat memengaruhi aktivitas ekonomi, sehingga hampir seluruh sektor mengalami penurunan produksi dan permintaan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kondisi ekonomi mulai pulih. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB Kota Surakarta terus tumbuh dan diperkirakan mencapai Rp64.700,97 miliar pada tahun 2024.

Kenaikan nilai PDRB ini mencerminkan meningkatnya aktivitas produksi, konsumsi masyarakat, serta investasi di berbagai sektor usaha. BPS menyebutkan bahwa pemulihan ekonomi pasca pandemi ditopang oleh belanja masyarakat yang kembali meningkat, pergerakan sektor jasa yang membaik, serta dukungan program pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Beberapa sektor usaha tercatat sebagai penyumbang utama terhadap kenaikan PDRB. Sektor konstruksi mencatat pertumbuhan yang stabil dari Rp12.878,84 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp15.844,89 miliar pada proyeksi 2024. Peningkatan ini menunjukkan tingginya aktivitas pembangunan, baik oleh pemerintah maupun swasta, termasuk pembangunan perumahan, jalan, fasilitas umum, serta proyek infrastruktur lainnya. Tren ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat infrastruktur kota sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Sektor perdagangan besar dan eceran juga menunjukkan peningkatan signifikan. Nilainya tumbuh dari Rp10.306,41 miliar pada 2020 menjadi Rp14.305,61 miliar pada 2024. Pertumbuhan sektor ini didorong oleh meningkatnya daya beli masyarakat, pemulihan aktivitas ritel, serta adaptasi pelaku usaha terhadap sistem perdagangan digital seperti *e-commerce*. Sektor perdagangan di kota-kota besar termasuk Surakarta mengalami percepatan transformasi digital, yang membuat pelaku UMKM dan pedagang tradisional lebih mudah menjangkau konsumen.

Sektor industri pengolahan turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai sektor ini meningkat dari Rp4.017,39 miliar menjadi Rp5.535,23 miliar dalam periode 2020–2024. Sektor ini banyak ditopang oleh kegiatan industri skala kecil dan menengah, seperti makanan dan minuman, tekstil, serta kerajinan lokal. Kota Surakarta dikenal sebagai salah satu pusat industri kreatif dan manufaktur ringan di Jawa Tengah, sehingga potensi nilai tambah dari sektor ini cukup besar.

Tabel 4.6

PDRB ADHB Kota Surakarta Tahun 2020-2024 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	243,79	253,4	265,55	301,56	285,91
B. Pertambangan dan Penggalan	0,28	0,24	0,2	0,18	0,18
C. Industri Pengolahan	4.017,39	4.362,55	4.797,44	5.170,21	5.535,23
1. Pengadaan Listrik dan Gas	95,47	104,63	111,25	122,10	130,97
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	74,92	71,49	70,98	73,96	77,32
F. Konstruksi	12.878,84	13.423,88	14.517,92	15.265,57	15.844,89
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.306,41	11.062,42	12.183,47	13.319,29	14.305,61
H. Transportasi dan Pergudangan	491,17	524,38	1.294,67	1.494,77	1.644,46
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.167,24	2.379,35	3.486,61	3.933,66	4.217,32
J. Informasi dan Komunikasi	6.929,68	7.486,88	7.671,54	8.548,55	9.509,08
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.856,88	1.968,24	2.144,79	2.222,46	2.327,51
L. Real Estat	1.890,73	1.974,90	2.147,89	2.337,92	2.475,94
M,N. Jasa Perusahaan	387,89	402,03	453,36	506,77	551,98
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.567,43	2.574,05	2.692,90	2.904,93	3.162,43
P. Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	2.688,47	2.740,94	2.889,39	3.118,92	3.346,40
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	622,77	635,8	674,13	736,68	752,46
R,S,T,U. Jasa Lainnya	402,47	406,4	446,47	483,42	533,27
Produk Domestik Regional Bruto <i>Gross Regional Domestic Product</i>	47.621,82	50.371,56	55.848,55	60.540,95	64.700,97

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2025

Setiap daerah memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda-beda, tergantung pada potensi sumber daya dan struktur kegiatan usahanya. Pemahaman terhadap arah dan kekuatan utama pertumbuhan ekonomi menjadi hal yang penting dalam menelaah struktur perekonomian daerah. Struktur perekonomian dapat dikenali melalui besarnya kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap total PDRB. Nilai kontribusi tersebut bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan besarnya output yang dihasilkan setiap sektor dari waktu ke waktu.

Analisis kontribusi persentase lapangan usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surakarta tahun 2024 menunjukkan bahwa sektor konstruksi mendominasi struktur ekonomi daerah, dengan kontribusi sebesar 24,49%. Besarnya peran sektor ini mencerminkan tingginya aktivitas pembangunan infrastruktur, baik oleh pemerintah maupun swasta, dalam lima tahun terakhir. Kinerja konstruksi yang konsisten tumbuh menjadikannya motor utama pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta.

Sektor perdagangan besar dan eceran berada di posisi kedua dengan kontribusi 22,11%. Peran sektor ini sangat penting dalam mendorong perputaran ekonomi lokal, terutama karena tingginya aktivitas konsumsi, peran UMKM, serta meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam perdagangan. Keduanya menjadikan perdagangan sebagai salah satu sektor andalan yang relatif stabil.

Sektor informasi dan komunikasi menyumbang 14,70%, menggambarkan pertumbuhan pesat sektor digital di Kota Surakarta. Meningkatnya kebutuhan akan layanan berbasis teknologi, termasuk internet, media digital, dan aplikasi layanan publik maupun swasta, mendorong sektor ini berkembang sebagai tulang punggung ekonomi baru yang menjanjikan.

Industri pengolahan berkontribusi sebesar 8,56%, terutama didukung oleh aktivitas industri kecil dan menengah seperti makanan-minuman, tekstil, dan kerajinan lokal. Sektor ini tetap stabil dan memberikan nilai tambah yang signifikan meskipun tidak sebesar sektor lainnya.

Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 5,34%, serta jasa pendidikan sebesar 5,08%, menunjukkan pentingnya sektor jasa dalam mendukung perekonomian kota, terutama sebagai kota destinasi wisata dan pusat pendidikan regional, sementara itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya menyumbang 0,35%, dan sektor pertambangan serta penggalian sebesar

0,01%. Rendahnya kontribusi sektor-sektor primer ini mencerminkan karakter wilayah yang lebih urban dan terbatasnya aktivitas agraris maupun tambang.

Komposisi ini menegaskan arah transformasi ekonomi Kota Surakarta yang semakin bertumpu pada sektor jasa dan industri manufaktur. Pergeseran ini menunjukkan upaya daerah dalam membangun ekonomi berbasis jasa modern dan inovasi, sejalan dengan tren urbanisasi dan perkembangan teknologi.

Tabel 4.7
Distribusi Persentase PDRB ADHB Kota Surakarta Tahun 2024

Lapangan Usaha	Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,44
B. Pertambangan dan Penggalian	0
C. Industri Pengolahan	8,56
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,2
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12
F. Konstruksi	24,49
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22,11
H. Transportasi dan Pergudangan	2,54
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,52
J. Informasi dan Komunikasi	14,7
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,6
L. Real Estate	3,83
M,N. Jasa Perusahaan	0,85
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	4,89
P. Jasa Pendidikan	5,17
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,16
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,82

Lapangan Usaha	Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Produk Domestik Regional Bruto	100

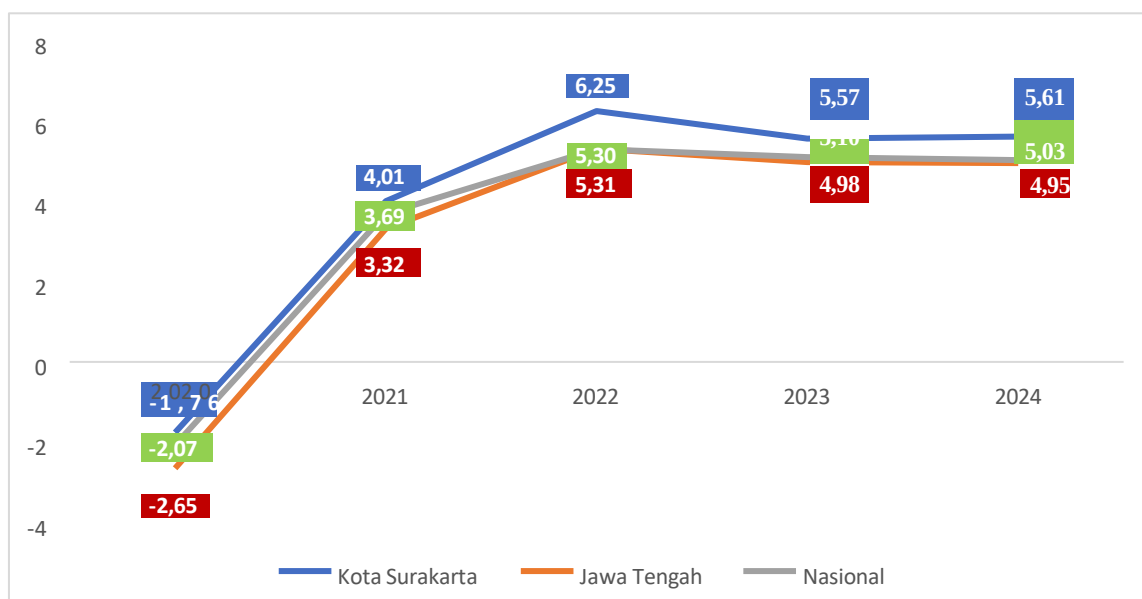
Sumber: BPS Kota Surakarta, 2025

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta antara tahun 2020 sampai 2024 mengalami perjalanan yang menarik. Di tahun 2020, ekonomi Surakarta menurun sebesar -1,76% karena pandemi COVID-19, sama seperti daerah lain di Jawa Tengah sebesar -2,65% dan secara nasional sebesar -2,07%. Saat itu, banyak usaha yang tutup, pariwisata sepi, dan masyarakat membatasi aktivitas, sehingga ekonomi melemah.

Setelah pandemi bisa dikendalikan, ekonomi mulai bangkit kembali. Tahun 2021, pertumbuhan Surakarta sudah naik menjadi 4,01%. Hal ini hampir sama dengan Jawa Tengah yang tumbuh 3,32% dan Indonesia secara umum 3,69%. Kondisi ekonomi terus membaik di tahun 2022. Surakarta bahkan tumbuh lebih tinggi dari rata-rata wilayah lain, yaitu mencapai 6,25%, sedangkan Jawa Tengah 5,31% dan nasional 5,3%. Kota ini cepat pulih karena sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata kembali ramai.

Pada tahun 2023 dan 2024, ekonomi Surakarta tetap tumbuh di atas 5%, bahkan lebih tinggi dari Jawa Tengah dan nasional. Pertumbuhan di Surakarta tercatat 5,57% di 2023 dan 5,61% di 2024, sementara Jawa Tengah dan nasional rata-rata sekitar 5%. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Surakarta sudah sangat pulih dan kembali stabil.



Sumber: BPS Kota Surakarta, 2025

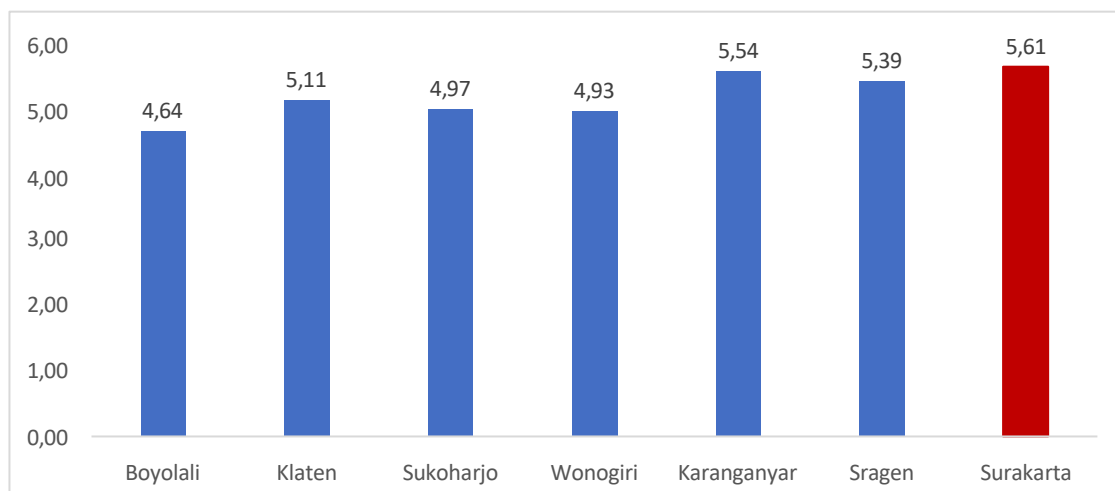
Gambar 4.2. Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta tahun 2024 mencapai 5,61%, menempatkannya pada posisi tertinggi dibandingkan kabupaten-kabupaten sekitarnya di kawasan Solo Raya. Capaian ini juga melampaui rata-rata pertumbuhan Jawa Tengah yang hanya 4,95% dan nasional sebesar 5,03%. Antara kabupaten sekitar, Karanganyar menjadi yang terdekat dengan pertumbuhan 5,54%, diikuti Sragen 5,39% dan Klaten 5,11%. Sementara itu, Sukoharjo (4,97%), Wonogiri (4,93%), dan Boyolali (4,64%) memiliki pertumbuhan di bawah 5%.

Keunggulan pertumbuhan ekonomi Surakarta ini menunjukkan kemampuan kota dalam mengelola potensinya, terutama pada sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata yang menjadi andalan. Sebagai pusat kegiatan ekonomi dan budaya kawasan Solo Raya, Surakarta mampu memaksimalkan pemulihan pasca-pandemi dengan lebih baik.

Posisi strategis sebagai kota pendidikan, pusat perbelanjaan, dan destinasi wisata budaya turut mendorong perputaran ekonomi yang lebih dinamis dibandingkan kabupaten tetangga yang masih lebih bertumpu pada sektor pertanian

dan industri kecil menengah. Capaian ini menjadi bukti bahwa strategi pengembangan ekonomi perkotaan yang diterapkan Surakarta berjalan efektif dan dapat menjadi contoh bagi kabupaten sekitarnya.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 4.3. Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2024

3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita Kota Surakarta dalam satuan ribu rupiah mengalami peningkatan setiap tahun dalam periode 2020 hingga 2024. Dari Rp66.650 ribu pada tahun 2020, angkanya naik menjadi Rp69.090 ribu di 2021, lalu Rp73.210 ribu pada 2022, dan Rp77.100 ribu pada 2023. Pertumbuhan yang stabil ini mencerminkan arah pemulihan ekonomi yang positif setelah masa pandemi, didukung oleh membaiknya berbagai sektor utama kota.

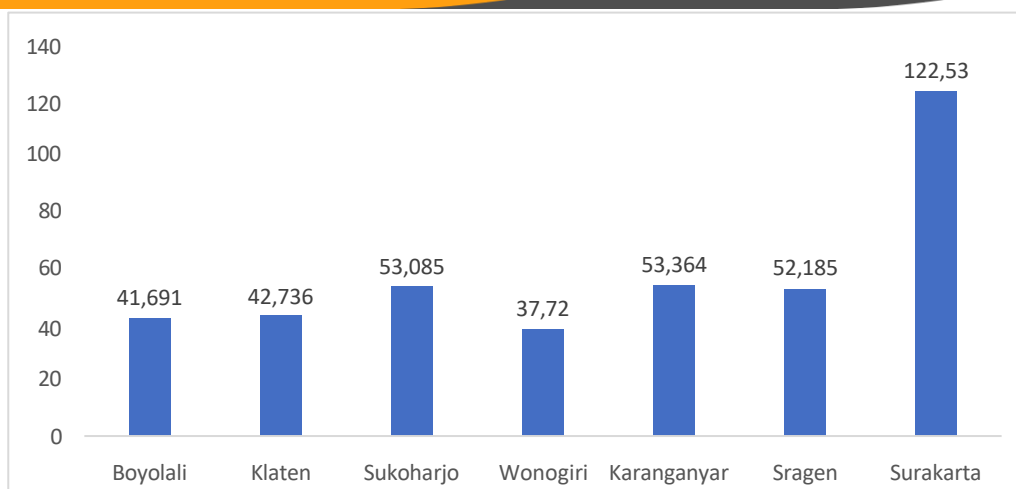
Kenaikan paling menonjol terlihat di tahun 2024 saat PDRB per kapita melonjak tajam menjadi Rp122.530 ribu. Lompatan ini menjadi indikasi semakin kuatnya perekonomian Surakarta dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata. Angka ini juga menandakan meningkatnya pendapatan rata-rata penduduk kota, yang pada akhirnya menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Surakarta secara keseluruhan.



Sumber: BPS Kota Surakarta, 2025

Gambar 4.4.PDRB Per Kapita Kota Surakarta 2020-2024

Data PDRB per kapita dengan satuan ribu rupiah menunjukkan perbedaan nilai ekonomi di beberapa wilayah sekitar Surakarta yang merupakan bagian dari kawasan Solo Raya. Kota Surakarta memiliki PDRB per kapita tertinggi, yakni sekitar 122,53 juta rupiah pada tahun 2024, yang mencerminkan aktivitas ekonomi yang lebih maju dan tingkat pendapatan yang relatif lebih tinggi dibandingkan kabupaten-kabupaten sekitarnya. Kabupaten seperti Karanganyar dan Sragen memiliki PDRB per kapita yang lebih rendah, masing-masing sekitar 12.732 ribu rupiah dan 13.890 ribu rupiah, memperlihatkan gap ekonomi antara kota dan kabupaten di wilayah tersebut. Kabupaten Sukoharjo, yang memiliki PDRB per kapita sekitar 53 ribu ribu rupiah, dan Karanganyar dengan angka serupa sekitar 53 ribu ribu rupiah, menunjukkan tingkat ekonomi yang lebih berkembang secara menengah di antara kabupaten lainnya. Wonogiri dengan angka per kapita sekitar 37,72 ribu rupiah dan Boyolali sekitar 41,69 ribu rupiah menandakan wilayah ini masih memiliki ruang yang cukup besar untuk tumbuh secara ekonomi dibandingkan Surakarta yang lebih maju. Perbedaan PDRB per kapita ini menggambarkan disparitas pendapatan antar wilayah yang dipengaruhi oleh faktor struktur ekonomi, tingkat urbanisasi, dan investasi di masing-masing daerah. Secara umum, Solo Raya sebagai satu kesatuan wilayah tetap memiliki potensi sinergi antara kota dan kabupaten untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di masa depan.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 4.5. PDRB Per Kapita Kota Surakarta dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2024

4.3 Situasi Sosial Budaya

1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Kota Surakarta memiliki karakter sosial budaya yang khas, ditandai dengan kuatnya nilai-nilai gotong royong, *tepa slira* (tenggang rasa), dan penghormatan terhadap sesama. Tradisi ini telah lama menjadi landasan hubungan sosial antarwarga dan menciptakan solidaritas yang tinggi di tengah kehidupan masyarakat. Namun, seiring laju urbanisasi, perubahan pola hidup, serta bergesernya struktur keluarga dari kolektif menjadi lebih individual, ikatan sosial mulai melemah, terutama di lingkungan perkotaan yang padat dan heterogen.

Perubahan tersebut memunculkan berbagai tantangan sosial baru. Mobilitas penduduk yang tinggi, pertumbuhan kawasan padat, serta tekanan ekonomi ikut mempengaruhi daya dukung lingkungan sosial. Dalam konteks ini, kelompok rentan semakin sulit mengakses perlindungan sosial secara informal dari keluarga atau komunitas sekitar. Tradisi yang dahulu menguatkan jaringan pertolongan kini tidak lagi mampu sepenuhnya menahan laju kerentanan sosial.

Fenomena tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Surakarta. Kelompok seperti anak jalanan, lansia terlantar, penyandang disabilitas, korban kekerasan, hingga ODGJ menghadapi berbagai hambatan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mendapatkan penerimaan

sosial. Stigma budaya terhadap beberapa kelompok PMKS masih kuat, menyebabkan mereka semakin terpinggirkan dari ruang sosial maupun pelayanan publik.

Meski demikian, budaya lokal tetap menyimpan potensi besar dalam mendukung penanganan PMKS. Kekuatan komunitas, peran tokoh masyarakat, dan jejaring sosial berbasis kultural dapat dimobilisasi untuk mengurangi stigma, mendorong kepedulian, serta memperkuat program pemberdayaan. Pemanfaatan nilai-nilai lokal secara kontekstual akan meningkatkan efektivitas intervensi sosial dan memperkuat proses reintegrasi kelompok rentan ke dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pada data Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara keseluruhan di Kota Surakarta pada tahun 2024 adalah 72.947 orang yang terdiri dari 36.940 laki-laki dan 36.007 perempuan. Jumlah PPKS Kota Surakarta tahun 2024 secara rinci disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.8
Jumlah PPKS Kota Surakarta Tahun 2024

No.	Jenis PMKS	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	2	0	2
2	Anak Terlantar (AT)	11	9	20
3	Anak yang Mengalami Masalah Hukum (AMH)	4	2	6
4	Anak Jalanan (AJ)	5	5	10
5	Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)	99	82	181
	a Anak dengan Disabilitas Fisik	46	41	87
	b Anak dengan Disabilitas Sensorik	19	17	36
	c Anak dengan Disabilitas Mental	16	12	28
	d Anak dengan Disabilitas Ganda	18	12	30
6	Anak yang menjadi korban Tindak kekerasan	0	2	2
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	41	33	74

No.	Jenis PMKS	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
8	Lanjut Usia Terlantar	6	15	21
9	Penyandang Disabilitas	728	600	1,328
	a Penyandang Disabilitas Fisik	286	264	550
	b Penyandang Disabilitas Sensorik	137	114	251
	c Penyandang Disabilitas Mental	247	185	432
	d Penyandang Disabilitas Ganda	58	37	95
10	Tuna Susila (TS)	0	41	41
11	Gelandangan	0	4	4
12	Pengemis	0	1	1
13	Pemulung	0	0	0
14	Kelompok Minoritas/Waria	0	0	0
	a Waria	0	0	0
	b Gay			0
15	Bekas Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	15	0	15
16	Orang dengan HIV /AIDS (ODHA)	0	0	0
17	Korban Penyalahgunaan Napza	3	0	3
18	Korban Trafficking	0	0	0
19	Korban Tindak Kekerasan	1	2	3
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0	0	0
21	Korban Bencana Alam	0	0	0
22	Korban Bencana Sosial	0	0	0
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	0	7	7
24	Fakir Miskin	36.023	35.202	71.225
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	2	2	4
26	Komunitas adat Terpencil	0	0	0

No.	Jenis PMKS	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	JUMLAH	36940	36,007	72,947

Sumber: Buku Sebaran Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

a. **Anak Balita Terlantar (ABT)**

Anak Balita Terlantar merupakan anak usia di bawah lima tahun yang tidak mendapat pengasuhan, perlindungan, atau pemenuhan kebutuhan dasarnya secara layak dari orang tua atau wali. Masalah ini muncul akibat ketidakmampuan keluarga menjalankan tanggung jawab karena faktor ekonomi, kematian orang tua, perceraian, keterbatasan mental atau fisik, serta pengabaian sosial. Urbanisasi dan migrasi keluarga ke kota besar memperbesar potensi balita terlantar di kota seperti Surakarta, sebab jaringan sosial dan keluarga besar kian renggang. Jumlah yang terdata hanya dua anak pada tahun 2024, namun banyak kasus ABT tidak teridentifikasi akibat pengetahuan yang rendah soal pelaporan dan perasaan malu. Sistem deteksi dini, peran posyandu, serta sinergi antarpihak mutu sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya balita terlantar.

b. **Anak Terlantar (AT)**

Anak Terlantar yaitu anak di bawah 18 tahun tanpa pengasuhan dan perhatian dari keluarga sehingga tumbuh kembangnya terancam. Faktor paling dominan yaitu konflik keluarga, kemiskinan, kekerasan, penelantaran, hingga tekanan ekonomi yang memaksa anak hidup mandiri. Kota Surakarta sebagai kota padat dan ramai migrasi menjadi lokasi tumbuhnya kasus anak terlantar, apalagi bila pengawasan keluarga melemah. Dua puluh anak terlantar tercatat pada 2024, namun bisa jadi jumlah riil lebih besar akibat keterbatasan pelaporan. Dukungan terhadap reunifikasi keluarga, penguatan lembaga perlindungan anak, dan kemudahan layanan sosial sangat penting agar masalah ini teratasi secara sistemik.

c. **Anak yang Mengalami Masalah Hukum (AMH)**

Anak mengalami masalah hukum sebagai pelaku, korban, atau saksi ketika mereka berhadapan langsung dengan proses hukum. Kejadian kerap bermula dari pergaulan negatif, kemiskinan, kurang pendidikan karakter, dan lemahnya pengawasan orang tua. Enam anak tercatat menghadapi masalah hukum tahun 2024, tanda lingkungan belum sepenuhnya aman bagi tumbuh kembang anak. Tindakan terhadap mereka sebaiknya berbasis pemulihan bukan hukuman, karena anak-anak membutuhkan bimbingan dan pemulihan psikologis, bukan

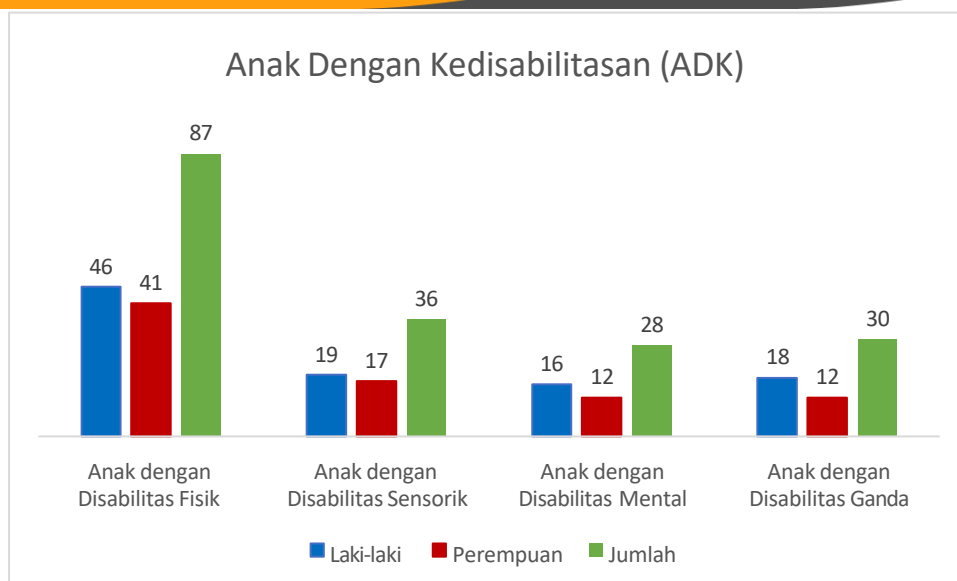
stigmatisasi. Pendampingan hukum, pendidikan karakter, serta rekonsiliasi keluarga mutlak diperlukan untuk anak-anak kelompok ini.

d. **Anak Jalanan (AJ)**

Anak Jalanan merupakan anak-anak yang menghabiskan waktu di jalan atau tempat umum, baik untuk bekerja, mengamen, meminta-minta, ataupun sekadar nongkrong. Faktor utama munculnya fenomena ini adalah kemiskinan keluarga, ketidakharmonisan rumah tangga, dan minimnya akses pendidikan. Kota padat seperti Surakarta kerap jadi tempat tujuan anak jalanan karena ada lebih banyak peluang ekonomi informal dan kurangnya pengawasan keluarga. Sebanyak 10 anak jalanan tercatat tahun 2024, tapi jumlah sebenarnya kemungkinan lebih besar karena mobilitas mereka sangat tinggi. Pencegahan anak jalanan butuh upaya outreach, pendidikan alternatif, penguatan keluarga, serta reintegrasi sosial.

e. **Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)**

Anak dengan kedisabilitasan adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, maupun sensorik yang menghambat aktivitas harian dan partisipasi di masyarakat. Penyebabnya beragam, mulai faktor genetik, infeksi prenatal, gizi buruk, kecelakaan, hingga kurang layanan kesehatan. Surakarta 2024 mencatat 181 anak penyandang disabilitas yang terdiri dari Anak dengan Disabilitas Fisik sejumlah 87 anak, Anak dengan Disabilitas Sensorik sebanyak 36 anak, Anak dengan Disabilitas Mental sebanyak 28 anak dan Anak dengan Disabilitas Ganda sebanyak 30 anak. Tantangan terbesar adalah biaya tinggi, stigma sosial, serta hambatan terhadap akses pendidikan dan kesehatan inklusif. Upaya perlindungan dan pemberdayaan mereka harus melibatkan keluarga, sekolah, hingga masyarakat luas untuk memberi dukungan dan akses yang merata.



Sumber: Buku Sebaran Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Gambar 4.6. Anak Dengan Kedisabilitas (ADK) di Kota Surakarta Tahun 2024

f. Anak Korban Tindak Kekerasan

Anak korban tindak kekerasan mengalami perlakuan fisik, psikis, maupun seksual dari keluarga, warga sekitar, atau lingkungan pendidikan. Sumber utamanya adalah lemahnya perlindungan anak, budaya permisif, dan tekanan ekonomi keluarga. Kota Surakarta melaporkan dua kasus tahun ini, namun kemungkinan besar angka riil lebih banyak mengingat kecenderungan korban tersembunyi karena rasa takut atau malu. Dampak kekerasan amat luas mulai dari trauma hingga kehilangan kepercayaan terhadap lingkungan. Penguatan sistem pelaporan, pendampingan psikologis, dan edukasi keluarga jadi solusi mutlak.

g. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Anak yang memerlukan perlindungan khusus biasanya hidup dalam kondisi rentan, seperti korban bencana, konflik, diskriminasi, atau eksploitasi sosial. Faktor utama pemicu antara lain migrasi, kemiskinan ekstrem, dan minim akses layanan negara. Surakarta mendata 74 anak dalam kategori ini, pertanda perlunya perbaikan tata kelola perlindungan anak secara khusus dan responsif. Intervensi mutlak melibatkan pemerintah, organisasi sosial, masyarakat, dan pendampingan hukum

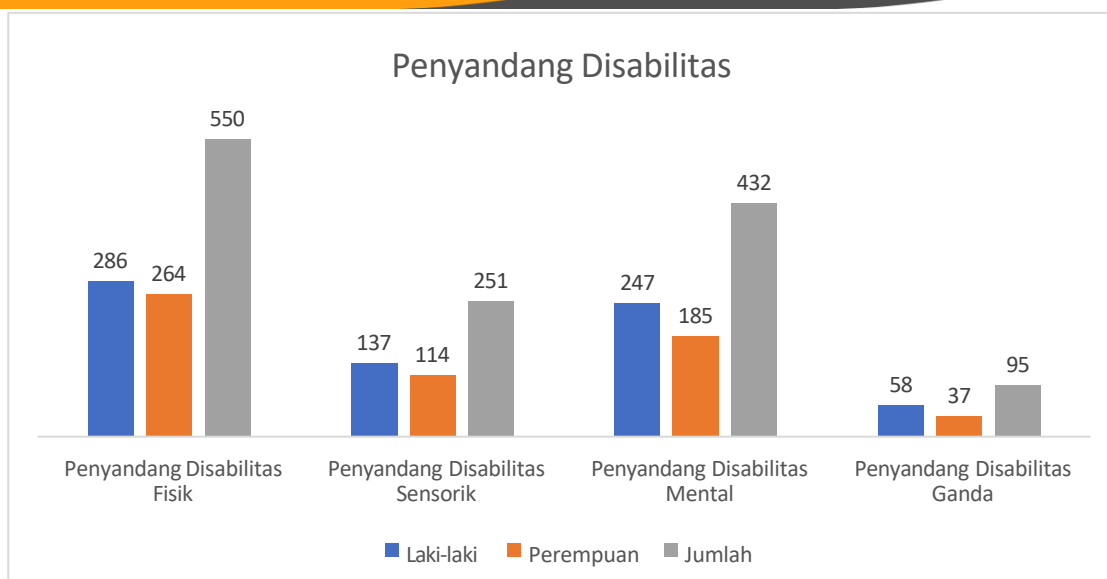
bagi anak. Kondisi khusus mutlak ditangani dengan layanan multisektor dan penjangkauan cepat.

h. Lanjut Usia Terlantar

Lanjut Usia Terlantar merupakan lansia tanpa pengasuhan atau dukungan keluarga, sehingga rentan terhadap masalah fisik, ekonomi, dan psikologis. Penyebab utama mencakup perubahan pola keluarga, urbanisasi, hingga keterbatasan ekonomi generasi penerus. Sebanyak 21 lansia terlantar tercatat di Surakarta 2024 dan kecenderungan naik di kota modern akibat individualisasi. Permasalahan yang dihadapi meliputi keterasingan, kehilangan penghasilan, dan masalah kesehatan yang semakin kompleks. Program bantuan sosial, panti lansia, dan komunitas peduli lansia mutlak diperkuat untuk melindungi mereka.

i. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, sensorik yang bertahan lama sehingga menghambat kehidupan sehari-hari. Faktor penyebab meliputi genetika, penyakit kronis, kecelakaan, hingga lingkungan yang tidak ramah. Sebanyak 1.328 penyandang disabilitas tercatat di Surakarta, mayoritas mengalami disabilitas fisik maupun mental. Terdapat 550 orang penyandang disabilitas fisik, 251 orang penyandang disabilitas sensorik, 432 orang penyandang disabilitas mental dan 95 orang penyandang disabilitas ganda. Tantangan paling berat berupa hambatan akses pendidikan, kerja, layanan publik, hingga diskriminasi sosial. Pencegahan harus menitikberatkan pada edukasi masyarakat, perbaikan kebijakan, dan dukungan infrastruktur inklusif.



Sumber: Buku Sebaran Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Gambar 4.7. Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Surakarta Tahun 2024

j. Tuna Susila (TS)

Tuna Susila adalah individu yang menjalani aktivitas prostitusi/pelacuran akibat keterdesakan ekonomi dan sosial. Penyebab utama biasanya kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan eksploitasi seksual atau kekerasan masa lalu. Pada 2024, sebanyak 41 kasus tuna susila tercatat, seluruhnya perempuan—menjadi indikator ketimpangan dan ketidakadilan gender. Kelompok ini umumnya juga rentan terhadap kekerasan, penularan penyakit, dan stigma berlapis dari masyarakat. Pendekatan pemulihan psikologis, pelatihan keterampilan, dan perlindungan hukum urgen dilakukan agar mereka punya kesempatan hidup lebih baik.

k. Gelandangan

Gelandangan merupakan individu tanpa tempat tinggal tetap yang hidup berpindah dan tak punya penghasilan pasti. Faktor pendorong meliputi kemiskinan ekstrem, kegagalan migrasi, konflik keluarga, atau masalah kesehatan mental. Empat kasus gelandangan tercatat Surakarta tahun ini dan sering tersembunyi dari data resmi karena mobilitasnya yang tinggi. Gelandangan berisiko tinggi alami kekerasan serta kehilangan identitas hukum. Penyediaan shelter, dukungan kesehatan, dan rehabilitasi sosial perlu ditingkatkan.

l. **Pengemis**

Pengemis adalah individu atau kelompok yang meminta-minta di ruang publik bermodalkan belas kasihan. Faktor utama meliputi kemiskinan, disabilitas, usia lanjut, bahkan kadang bagian sindikat eksploitasi anak atau perempuan. Hanya satu pengemis tercatat di Surakarta 2024, namun angka bisa naik di musim tertentu seperti hari raya atau musim liburan. Alasannya beragam, mulai dari benar-benar kesulitan ekonomi hingga karena kebiasaan mendapat kebaikan dari masyarakat. Pemberdayaan ekonomi dan kampanye pemberian tepat sasaran perlu digalakkan agar masalah pengemis dapat ditekan.

m. **Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)**

Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan menghadapi tantangan adaptasi ketika keluar dari tahanan karena stigma masyarakat, minim dukungan keluarga, dan sulit memperoleh pekerjaan layak. Sebanyak 15 orang masuk kategori ini tahun 2024 di Surakarta. Hambatan integrasi sosial sering kali memunculkan ciri lingkaran setan: susah mencari nafkah akhirnya kembali melakukan pelanggaran hukum. Kondisi sosial ekonomi yang belum ramah bekas napi membuat keterampilan dan pendampingan pasca-lapas sangat penting. Intervensi lintas sektor berupa pelatihan, pendampingan keluarga, sampai perubahan persepsi sosial harus terus ditingkatkan.

n. **Korban Penyalahgunaan Napza**

Korban penyalahgunaan napza alami gangguan kesehatan fisik, mental, serta dampak sosial ekonomi akibat konsumsi narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Lingkungan pergaulan negatif, tekanan keluarga, dan lemahnya edukasi pencegahan menjadi pemicu utamanya. Tiga kasus korban napza tercatat tahun 2024, namun di level kota angka riil bisa lebih banyak apabila pendataan dan penjangkauan lebih optimal. Korban napza rentan kembali ke lingkaran narkoba dan tindak kriminal jika tidak dapat pemulihan memadai. Layanan rehabilitasi, penyuluhan, dan pemberdayaan sosial amat penting agar mereka dapat hidup sehat dan produktif kembali.

o. Korban Tindak Kekerasan

Korban tindak kekerasan dewasa mengalami kekerasan fisik, mental, ataupun seksual akibat relasi kuasa yang tidak setara, patriarkisme, dan lemahnya sistem perlindungan hukum. Tiga kasus muncul Surakarta tahun 2024, sementara banyak korban memilih diam karena takut stigma atau ancaman lanjutan. Kekerasan sering terjadi berulang dan menimbulkan trauma, sulit dipulihkan tanpa dukungan berarti. Akses bantuan hukum, konseling psikososial, dan perlindungan darurat harus diberikan dalam waktu singkat. Tokoh agama, tokoh masyarakat dan organisasi perempuan perlu dilibatkan dalam penanganan serta pencegahan.

p. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)

Pekerja migran bermasalah sosial alami kesulitan hukum, ekonomi, hingga psikologis setelah bekerja di luar negeri. Sumber masalah meliputi penipuan agen, ketidaktahuan soal hak, atau eksploitasi kerja di negara tujuan. Tidak ditemukan kasus migran bermasalah di Surakarta tahun ini, meski kota ini dikenal sebagai daerah asal migrant dan tujuan kembalinya eks-migran. Sosialisasi hak dan kewajiban, pelatihan pra-keberangkatan, serta penyediaan layanan pengaduan dan advokasi tetap perlu dijaga kuantitas dan kualitasnya. Program perlindungan migran dan keluarga secara konsisten menjadi kunci agar kasus serupa tak muncul di masa depan.

q. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Perempuan rawan sosial ekonomi merupakan perempuan, seperti janda atau kepala keluarga, yang menghadapi kerentanan akibat terbatasnya akses ekonomi dan sosial. Penyebabnya antara lain diskriminasi gender, rendahnya pendidikan, kurangnya modal, hingga hilangnya pasangan hidup yang menopang nafkah keluarga. Tujuh perempuan tercatat masuk kategori ini tahun 2024, sementara angka riil bisa lebih banyak tanpa pelaporan yang optimal. Tantangan mereka sangat berat karena risiko eksploitasi serta kemiskinan berlapis. Bantuan modal, pendidikan keterampilan, dan akses jaringan perlindungan sosial harus diperbanyak agar mereka lebih mandiri dan sejahtera.

r. Fakir Miskin

Fakir miskin menggambarkan individu/keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Kemiskinan umumnya dipicu pendidikan rendah, langkanya lapangan kerja, masalah kesehatan keluarga, serta tekanan ekonomi kota besar. Surakarta mencatat jumlah fakir miskin sangat tinggi, yakni 71.225 jiwa, menjadi persoalan terbesar PMKS. Kemiskinan sering berujung pada masalah sosial lain seperti anak jalanan, putus sekolah, hingga kriminalitas. Penanganan sistemik dan kolaboratif dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat diperlukan agar fakir miskin tidak terus menjadi masalah lintas generasi.

s. **Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis**

Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang mengalami konflik, kekerasan rumah tangga, masalah mental, hingga kegagalan fungsi pengasuhan dalam keluarga. Penyebab utama terdiri dari tekanan ekonomi, komunikasi yang buruk, trauma masa lalu, hingga kurangnya pendidikan tentang kesehatan mental. Surakarta mencatat empat keluarga pada tahun 2024, dan keluarga ini sangat berisiko melahirkan masalah sosial baru seperti anak terlantar atau korban kekerasan. Keluarga dengan masalah semacam ini memerlukan dukungan konseling keluarga, layanan kesehatan mental, serta edukasi berkelanjutan. Kemandirian emosional dan pemahaman pengelolaan konflik jadi kunci kesehatan keluarga jangka panjang.

2. **Program Keluarga Harapan**

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan sosial bersyarat yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan rentan melalui bantuan tunai serta peningkatan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di beberapa kecamatan dan kelurahan dari tahun 2023 hingga proyeksi tahun 2025, terlihat adanya tren peningkatan jumlah penerima di hampir seluruh wilayah. Kecamatan Banjarsari menjadi wilayah dengan jumlah penerima PKH tertinggi sepanjang periode ini, dengan angka meningkat dari 6.640 pada 2023 menjadi 8.987 pada 2025. Hal ini menunjukkan kebutuhan bantuan sosial yang cukup besar di kecamatan tersebut, yang terdiri dari 15 kelurahan dengan berbagai tingkat pertumbuhan penerima.

Kecamatan Jebres juga mencatat kenaikan signifikan dari 5.473 penerima pada 2023 menjadi 7.724 pada 2025. Kelurahan Mojosoongo dan Kelurahan Jebres menjadi penyumbang utama angka tertinggi, dengan masing-masing penerima melebihi seribu kepala keluarga pada 2025. Peningkatan serupa terjadi pula di Kecamatan Pasar Kliwon, di mana jumlah penerima naik dari 3.881 pada 2023 menjadi 5.481 pada 2025. Kelurahan Semanggi dan Mojo mencatat kenaikan signifikan, yang menggambarkan karakteristik sosial ekonomi wilayah tersebut.

Pada Kecamatan Laweyan dan Serengan terjadi peningkatan jumlah penerima PKH. Kecamatan Laweyan naik dari 2.878 penerima tahun 2023 menjadi 4.149 penerima pada 2025, sementara Kecamatan Serengan meningkat dari 1.996 menjadi 2.810 penerima dalam periode yang sama. Peningkatan ini menggambarkan adanya kebutuhan yang terus bertambah untuk mendapatkan bantuan sosial, terutama di kelurahan-kelurahan seperti Kelurahan Pajang di Kecamatan Laweyan dan Kelurahan Joyotakan di Kecamatan Serengan.

Tabel 4.9

Jumlah Penerima PKH menurut Kelurahan Kota Surakarta Tahun 2023-2025

Kelurahan	Jumlah Penerima PKH		
	2023	2024	2025**
1. Pajang	705	665	990
2. Laweyan	82	239	112
3. Bumi	195	180	283
4. Panularan	318	291	500
5. Sriwedari	100	100	138
6. Penumping	73	64	114
7. Purwosari	253	238	369
8. Sondakan	421	376	614
9. Kerten	250	239	334
10. Jajar	230	212	345
11. Karangasem	251	242	350
Kecamatan Laweyan	2.878	2685	4149
1. Joyotakan	403	370	567
2. Danukusuman	413	376	562

	Jumlah Penerima PKH		
--	---------------------	--	--

Kelurahan	2023	2024	2025**
3. Serengan	387	316	555
4. Tipes	492	432	694
5. Kratonan	159	162	231
6. Jayengan	64	57	93
7. Kemlayan	78	74	108
Kecamatan Serengan	1.996	1787	2810
1. Joyosuran	441	433	650
2. Semanggi	1.210	1155	1618
3. Pasar Kliwon	166	161	270
4. Baluwarti	249	239	341
5. Gajahan	96	90	123
6. Kauman	56	51	77
7. Kampung Baru	82	83	113
8. Kedung Lumbu	201	193	271
9. Sangkrah	641	616	982
10. Mojo	739	685	1036
Kecamatan Pasar Kliwon	3.881	3712	5481
1. Kepatihan Kulon	104	95	144
2. Kepatihan Wetan	77	64	101
3. Sudiroprajan	179	171	255
4. Gandekan	512	493	766
5. Sewu	393	374	534
6. Pucangsawit	717	679	987
7. Jagalan	524	494	793
8. Purwodiningratan	230	214	298
9. Tegalharjo	148	143	207
10. Jebres	1.155	1017	1604
11. Mojosongo	1.434	1375	2035
Kecamatan Jebres	5.473	5129	7724
1. Mangkubumen	243	222	380

Kelurahan	Jumlah Penerima PKH		
	2023	2024	2025**
2. Timuran	64	63	109
3. Keprabon	77	72	101
4. Ketelan	201	192	258
5. Punggawan	128	125	166
6. Kestalan	104	97	140
7. Setabelan	120	116	177
8. Gilingan	953	910	1303
9. Manahan	225	214	335
10. Sumber	538	508	793
11. Nusukan	1.282	1223	1716
12. Kadipiro	959	933	1235
13. Banyuanyar	460	438	603
14. Joglo	600	570	803
15. Banjarsari	686	648	868
Kecamatan Banjarsari	6.640	6331	8987

Keterangan: **Angka Sangat Sementara

Data tersebut mengindikasikan upaya pemerintah daerah dalam memperluas cakupan bantuan sosial melalui PKH agar lebih banyak keluarga yang terdampak ekonomi bisa menerima dukungan. Kenaikan jumlah penerima dari tahun ke tahun juga menjadi sinyal adanya dinamika sosial ekonomi yang memerlukan intervensi berkelanjutan. Selain itu, distribusi penerima yang merata antar kelurahan menunjukkan pemerataan bantuan yang relatif baik. Dengan adanya data ini, perencanaan dan evaluasi program sosial dapat dilakukan secara lebih terfokus pada wilayah dengan kebutuhan tertinggi, sehingga program ini dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Identifikasi Tingkat Ketimpangan Kesejahteraan

5.1.1. Dimensi Ekonomi

Dimensi ekonomi merupakan salah satu pilar utama dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Aspek ini berkaitan erat dengan kapasitas individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, merencanakan masa depan, serta menghindari kerentanan ekonomi. Secara umum, pendapatan rumah tangga, jenis pekerjaan, stabilitas finansial, dan kemampuan dalam mengelola pengeluaran merupakan indikator penting yang mencerminkan kesejahteraan dari sisi ekonomi. Dalam konteks perkotaan seperti Surakarta, dinamika ekonomi rumah tangga menjadi semakin kompleks seiring dengan naiknya biaya hidup, kompetisi kerja, dan tuntutan terhadap pendidikan serta kesehatan yang semakin tinggi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat tidak bisa hanya dilihat dari angka pendapatan semata, melainkan juga dari struktur pengeluaran, stabilitas sumber penghasilan, dan kemampuan merespons risiko ekonomi. Masyarakat dengan pekerjaan formal cenderung memiliki pola konsumsi yang lebih stabil, sedangkan mereka yang bergantung pada sektor informal mengalami ketidakpastian yang tinggi dalam pendapatan hariannya. Selain itu, sumber ekonomi alternatif seperti usaha sampingan dan transfer dari anggota keluarga lain juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan rumah tangga, terutama di tengah tekanan ekonomi pascapandemi.

Dimensi ekonomi juga berhubungan erat dengan akses terhadap lembaga keuangan, tabungan, asuransi sosial, dan kemampuan dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Dalam wawancara dengan beberapa keluarga ASN dan pegawai kelurahan, terlihat bahwa adanya penghasilan tetap memungkinkan mereka untuk mengalokasikan sebagian pendapatan untuk pendidikan anak dan dana darurat. Sebaliknya, keluarga dengan penghasilan tidak tetap terutama dari sektor informal menunjukkan kecenderungan untuk mengutamakan konsumsi harian, sehingga minim ruang untuk menabung atau mengantisipasi kejadian darurat.

Kesenjangan dalam dimensi ekonomi ini juga menunjukkan adanya ketimpangan struktural yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, status pekerjaan, serta jejaring sosial-ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing rumah tangga. Ketimpangan ekonomi yang dialami oleh keluarga miskin struktural bahkan menyebabkan terjadinya *intergenerational poverty*, atau kemiskinan yang berulang antar generasi, karena keterbatasan dalam investasi sumber daya manusia. Oleh karena itu, dimensi ekonomi tidak hanya menjadi refleksi dari kondisi saat ini, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam membentuk peluang masa depan keluarga dan keberlanjutan kesejahteraan lintas generasi. Pendekatan ini sekaligus menegaskan pentingnya kebijakan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan pendapatan, tetapi juga memastikan distribusi penghasilan yang merata dan perlindungan ekonomi yang memadai bagi kelompok rentan.

5.1.1.1. Distribusi Pendapatan dan Pengeluaran Keluarga

Distribusi pendapatan di Kota Surakarta mencerminkan adanya disparitas antara kelompok rumah tangga yang memiliki penghasilan tetap dari sektor formal dan mereka yang bergantung pada pendapatan tidak tetap. Mayoritas keluarga dengan pekerjaan formal seperti ASN, guru, atau pegawai kelurahan menyatakan bahwa penghasilan bulanan mereka mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pendapatan mereka umumnya berasal dari gaji pokok, tunjangan jabatan, serta insentif atau tambahan dari usaha sampingan. Seperti yang dicontohkan oleh Pak Supyanto, seorang lurah, yang mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, menyisihkan penghasilan untuk tabungan, dan tetap menjaga kestabilan keuangan rumah tangga melalui perencanaan.

Sebaliknya, keluarga seperti Ibu Ratnadyah Kusumawati yang bekerja sebagai guru SMP menghadapi tekanan finansial akibat perubahan siklus pendapatan rumah tangga, terutama karena suaminya telah pensiun. Dukungan dari anak yang telah bekerja menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan ekonomi keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang bekerja di sektor formal, faktor-faktor seperti perubahan status pekerjaan pasangan, beban tanggungan, dan biaya hidup turut memengaruhi stabilitas ekonomi rumah tangga. Ketergantungan pada pendapatan tunggal tanpa adanya penguatan struktur pengeluaran dapat menyebabkan rumah tangga tetap rentan.

Ketimpangan menjadi semakin jelas dalam keluarga yang bekerja di sektor informal, seperti yang dialami oleh Pak Kuspriyanto dari Panularan, yang mengandalkan pekerjaan serabutan atau freelance. Pendapatan yang bersifat tidak tetap dan tergantung pada permintaan dari orang lain membuat perencanaan ekonomi jangka panjang menjadi sulit dilakukan. Kondisi ini diperparah apabila rumah tangga masih memiliki anak usia sekolah atau anggota keluarga yang tidak produktif. Banyak keluarga dalam kondisi seperti ini harus bergantung pada bantuan sosial pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan KIS.

Pengeluaran terbesar bagi mayoritas keluarga di semua wilayah mencakup konsumsi harian (makanan, listrik, transportasi), pendidikan anak, dan kesehatan. Meskipun banyak keluarga telah menjadi peserta BPJS, beberapa responden menyatakan bahwa layanan kesehatan darurat atau rujukan yang rumit tetap mendorong mereka untuk mengeluarkan biaya pribadi. Hal ini menandakan bahwa sistem jaminan sosial belum sepenuhnya menyentuh aspek perlindungan yang komprehensif. Di sisi lain, hanya sebagian keluarga yang mampu menyisihkan dana untuk tabungan dan investasi masa depan. Responden seperti Suryatiningsih menyatakan bahwa stabilitas ekonomi hanya mungkin dicapai jika pengeluaran dikelola secara bijak dan tidak hanya bergantung pada satu sumber pendapatan.

Strategi bertahan hidup pun sangat bervariasi antara satu keluarga dan lainnya. Keluarga ASN/PNS cenderung memiliki struktur keuangan yang lebih tertata, dengan pengalokasian untuk tabungan dan dana pendidikan. Sementara itu, keluarga yang menjalankan usaha sampingan seperti warung atau konter pulsa memanfaatkan peluang tersebut sebagai jaring pengaman tambahan. Keluarga rentan sangat bergantung pada program sosial dan kadang harus memilih antara kebutuhan anak dan kebutuhan rumah tangga lainnya, mencerminkan *trade-off* keseharian yang menggambarkan struktur ketimpangan kesejahteraan secara nyata.

Gambaran dari sisi pengeluaran menunjukkan adanya pola yang relatif konsisten di hampir seluruh wilayah Kota Surakarta, baik pada rumah tangga dengan status ekonomi menengah maupun keluarga rentan. Secara umum, pengeluaran rumah tangga didominasi oleh empat komponen utama yang mencerminkan kebutuhan dasar sekaligus tantangan kesejahteraan yang dihadapi masyarakat sehari-hari.

1. Kebutuhan pokok dan rumah tangga, seperti konsumsi makanan, biaya listrik, air bersih, serta transportasi harian, merupakan pos pengeluaran terbesar. Hampir semua responden menyatakan bahwa kebutuhan ini bersifat wajib dan tidak fleksibel dalam pengelolaannya. Komponen ini menghabiskan sebagian besar pendapatan bulanan, terutama pada keluarga dengan jumlah anggota yang besar.
2. Pendidikan anak juga menjadi beban tetap yang signifikan. Pengeluaran ini meliputi biaya sekolah, pembelian seragam, alat tulis, buku pelajaran, iuran ekstrakurikuler, serta ongkos transportasi ke sekolah. Beban tersebut semakin terasa berat bagi keluarga dengan lebih dari satu anak usia sekolah. Meskipun beberapa telah menerima bantuan dari Kartu Indonesia Pintar (KIP), banyak keluarga menyatakan bahwa bantuan tersebut belum mampu menutup seluruh biaya pendidikan.
3. Kesehatan menjadi dimensi penting yang tak terelakkan dalam pengeluaran rumah tangga. Sebagian besar responden telah terdaftar sebagai peserta BPJS, namun dalam praktiknya mereka masih menghadapi kendala, seperti sistem rujukan yang lambat, antrean panjang, serta keterbatasan layanan gawat darurat. Beberapa keluarga, seperti keluarga Pak Agus dari Semanggi dan Ibu Rika dari DLH, mengaku terpaksa mengeluarkan dana pribadi saat menghadapi situasi darurat atau saat layanan BPJS tidak dapat digunakan secara optimal.
4. Tabungan dan dana darurat, meskipun bukan prioritas utama bagi seluruh rumah tangga, tetap menjadi elemen penting dalam perencanaan ekonomi jangka panjang. Sebagian responden menyadari pentingnya menabung, terutama untuk kebutuhan mendadak atau masa depan anak. Responden seperti Ibu Suryatiningsih menekankan bahwa pengelolaan pengeluaran yang bijak hanya bisa dilakukan jika ada perencanaan yang mencakup cadangan keuangan, meskipun dalam jumlah kecil.

Melihat dari dimensi adaptasi sosial-ekonomi, rumah tangga di Surakarta menunjukkan strategi bertahan yang bervariasi tergantung pada status pekerjaan, jumlah tanggungan, dan tingkat pendapatan.

5.1.1.2. Kepemilikan Aset Produktif (Tanah, Usaha, Tabungan)

Kepemilikan aset produktif merupakan indikator penting dalam mengukur stabilitas ekonomi rumah tangga serta menjadi refleksi nyata dari ketimpangan sosial-

ekonomi yang terjadi di wilayah perkotaan seperti Kota Surakarta. Aset-aset seperti rumah, tanah, tabungan, dan usaha sampingan bukan hanya berfungsi sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai penopang daya tahan keluarga terhadap krisis dan guncangan hidup. Dalam konteks masyarakat urban yang dinamis dan kompetitif, kepemilikan aset sering kali menentukan sejauh mana suatu keluarga mampu bertahan, berkembang, dan melakukan mobilitas sosial ke arah yang lebih sejahtera. Berdasarkan wawancara mendalam dengan warga dari beragam latar belakang sosial dan ekonomi, ditemukan bahwa akses terhadap aset-aset ini sangat bervariasi, dan mencerminkan garis pemisah yang tajam antara keluarga yang mapan secara ekonomi dan kelompok yang masih berada dalam kondisi rentan.

Sebagian besar keluarga dengan latar belakang pekerjaan formal seperti ASN, guru, dan pegawai pemerintah menunjukkan tingkat kepemilikan aset yang relatif lebih baik. Mereka umumnya telah memiliki rumah tinggal, bahkan sejak sebelum menikah, baik melalui pembelian dari hasil kerja maupun warisan keluarga. Kondisi ini memberi rasa aman finansial yang memungkinkan penghasilan digunakan untuk kebutuhan lainnya seperti pendidikan dan kesehatan, tanpa harus dibebani oleh sewa atau cicilan. Sebaliknya, keluarga dengan penghasilan tidak tetap atau bekerja di sektor informal mengalami kesulitan dalam membangun kepemilikan aset. Banyak yang masih tinggal di rumah kontrakan, rumah petak warisan yang sempit, atau bahkan harus menumpang di rumah keluarga besar. Pola ini memperlihatkan bagaimana struktur sosial dan jenis pekerjaan berdampak langsung terhadap kemampuan individu atau keluarga dalam mengakses sumber daya produktif. Dengan demikian, ketimpangan dalam kepemilikan aset bukan hanya persoalan ekonomi mikro, tetapi juga berkaitan erat dengan akses struktural terhadap kesempatan, warisan sosial, dan keterhubungan dengan institusi formal.

5.1.1.3. Kepemilikan Rumah: Aset Tempat Tinggal dan Ketahanan Ekonomi

Kepemilikan rumah menjadi salah satu bentuk aset paling krusial dalam menjamin stabilitas ekonomi keluarga. Rumah tidak hanya dipandang sebagai tempat tinggal fisik, tetapi juga sebagai simbol keberhasilan ekonomi dan jaminan keamanan sosial. Mayoritas responden menyatakan telah memiliki rumah tinggal sendiri, baik yang diperoleh melalui

pembelian selama masa kerja maupun sebagai warisan keluarga. Bagi keluarga seperti Bu Yulianti, rumah yang diwariskan dari orang tua menjadi aset penting yang mengurangi beban finansial, terutama pada masa pensiun. Dengan tidak adanya kewajiban membayar sewa atau cicilan, keluarga tersebut dapat memfokuskan pengeluaran pada kebutuhan kesehatan, pendidikan anak cucu, serta tabungan.

Situasi ini tidak merata di seluruh kota. Beberapa warga masih tinggal di rumah kontrakan, rumah petak sempit, atau rumah yang sudah dibagi-bagi oleh ahli waris menjadi unit kecil yang kurang layak. Fenomena ini banyak ditemui di wilayah padat penduduk seperti Panularan dan Mojosongo, di mana tekanan ekonomi tinggi menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk membeli atau membangun rumah sendiri. Warga seperti Pak Agus dari Semanggi masih mencicil rumah, tetapi tetap merasa lebih stabil secara ekonomi karena memiliki aset yang perlahan-lahan menjadi milik pribadi. Realitas ini mengindikasikan bahwa kepemilikan rumah menjadi garis pembeda penting antara keluarga dengan kestabilan ekonomi dan mereka yang rentan terhadap guncangan finansial.

5.1.1.4. Aset Tanah: Potensi Ekonomi yang Belum Tergarap

Kepemilikan tanah, terutama tanah warisan, juga menjadi indikator penting dalam kajian ketimpangan kesejahteraan. Sekitar 40% responden menyatakan memiliki tanah warisan, namun sebagian besar belum mampu mengelolanya secara produktif. Lahan-lahan ini sering kali berada dalam kondisi tidak tergarap, atau hanya dianggap sebagai cadangan masa depan. Kasus seperti yang dialami Ibu Dyah dari Kecamatan Jebres menunjukkan bahwa meskipun memiliki tanah kosong, keterbatasan modal dan keterampilan menjadi penghalang dalam mengubah lahan tersebut menjadi sumber pendapatan. Akibatnya, aset tersebut menjadi "aset diam" yang hanya berfungsi sebagai simpanan pasif.

Berbeda dengan tanah sawah atau kebun yang langsung menghasilkan hasil panen, tanah kosong di kawasan urban Surakarta kerap tidak memiliki nilai produktif

harian. Banyak warga merasa enggan menjualnya karena alasan warisan atau nilai sentimental, namun juga tidak memiliki kapasitas atau akses ke pembiayaan untuk mengembangkannya. Situasi ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam pemanfaatan aset antarkelompok masyarakat di mana kelas ekonomi menengah atas memiliki kemampuan modal untuk mengembangkan aset, sedangkan kelas bawah tidak. Padahal, jika tanah tersebut dikelola secara tepat, bisa menjadi instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.

5.1.1.5. Aset Usaha Sampingan: Penyangga Ekonomi yang Rentan

Selain rumah dan tanah, sebagian keluarga di Surakarta memiliki usaha sampingan kecil sebagai bentuk diversifikasi ekonomi. Sekitar 20% responden menyebutkan bahwa mereka menjalankan usaha seperti toko kelontong, usaha lemon, konter pulsa, atau produksi kerajinan daur ulang. Usaha ini, meskipun berskala mikro, berfungsi sebagai penyangga ekonomi yang penting terutama ketika penghasilan utama mengalami penurunan. Ibu Yena Anggarwijaya dari Kecamatan Banjarsari, misalnya, menjadikan usaha lemon sebagai penopang penghasilan keluarga di samping pekerjaan utamanya sebagai staf kecamatan. Demikian pula Bu Rika dari DLH memanfaatkan waktu luangnya untuk berdagang sebagai tambahan pendapatan.

Usaha kecil tersebut tidak selalu mampu bertahan dalam jangka panjang. Banyak keluarga menghadapi kesulitan dalam manajemen usaha, akses modal, hingga daya saing pasar yang ketat. Contohnya adalah keluarga Pak Agus dari Semanggi, yang pernah menjalankan usaha konter pulsa namun akhirnya tutup karena tidak mampu bertahan menghadapi persaingan dan masalah internal. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan pelatihan usaha, pendampingan, dan akses terhadap permodalan mikro, usaha kecil berisiko tinggi untuk gagal. Oleh karena itu, program penguatan UMKM perlu menysasar kelompok-kelompok ini secara tepat guna dan berbasis komunitas.

5.1.1.6. Aset Keuangan: Tabungan dan Dana Darurat

Aset finansial dalam bentuk tabungan, dana darurat, atau investasi sederhana menjadi dimensi lain dari ketahanan ekonomi rumah tangga. Sekitar 30% responden menyatakan secara rutin menyisihkan penghasilan untuk ditabung. Keluarga seperti Ibu

Ratnadyah Kusumawati, Supyanto, dan Suryatiningsih, yang semuanya bekerja di sektor formal, menekankan pentingnya perencanaan keuangan yang sehat sebagai langkah antisipasi terhadap risiko mendadak, seperti biaya pendidikan atau sakit. Tabungan menjadi bentuk ketahanan mikro yang sangat penting, terlebih di tengah situasi ekonomi yang tidak stabil.

Keluarga yang berpenghasilan tidak menentu, seperti Kuspriyanto dari Panularan, mengaku tidak mampu menabung karena seluruh penghasilan habis untuk kebutuhan harian. Bahkan, dalam beberapa kasus, warga bergantung pada utang mikro atau pinjaman dari keluarga untuk menutupi biaya sekolah atau berobat. Fenomena ini memperlihatkan adanya jurang signifikan dalam kemampuan perencanaan keuangan antar kelas ekonomi. Ketimpangan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses terhadap literasi keuangan, layanan perbankan, dan produk keuangan mikro yang inklusif.

5.1.1.7. Ketimpangan Aset dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan

Analisis terhadap pola kepemilikan dan pengelolaan aset produktif mengungkapkan adanya stratifikasi ekonomi yang tajam di tengah masyarakat perkotaan. Akses terhadap rumah, tanah, usaha sampingan, dan tabungan mencerminkan lebih dari sekadar status ekonomi tetapi juga akumulasi modal sosial, jaringan, pendidikan, serta akses pada kebijakan negara. Keluarga yang berada dalam jaringan formal (PNS/ASN/guru) cenderung memiliki stabilitas yang lebih kuat dibandingkan mereka yang berada dalam sektor informal. Ketimpangan ini pada akhirnya berkontribusi terhadap diferensiasi dalam kualitas hidup, peluang mobilitas sosial, dan daya tahan terhadap krisis.

Implikasi kebijakan dari temuan ini menuntut pendekatan yang lebih progresif dalam redistribusi akses dan dukungan terhadap pemanfaatan aset. Pemerintah kota dapat mendorong pemberdayaan tanah kosong melalui insentif pajak, pelatihan kewirausahaan berbasis komunitas, serta mendorong literasi keuangan di kelompok masyarakat miskin kota. Selain itu, penguatan program perlindungan sosial dan fasilitasi permodalan mikro menjadi langkah strategis untuk mendorong aset pasif menjadi produktif. Ketimpangan dalam kepemilikan dan pengelolaan aset produktif bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut keadilan struktural dalam pembangunan kota yang inklusif.

Tabel 5.1 Perbandingan Kepemilikan dan Pengelolaan Aset Produktif Rumah Tangga di Kota Surakarta

Jenis Keluarga / Status Sosial Ekonomi	Kepemilikan Rumah	Kepemilikan Tanah	Aset Usaha Sampingan	Tabungan / Dana Darurat	Implikasi terhadap Stabilitas Ekonomi
ASN/PNS (Formal dan Pensiunan)	Milik sendiri (penuh / warisan)	Ada (warisan atau beli)	Ada (warung, lemon, dll.)	Ada (rutin menyalurkan)	Tinggi: mampu merencanakan masa depan dan menghadapi krisis
Guru / Pegawai Kontrak	Milik sendiri / cicilan	Terbatas / tidak ada	Terbatas (usaha mikro skala kecil)	Terbatas / bergantung dukungan keluarga	Sedang: stabil tapi rentan jika ada pengeluaran tak terduga
Pekerja Informal / Serabutan	Sewa / rumah petak / warisan sempit	Tidak ada / belum produktif	Tidak ada / pernah tapi tutup	Tidak ada / bergantung pinjaman	Rendah: sangat rentan terhadap tekanan ekonomi harian
Usaha Mikro Aktif	Milik sendiri / keluarga	Ada tapi belum optimal	Aktif (usaha rumah tangga)	Terbatas (hasil usaha kecil)	Sedang: fleksibel namun bergantung dinamika pasar
Warga Lansia (pensiunan tanpa tabungan)	Warisan keluarga	Ada tapi tidak produktif	Tidak ada	Terbatas / tidak ada	Menengah ke bawah: stabil tapi tidak ada kapasitas menabung atau investasi

5.1.1.8. Akses terhadap Pekerjaan Layak dan Perlindungan Sosial (BPJS)

Pekerjaan dan jaminan sosial merupakan dua pilar fundamental dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Keduanya tidak hanya menentukan daya beli dan ketahanan ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas hidup serta ketimpangan sosial-ekonomi dalam suatu wilayah. Hasil temuan dari wawancara mendalam di berbagai wilayah di Kota Surakarta menunjukkan adanya perbedaan nyata dalam akses dan kualitas pekerjaan, yang berdampak langsung pada seberapa besar perlindungan sosial yang bisa dinikmati oleh tiap individu atau rumah tangga. Akses terhadap pekerjaan yang layak mencakup upah memadai, stabilitas kerja, dan jaminan sosial ternyata masih sangat dipengaruhi oleh status pekerjaan (formal/informal), lokasi geografis (pusat/pinggiran kota), serta kekuatan jejaring sosial dan kelembagaan lokal. Dalam konteks ini, kelompok yang bekerja di sektor formal seperti ASN,

guru, atau pegawai tetap pemerintah berada dalam posisi yang lebih terlindungi secara ekonomi dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal atau serabutan.

Contoh nyata terlihat dari sosok seperti Pak Supyanto, seorang Lurah di salah satu kelurahan di Surakarta, yang menyatakan bahwa stabilitas pendapatan bulanan yang ia terima memungkinkan keluarganya hidup dengan aman, merencanakan pendidikan anak, dan memiliki tabungan darurat. Cerita serupa juga datang dari Ibu Ratnadyah Kusumawati, seorang guru SMP, yang mengandalkan gaji tetap serta dukungan anak pasca suami pensiun untuk mempertahankan keseimbangan finansial keluarga. Tidak semua warga memiliki *privilege* yang sama. Narasi berbeda muncul dari kelompok pekerja informal, seperti Pak Kuspriyanto dari Panularan yang bekerja sebagai tenaga lepas jasa penagihan. Ia menggambarkan kondisi kerja yang penuh ketidakpastian dan bergantung pada permintaan harian. Lingkungan dengan kondisi ekonomi yang lebih rapuh, seperti Mojosongo, para pekerja yang terdampak PHK massal akibat penurunan sektor industri mengandalkan bantuan sosial sebagai penyangga hidup. Ketimpangan inilah yang menciptakan diferensiasi tajam dalam kualitas perlindungan sosial dan kemampuan adaptasi rumah tangga terhadap risiko ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan yang layak dan sistem jaminan sosial yang inklusif belum merata dirasakan, dan menjadi tantangan serius dalam upaya mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan di Kota Surakarta.

Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa perlindungan sosial di Surakarta belum menyentuh semua aspek kebutuhan warga. Banyak responden menyampaikan bahwa mereka sudah memiliki kartu BPJS atau KIS, tetapi tidak selalu bisa menggunakannya secara optimal. Prosedur yang kaku, kurangnya pemahaman, serta ketidaksesuaian sistem data antarinstansi menjadi hambatan yang cukup signifikan. Beberapa responden, seperti dari Panularan dan Mojo, menyebut bahwa program bantuan sosial seperti PKH, bansos pendidikan, dan jaminan kesehatan sudah menjangkau warga rentan, tetapi masih ada keluarga yang luput dari pendataan. Ada pula warga yang tidak benar-benar membutuhkan tetapi tetap menerima bantuan karena masalah akurasi data atau kedekatan dengan pengurus lokal.

5.1.1.9. Pemetaan Jenis Pekerjaan dan Status Sosial

Struktur pekerjaan masyarakat di Kota Surakarta mencerminkan keberagaman kelas sosial yang kompleks. Responden yang bekerja di sektor formal, seperti ASN, guru, dan pegawai BUMD, umumnya menunjukkan stabilitas ekonomi yang relatif lebih baik. Kelompok ini tidak hanya menerima penghasilan tetap, tetapi juga mendapatkan berbagai tunjangan, seperti tunjangan kinerja, pensiun, serta akses langsung ke jaminan sosial dan kesehatan. Mereka juga lebih leluasa dalam perencanaan keuangan jangka panjang dan memiliki ruang untuk investasi produktif. Sebagai contoh, keluarga Ibu Ratnadyah, seorang guru, mampu menyisihkan sebagian pendapatannya untuk tabungan dan keperluan pendidikan anak, bahkan setelah suami memasuki masa pensiun. Situasi ini menunjukkan adanya korelasi antara jenis pekerjaan dan tingkat keamanan sosial-ekonomi rumah tangga.

Kelompok pekerja di sektor informal menghadapi dinamika kerja yang sangat fluktuatif. Pekerja lepas, seperti Pak Kuspriyanto, sering kali tidak memiliki pendapatan tetap, bergantung pada kesempatan musiman, atau bahkan harian. Mereka tidak tercakup dalam sistem formal perlindungan sosial, dan dalam banyak kasus harus menanggung seluruh risiko kesehatan dan ekonomi sendiri. Di beberapa kecamatan seperti Mojosongo dan Panularan, warga banyak yang bekerja sebagai buruh pabrik atau pedagang kaki lima, yang terpaksa beralih ke pekerjaan informal setelah pemutusan hubungan kerja (PHK). Fenomena ini menunjukkan bahwa status pekerjaan menjadi faktor pembeda utama dalam menentukan seberapa besar akses seseorang terhadap jaminan sosial, kestabilan pendapatan, serta kapasitas untuk menghadapi risiko sosial-ekonomi yang tidak terduga.

5.1.1.10. Jangkauan dan Efektivitas Jaminan Sosial

Sebagian besar warga di Surakarta telah memiliki akses ke jaminan kesehatan seperti BPJS atau KIS, namun efektivitas perlindungan sosial ini masih menjadi persoalan yang belum tuntas. Banyak responden menyampaikan bahwa prosedur administratif yang rumit, ketidaksesuaian data kepesertaan, dan kurangnya pemahaman mengenai mekanisme layanan menjadi hambatan besar dalam memanfaatkan fasilitas tersebut. Misalnya, keluarga Pak Agus dari Semanggi menyatakan bahwa ketika harus dirujuk ke rumah sakit tingkat lanjut, mereka kerap mengalami kendala administratif yang menghambat proses pelayanan. Dalam beberapa kasus

darurat, keluarga terpaksa membayar layanan secara mandiri, karena sistem jaminan tidak dapat diakses dengan cepat.

Program bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan bansos pendidikan dinilai belum sepenuhnya merata dalam pendistribusiannya. Satu sisi, terdapat warga rentan yang sangat bergantung pada bantuan tersebut, namun tidak terdaftar karena tidak tercakup dalam data kependudukan yang diperbarui. Sisi lain, beberapa warga yang secara ekonomi relatif lebih mampu tetap menerima bantuan karena kedekatan sosial atau administratif dengan pihak kelurahan atau RT/RW. Hal ini menimbulkan ketimpangan baru dalam distribusi manfaat sosial, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap keadilan sistem bantuan pemerintah. Perbaikan sistem verifikasi, pembaruan data secara real-time, dan transparansi dalam proses distribusi sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan sosial di tingkat kota.

5.1.1.11. Strategi Bertahan Rumah Tangga Rentan

Ketidakpastian ekonomi, banyak keluarga di Surakarta menerapkan berbagai strategi bertahan untuk menjaga kelangsungan hidup rumah tangga. Strategi ini bervariasi tergantung pada kapasitas ekonomi, latar belakang pekerjaan, dan dukungan sosial yang dimiliki. Keluarga dengan penghasilan stabil umumnya dapat menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk dana darurat dan pendidikan anak. Sementara itu, keluarga dari sektor informal atau mereka yang tergolong rentan cenderung mengandalkan bantuan sosial sebagai penopang utama. Bahkan, dalam beberapa kasus, anak-anak di usia sekolah mulai bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, seperti yang diungkapkan oleh keluarga di wilayah Mojo dan Jebres.

Sebagian keluarga juga mencoba memulai usaha mikro sebagai penyangga ekonomi. Usaha kecil seperti toko kelontong, konter pulsa, penjualan minuman herbal, dan kerajinan daur ulang menjadi alternatif sumber pendapatan tambahan. Namun, usaha ini sangat bergantung pada daya beli masyarakat sekitar dan sering tidak memiliki dukungan modal maupun pelatihan kewirausahaan. Keluarga Pak Agus, yang pernah membuka konter pulsa, harus menutup usahanya karena persaingan yang tinggi dan kurangnya keterampilan manajerial. Kondisi ini menegaskan perlunya peran aktif dari pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi kewirausahaan, akses modal mikro, serta pelatihan bisnis berbasis komunitas agar usaha mikro benar-benar menjadi solusi jangka panjang, bukan sekadar respons jangka pendek atas krisis ekonomi.

Tabel 5.2 Perbandingan Jenis Pekerjaan, Akses Jaminan Sosial, dan Ketahanan Sosial-Ekonomi Rumah Tangga

Kategori Pekerjaan	Contoh Responden	Akses terhadap Jaminan Sosial	Stabilitas Pendapatan	Strategi Bertahan	Tingkat Ketahanan Sosial-Ekonomi
ASN/PNS (Formal Stabil)	Pak Supyanto (Lurah), Ibu Ratnadyah (Guru)	BPJS aktif, pensiun, tunjangan, PKP	Stabil dan terjamin	Menabung, investasi pendidikan, dana darurat	Tinggi – perencanaan keuangan jangka panjang berjalan
Non-PNS / Tenaga Honorer / Pegawai Kontrak	Ibu Rika (DLH), staf kecamatan	BPJS terbatas, tidak semua dapat pensiun	Stabil namun terbatas	Usaha sampingan (jualan lemon), dukungan pasangan	Sedang – pendapatan cukup namun tidak fleksibel
Pekerja Informal / Serabutan	Pak Kuspriyanto (freelancer Panularan)	Tidak semua terdaftar BPJS; rentan	Tidak tetap, tergantung permintaan	Mengandalkan bantuan sosial (PKH, KIS), utang keluarga	Rendah – rawan krisis ekonomi, tidak bisa menabung
Pensiunan	Bu Yulianti (pensiunan guru)	Pensiun, BPJS aktif	Tetap namun terbatas	Hemat pengeluaran, tinggal di rumah sendiri (warisan)	Sedang ke tinggi – aman karena aset rumah dimiliki
Usaha Mikro / Sampingan	Bu Yena (usaha herbal), Pak Agus (eks konter pulsa)	Tergantung pada pekerjaan utama	Fluktuatif	Jualan, daur ulang, subsidi silang	Sedang – usaha rentan jika tidak dibina
Buruh Pabrik / PHK	Warga Mojosongo, Pak Andi Suwarno	BPJS (kadang non-aktif setelah PHK)	Hilang saat PHK	Bertumpu pada pekerjaan anak / jualan kecil	Rendah – sangat tergantung bantuan luar

5.1.1.12. Perbandingan antar Wilayah Kecamatan dan Kelompok Masyarakat

Ketimpangan kesejahteraan di Kota Surakarta tidak hanya tampak dalam perbedaan tingkat pendapatan individu atau keluarga, tetapi juga dalam dimensi spasial yang lebih luas antar wilayah kelurahan dan kecamatan. Temuan lapangan menunjukkan adanya variasi yang sangat tajam dalam struktur sosial-ekonomi, akses terhadap layanan dasar, kepemilikan aset, serta ketahanan ekonomi rumah tangga. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembangunan

kawasan, pola distribusi pekerjaan formal dan informal, serta efektivitas intervensi pemerintah dalam mengelola pelayanan publik. Wilayah seperti Pajang dan Karangasem di Kecamatan Laweyan menunjukkan karakteristik sebagai kantong stabilitas ekonomi, di mana penduduknya sebagian besar bekerja di sektor formal dan memiliki rumah serta tabungan. Wilayah seperti Mojosongo dan Panularan menggambarkan wajah kerentanan urban, yang ditandai dengan pekerjaan tidak tetap, sanitasi buruk, dan akses terbatas terhadap jaminan sosial. Ini menunjukkan bahwa peta ketimpangan di Surakarta bukan hanya bersifat individu, tetapi juga kolektif dan terstruktur secara spasial.

Perbedaan kondisi antar wilayah ini mencerminkan realitas bahwa program pembangunan dan kebijakan sosial belum sepenuhnya menyentuh akar masalah ketimpangan di level mikro, khususnya di tingkat kelurahan. Wawancara mendalam dengan warga dari lima kelurahan menunjukkan betapa pentingnya pemahaman lokalitas dan konteks sosial-ekonomi dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Misalnya, Kelurahan Kadipiro di Kecamatan Banjarsari yang tampak “cukup baik” secara ekonomi tetap menghadapi tantangan lingkungan seperti banjir musiman, yang berdampak pada produktivitas dan kenyamanan hidup. Sementara itu, kelurahan-kelurahan yang rentan seringkali menghadapi tekanan ganda: ekonomi yang rapuh, lingkungan yang tidak mendukung, dan sistem bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Kesejahteraan bukan hanya soal pendapatan, tetapi juga tentang ruang hidup, akses terhadap peluang, dan kekuatan komunitas untuk bertahan di tengah ketidakpastian. Perbandingan antar wilayah ini menjadi landasan penting untuk memahami bentuk-bentuk ketimpangan yang terjadi dan strategi apa yang paling efektif untuk mengatasinya.

5.1.1.13. Kelurahan Pajang (Kecamatan Laweyan): Wilayah Stabil dengan Akses Baik

Kelurahan Pajang tergolong sebagai wilayah yang relatif stabil secara sosial dan ekonomi. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai ASN, pegawai tetap, atau memiliki pekerjaan dengan pendapatan tetap. Responden dari wilayah ini, seperti Pak Supyanto, menggambarkan struktur penghasilan yang stabil, kepemilikan rumah tinggal, serta kemampuan menyisihkan penghasilan untuk tabungan.

Akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan juga cukup merata. Anak-anak usia sekolah dengan mudah dapat mengakses jenjang SMP dan SMA, meskipun untuk

pendidikan tinggi masih menjadi tantangan bagi sebagian keluarga karena faktor biaya dan minat. Infrastruktur di Pajang mendukung mobilitas, serta kesadaran lingkungan sangat tinggi hal ini dibuktikan dengan keberhasilan RW 8 meraih juara nasional Program Kampung Iklim (ProKlim). Pajang mencerminkan wajah “ideal” Surakarta, dengan akses, kepemilikan aset, dan partisipasi warga dalam kegiatan sosial serta keberlanjutan lingkungan berjalan beriringan. Ini menjadikan Pajang sebagai *benchmark* kawasan stabil di Surakarta.

5.1.1.14. Kelurahan Karangasem (Kecamatan Laweyan): Stabil, Tapi Masih Ada Tantangan Pendidikan

Kelurahan Karangasem juga menunjukkan tingkat stabilitas ekonomi dan sosial yang cukup tinggi. Responden seperti Bu Ratnadyah Kusumawati, seorang guru, menyatakan bahwa penghasilan keluarganya cukup, terutama karena didukung oleh anak-anak yang sudah mandiri. Sebagian warga memiliki aset berupa rumah tinggal dan tanah, yang membantu menurunkan beban ekonomi jangka panjang.

Akses pendidikan menengah (SMA negeri) disebut masih menantang karena sistem zonasi, sehingga beberapa anak terpaksa bersekolah di luar wilayah atau memilih sekolah swasta. Layanan kesehatan sudah memadai, dengan keberadaan puskesmas pembantu dan keterlibatan warga dalam BPJS Kesehatan yang relatif tinggi. Secara umum, Karangasem merupakan wilayah dengan keseimbangan sosial ekonomi, meskipun masih ada tantangan dalam akses pendidikan lanjutan dan transportasi pelajar.

5.1.1.15. Kelurahan Mojosongo (Kecamatan Jebres): Titik Rentan dengan Tantangan Berlapis

Mojosongo adalah salah satu wilayah yang tergolong paling rentan secara ekonomi dan sosial. Berdasarkan wawancara dengan beberapa responden seperti Ibu Katarina dan Pak Kuspriyanto, ditemukan bahwa banyak warga bekerja di sektor informal atau kehilangan pekerjaan akibat PHK dari pabrik. Tingkat PHK tinggi mengakibatkan turunnya daya beli keluarga, serta peningkatan ketergantungan pada bantuan sosial. Kepemilikan aset sangat rendah banyak warga tidak memiliki rumah atau hanya tinggal di rumah petak sempit hasil warisan yang dibagi antar ahli waris. Lingkungan ini juga menghadapi berbagai tekanan sosial, seperti pengaruh narkoba, KDRT, dan kasus pelecehan seksual yang menurut Katarina cukup dominan.

Akses terhadap layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan bermasalah, terutama dalam proses rujukan dan validasi keaktifan kartu. Meskipun secara administratif warga terdaftar, banyak yang mengalami kendala saat mengakses layanan secara langsung. Bahkan, fasilitas air bersih dari PDAM sering tersendat, dan sanitasi masih menggunakan pembuangan terbuka ke tanah, yang memperburuk kondisi lingkungan. Secara keseluruhan, Mojosongo merepresentasikan wilayah krisis struktural, dengan rendahnya kepemilikan aset, pekerjaan tidak stabil, dan kompleksitas sosial yang membuat intervensi harus dilakukan secara lintas sektor dan terintegrasi.

5.1.1.16. Kelurahan Panularan: Rendah Aset, Minim Sanitasi, dan BPJS Tidak Optimal

Panularan menunjukkan pola kerentanan yang hampir serupa dengan Mojosongo, dengan tingkat kepemilikan aset yang rendah dan ketergantungan pada rumah sewa atau warisan sempit. Responden seperti Pak Kuspriyanto mengakui bahwa dirinya bekerja serabutan dan tidak memiliki rumah sendiri. Banyak warga belum memiliki WC pribadi, dan air bersih diperoleh dari sumur, bukan PDAM. Dalam hal perlindungan sosial, mayoritas warga mengandalkan BPJS PBI (KIS), tetapi layanan ini tidak berjalan maksimal. Kasus rujukan BPJS yang rumit seringkali membuat warga harus mengeluarkan uang pribadi untuk layanan kesehatan mendesak. Masalah lain yang menonjol adalah kurangnya bantuan sosial bagi yang benar-benar membutuhkan, disebabkan oleh ketidaktepatan pendataan dan lemahnya peran RT dalam menyeleksi penerima manfaat.

5.1.1.17. Kelurahan Kadipiro (Kecamatan Banjarsari): Cukup Baik, tapi Hadapi Risiko Lingkungan

Kadipiro merupakan wilayah menengah, tidak sekuat Laweyan tapi tidak serentan Mojosongo. Responden seperti Ibu Yena Anggarwijaya menyatakan bahwa ekonomi keluarga cukup stabil karena adanya penghasilan dari pekerjaan utama dan usaha sampingan. Warga di sini umumnya memiliki rumah sendiri dan beberapa usaha kecil, meskipun belum semua keluarga mandiri secara penuh. Salah satu isu yang membedakan Kadipiro adalah banjir musiman, terutama

di wilayah Joglo dan Sambirejo. Saluran pembuangan air yang belum optimal membuat wilayah ini menjadi rawan genangan saat musim hujan, meskipun sudah ada intervensi seperti pompa air dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta. Akses pendidikan dan BPJS Kesehatan berjalan baik, meskipun beberapa keluarga masih mengalami kendala zonasi untuk SMA dan biaya sekolah anak. Namun, secara umum, Kadipiro menunjukkan potensi tumbuh jika tantangan lingkungan dapat ditangani.

Perbandingan antar wilayah kelurahan ini menampakkan struktur ketimpangan ekonomi yang nyata di Kota Surakarta. Wilayah seperti Pajang dan Karangasem mewakili kelas menengah mapan, yang menikmati stabilitas pekerjaan, kepemilikan aset, serta akses layanan dasar yang baik. Mojosongo dan Panularan adalah representasi wilayah miskin kota, dengan aset minim, sanitasi buruk, dan pekerjaan tidak tetap menciptakan lingkaran ketidakberdayaan yang sulit diputus. Masalah sosial seperti PHK massal, pengaruh narkoba, minimnya sanitasi, serta bantuan sosial yang tidak tepat sasaran memperparah jurang kesenjangan ini. Ketimpangan juga tercermin dalam cara warga menyelesaikan masalah kesehatan dari keluarga yang mampu menabung dan menggunakan BPJS secara optimal, hingga mereka yang harus membayar sendiri karena terganjal prosedur rujukan atau status BPJS tidak aktif.

Tabel 5.3 Perbandingan Karakteristik Sosial-Ekonomi Antar Wilayah Kelurahan di Kota Surakarta

Aspek	Pajang (Laweyan)	Karangasem (Laweyan)	Mojosongo (Jebres)	Panularan (Laweyan)	Kadipiro (Banjarsari)
Status Ekonomi Umum	Stabil, kelas menengah ASN/PNS	Cukup stabil, sebagian ditopang anak mandiri	Rentan, dominan sektor informal	Rentan, pekerjaan tidak tetap	Menengah, stabil namun belum merata
Pekerjaan	Mayoritas ASN, pegawai tetap	Guru, ASN, staf, keluarga berpendapatan tetap	Serabutan, korban PHK, pekerja informal	Freelance, buruh informal	Kombinasi PNS, wiraswasta kecil, pekerja non-PNS
Kepemilikan Aset	Tinggi: rumah pribadi, tanah, tabungan	Sedang: rumah pribadi, warisan tanah	Rendah: rumah petak/warisan dibagi	Rendah: kontrakan, rumah sempit, tanpa tabungan	Sedang: rumah pribadi, usaha sampingan

Aspek	Pajang (Laweyan)	Karangasem (Laweyan)	Mojosongo (Jebres)	Panularan (Laweyan)	Kadipiro (Banjarsari)
Akses Pendidikan	Cukup baik (SD-SMP-SMA)	Masalah zonasi SMA, pilihan swasta	Terbatas, anak putus sekolah meningkat	Terbatas, biaya menjadi kendala	Relatif baik, tapi zonasi SMA masih jadi isu
Layanan Kesehatan	Baik, pemanfaatan BPJS optimal	Baik, Puskesmas Pembantu aktif	Masalah BPJS: validasi & rujukan rumit	BPJS tidak optimal, rujukan dan biaya mandiri	Baik, tetapi masih ada kendala administratif
Sanitasi & Air Bersih	Sudah memadai, sebagian rumah sudah septic tank	Memadai	Banyak rumah pakai sanitasi terbuka, PDAM bermasalah	Banyak pakai sumur, belum semua punya WC pribadi	Masalah banjir musiman, sanitasi sudah membaik
Bantuan Sosial	Tidak tergantung, hanya warga rentan tertentu	Terdata dan dimanfaatkan oleh yang berhak	Tinggi ketergantungan, beberapa tidak terdata	Banyak yang tidak tepat sasaran	Sudah menjangkau warga, tapi pendataan perlu ditingkatkan
Isu Sosial Lingkungan	Aktif lingkungan, juara ProKlim	Zonasi sekolah, tantangan biaya pendidikan tinggi	Narkoba, KDRT, pelecehan, lingkungan kumuh	Pendataan bansos lemah, ketimpangan tajam	Banjir, keterbatasan zonasi, pendidikan anak

5.1.2. Ketimpangan Ekonomi Wilayah

Ketimpangan ekonomi di Kota Surakarta tidak dapat hanya dipahami dari indikator statistik makro seperti angka kemiskinan atau rata-rata pendapatan, melainkan juga harus dilihat melalui lensa spasial yang lebih mikro yaitu ketimpangan antarwilayah kecamatan, antar- kelurahan, bahkan antar-RT. Temuan lapangan dari wawancara mendalam dengan warga di berbagai kelurahan menunjukkan bahwa ketimpangan memiliki dimensi ruang yang sangat jelas dan berlapis. Beberapa wilayah seperti Pajang dan Karangasem menunjukkan tanda-tanda stabilitas ekonomi dan sosial, ditandai dengan kepemilikan rumah pribadi, pekerjaan tetap, akses sanitasi dan pendidikan yang baik, serta keterlibatan warga dalam kegiatan sosial. Wilayah seperti Mojosongo, Panularan, dan sebagian Joyotakan menghadirkan potret yang kontras dengan dominasi pekerjaan informal, ketergantungan pada bantuan sosial, keterbatasan layanan

dasar, dan kepemilikan aset yang minim. Pola distribusi ini membentuk struktur ketimpangan spasial yang kompleks dan sangat terkait dengan sejarah pembangunan kota serta distribusi infrastruktur yang tidak merata.

Analisis terhadap data kualitatif dari warga menunjukkan bahwa ketimpangan juga bersifat *internal* terjadi di dalam satu kelurahan bahkan satu lingkungan. Hal ini terlihat jelas di beberapa bagian Kelurahan Pajang dan Kadipiro, yang secara umum dianggap stabil, namun menyimpan kantong-kantong kerentanan tersembunyi di area seperti bantaran sungai, gang sempit, atau pemukiman padat tak tertata. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan ekonomi tidak bisa disimplifikasi sebagai masalah antar-kecamatan semata, melainkan harus dipahami secara multilevel: dari tingkat kota, kelurahan, hingga rumah tangga. Ketimpangan ekonomi tidak hanya ditandai oleh distribusi pendapatan, tetapi juga oleh distribusi akses terhadap pekerjaan layak, fasilitas dasar, lingkungan sehat, serta nilai-nilai sosial yang membentuk pola pikir dan perilaku warga. Peta ketimpangan wilayah ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen visual, tetapi juga sebagai bahan refleksi struktural dalam merancang kebijakan pembangunan kota yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Ketimpangan ekonomi tidak hanya tercermin dari angka statistik makro, melainkan juga tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, yang mencakup aspek kepemilikan aset, pekerjaan, sanitasi, akses pendidikan, serta kondisi sosial-budaya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan di berbagai kelurahan di Kota Surakarta, diperoleh gambaran bahwa ketimpangan ekonomi bersifat spasial (antar wilayah), horizontal (antar kelompok masyarakat), dan bahkan internal (di dalam satu kelurahan).

5.1.2.1. Distribusi Aset dan Pekerjaan: Fondasi Ketimpangan Struktural

Ketimpangan paling mencolok terlihat dari distribusi aset produktif dan jenis pekerjaan yang dimiliki warga. Wilayah-wilayah seperti Laweyan, Kerten, dan Pajang didominasi oleh warga dengan pekerjaan formal terutama ASN, guru, pensiunan, dan pegawai tetap yang memiliki penghasilan tetap, rumah sendiri, dan tabungan. Kepemilikan rumah pada kelompok ini banyak yang bersumber dari warisan keluarga, sehingga beban ekonomi lebih ringan karena tidak perlu membayar sewa atau cicilan. Sebaliknya, di wilayah seperti Mojosongo, Panularan,

dan Joyotakan, sebagian besar warga bekerja di sektor informal atau rentan, seperti pedagang keliling, buruh pabrik, pekerja harian, atau penganggur setelah terkena PHK.

Mereka umumnya tinggal di rumah petak kecil, kontrakan, atau rumah hasil warisan yang terbagi-bagi antargenerasi, sehingga kualitas hunian rendah dan sempit. Banyak keluarga tidak memiliki tabungan atau aset produktif, membuat mereka sangat rentan terhadap guncangan ekonomi sekecil apapun. Hal ini didukung dengan pernyataan dari cerita pak Kuspriyanto di Panularan yang bekerja sebagai *freelance* tanpa penghasilan tetap, atau keluarga di Mojosongo yang kehilangan pekerjaan akibat PHK dan kini hidup dari bantuan sosial.

5.1.2.2. Akses terhadap Layanan Dasar dan Sanitasi: Ketimpangan yang Kasat Mata

Ketimpangan ekonomi juga terlihat dari akses terhadap layanan dasar, terutama air bersih, sanitasi, dan hunian yang layak. Di wilayah Pajang, Karangasem, dan Kadipiro, sebagian besar warga telah memiliki akses air PDAM, fasilitas sanitasi memadai, serta rumah yang bersih dan cukup luas. Namun di wilayah seperti Panularan dan Joyotakan, akses terhadap air bersih masih menjadi masalah. Sebagian warga hanya memiliki sumur dangkal, dan tidak sedikit rumah tangga masih buang air di tanah atau selokan. Fasilitas WC umum masih digunakan bersama oleh beberapa keluarga, dan kondisi rumah banyak yang tidak memiliki dapur terpisah atau ventilasi yang cukup. Situasi ini digambarkan oleh responden dari Panularan yang menyebutkan bahwa banyak rumah di lingkungannya belum memiliki WC pribadi, dan air bersih sering kali harus disedot secara bergiliran dari sumber air yang sama. Keterbatasan infrastruktur membuat mereka tidak bisa mengakses layanan kesehatan dengan baik, meskipun telah memiliki kartu KIS atau BPJS.

5.1.2.3. Kesenjangan Internal dalam Satu Kelurahan

Hasil wawancara adalah munculnya ketimpangan internal di dalam satu kelurahan, terutama di wilayah yang secara umum dianggap mapan. Di Kelurahan Pajang, misalnya, meskipun sebagian besar wilayah teratur, asri, dan memiliki capaian pendidikan tinggi, masih ada kantong-kantong kemiskinan yang tersembunyi di bantaran sungai atau di gang sempit dekat pasar dan rel kereta. Responden menyebut bahwa warga di kawasan bantaran sungai memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah, pekerjaan yang tidak tetap, serta tidak terlalu aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti posyandu, PKK, atau karang taruna. Anak-anak mereka cenderung putus sekolah lebih awal atau bekerja sejak muda.

Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan sosial tidak selalu antar wilayah, tetapi juga bisa terjadi antar-RT bahkan antar-rumah dalam satu lingkungan. Faktor ini juga ditemukan di beberapa bagian Pak Kadipiro, dengan kawasan utama cukup berkembang, tetapi masih terdapat titik-titik rawan banjir dan pemukiman padat yang kurang tersentuh program pemberdayaan.

5.1.2.4. Pengaruh Sosial dan Budaya

Wawancara di lapangan juga mengungkap bahwa faktor sosial dan budaya memperkuat ketimpangan ekonomi, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Di Mojosongo, misalnya, responden seperti Ibu Katarina menyampaikan bahwa lingkungan tempat tinggalnya rawan dengan narkoba, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, serta tingginya angka anak putus sekolah. Kondisi ini tidak hanya menurunkan motivasi warga untuk memperbaiki diri, tetapi juga menciptakan lingkaran kemiskinan struktural, dengan anak-anak tumbuh tanpa *role model* yang positif, terjerat lingkungan toksik, dan akhirnya mengulangi siklus kemiskinan yang sama. Ketimpangan bukan hanya soal materi, tetapi juga soal nilai, norma, dan pola pikir yang terbentuk dari kondisi lingkungan. Ini sangat berbeda dengan kondisi di Laweyan atau Kerten, di mana partisipasi warga dalam organisasi sosial tinggi, komunitas RT/RW aktif, dan orang tua memiliki ekspektasi tinggi terhadap pendidikan anak-anak mereka.

Tabel 5.4 Ketimpangan Ekonomi Wilayah Kota Surakarta

Kelurahan	Kategori Ekonomi	Karakteristik Pekerjaan	Akses Layanan Dasar (Air, Sanitasi, Pendidikan)	Kepemilikan Aset	Isu Sosial Khusus
Pajang (Laweyan)	Stabil/Mapan	Mayoritas ASN, pegawai tetap	Baik – Air PDAM merata, sanitasi layak, pendidikan mudah diakses	Mayoritas memiliki rumah sendiri dan tabungan	Minim; komunitas aktif, lingkungan bersih
Karangasem (Laweyan)	Stabil/Mapan dengan	Guru, pegawai, anak mandiri	Baik – Namun zonasi SMA	Rumah pribadi & tanah warisan	Tantangan akses SMA negeri
Kelurahan	Kategori Ekonomi	Karakteristik Pekerjaan	Akses Layanan Dasar (Air, Sanitasi, Pendidikan)	Kepemilikan Aset	Isu Sosial Khusus

	tantangan zonasi		menjadi hambatan		
Kadipiro (Banjarsari)	Menengah Rentan	Staf kelurahan, usaha sampingan	Air & BPJS memadai; masih ada risiko banjir	Rumah milik sendiri, beberapa memiliki usaha kecil	Risiko banjir, zonasi sekolah
Panularan (Laweyan)	Ren.2.tan	Freelance, buruh harian	Air sumur, WC umum, BPJS tidak optimal	Rumah sewa/warisan sempit; minim tabungan	Masalah sanitasi, ketidaktepatan bansos
Mojosongo (Jebres)	Rentan/Kritis	PHK massal, sektor informal	Air bersih terbatas, WC umum, BPJS bermasalah	Minim aset, rumah petak kecil	PHK tinggi, narkoba, KDRT, pelecehan seksual
Joyotakan (Serengan)	Rentan	Pekerja kasar, informal	Sanitasi buruk, air tidak stabil	Rumah padat, warisan sempit	Padat penduduk, kurang fasilitas kesehatan

5.1.3. Dimensi Pendidikan

5.1.3.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS dan APM)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator fundamental dalam mengukur capaian keberhasilan sistem pendidikan di suatu wilayah. Keduanya tidak hanya menggambarkan jumlah peserta didik berdasarkan usia sekolah, tetapi juga mencerminkan dimensi sosial-ekonomi yang lebih luas seperti aksesibilitas, ketahanan ekonomi rumah tangga, serta aspirasi pendidikan dalam keluarga. Berdasarkan hasil temuan kualitatif dari wawancara mendalam di berbagai wilayah administratif Kota Surakarta, diketahui bahwa APS dan APM pada jenjang Sekolah Dasar (SD) terbilang tinggi dan cenderung merata di seluruh kecamatan. Tingginya partisipasi ini disebabkan oleh sejumlah faktor penting: ketersediaan sekolah dasar dalam radius yang dekat dengan permukiman warga, penghapusan biaya pendidikan dasar oleh pemerintah melalui program wajib belajar 12 tahun, serta meningkatnya kesadaran orang tua mengenai pentingnya pendidikan dasar bagi masa depan anak-anak mereka.

Tren yang berbeda tampak jelas ketika menelaah partisipasi pendidikan di jenjang SMP dan lebih signifikan lagi di tingkat SMA/SMK. Penurunan angka partisipasi pada jenjang ini tidak bersifat homogen, tetapi sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masing-masing wilayah. Keluarga dari kelompok ekonomi menengah ke bawah menghadapi berbagai hambatan dalam mempertahankan anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hambatan tersebut mencakup biaya transportasi, kebutuhan untuk membantu ekonomi rumah tangga, serta keterbatasan jumlah sekolah negeri unggulan di sekitar tempat tinggal mereka.

Warga dari Kelurahan Pajang dan Karangasem (Kecamatan Laweyan) menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan yang tinggi hingga jenjang menengah atas dan bahkan pendidikan tinggi. Anak-anak dari wilayah ini tidak hanya menyelesaikan SMA/SMK, tetapi sebagian besar melanjutkan ke perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Faktor pendukung utama partisipasi tinggi di wilayah ini antara lain: (1) kestabilan ekonomi keluarga, karena sebagian besar orang tua bekerja sebagai ASN, guru, atau pensiunan; (2) kepemilikan rumah dan aset yang mengurangi beban pengeluaran rutin; (3) latar belakang pendidikan orang tua yang relatif tinggi, sehingga aspirasi terhadap pendidikan anak lebih besar; serta (4) ketersediaan fasilitas pendidikan yang dekat, berkualitas, dan mencakup sekolah negeri favorit. Salah satu responden, warga Pajang, menyatakan: *“Anak saya sudah lulus SMA, sekarang kuliah di UNS. Alhamdulillah bisa disekolahkan karena kita memang niatkan dari awal.”*

Kelurahan Kadipiro (Kecamatan Banjarsari) memperlihatkan kondisi partisipasi pendidikan yang berada pada kategori menengah. Sebagian besar anak di wilayah ini berhasil menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMP, namun belum semuanya melanjutkan ke jenjang SMA atau SMK. Terdapat beberapa faktor penghambat yang muncul dari wawancara dengan warga, seperti keterbatasan biaya sekolah lanjutan, lokasi sekolah negeri yang relatif jauh dari permukiman warga, dan ketatnya sistem zonasi sekolah menengah. Beberapa keluarga juga mengalami keterbatasan dalam mendukung pembiayaan transportasi harian atau biaya tambahan seperti seragam, buku pelajaran, dan kegiatan ekstra kurikuler.

Wilayah seperti Mojosongo dan Panularan mengalami tantangan serius dalam mempertahankan partisipasi pendidikan pasca jenjang SD. Banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu harus membantu orang tua bekerja atau bahkan memilih putus sekolah karena keterbatasan

biaya. Tidak sedikit kasus di mana anak-anak di jenjang SMP sudah mulai bekerja paruh waktu atau tidak melanjutkan ke SMA karena ketidakstabilan ekonomi keluarga. Responden dari Mojosongo menyebutkan bahwa meskipun anaknya mendapat KIP (Kartu Indonesia Pintar), biaya lain-lain di luar komponen yang ditanggung tetap menjadi kendala. Ketimpangan APS dan APM di Surakarta pada akhirnya menggarisbawahi bahwa keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh faktor struktural seperti status pekerjaan orang tua, kepemilikan aset, dan kemampuan lingkungan sosial dalam menopang proses belajar anak.

Tabel 5.5 Perbandingan APS dan APM antar Kecamatan di Kota Surakarta (Berdasarkan Temuan Lapangan)

Kecamatan	APS SD (%)	APM SD (%)	APS SMP (%)	APM SMP (%)	APS SMA/SMK (%)	APM SMA/SMK (%)	Catatan Kualitatif
Laweyan (Pajang & Karangasem)	98	95	95	90	90	85	Partisipasi tinggi di semua jenjang, banyak siswa lanjut hingga perguruan tinggi.
Banjarsari (Kadipiro)	97	94	88	82	75	68	Partisipasi cukup baik, namun akses SMA negeri dan faktor biaya masih menjadi hambatan.
Jebres (Mojosongo)	96	92	80	70	60	50	Banyak anak putus sekolah setelah SMP, banyak bekerja di usia dini.
Serengan	96	93	85	78	70	60	Masih cukup terjangkau secara fasilitas, namun motivasi belajar rendah pada remaja.
Laweyan (Panularan)	95	90	78	65	55	40	Kesulitan biaya sekolah menengah, ketergantungan pada bantuan sosial.

Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa terjadi ketimpangan yaitu :

1. Kesenjangan antar Kecamatan

Tabel menunjukkan perbedaan partisipasi pendidikan yang mencolok antar wilayah. Kecamatan Laweyan, terutama Kelurahan Pajang dan Karangasem, menunjukkan performa pendidikan terbaik. Ini didukung oleh faktor ekonomi stabil, pekerjaan formal, dan kesadaran pendidikan tinggi dalam keluarga.

2. Kerentanan Sosial-Ekonomi dan Akses Pendidikan

Kecamatan Jebres (Mojosongo) dan Laweyan (Panularan) memiliki tingkat APM SMA/SMK yang paling rendah. Hal ini menunjukkan keterbatasan finansial keluarga untuk melanjutkan pendidikan anak. Banyak dari anak-anak ini beralih ke pekerjaan informal, memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi.

3. Peran Infrastruktur dan Zonasi Sekolah

Faktor seperti zonasi SMA negeri, jarak sekolah, dan ketersediaan transportasi sangat memengaruhi keberlanjutan pendidikan di Kadipiro (Banjarsari) dan Serengan. Meskipun secara ekonomi tidak seburuk Mojosongo, hambatan fisik dan teknis tetap menjadi penghalang.

4. Peran Orang Tua dan Lingkungan Sosial

Wilayah dengan pendidikan orang tua tinggi dan keterlibatan komunitas (seperti di Laweyan) cenderung memiliki partisipasi pendidikan yang tinggi. Sementara di wilayah dengan kerentanan sosial (misalnya, pengaruh narkoba dan PHK), partisipasi pendidikan cenderung menurun drastis.

5. Implikasi Kebijakan

Pemerintah daerah perlu memperluas akses ke pendidikan menengah di wilayah rentan, memperkuat program beasiswa berbasis keluarga miskin, dan meningkatkan transportasi pelajar. Selain itu, pendekatan sosial berbasis RT/RW juga penting untuk membangun budaya belajar di masyarakat urban bawah.

5.1.3.2 Rata-rata Lama Sekolah Dan Tingkat Putus Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah indikator pendidikan yang menunjukkan jumlah tahun rata-rata yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam mengikuti pendidikan formal, terlepas dari apakah mereka telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Indikator ini mencerminkan akumulasi pengalaman pendidikan masa lalu, bukan tingkat partisipasi pendidikan yang sedang berjalan. RLS tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan bertahap

yaitu 10,02 tahun pada 2020 menjadi 10,32 tahun pada 2024. Angka ini menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk dewasa di Surakarta secara rata-rata telah menempuh pendidikan hingga setara kelas X–XI SMA. Ini merupakan capaian yang cukup baik dibandingkan dengan rata-rata nasional, dan menunjukkan keberhasilan kebijakan pendidikan dasar serta menengah yang inklusif, ditopang oleh infrastruktur pendidikan yang merata di kawasan perkotaan. Berikut tren rata-rata lama sekolah Kota Surakarta tahun 2000–2024.

Tabel 5.6 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Surakarta Tahun 2020–2024 Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun	Laki-laki (tahun)	Perempuan (tahun)	Total (tahun)
2020	10,15	9,89	10,02
2021	10,26	10,01	10,14
2022	10,34	10,07	10,21
2023	10,41	10,13	10,27
2024	10,46	10,18	10,32

Sumber : Surakarta Dalam Angka 2025

Angka RLS yang cukup tinggi bukan berarti bahwa semua penduduk menikmati kualitas pendidikan yang sama. Hasil wawancara lapangan dan kajian sosial menunjukkan masih terdapat ketimpangan antar wilayah dan antar kelompok sosial. Wilayah seperti Pajang dan Karangasem (Kecamatan Laweyan), yang didominasi oleh penduduk berstatus ASN, guru, dan pensiunan, memiliki penduduk dewasa dengan RLS yang lebih tinggi karena akses historis terhadap pendidikan formal lebih baik. Sebaliknya, di wilayah seperti Mojosongo dan Joyotakan, yang banyak dihuni oleh pekerja informal atau keluarga rentan ekonomi, banyak penduduk dewasa hanya menamatkan pendidikan hingga tingkat dasar atau menengah pertama. Kondisi ini menunjukkan pentingnya intervensi pendidikan nonformal dan program kejar paket untuk mendorong peningkatan RLS lebih lanjut, agar tidak terjadi stagnasi pendidikan antar generasi yang memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi.

Tabel 5.7 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) per Kecamatan Kota Surakarta Tahun 2024 (dalam Tahun)

Kecamatan	Laki-laki (Tahun)	Perempuan (Tahun)	Rata-rata Total
Banjarsari	10,78	10,80	10,79
Jebres	10,41	10,44	10,43
Laweyan	10,89	10,88	10,89

Pasar Kliwon	10,15	10,20	10,18
--------------	-------	-------	-------

Kecamatan	Laki-laki (Tahun)	Perempuan (Tahun)	Rata-rata Total
Serengan	10,34	10,32	10,33

Sumber : Surakarta Dalam Angka 2025

Wawancara mencatat bahwa masyarakat di wilayah mapan seperti Pajang dan Karangasem (Kecamatan Laweyan) umumnya memiliki rata-rata lama sekolah antara 10–12 tahun, yang berarti mayoritas penduduk menyelesaikan pendidikan hingga SMA atau bahkan perguruan tinggi. Sementara itu, di wilayah seperti Mojosongo (Jebres) dan Joyotakan (Serengan), rata-rata lama sekolah hanya berkisar antara 7–8 tahun, yang menunjukkan bahwa banyak anak putus sekolah setelah jenjang SD atau SMP. Warga dari wilayah seperti Pajang mencatat bahwa: (1) Mayoritas anak berhasil menyelesaikan pendidikan SMA bahkan banyak yang melanjutkan ke universitas, baik negeri maupun swasta; (2) latar belakang keluarga yang kuat secara ekonomi yaitu pekerjaan sebagai ASN, guru, dan pensiunan serta kesadaran pendidikan yang tinggi. Kepemilikan aset dan kemampuan finansial memungkinkan keluarga untuk merencanakan pendidikan anak secara jangka panjang, termasuk menyediakan dana tambahan untuk bimbingan belajar, seragam, hingga biaya kuliah. *“Anak saya kuliah di UNS, dari awal kami siapkan biayanya. Alhamdulillah ada tabungan pensiun.”* Responden dari Pajang. Faktor lain yang mendukung adalah ketersediaan sekolah negeri yang merata, serta dukungan dari komunitas dan lingkungan yang mendorong pendidikan sebagai jalan menuju masa depan yang lebih baik.

Wilayah Mojosongo dan Joyotakan mencerminkan situasi yang kontras yaitu banyak anak hanya menyelesaikan pendidikan hingga SD atau SMP, karena berbagai hambatan struktural dan sosial. Rata-rata lama sekolah di wilayah ini hanya 7–8 tahun, menandakan bahwa akses terhadap jenjang pendidikan menengah dan atas sangat terbatas.

Berdasarkan data dari Pusdatin, menunjukkan bahwa angka putus sekolah pada semua jenjang Kota Surakarta berdasarkan kecamatan cukup tinggi. Adapun datanya sebagai berikut:

Tabel 5.8 Jumlah Anak Putus Sekolah Tahun 2024

Kecamatan	PAUD	Dasar (SD)	Menengah (SMP)	Atas (SMA/SMK)	Total
Kec. Laweyan	0	28	51	71	150

Kecamatan	PAUD	Dasar (SD)	Menengah (SMP)	Atas (SMA/SMK)	Total
Kec. Serengan	0	22	18	48	88
Kec. Pasarkliwon	0	56	94	104	254
Kec. Jebres	0	45	67	171	283
Kec. Banjarsari	0	51	66	166	283

Sumber : Pusdatin, 2025

Putus sekolah merupakan fenomena multidimensional yang tidak hanya dipengaruhi oleh aspek ekonomi, tetapi juga oleh budaya, kebijakan pendidikan, dan lingkungan sosial. Di Kota Surakarta, berdasarkan hasil wawancara mendalam dan temuan lapangan, terdapat beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya angka putus sekolah, terutama pada jenjang pendidikan menengah. Berikut ini adalah uraian faktor penyebab berdasarkan wilayah kecamatan:

1. Keterbatasan Ekonomi Keluarga

Di wilayah seperti Mojosongo, Panularan, dan Joyotakan, banyak keluarga menggantungkan hidup dari sektor informal, seperti buruh cuci, tukang ojek, pedagang keliling, atau pekerja serabutan. Penghasilan yang tidak tetap dan minim membuat mereka kesulitan memenuhi biaya pendidikan lanjutan anak, meskipun sekolah negeri telah digratiskan. Biaya tidak langsung seperti seragam, alat tulis, uang saku, dan transportasi menjadi penghalang serius. Dalam beberapa kasus, anak-anak justru diminta membantu menambah pendapatan keluarga dengan bekerja selepas lulus SMP.

2. Ketidapkahaman Terhadap Nilai Pendidikan Menengah

Kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan menengah masih ditemukan di beberapa keluarga, khususnya di wilayah dengan tingkat pendidikan orang tua yang rendah. Beberapa bagian Kecamatan Serengan dan Jebres, banyak orang tua beranggapan bahwa menyelesaikan pendidikan dasar sudah cukup untuk bekal hidup. Paradigma ini menjadi penghambat ketika anak menunjukkan keinginan melanjutkan ke SMA/SMK,

tetapi tidak mendapat dukungan penuh dari keluarga. Hal ini juga menunjukkan perlunya penguatan literasi pendidikan di tingkat keluarga.

3. Lingkungan Sosial yang Tidak Mendukung Pendidikan

Lingkungan padat penduduk dan kumuh seperti Mojosongo, tekanan sosial justru menjadi faktor dominan. Wawancara dengan warga setempat mengungkapkan bahwa keberadaan narkoba, pergaulan bebas, KDRT, hingga minimnya figur teladan yang berpendidikan tinggi membuat anak-anak kehilangan motivasi untuk melanjutkan sekolah. Beberapa bahkan menganggap bekerja lebih cepat menghasilkan uang ketimbang duduk di bangku sekolah. Pola ini menjadi lingkaran setan yang sulit diputus jika tidak ada intervensi komunitas atau sekolah.

4. Kebijakan Zonasi yang Tidak Proporsional

Kebijakan zonasi pendidikan, meskipun bertujuan menciptakan pemerataan akses, justru menjadi hambatan bagi anak-anak dari kelurahan padat dan terpinggirkan. Anak-anak dari Joyotakan, Panularan, dan Mojosongo sering kali tidak diterima di sekolah negeri favorit karena rumah mereka berada di luar zona prioritas. Sementara itu, pilihan sekolah swasta membutuhkan biaya lebih tinggi, yang tak sanggup dijangkau keluarga. Kondisi ini menyebabkan sebagian anak memilih tidak melanjutkan sekolah atau menunda pendidikan sambil bekerja.

5. Minimnya Peran dan Intervensi Sosial

Kecamatan seperti Jebres dan Serengan, temuan lapangan juga menunjukkan bahwa lemahnya pendampingan sosial dari pihak kelurahan atau lembaga sosial menyebabkan anak-anak rentan kehilangan arah setelah lulus SMP. Tidak banyak tersedia program beasiswa lokal yang menyasar pelajar berprestasi namun miskin, dan sistem rujukan bantuan pendidikan sering kali rumit serta kurang transparan. Ini menjadi tantangan bagi penguatan jaring pengaman sosial berbasis komunitas agar mampu menjangkau kelompok rentan secara merata.

Tabel 5.9 Faktor Penyebab Putus Sekolah Berdasarkan Kecamatan di Kota Surakarta

Kecamatan / Kelurahan	Keterbatasan Ekonomi	Rendahnya Kesadaran Pendidikan	Lingkungan Sosial Negatif	Kendala Zonasi Sekolah	Minimnya Dukungan Sosial
Mojosongo (Jebres)	✓ Sektor informal dominan, penghasilan minim	■ Banyak orang tua lulusan SD	■ Narkoba, pergaulan bebas, KDRT	■ Sering tidak diterima di SMA Negeri	✓ Kurang program intervensi sosial
Panularan (Laweyan)	■ Pendapatan serabutan, tidak tetap	■ Beberapa keluarga belum prioritaskan SMA	■ Pergaulan remaja tanpa pengawasan	■ Kesulitan masuk sekolah negeri	■ RT/RW kurang aktif dalam seleksi bansos
Joyotakan (Serengan)	✓ Banyak keluarga tinggal di rumah sewa, berpendapatan rendah	■ Pendidikan tidak dianggap investasi penting	■ Anak-anak putus sekolah akibat tekanan ekonomi	■ L okasi luar zona sekolah negeri	■ T idak semua penerima manfaat tepat sasaran
Karangasem (Laweyan)	■ Sebagian keluarga tergantung anak yang sudah bekerja	■ Masih ada keluarga yang hanya mendorong anak hingga SMP	+ Relatif aman dan mendukung pendidikan	■ Zonasi menyulitkan akses ke SMA favorit	■ Perlu penguatan dukungan komunitas
Pajang (Laweyan)	+ Mayoritas keluarga stabil secara ekonomi	+ Kesadaran pendidikan tinggi	+ Lingkungan sosial mendukung	+ Dekat dengan banyak fasilitas pendidikan	+ Sistem jaminan pendidikan keluarga cukup baik
Kadipiro (Banjarsari)	■ Sebagian keluarga ekonomi menengah ke bawah	■ Perlu peningkatan kesadaran pendidikan tinggi	■ Pengaruh lingkungan di titik banjir dan padat	■ Zonasi kadang menyulitkan siswa miskin	■ Beberap a komunitas aktif mengawal pendidikan

Keterangan:

- = Faktor dominan di wilayah tersebut
- = Faktor sedang/terdapat sebagian kasus
- + = Tidak menjadi isu utama di wilayah tersebut
- Wilayah paling rentan: Mojosongo, Panularan, dan Joyotakan memiliki kombinasi faktor struktural, sosial, dan teknis yang saling memperkuat ketimpangan akses pendidikan.

- Wilayah relatif stabil: Pajang dan Karangasem — menunjukkan dukungan sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang lebih baik.
- Zonasi muncul sebagai faktor teknis transversal yang berdampak signifikan bagi siswa miskin dari wilayah padat penduduk.
- Minimnya intervensi sosial berbasis komunitas juga menjadi penghambat penyelesaian isu pendidikan di level lokal.

5.1.3.3 Akses ke Lembaga Pendidikan (Jarak, Transportasi, Kualitas Fasilitas)

Akses fisik terhadap lembaga pendidikan, yang mencakup jarak ke sekolah, ketersediaan transportasi, dan kualitas fasilitas pembelajaran, merupakan faktor krusial yang memengaruhi kemampuan anak-anak untuk melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan secara optimal. Hasil wawancara mendalam yang dilakukan di berbagai kelurahan di Kota Surakarta menunjukkan bahwa akses pendidikan sangat bervariasi antar wilayah, dan kesenjangan ini berimplikasi langsung pada tingkat partisipasi, motivasi, serta keberlanjutan pendidikan anak-anak.

Beberapa wilayah seperti Laweyan (terutama Kelurahan Pajang dan Karangasem) dan sebagian wilayah Kadipiro (Kecamatan Banjarsari), akses ke lembaga pendidikan tergolong sangat baik. Wawancara dengan warga menunjukkan kondisi berikut:

1. Sekolah dasar dan menengah berada dalam radius yang mudah dijangkau dari permukiman.
2. Mayoritas orang tua memiliki kendaraan pribadi, sehingga anak-anak dapat diantar dengan mudah.
3. Transportasi umum tersedia dan cukup aman untuk digunakan oleh anak usia sekolah.
4. Jumlah sekolah negeri memadai, termasuk sekolah-sekolah unggulan di jenjang SMP dan SMA.
5. Sebagian keluarga mampu memilih sekolah swasta berkualitas jika tidak mendapat tempat di sekolah negeri.

Kualitas fasilitas pendidikan juga menjadi faktor pendukung penting. Sekolah-sekolah seperti MAN 1 Surakarta memberikan contoh baik dari segi sarana dan lingkungan belajar:

1. Tersedia laboratorium IPA, ruang komputer, akses internet, serta perpustakaan.
2. Bangunan sekolah dalam kondisi baik, dengan rasio guru-murid yang ideal dan kelas yang tidak terlalu padat.
3. Lingkungan sekolah kondusif untuk pengembangan karakter dan aktivitas ekstrakurikuler.

Mojosongo (Kecamatan Jebres), Panularan (Kecamatan Laweyan), dan Joyotakan (Kecamatan Serengan), akses terhadap lembaga pendidikan masih menjadi tantangan utama, terutama dalam hal keterjangkauan geografis, transportasi, dan kualitas fasilitas. Warga di Mojosongo dan Panularan menyampaikan beberapa kendala sebagai berikut:

1. Jumlah sekolah negeri, terutama pada jenjang SMP dan SMA, masih sangat terbatas.
2. Kapasitas sekolah negeri yang ada tidak mencukupi untuk menampung seluruh anak usia sekolah di wilayah padat penduduk.
3. Banyak anak terpaksa bersekolah di luar kelurahan, menempuh **jarak yang cukup jauh**, yang tidak semua orang tua dapat fasilitasi.
4. Tidak tersedia layanan transportasi umum yang efektif dan terintegrasi, terutama untuk wilayah pinggiran atau padat penduduk.
5. Anak-anak dari keluarga tidak mampu, yang tidak memiliki sepeda motor atau uang saku, sering kali berjalan kaki jauh atau menggunakan ojek dengan biaya harian yang tinggi.
6. Kondisi ini membuat sebagian anak rawan putus sekolah, terutama jika orang tua bekerja dan tidak dapat mendampingi atau mengantar setiap hari.

Data lapangan menunjukkan bahwa ketimpangan dalam akses fisik dan fasilitas pendidikan berdampak nyata pada keberlanjutan pendidikan anak-anak. Beberapa dampak yang teridentifikasi meliputi:

1. Tingginya angka bolos sekolah di wilayah dengan akses terbatas.
2. Rendahnya minat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
3. Tingginya tingkat putus sekolah, terutama pada kelompok anak dari keluarga berpenghasilan rendah.
4. Tidak ada layanan transportasi umum yang efektif dan terintegrasi untuk anak sekolah di wilayah pinggiran.
5. Anak-anak yang tidak memiliki sepeda motor atau uang saku terpaksa berjalan kaki jauh atau naik ojek dengan biaya harian tinggi.
6. Hal ini menyebabkan anak-anak lebih mudah putus sekolah, terutama jika orang tua bekerja di luar rumah dan tidak bisa mengantar.

Data lapangan menunjukkan bahwa ketimpangan akses fisik dan kualitas fasilitas secara langsung berdampak pada:

1. Tingginya angka bolos sekolah.
2. Rendahnya minat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.
3. Tingginya tingkat putus sekolah di wilayah dengan akses terbatas.

Kondisi ini menciptakan lingkaran ketertinggalan pendidikan, karena anak-anak yang tidak dapat mengakses sekolah yang layak akan sulit bersaing dalam dunia kerja dan cenderung kembali ke sektor informal dengan risiko sosial dan ekonomi tinggi. Hal ini juga didukung dengan data anak belum pernah bersekolah menurut Pusdatin. Berdasarkan data dibawah, menunjukan bahwa anak belum pernah sekolah di Kecamatan Kota Surakarta masih cukup tinggi. Dapat dilihat bahwa anak belum pernah sekolah banyak di umur >15 dan dominan berada di Kecamatan Banjarsari. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.10 Kategori Akses Pendidikan

Wilayah	Kategori Akses	Keterangan Singkat
Pajang (Laweyan) ●	Baik	Dekat, transportasi mudah, fasilitas baik
Karangasem ●	Baik	Sama seperti Pajang
Kadipiro (Banjarsari) ●	Baik	Sekolah cukup, akses transportasi ada
Mojosongo (Jebres) ●	Terbatas	Sekolah minim, transportasi sulit
Panularan ●	Terbatas	Sama seperti Mojosongo
Joyotakan (Serengan) ●	Terbatas	Jarak jauh, sarana minim

● = Baik | ● = Sedang | ● = Terbatas

Tabel 5.11 Jumlah Anak Belum Pernah Sekolah Menurut Kecamatan dan Kelompok Umur di Kota Surakarta

Kecamatan	< 7 Tahun	7–12 Tahun	13–15 Tahun	>15 Tahun	Total
Laweyan	0	74	46	87	207
Serengan	0	49	23	38	110
Pasar Kliwon	0	70	34	66	170
Jebres	0	110	40	89	239
Banjarsari	0	107	81	138	326
TOTAL	0	410	224	418	1.052

Sumber :Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, *Surakarta Dalam Angka 2025*

5.1.3.4 Tantangan dan Kendala Akses Pendidikan

Pendidikan merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, sekaligus menjadi prasyarat utama bagi pembangunan sumber daya manusia yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, akses terhadap pendidikan yang layak dan berkesinambungan di Kota Surakarta masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan sosial yang bersifat laten maupun nyata. Hasil wawancara mendalam di lima kecamatan utama menunjukkan bahwa ketimpangan akses pendidikan tidak semata disebabkan oleh kemiskinan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh desain kebijakan yang kurang adaptif, keterbatasan infrastruktur pendidikan, serta norma sosial dan budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, hasil temuan lapangan ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu: (1) Tantangan Struktural, dan (2) Tantangan Sosial, dengan fokus utama pada dimensi struktural dalam pembahasan ini. Setiap kategori dianalisis berdasarkan data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan warga dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi dan lokasi geografis yang berbeda.

1. Tantangan Struktural

Kebijakan zonasi yang diberlakukan oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan pemerataan akses dan mutu pendidikan, khususnya pada jenjang SMP dan SMA. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan ini justru menciptakan eksklusi baru bagi anak-anak dari wilayah padat dan tertinggal. Wawancara dengan warga di Kelurahan Mojosongo (Jebres), Joyotakan (Serengan), dan Panularan (Laweyan) mengungkapkan bahwa banyak anak tidak dapat diterima di sekolah negeri dalam zona mereka, meskipun secara geografis sangat dekat, karena keterbatasan daya tampung.

Akibatnya, keluarga dihadapkan pada dua pilihan sulit: menyekolahkan anak ke sekolah swasta yang biayanya tinggi, atau mendaftarkan anak ke sekolah di luar kecamatan, yang menimbulkan beban tambahan transportasi, waktu tempuh, dan risiko sosial. Dalam konteks keluarga miskin, opsi ini sering kali tidak feasible, yang pada akhirnya menyebabkan anak mundur dari proses pendidikan formal. Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam implementasi kebijakan zonasi, yang belum sepenuhnya mempertimbangkan kapasitas infrastruktur dan distribusi geografis penduduk.

Temuan lapangan juga menyoroti ketimpangan distribusi sekolah negeri antarwilayah. Kelurahan Panularan dan Mojosongo, yang memiliki kepadatan penduduk tinggi, ketersediaan

sekolah negeri pada jenjang SMP dan SMA dinilai sangat terbatas. Warga menyatakan bahwa tidak terdapat satu pun sekolah negeri di wilayah mereka, sehingga anak-anak harus menempuh jarak yang cukup jauh ke kelurahan atau kecamatan lain untuk bersekolah.

Hal ini sangat kontras dengan kondisi di wilayah seperti Pajang dan Karangasem (Laweyan), di mana akses terhadap sekolah negeri relatif dekat, yaitu dalam radius 1–2 km dari permukiman warga. Ketidakseimbangan ini menciptakan gap struktural yang memperbesar kesenjangan pendidikan antarwilayah, memperkuat ketidaksetaraan yang sudah ada, dan secara tidak langsung menghambat mobilitas sosial masyarakat di wilayah tertinggal. Walaupun secara normatif pemerintah telah menghapuskan biaya pendidikan formal melalui kebijakan pembebasan SPP di sekolah negeri, wawancara lapangan menunjukkan bahwa biaya tidak langsung pendidikan tetap menjadi beban signifikan, terutama bagi keluarga

dengan status ekonomi rendah. Biaya-biaya tersebut antara lain meliputi:

1. Pengadaan seragam sekolah, termasuk seragam ekstrakurikuler dan atribut tambahan.
 2. Biaya transportasi harian, terutama bagi siswa yang bersekolah di luar kelurahan.
 3. Pembelian buku penunjang, alat tulis, dan perlengkapan belajar lainnya.
 4. Kontribusi sukarela dari orang tua murid yang dalam praktiknya sering bersifat semi- wajib.
- Bagi keluarga yang memiliki lebih dari satu anak usia sekolah, total pengeluaran pendidikan menjadi tidak terjangkau, meskipun sekolah secara formal tidak menarik SPP. Situasi ini memunculkan bentuk baru eksklusi pendidikan, di mana faktor ekonomi tetap menjadi penghambat utama partisipasi, meskipun pendidikan disebutkan "gratis" dalam kerangka kebijakan nasional.

Tabel 5.12 Tematik Ketimpangan Akses Pendidikan di Kota Surakarta

No	Kelurahan	Zonasi & Daya Tampung	Sekolah Negeri	Transportasi	Biaya Tidak Langsung	Kategori Akses Pendidikan
1	Pajang (Laweyan)	Proporsional, diterima di zona	Tersedia SD, SMP, dan SMA negeri	Umum dan pribadi tersedia	Terjangkau bagi mayoritas	● Baik
2	Karangasem (Laweyan)	Proporsional	Sekolah negeri dekat permukiman	Akses mudah dan aman	Terjangkau	● Baik

No	Kelurahan	Zonasi & Daya Tampung	Sekolah Negeri	Transportasi	Biaya Tidak Langsung	Kategori Akses Pendidikan
----	-----------	-----------------------	----------------	--------------	----------------------	---------------------------

3	Kadipiro (Banjarsari)	Relatif memadai	Sekolah negeri cukup tersedia	Transportasi umum dan pribadi tersedia	Cukup terjangkau	● Baik
4	Mojosongo (Jebres)	Tidak proporsional, banyak tidak tertampung	Sangat terbatas (tidak ada SMP/SMA)	Transportasi umum tidak memadai	Tinggi, terutama ongkos & buku	● Terbatas
5	Panularan (Laweyan)	Tidak proporsional	Tidak tersedia sekolah negeri jenjang SMP/SMA	Transportasi terbatas dan tidak aman	Beban tinggi untuk keluarga miskin	● Terbatas
6	Joyotakan (Serengan)	Tidak proporsional, daya tampung kecil	Jumlah sekolah negeri sangat sedikit	Transportasi mahal, jarak jauh	Biaya tidak langsung memberatkan	● Terbatas

Keterangan Kategori Akses Pendidikan

- **Baik** = Jarak dekat, transportasi mudah, sekolah negeri cukup, biaya terjangkau
- **Sedang** = Beberapa kendala ringan pada zonasi atau transportasi
- **Terbatas** = Terdampak zonasi, kekurangan sekolah negeri, atau masalah biaya dan transportasi

2. Tantangan Sosial

Selain tantangan struktural, hasil studi lapangan juga mengungkap bahwa faktor sosial memainkan peran signifikan dalam menciptakan ketimpangan akses pendidikan. Tantangan sosial ini tidak hanya terkait dengan kondisi ekonomi rumah tangga, tetapi juga mencakup norma budaya, relasi kuasa dalam keluarga, dan persepsi masyarakat terhadap pendidikan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak perempuan, anak disabilitas, dan keluarga dengan tingkat pendidikan rendah. Tiga isu utama yang diidentifikasi meliputi: (a) peran keluarga dan dukungan sosial, (b) persepsi terhadap nilai pendidikan, serta (c) stigma dan marginalisasi terhadap kelompok rentan.

Keluarga merupakan institusi pertama yang mendukung atau justru membatasi akses anak terhadap pendidikan. Beberapa wilayah seperti Joyotakan dan Mojosongo, hasil wawancara dengan warga mengindikasikan bahwa orang tua dengan tingkat pendidikan rendah cenderung tidak memberikan pendampingan yang cukup terhadap proses belajar anak.

Beberapa kasus, anak usia SMP sudah diminta bekerja membantu ekonomi keluarga atau mengurus adik di rumah, terutama jika orang tua bekerja di sektor informal.

Dukungan sosial yang rendah juga berdampak pada minimnya motivasi anak untuk bersekolah secara konsisten. Ketika pendidikan tidak dianggap sebagai investasi jangka panjang, maka keputusan jangka pendek seperti membiarkan anak tidak masuk sekolah karena alasan ekonomi atau keperluan domestik menjadi hal yang dibenarkan secara sosial. Hal ini memperkuat siklus intergenerasional kemiskinan dan rendahnya mobilitas sosial.

Temuan lapangan menunjukkan adanya perbedaan persepsi antarwilayah terhadap nilai pendidikan formal. Wilayah seperti Pajang dan Karangasem, pendidikan hingga jenjang SMA bahkan perguruan tinggi dianggap sebagai bagian dari mobilitas sosial yang penting. Beberapa bagian Panularan dan Joyotakan, masih ditemukan pandangan bahwa pendidikan bukan prioritas, terutama jika anak dianggap akan bekerja di sektor informal atau mengikuti jejak usaha keluarga.

Persepsi seperti ini menyebabkan rendahnya minat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan, dalam beberapa kasus, keluarga tidak terlalu aktif mencari solusi saat anak mengalami hambatan administratif seperti tidak diterima di sekolah negeri atau kesulitan membayar buku dan transportasi. Budaya “nrimo” atau pasrah terhadap situasi dianggap sebagai bentuk adaptasi, namun pada saat yang sama menghambat upaya perubahan struktural.

Kelompok rentan seperti anak dengan disabilitas, anak dari keluarga miskin ekstrem, atau perempuan usia remaja menghadapi tantangan tambahan berupa stigma sosial dan eksklusi kultural. Wawancara di Mojosoongo dan Panularan menunjukkan bahwa beberapa anak dengan kebutuhan khusus tidak didaftarkan ke sekolah karena dianggap akan “mengganggu” proses belajar anak lain. Dalam kasus lain, anak perempuan yang sudah menginjak usia SMP kadang lebih diprioritaskan untuk bekerja membantu ibu di rumah daripada menyelesaikan pendidikan formal.

Selain itu, stigma terhadap keluarga miskin juga masih kental di lingkungan sekolah. Anak-anak dari latar belakang ekonomi rendah sering merasa malu karena tidak memiliki seragam lengkap, alat tulis yang layak, atau uang jajan, yang menyebabkan mereka menarik diri secara sosial dan akhirnya kehilangan semangat belajar. Tanpa intervensi sosial yang

memadai dari sekolah dan masyarakat sekitar, anak-anak ini berisiko tinggi untuk putus sekolah secara dini.

Tabel 5.13 Sintesis Tantangan Sosial dan Dampak Jangka Panjang terhadap Akses Pendidikan

No.	Tantangan Sosial	Deskripsi Ringkas	Dampak Jangka Panjang
1	Rendahnya Pendidikan Orang Tua	Mayoritas orang tua hanya tamat SD/SMP dan tidak memiliki pengetahuan tentang pentingnya pendidikan menengah atau tinggi.	• Rendahnya aspirasi pendidikan antar generasi • Reproduksi kemiskinan struktural • Minimnya mobilitas sosial keluarga
2	Dorongan untuk Anak Bekerja Dini	Anak-anak diminta bekerja membantu ekonomi keluarga sebelum menamatkan sekolah.	• Tingginya angka putus sekolah usia SMP–SMA • Kehilangan potensi SDM produktif • Meningkatnya pekerja anak
3	Lingkungan Sosial yang Negatif	Paparan narkoba, geng jalanan, dan minimnya keteladanan dari remaja/pemuda sekitar.	• Normalisasi perilaku menyimpang Budaya anti-pendidikan berkembang • Meningkatnya kriminalitas remaja
4	Minimnya Akses ke Informasi Beasiswa	Orang tua tidak tahu cara mengakses bantuan pendidikan akibat rendahnya literasi digital dan informasi formal.	• Bantuan pendidikan tidak tepat sasaran • Anak dari keluarga miskin tidak mendapatkan hak pendidikan • Turunnya partisipasi sekolah menengah
5	Kurangnya Infrastruktur Digital Rumah Tangga	Tidak semua keluarga memiliki akses internet atau perangkat digital untuk belajar atau mendaftar bantuan.	• Kesenjangan digital makin melebar • Anak tidak mampu mengikuti pembelajaran daring • Tertinggal dalam akses informasi dan inovasi

5.1.3.5 Analisis Spasial terhadap Disparitas Pendidikan

Analisis spasial terhadap akses dan partisipasi pendidikan di Kota Surakarta menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan tidak bersifat acak, melainkan mengikuti pola geografis yang berasosiasi erat dengan status sosial-ekonomi masyarakat di masing-masing wilayah. Berdasarkan hasil triangulasi data yang diperoleh dari wawancara mendalam, observasi lapangan, dan data sekunder pemerintah daerah, teridentifikasi bahwa disparitas pendidikan membentuk gradien spasial barat–timur, di mana wilayah barat dan barat daya kota (seperti Laweyan dan sebagian Banjarsari)

menunjukkan akses dan partisipasi pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah timur dan timur laut (seperti Jebres, Pasar Kliwon, dan Serengan).

Wilayah dengan akses ekonomi yang lebih baik, dominasi pekerjaan formal, dan kepemilikan aset rumah tangga yang tinggi, cenderung memiliki fasilitas pendidikan yang lebih lengkap, partisipasi pendidikan yang lebih tinggi, dan risiko putus sekolah yang lebih rendah. Sebaliknya, wilayah dengan kerentanan ekonomi, dominasi pekerjaan informal, serta keterbatasan akses layanan dasar, menghadapi tantangan signifikan dalam menjaga kontinuitas pendidikan, khususnya pada jenjang menengah dan atas. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan dan kemiskinan saling memperkuat dalam membentuk siklus eksklusi sosial yang sulit diputus tanpa intervensi lintas sektor.

Kelurahan Pajang dan Karangasem menempati klaster tertinggi dalam hal akses dan partisipasi pendidikan:

1. Sekolah dasar hingga menengah tersedia dalam radius kurang dari 2 km dari pemukiman warga.
2. Transportasi tidak menjadi hambatan karena mayoritas keluarga memiliki kendaraan pribadi.
3. Sekolah di wilayah ini memiliki kualitas fasilitas yang memadai, termasuk laboratorium, perpustakaan, dan akses internet.
4. Mayoritas orang tua bekerja sebagai ASN, guru, atau pensiunan, dengan pendapatan stabil dan tingkat literasi pendidikan yang tinggi.

Tantangan utama di wilayah ini adalah keterbatasan kuota zonasi SMA negeri, yang terkadang memaksa anak bersekolah di luar kelurahan. Namun, hal ini dapat diatasi oleh kapasitas mobilitas keluarga, baik dengan kendaraan pribadi maupun pilihan sekolah swasta. Kadipiro merepresentasikan zona transisi, di mana akses pendidikan tidak seburuk wilayah marginal, namun juga tidak sebaik wilayah inti (barat):

1. Sekolah dasar dan menengah pertama tersedia dan dapat dijangkau dengan relatif mudah.
2. Akses ke jenjang SMA terganggu oleh sistem zonasi serta terbatasnya jumlah SMA negeri di sekitar.
3. Biaya tambahan seperti seragam, iuran kegiatan, dan transportasi menjadi beban bagi keluarga kelas menengah bawah.
4. Anak-anak tetap bersekolah, namun partisipasi pada jenjang pendidikan tinggi rendah, karena biaya kuliah dianggap tidak terjangkau dan bukan prioritas.

Keberlanjutan pendidikan di zona ini sangat tergantung pada dukungan finansial keluarga dan akses terhadap informasi beasiswa atau program afirmasi pendidikan. Ketiga kelurahan ini

merupakan klaster dengan disparitas pendidikan tertinggi, yang mencerminkan ketertinggalan dalam dimensi spasial dan sosial. Pola ketimpangan terlihat jelas sebagai berikut:

1. Mojosongo (Kecamatan Jebres):

- a. Jarak ke sekolah menengah negeri cukup jauh, dan transportasi umum tidak mendukung.
- b. Banyak anak tidak diterima di sekolah negeri karena sistem zonasi, dan tidak memiliki alternatif swasta yang terjangkau.
- c. Tingkat putus sekolah meningkat setelah jenjang SD/SMP, terutama pada anak dari keluarga berpendapatan rendah.

2. Panularan (Kecamatan Pasar Kliwon):

- a. Jumlah sekolah negeri tidak mencukupi, dan fasilitas yang ada tidak merata.
- b. Warga mengeluhkan bahwa bantuan pendidikan seperti KIP/KIS tidak aktif atau sulit diakses karena kendala administratif.
- c. Ketiadaan transportasi murah menjadi hambatan utama untuk anak-anak dari keluarga miskin.

3. Joyotakan (Kecamatan Serengan):

- a. Meskipun akses ke SD masih tersedia, banyak anak kesulitan melanjutkan ke SMP dan SMA karena kendala biaya dan sosial.
- b. Lingkungan didominasi oleh norma sosial negatif, seperti kenakalan remaja, narkoba, dan geng motor.
- c. Rendahnya pendidikan orang tua dan dominasi pekerjaan informal menyebabkan rendahnya dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan anak.

Pola spasial yang teridentifikasi mengonfirmasi bahwa ketimpangan akses pendidikan di Kota Surakarta memiliki dimensi geografis yang beririsan langsung dengan distribusi kemiskinan, kepemilikan aset, jenis pekerjaan, serta akses terhadap layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi. Gradien ketimpangan ini secara kasar membagi Kota Surakarta ke dalam dua klaster utama:

1. Klaster Barat dan Barat Daya (Laweyan, sebagian Banjarsari): wilayah dengan tingkat kesejahteraan relatif tinggi, didukung oleh infrastruktur dan budaya pendidikan yang kuat.
2. Klaster Timur dan Timur Laut (Jebres, Pasar Kliwon, Serengan): wilayah dengan tantangan multidimensi, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, dan penghidupan.

Berikut adalah tabel ringkasan spasial per wilayah berdasarkan hasil analisis pada narasi sebelumnya. Tabel ini menyajikan data secara terstruktur untuk masing-masing wilayah, mencakup indikator akses pendidikan, partisipasi sekolah, infrastruktur, pekerjaan orang tua, dan tantangan utama, sehingga memudahkan analisis komparatif antarwilayah di Kota Surakarta.

Tabel 5.14 Ringkasan Spasial Akses dan Partisipasi Pendidikan di Kota Surakarta

No.	Kelurahan / Kecamatan	Akses Sekolah (SD–SMA)	Partisipasi Pendidikan	Pekerjaan Orang Tua	Kondisi Sosial	Tantangan Utama
1	Pajang / Laweyan	Sangat Baik (semua jenjang dalam radius 2 km)	Tinggi (>90%)	ASN, guru, pensiunan	Stabil, dukungan pendidikan tinggi	Zonasi SMA, persaingan masuk sekolah negeri favorit
2	Karangasem / Laweyan	Sangat Baik	Tinggi	Pegawai formal, wirausaha	Lingkungan kondusif, literasi pendidikan tinggi	Kuota sekolah negeri terbatas
3	Kadipiro / Banjarsari	Baik (SD–SMP), terbatas SMA	Sedang–Tinggi	Campuran formal-informal	Literasi pendidikan bervariasi	Beban biaya tambahan, akses beasiswa terbatas
4	Mojosongo / Jebres	Terbatas (jarak jauh, transportasi sulit)	Rendah (<70%)	Buruh, pekerja informal	Lingkungan padat, kenakalan remaja	Zonasi diskriminatif, putus sekolah tinggi, minim transportasi
5	Panularan / Pasar Kliwon	Terbatas (SMP–SMA)	Rendah	Pekerja informal, pengangguran	Tidak stabil, minim literasi beasiswa	KIP tidak aktif, biaya transportasi tinggi, administrasi rumit

No.	Kelurahan / Kecamatan	Akses Sekolah (SD–SMA)	Partisipasi Pendidikan	Pekerjaan Orang Tua	Kondisi Sosial	Tantangan Utama
6	Joyotakan / Serengan	Terbatas	Rendah	Pekerja informal	Lingkungan negatif, kenakalan, narkoba	Putus sekolah pasca-SD, dukungan keluarga rendah, minim tokoh teladan

Keterangan Kategori:

- Akses Sekolah: Diukur dari ketersediaan dan kedekatan sekolah negeri SD–SMA, serta moda transportasi.
- Partisipasi Pendidikan: Estimasi kasar berdasarkan observasi dan wawancara (angka aktual dapat ditambahkan).
- Pekerjaan Orang Tua: Mempengaruhi kestabilan ekonomi dan orientasi pendidikan anak.
- Kondisi Sosial: Termasuk norma, nilai, dan pengaruh lingkungan sekitar.
- Tantangan Utama: Masalah dominan yang menghambat keberlanjutan pendidikan.

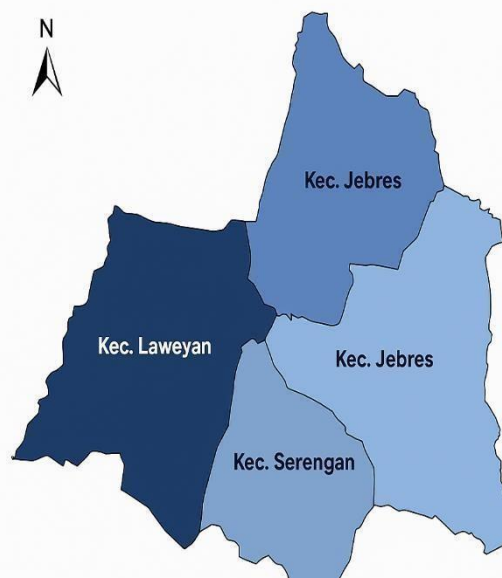
Hasil wawancara dengan warga dari lima kecamatan utama di Kota Surakarta mengungkapkan adanya ketimpangan spasial yang signifikan dalam hal akses dan partisipasi pendidikan. Ketimpangan ini erat kaitannya dengan struktur sosial-ekonomi yang membentuk karakteristik unik tiap wilayah. Wilayah dengan penduduk berpenghasilan tetap, kepemilikan aset produktif tinggi, dan latar belakang pendidikan orang tua yang baik—seperti Laweyan (Pajang dan Karangasem) memiliki tingkat partisipasi pendidikan yang tinggi dan berkelanjutan. Hal ini diperkuat oleh tersedianya fasilitas pendidikan yang lengkap, transportasi yang mendukung, dan budaya keluarga yang menghargai pendidikan formal.

Wilayah Mojosongo (Kec. Jebres), Panularan (Kec. Laweyan), dan Joyotakan (Kec. Serengan) menunjukkan keterbatasan serius dalam keberlanjutan pendidikan, terutama setelah jenjang SMP. Pendidikan sering kali dikalahkan oleh kebutuhan ekonomi jangka pendek. Anak-anak harus membantu pekerjaan orang tua, terhambat oleh biaya sekolah lanjutan, atau terdampak oleh lingkungan sosial yang tidak mendukung (seperti narkoba, kenakalan remaja, dan budaya putus

sekolah). Situasi ini menunjukkan siklus ketimpangan di mana kemiskinan dan pendidikan saling memperkuat dalam bentuk *lingkaran struktural* yang sulit diputus tanpa intervensi lintas sektor dan berbasis komunitas.

Wilayah Kadipiro di Kecamatan Banjarsari menempati posisi tengah sebagai wilayah “transisi” memiliki infrastruktur pendidikan dasar yang cukup baik namun masih menghadapi hambatan biaya dan akses untuk pendidikan tinggi. Ini menjadi indikator bahwa kemiskinan pendidikan tidak hanya monopoli kawasan marginal, tapi juga berpotensi terjadi pada zona menengah jika dukungan negara dan akses informasi beasiswa tidak merata.

Pola Spasial Ketimpangan Akses Pendidikan di Kota Surakarta



Tabel 5.15 Pola Spasial Ketimpangan Akses Pendidikan di Kota Surakarta

Kecamatan	Profil Sosial-Ekonomi	Akses Pendidikan	Tingkat Partisipasi	Tantangan Utama
Laweyan (Pajang, Karangasem)	Stabil, pekerjaan formal (ASN, guru, pensiunan), aset tinggi	Sangat baik (SD-SMA dekat, fasilitas lengkap)	Tinggi (banyak melanjutkan kuliah)	Zonasi SMA, biaya kuliah tinggi
Banjarsari (Kadipiro)	Menengah, kombinasi formal dan informal	Baik (SD/SMP dekat, SMA terbatas)	Sedang (banyak hanya sampai SMA)	Biaya sekolah, zonasi, info beasiswa
Jebres (Mojosongo)	Rentan, sektor informal dominan	Buruk (jarak jauh, transportasi sulit)	Rendah (putus sekolah tinggi)	Transportasi, zonasi, tekanan ekonomi
Pasar Kliwon (Panularan)	Rentan, pekerja serabutan	Terbatas (akses SMA rendah)	Rendah	Transportasi, kendala administrasi KIP/KIS
Serengan (Joyotakan)	Rentan, lingkungan sosial negatif	Terbatas (terutama pasca-SD)	Sangat rendah	Kenakalan remaja, narkoba, dukungan orang tua rendah

5.1.4. Dimensi Kesehatan

5.1.4.1 Akses Layanan Kesehatan dan Status Kepesertaan JKN/BPJS

Pemerintah Kota Surakarta senantiasa menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mewujudkan penyediaan layanan kesehatan yang adil dan berkualitas bagi seluruh penduduk. Komitmen tersebut diwujudkan melalui upaya peningkatan cakupan kepesertaan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Program ini menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, terutama bagi kelompok yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi. Total peserta JKN tersebut, sebanyak 294.012 jiwa atau sekitar 50,76% tergolong sebagai peserta PBI, yaitu warga yang iuran bulannya ditanggung oleh pemerintah pusat (APBN) atau pemerintah daerah (APBD). Sementara itu, 285.106 jiwa atau 49,24% merupakan peserta non- PBI, mencakup pekerja formal, sektor informal, dan peserta mandiri. Proporsi peserta PBI yang masih lebih dari separuh menunjukkan bahwa sebagian besar warga Kota Surakarta masih memerlukan dukungan pembiayaan dari negara karena berada dalam kategori miskin atau rentan miskin.

Fenomena ini mencerminkan bahwa meskipun akses terhadap layanan kesehatan telah luas, namun kesenjangan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat masih terlihat. Umumnya, peserta PBI merupakan kelompok dengan pendapatan di bawah Upah Minimum Kota (UMK) yang belum memiliki kemampuan untuk membayar iuran secara mandiri. Dalam hal ini, kebijakan PBI memainkan peran krusial dalam menurunkan beban ekonomi rumah tangga miskin dan mencegah mereka jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan akibat biaya kesehatan yang tidak terduga.

Pentingnya keberadaan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu juga diperkuat melalui pernyataan warga bernama Bapak Kuspriyanto dalam wawancara yang dilakukan. Beliau menyampaikan bahwa Kartu Indonesia Sehat (KIS) sangat membantu dalam memperoleh layanan kesehatan tanpa perlu mengeluarkan biaya, baik untuk pengobatan, pemeriksaan, maupun rawat inap. KIS dinilai sangat bermanfaat bagi keluarga berpenghasilan rendah yang sebelumnya kesulitan mengakses fasilitas kesehatan. Namun, di balik capaian yang menggembirakan tersebut, masih terdapat sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan di Kota Surakarta. Salah satu keluhan yang sering disampaikan masyarakat adalah keterbatasan kapasitas ruang rawat inap, khususnya di rumah sakit rujukan lanjutan.

Kondisi ini menyebabkan terjadinya antrean dan keterlambatan dalam penanganan medis bagi pasien yang membutuhkan perawatan intensif. Selain itu, mekanisme pengalihan status dari peserta mandiri ke PBI belum sepenuhnya berjalan dengan lancar, terutama bagi warga yang mengalami penurunan pendapatan secara tiba-tiba akibat pemutusan hubungan kerja, musibah, atau kondisi darurat lainnya.

Cakupan layanan dasar terus membaik, tetapi masih perlu peningkatan layanan yang berkualitas terutama bagi kelompok masyarakat rentan dan kelompok berkebutuhan khusus, termasuk ibu, anak, peyandang gangguan kesehatan mental, lansia, dan warga miskin. Penguatan Posyandu sebagai ujung tombak layanan kesehatan masyarakat menjadi sangat penting, terutama melalui pengembangan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) dan Posyandu yang memenuhi standar Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sistem kesehatan yang kuat dengan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif diarahkan untuk menurunkan angka stunting, mendorong pencapaian Kota Sehat, serta memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan inklusif. Secara keseluruhan, upaya pemerataan akses layanan kesehatan di Kota Surakarta telah menunjukkan hasil yang baik.

Ketimpangan sosial ekonomi serta mutu pelayanan kesehatan masih menjadi agenda penting yang perlu diatasi secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar setiap warga, tanpa memandang latar belakang sosial ekonominya, memiliki peluang yang sama dalam mengakses layanan kesehatan yang layak demi mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera.

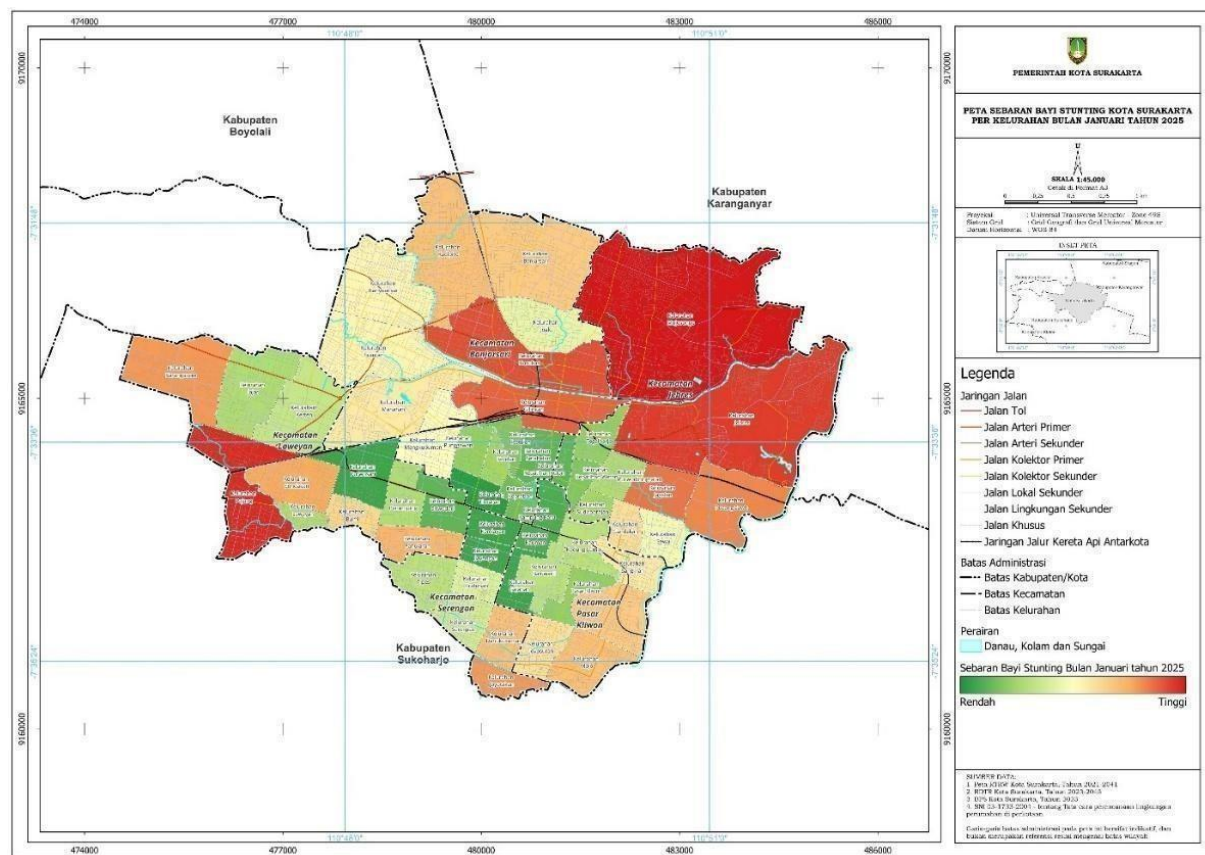
5.1.4.2 Status Gizi Anak dan Prevalensi Stunting/Gizi Buruk

Pemerintah Kota Surakarta menunjukkan komitmen nyata dalam menangani persoalan stunting melalui serangkaian program dan langkah strategis yang dijalankan secara berkelanjutan. Berdasarkan perkembangan data sejak tahun 2019, angka prevalensi stunting di Kota Surakarta berhasil ditekan dari 18,76% menjadi 16,20% pada tahun 2024. Walaupun sempat meningkat hingga 20,40% di tahun 2021, peningkatan tersebut banyak dipengaruhi oleh terganggunya layanan kesehatan serta melemahnya kondisi ekonomi masyarakat selama masa pandemi. Namun demikian, penurunan kembali terjadi dan menjadi tren positif hingga akhir tahun 2024. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari berbagai upaya yang dilaksanakan pemerintah daerah, di antaranya perluasan layanan posyandu, penguatan pelaksanaan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), serta koordinasi lintas sektor yang melibatkan bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Persoalan di lapangan masih kerap ditemukan, terutama pada tingkat kelurahan. Di Kelurahan Purwosari, misalnya, program PMT belum sepenuhnya berjalan optimal. Berdasarkan laporan kader posyandu setempat, terdapat kasus di mana makanan tambahan yang diberikan tidak dikonsumsi oleh anak-anak penerima. Ada yang hanya memakannya beberapa hari, ada pula yang menolak sama sekali. Masalah ini banyak berkaitan dengan pola pengasuhan anak, karena sebagian besar anak tidak dirawat langsung oleh orang tua melainkan dititipkan pada lembaga penitipan. Selain itu, persepsi masyarakat yang merasa secara ekonomi tidak tergolong miskin juga memunculkan penolakan terhadap label “*keluarga risiko stunting*”, sehingga enggan terlibat aktif dalam program yang disediakan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penurunan stunting tidak cukup hanya dengan menyediakan makanan tambahan, namun juga memerlukan peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi serta peran orang tua dalam tumbuh kembang anak. Selain itu, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang dirilis pada Januari 2025, dua wilayah yang masih mencatat angka stunting relatif tinggi adalah Kecamatan Jebres dan Kecamatan Laweyan. Dengan demikian, penanganan stunting ke depan perlu diarahkan secara lebih fokus ke kecamatan-kecamatan tersebut melalui pendekatan layanan yang lebih intensif, peningkatan pendampingan kepada keluarga, serta edukasi yang berkelanjutan.

Pemerintah Kota Surakarta perlu terus memperkuat sinergi program penurunan stunting dengan melibatkan lebih banyak sektor dan elemen masyarakat. Penguatan komunikasi gizi, peningkatan partisipasi keluarga, serta penguatan peran kader di tingkat lokal menjadi langkah penting agar setiap anak di Kota Surakarta dapat tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari stunting.



Gambar 5.1 Peta Sebaran Bayi Stunting Perkelurahan Bulan Januari Tahun 2025

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025 - diolah Tim CIP Kota Surakarta

5.1.4.3 Ketersediaan Tenaga Medis dan Fasilitas Kesehatan

Ketersediaan tenaga kesehatan serta sarana pelayanan medis di Kota Surakarta telah mencukupi dan mampu mendukung pelaksanaan layanan kesehatan dasar secara optimal. Hasil wawancara dengan tenaga medis di Puskesmas Stabelan dan bidan dari Puskesmas Pucangsawit menunjukkan bahwa jumlah tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah mereka sudah sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan dinilai cukup untuk menangani jumlah pasien yang ada di lingkungan sekitar. Dari sisi jumlah maupun komposisi jenis tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan bidan, tidak ditemukan kekurangan yang signifikan. Para tenaga medis tersebut dapat menjalankan tugas pelayanan secara efektif sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing. Di samping itu, kondisi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, baik di tingkat puskesmas maupun rumah sakit, umumnya sudah layak dan menunjang pelaksanaan program-program kesehatan di Kota Surakarta.

Masih terdapat isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama mengenai keterbatasan kapasitas ruang rawat inap. Fasilitas perawatan inap yang tersedia saat ini belum sepenuhnya mampu menampung lonjakan jumlah pasien dalam situasi tertentu, seperti ketika terjadi peningkatan kasus secara mendadak. Akibatnya, seringkali terjadi antrean pasien dan keterlambatan dalam pemberian layanan, yang pada gilirannya dapat berdampak pada mutu pelayanan secara keseluruhan. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis guna memperkuat sistem layanan kesehatan, salah satunya dengan menyesuaikan kapasitas tempat tidur di rumah sakit, khususnya di kawasan dengan tingkat kunjungan pasien yang tinggi. Selain penambahan ruang, dibutuhkan pula penguatan sistem rujukan dan alur distribusi pasien antar fasilitas kesehatan. Hal ini bertujuan agar pelayanan tetap berjalan efisien, pasien mendapatkan penanganan tepat waktu, dan kenyamanan selama masa perawatan dapat lebih terjamin.

5.1.4.4 Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Layanan Kesehatan

Penyelenggaraan layanan kesehatan di Kota Surakarta sudah berlangsung sesuai dengan ketentuan standar pelayanan minimal dan berjalan dengan baik. Keberadaan puskesmas induk dan puskesmas pembantu di sejumlah wilayah telah mendukung pemerataan akses layanan dasar bagi masyarakat. Kegiatan pemeriksaan kesehatan rutin yang diselenggarakan secara gratis setiap bulan di posyandu memberikan kontribusi penting dalam peningkatan status kesehatan masyarakat, terutama untuk kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, dan lansia. Dari sisi aksesibilitas fisik, masyarakat Kota Surakarta umumnya tidak mengalami kesulitan berarti dalam menjangkau fasilitas layanan kesehatan. Temuan di lapangan mengindikasikan adanya kendala non-teknis yang masih dihadapi sebagian warga, terutama dalam pemanfaatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan.

Salah satu permasalahan yang menonjol adalah masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan prosedur pelayanan menggunakan BPJS, khususnya dalam penanganan kasus gawat darurat atau layanan lanjutan yang memerlukan proses rujukan. Berdasarkan keterangan warga, untuk pengobatan ringan, penggunaan BPJS cukup mudah dan tidak menimbulkan hambatan. Namun dalam kasus-kasus tertentu yang lebih kompleks, prosedur administrasi kerap dinilai rumit, menyita waktu, dan menguras tenaga serta emosi pasien dan keluarga. Di sisi lain, kondisi ekonomi juga turut menjadi faktor penghambat, terutama bagi warga yang belum tercakup sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan harus membayar iuran secara mandiri. Meskipun pengurusan kepesertaan dapat diselesaikan dalam waktu singkat, biasanya satu hari, keterbatasan

informasi dan kemampuan finansial masih menjadi kendala bagi sebagian kalangan.

5.1.5 Dimensi Sosial dan Lingkungan

5.1.6.5 Partisipasi Sosial (Kegiatan Warga, Gotong Royong, Forum RT/RW)

Hasil wawancara dengan salah satu warga Kecamatan Pasar Kliwon, tingkat keterlibatan sosial masyarakat di Kecamatan Pasar Kliwon mencerminkan kuatnya rasa kebersamaan dan kemampuan masyarakat dalam membangun jejaring sosial yang solid. Berdasarkan hasil wawancara dengan warga, diketahui bahwa masyarakat masih secara aktif melaksanakan berbagai kegiatan bersama yang mencerminkan nilai-nilai gotong royong dan solidaritas, meskipun berada di tengah lingkungan perkotaan. Salah satu kegiatan utama yang rutin dilakukan adalah kerja bakti bersama yang dilaksanakan serentak setiap bulan. Selain itu, kegiatan serupa juga diselenggarakan secara mandiri di tingkat RT dan RW, sebagai bagian dari inisiatif warga dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Aktivitas ini mencakup berbagai hal, seperti pembersihan kawasan pemukiman, pemeliharaan saluran air, dan perawatan sarana umum. Tidak hanya terbatas di pusat kelurahan, kegiatan ini juga masih aktif dijalankan di daerah perbatasan, menunjukkan adanya pemerataan partisipasi di seluruh wilayah kelurahan.

Selain kerja bakti, masyarakat juga rutin mengadakan pertemuan warga setiap bulan, yang menjadi wadah penting untuk memperkuat interaksi sosial dan membahas isu-isu yang berkembang di lingkungan sekitar. Berbagai aktivitas sosial lainnya pun terus berlangsung, seperti menjenguk warga yang sedang sakit, pelaksanaan posyandu secara rutin, serta keterlibatan aktif Kelompok Wanita Tani (KWT). KWT secara khusus mengembangkan kegiatan penanaman tanaman pangan yang hasilnya kembali disalurkan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi nyata dalam penguatan ketahanan pangan lokal. Kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan juga cukup tinggi. Pengelolaan sampah rumah tangga dilakukan melalui sistem pemilahan dan daur ulang, di mana sebagian sampah dijual, sementara sebagian lainnya diolah menjadi barang bernilai guna seperti vas bunga, pakaian daur ulang, dan produk kerajinan lainnya.

5.1.6.6 Keamanan Lingkungan

Hasil pengumpulan informasi dari warga di sejumlah kelurahan di Kota Surakarta mengungkapkan bahwa masih terdapat berbagai persoalan sosial yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Di Kelurahan Mojosongo, misalnya, masyarakat menyampaikan bahwa kesenjangan sosial dan ekonomi masih dirasakan, yang terlihat dari adanya perbedaan signifikan dalam tingkat kesejahteraan antar penduduk. Selain itu, warga juga menyoroti masih

adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual, yang mengindikasikan perlunya peningkatan perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak-anak. Isu sosial lainnya yang cukup mengkhawatirkan adalah masih maraknya penyalahgunaan serta peredaran narkotika di lingkungan sekitar. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi upaya pemberantasan narkoba yang tidak hanya membutuhkan penegakan hukum, tetapi juga pendekatan kolaboratif yang melibatkan peran aktif masyarakat serta dukungan dari berbagai institusi terkait.

Warga Kelurahan Panularan menyatakan bahwa kondisi keamanan di lingkungan mereka belum sepenuhnya kondusif. Kasus pencurian masih ada dan menimbulkan rasa tidak aman di tengah masyarakat. Wilayah ini juga menghadapi kerentanan terhadap bencana, seperti banjir dan tanah longsor yang sering muncul saat curah hujan tinggi. Dalam situasi tersebut, masyarakat secara sukarela melakukan pemantauan di sekitar aliran sungai dan bahu-membahu untuk meminimalkan dampak bencana. Hal ini mencerminkan tingginya kesadaran dan semangat kebersamaan dalam menghadapi kondisi darurat. Sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana, sejumlah kelurahan di Kota Surakarta telah membentuk organisasi masyarakat tanggap bencana, yang terdiri dari relawan lokal yang siaga dalam situasi darurat. Inisiatif ini terbukti efektif dalam mempercepat penanganan dan memperkuat kapasitas komunitas dalam menghadapi ancaman alam maupun sosial.

Melihat berbagai dinamika tersebut, diperlukan penanganan lintas sektor yang lebih sinergis dan berkelanjutan untuk menjawab tantangan sosial serta meningkatkan ketahanan lingkungan. Pemerintah Kota Surakarta diharapkan dapat mengoptimalkan peran kelembagaan masyarakat, memperkuat forum komunikasi warga, dan mendorong kolaborasi antar perangkat daerah guna menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan sejahtera bagi seluruh penduduk.

5.1.6.7 Kualitas Lingkungan (Akses Sanitasi, Air Bersih, Drainase)

Sistem drainase di Kota Surakarta telah berfungsi cukup baik. Pemerintah Kota Surakarta secara konsisten melakukan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan jaringan drainase di seluruh kelurahan. Meskipun demikian, beberapa kawasan seperti Pasar Burung dan Pasar Kliwon masih menghadapi kendala berupa tersumbatnya saluran air akibat tumpukan sampah. Oleh karena itu, pembersihan secara berkala perlu terus dilakukan agar aliran air tetap lancar, terutama di area dengan aktivitas masyarakat yang tinggi. Dari sisi penyediaan air bersih, PDAM unit Pajang dinilai sebagai yang terbaik di kota ini karena memanfaatkan mata air Cokro, sumber air yang juga digunakan oleh produsen air minum nasional. Namun demikian, akses layanan PDAM belum menjangkau seluruh

warga, sehingga masih ada masyarakat yang menggunakan sumur, walaupun sebagian kini hanya dimanfaatkan sebagai tandon air cadangan.

Khusus di Kelurahan Pajang, RW 8, pencapaian dalam pengelolaan lingkungan mendapatkan pengakuan di tingkat nasional melalui penghargaan PROKLIM kategori utama tahun 2024. Keberhasilan ini didukung oleh lingkungan fisik yang asri, seperti pepohonan rindang, pekarangan hijau, dan kebun milik warga, yang juga berdampak positif terhadap kualitas udara. Sistem pembuangan air limbah di wilayah Pajang juga tergolong baik karena didukung oleh aliran sungai besar seperti Jenes, Premulung, dan Brojo, yang membantu menjaga kelancaran aliran air dan mencegah genangan. Layanan pengangkutan sampah rumah tangga telah berjalan, meskipun masih dijumpai keterlambatan pengambilan akibat keterbatasan tenaga petugas. Upaya pemilahan sampah dari rumah tangga sudah mulai diterapkan di beberapa titik.

Kawasan Joglo, banjir masih kerap terjadi, disebabkan oleh tingginya volume air saat hujan serta daya serap tanah yang kurang memadai. Sementara itu, di Kecamatan Banjarsari (Sambirejo), genangan air juga menjadi masalah, sehingga pemerintah setempat telah menyediakan pompa air guna mempercepat proses pengeringan saat hujan lebat. Sedangkan di Kelurahan Mojosongo, pasokan air dari PDAM belum sepenuhnya lancar dan sering mengalami gangguan aliran. Kondisi sanitasi lingkungan di wilayah ini juga masih memerlukan perhatian. Pemerintah telah menyalurkan bantuan untuk penanganan stunting dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dengan jumlah bantuan sebesar Rp20 juta ditambah Rp2,5 juta untuk sekitar 15 rumah. Selain itu, fasilitas IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) sudah tersedia, meskipun masih ditemukan saluran got yang tersumbat yang menghambat aliran limbah.

Kota Surakarta telah mengembangkan fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) sebagai inovasi pengolahan sampah menjadi energi. Namun, efektivitas pengoperasian PLTSA masih belum optimal, terutama karena kendala teknis pada mesin. Program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) juga telah berjalan di masyarakat, namun belum sepenuhnya diterapkan secara merata. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah melakukan sosialisasi kepada warga sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

5.1.6.8 Akses dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Infrastruktur jalan di Kota Surakarta berada dalam kondisi yang cukup baik. Wilayah seperti Kelurahan Kerten, misalnya, kondisi permukaan jalan terbilang mantap dan menunjang mobilitas warga. Akses menuju layanan kesehatan maupun moda transportasi umum, seperti Batik Solo Trans

(BST), juga relatif mudah dijangkau oleh masyarakat setempat. Sejumlah titik di wilayah pinggiran, terutama di sekitar Pasar Kleco, masih menunjukkan kondisi jalan yang kurang optimal. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh tingginya aktivitas pasar dan kurangnya intensitas perawatan jalan. Di kawasan perbatasan antara Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo, seperti di sekitar lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), masih terdapat jalan berlubang yang memerlukan perhatian. Wilayah tersebut, akses ke angkutan umum juga belum merata, sehingga warga harus menempuh jarak lebih jauh untuk mencapai halte.

Wilayah-wilayah padat penduduk seperti Jebres, Banjarsari, Pasar Kliwon, dan Semanggi, akses terhadap transportasi publik lebih tersedia. Halte BST telah tersebar di beberapa titik strategis, dan kondisi jalan juga umumnya dalam keadaan baik. Program peningkatan kualitas jalan juga telah masuk dalam agenda tahunan pemerintah daerah. Beberapa warga masih menganggap bahwa transportasi umum belum sepenuhnya optimal. Keluhan yang muncul antara lain berkaitan dengan arah rute yang membingungkan bagi warga pendatang, serta aksesibilitas layanan yang belum sepenuhnya inklusif, terutama bagi kelompok rentan. Dari sisi lingkungan, Kota Surakarta telah menyediakan berbagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) di banyak titik kota. RTH ini terbagi atas dua kategori, yaitu RTH publik seperti taman, lapangan, dan jalur hijau, serta RTH privat yang meliputi lahan milik warga atau institusi. Keberadaan RTH tidak hanya membantu menjaga kualitas udara, tetapi juga memberi ruang interaksi sosial dan rekreasi bagi masyarakat kota.

5.1.6 Dimensi Kebebasan dan Pilihan Hidup

5.1.7.5 Persepsi Warga Dalam Kebebasan Mengambil Keputusan Hidup

Warga di wilayah Serengan dan Jayengan, menunjukkan persepsi yang cukup kompleks terkait kebebasan mengambil keputusan dalam kehidupan mereka. Kebebasan ini tidak hanya dipahami sebagai kebebasan memilih pekerjaan atau pendidikan, tetapi juga mencakup otonomi dalam menghadapi dinamika keluarga, lingkungan kerja, dan akses terhadap layanan sosial. Wawancara dengan Ibu Selvi, perempuan pekerja yang juga kader kesehatan, terungkap bahwa meskipun ia menghadapi tekanan ekonomi dan peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus anggota Linmas, ia tetap merasakan bahwa dirinya mampu membuat keputusan penting bagi keluarganya meskipun terbatas oleh faktor eksternal seperti status ekonomi dan akses tempat usaha.

Beberapa responden mengungkapkan bahwa kendala sosial, seperti stigma atau keterbatasan dalam jaringan sosial-ekonomi, membatasi kebebasan mereka dalam menentukan jalan hidup. Ibu Selvy misalnya, menghadapi tantangan besar setelah mengalami perceraian dan harus memulai

kembali hidup dari nol bersama dua anak. Meski demikian, ia tidak menyerah. Ia aktif dalam komunitas dan menjalankan beberapa peran sosial, termasuk menjadi kader Posbindu dan relawan kesehatan. Pengalaman pahit masa lalu justru menguatkannya untuk mandiri dan membantu orang lain. Ini menunjukkan bahwa persepsi kebebasan sering kali dibentuk dari pengalaman pribadi dan respons adaptif terhadap kesulitan.

Aparat kelurahan seperti Plt Lurah Serengan, Bapak Sumaryanto, memandang bahwa sebagian besar warga memiliki kecenderungan bergantung pada pemerintah, terutama dalam konteks bantuan sosial. Hal ini berdampak negatif terhadap motivasi warga untuk meningkatkan taraf hidup secara mandiri. Ia menyebut bahwa banyak warga menolak untuk “naik kelas” dalam data kemiskinan, karena takut kehilangan bantuan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebebasan mengambil keputusan hidup seringkali dipengaruhi oleh struktur kebijakan dan insentif sosial yang justru menciptakan ketergantungan.

Aspek kebebasan juga terlihat dari cara warga memanfaatkan teknologi dan media sosial sebagai alat untuk mengekspresikan diri dan mencari peluang ekonomi. Keterbatasan literasi digital dan rasa percaya diri (*self-efficacy*) menjadi kendala besar, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Selvy yang merasa kurang percaya diri memasarkan produknya secara online meskipun sudah memiliki akun Facebook dan TikTok. Hal ini mengindikasikan bahwa kebebasan secara teknis (memiliki alat) tidak selalu sejalan dengan kebebasan secara psikologis (merasa mampu menggunakan alat tersebut).

Perspektif penyedia layanan, seperti PDAM, terdapat dinamika menarik. Program pemasangan air gratis bagi warga miskin kadang tidak diterima oleh warga karena status “miskin” dianggap menciptakan stigma. Ini memperkuat temuan bahwa sebagian warga merasa identitas sosial yang melekat dari program pemerintah dapat membatasi ruang otonomi mereka, bahkan dalam hal akses terhadap layanan dasar. Warga ingin memperoleh fasilitas tetapi tanpa embel-embel status penerima bantuan, yang dianggap menurunkan martabat.

Persepsi warga terhadap kebebasan mengambil keputusan hidup berada dalam spektrum antara determinasi individu dan kendala struktural. Mereka yang memiliki akses terhadap jaringan sosial, pengalaman organisasi, dan dukungan keluarga, cenderung merasa lebih bebas dan percaya diri. Sebaliknya, mereka yang terkungkung dalam struktur sosial yang kaku atau ketergantungan pada bantuan sosial, cenderung merasa terbatas dalam mengambil keputusan penting dalam hidupnya.

Implikasi dari temuan ini menegaskan pentingnya penguatan literasi sosial, program pemberdayaan berbasis komunitas, serta kebijakan sosial yang tidak menstigma. Pemerintah kota perlu mempertimbangkan pendekatan pembangunan yang berfokus pada *empowerment* dan tidak semata-mata *charity*, agar warga dapat merasakan kebebasan hidup yang otentik dan berkelanjutan.

Tabel 5.16 Analisis Persepsi Warga terhadap Kebebasan Mengambil Keputusan Hidup

Aspek/Subtema	Temuan Lapangan	Sumber Data	Catatan/Kesimpulan Awal
Otonomi Perempuan Pekerja	Perempuan bekerja aktif sebagai anggota Linmas, menjalankan peran domestik sebagai ibu rumah tangga, serta mengelola usaha kecil (jualan door-to-door). Mampu mengatur waktu dan mengambil keputusan sendiri	Wawancara Mendalam	Tingkat otonomi tinggi secara personal, namun masih dibatasi oleh struktur ekonomi dan keterbatasan ruang sosial untuk pengembangan usaha.

Aspek/Subtema	Temuan Lapangan	Sumber Data	Catatan/Kesimpulan Awal
	meski dengan keterbatasan modal dan tempat.		
Respons terhadap Trauma dan Masa Lalu	Pasca perceraian secara paksa, Ibu Selvi mampu bangkit, mandiri secara ekonomi, dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.	Wawancara Mendalam	Resiliensi pribadi memperkuat rasa otonomi; pengalaman traumatik tidak selalu melemahkan kemampuan pengambilan keputusan.
Ketergantungan terhadap Bantuan Pemerintah	Warga di Serengan enggan keluar dari status penerima bantuan karena khawatir kehilangan hak. Ada resistensi saat bantuan dihentikan karena naik kelas, namun tidak ada dorongan untuk mandiri.	Wawancara Mendalam	Ketergantungan struktural terhadap bantuan sosial dapat melemahkan inisiatif individu, serta menciptakan siklus ketidakmandirian sosial dan ekonomi.
Literasi Digital dan Percaya Diri	Banyak warga memiliki akun media sosial seperti Facebook dan TikTok untuk usaha, tetapi belum percaya diri memasarkan produk secara online.	Wawancara Mendalam	Kebebasan digital secara teknis belum cukup; diperlukan penguatan kapasitas digital dan mental (self-efficacy) untuk mendukung otonomi ekonomi digital.
Stigma Status Penerima Bantuan	Sebagian warga menolak fasilitas bantuan seperti air bersih karena tidak ingin dicap sebagai “keluarga miskin” meskipun mereka sangat membutuhkan.	Wawancara Mendalam	Persepsi dan stigma sosial terhadap status miskin berdampak pada harga diri dan rasa kebebasan, bahkan dapat menghambat penerimaan bantuan yang semestinya.
Dukungan Sosial dan Jaringan	Ibu Selvi aktif dalam berbagai forum sosial seperti Posyandu, Posbindu, dan kader kesehatan, yang menjadi sarana untuk merasa diakui dan berdaya.	Wawancara Mendalam	Partisipasi sosial memperkuat kapasitas individu untuk mengambil keputusan, membangun jaringan dukungan, dan memperbesar rasa kontrol atas hidupnya.

Analisis tematik dari data lapangan menunjukkan bahwa kebebasan dalam mengambil keputusan hidup sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, keterlibatan sosial, struktur bantuan pemerintah, serta kapasitas individu dalam mengelola trauma dan adaptasi teknologi. Perempuan memiliki kapasitas untuk menjalankan berbagai peran secara simultan: sebagai pekerja, pengelola rumah tangga, dan pelaku ekonomi informal. Meski otonomi tinggi dalam pengambilan keputusan, keterbatasan modal dan ruang sosial masih menjadi hambatan. Ini menunjukkan adanya potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi perempuan jika ditopang kebijakan pendukung.

Pengalaman traumatik seperti perceraian tidak selalu menghasilkan ketidakberdayaan. Warga seperti Ibu Selvi menunjukkan resiliensi tinggi, bangkit menjadi individu yang mandiri secara ekonomi dan aktif secara sosial. Ini menantang asumsi bahwa trauma selalu melemahkan kapasitas keputusan. Warga menunjukkan ambivalensi terhadap bantuan sosial. Di satu sisi, bantuan meringankan beban ekonomi; di sisi lain, muncul ketergantungan dan resistensi terhadap mobilitas ekonomi karena takut kehilangan bantuan. Ini menjadi sinyal penting untuk meninjau ulang desain insentif program perlindungan sosial.

Meski memiliki akses terhadap platform digital, warga belum cukup percaya diri untuk memanfaatkannya sebagai alat pengembangan usaha. Ini menandakan bahwa kebebasan tidak cukup diberikan dari sisi akses (hardware), tetapi juga harus disertai dengan dukungan penguatan mental dan keterampilan. Ketakutan terhadap label “miskin” menyebabkan warga menolak fasilitas yang sebenarnya mereka butuhkan. Hal ini memperlihatkan konflik antara kebutuhan dasar dan nilai sosial yang melekat, yang dapat menghambat efektivitas kebijakan berbasis data sosial. Keterlibatan dalam forum sosial memperkuat rasa percaya diri dan memberi ruang aktualisasi diri. Ini menunjukkan pentingnya membangun ekosistem sosial yang mendukung keputusan individu, terutama di lingkungan yang padat dan miskin secara ekonomi. Berikut implikasi kebijakan atas dasar hasil temuan lapangan yang bisa ditindaklanjuti :

Tabel 5.17 Implikasi Kebijakan Berbasis Temuan Lapangan

Tema/Subtema	Masalah Utama	Akar Permasalahan	Rekomendasi Kebijakan	Penanggung Jawab Utama
Otonomi Perempuan Pekerja	Otonomi tinggi tapi terbatas ruang untuk pengembangan usaha	Minimnya modal dan akses pembinaan	Program inkubasi wirausaha berbasis komunitas perempuan + subsidi modal usaha mikro	Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian & Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Respons terhadap Trauma	Individu resilient tetapi minim dukungan psikososial formal	Kurangnya layanan pemulihan trauma berbasis komunitas	Pendampingan psikososial berbasis kader PKK dan Posyandu	Dinsos & Dinas Kesehatan

Ketergantungan Bantuan Sosial	Relasi vertikal warga–negara yang pasif; tidak	Desain bantuan tidak berbasis insentif kemandirian	Evaluasi ulang skema graduasi PKH + insentif untuk	Kemensos & Dinas Sosial Kota Surakarta
Tema/Subtema	Masalah Utama	Akar Permasalahan	Rekomendasi Kebijakan	Penanggung Jawab Utama
	mendorong kemandirian		keluarga yang naik kelas ekonomi	
Literasi Digital & Kepercayaan Diri	Akses digital tersedia, namun self-efficacy rendah	Kurangnya pelatihan berbasis praktik dan mentoring	Pelatihan pemasaran digital berbasis kasus nyata + pendampingan usaha rumahan berbasis RT/RW	Diskominfo SP & Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian
Stigma Status Penerima Bantuan	Warga menolak bantuan karena malu dicap “miskin”	Sistem klasifikasi bantuan terlalu eksplisit	Reformulasi sistem klasifikasi bantuan dengan skema anonimitas + intervensi berbasis kerahasiaan data	Bappeda & Dinsos
Dukungan Sosial & Keterlibatan Warga	Tidak semua wilayah memiliki jejaring sosial aktif	Ketimpangan pembangunan kapasitas kelembagaan komunitas	Revitalisasi peran karang taruna, Posyandu, dan PKK dalam penguatan kapasitas pengambilan keputusan individu	Lurah, Camat, dan OPD Terkait

5.1.7.6 Ekspektasi Masa Depan Keluarga dan Anak-anak

Ekspektasi terhadap masa depan keluarga dan anak-anak di kalangan warga Surakarta, terutama yang berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, sangat kental dengan semangat survival dan mobilitas sosial. Dalam wawancara dengan masyarakat ditemukan, bahwa pendidikan anak menjadi fokus utama harapan keluarga. Meskipun ia memiliki penghasilan terbatas (rata-rata Rp2,2 juta/bulan), mereka tetap menyekolahkan dua anaknya di SMK Negeri 7 dan SMP Negeri 10. Hal ini mencerminkan bahwa bagi kelompok rentan sekalipun, pendidikan adalah pintu utama untuk keluar dari ketimpangan dan kemiskinan struktural.

Kelompok rentan tidak hanya berjuang dalam ranah domestik, tetapi juga di ruang sosial yang lebih luas, seperti Selvi yang aktif sebagai kader Posbindu, kader kesehatan, serta relawan dalam beberapa forum RW. Partisipasi sosial bukan hanya menjadi saluran eksistensi, melainkan juga strategi bertahan hidup dan membangun harapan. Semakin banyak informasi dan jaringan yang ia

akses, semakin besar peluang untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi keluarganya. Ia tidak sekadar menunggu bantuan, tetapi berupaya membuka jalan, meski dalam ruang sempit. Ini adalah bentuk harapan yang sangat aktif, optimisme berbasis tindakan.

Harapan warga terhadap masa depan anak-anak tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai rintangan struktural, salah satunya adalah ketimpangan akses terhadap ruang ekonomi. Ibu Selvi menceritakan pengalamannya ditolak saat ingin berjualan di car free day (CFD) oleh komunitas pedagang yang sudah lebih dulu mapan. Hal ini menandakan adanya eksklusi ekonomi yang membatasi peluang warga kecil untuk berkembang. Ketika ruang ekonomi bersifat eksklusif dan tidak inklusif, maka harapan yang dibangun secara personal menjadi terhalang oleh tembok sosial yang kasat mata namun nyata.

Perspektif infrastruktur dan pelayanan dasar, kelurahan dan pemerintah telah berupaya membuka peluang, namun masih terdapat kekosongan pada level pendampingan berkelanjutan. Misalnya, program pelatihan usaha bagi warga miskin memang ada, namun setelah pelatihan selesai, tidak ada pendampingan bisnis, pemasaran, atau akses modal lanjutan. Hal ini juga dikemukakan oleh Plt Lurah Serengan, yang menyebut bahwa warga seringkali manja dengan bantuan, tapi faktanya banyak dari mereka justru mengalami stuck karena tidak ada sistem yang mendukung keberlanjutan dari inisiatif pelatihan.

Dukungan keluarga sangat menentukan bentuk dan kekuatan ekspektasi terhadap masa depan. Setelah menikah kembali, Selvi merasa lebih kuat secara psikologis dan logistik. Suaminya turut membantu pekerjaan rumah tangga dan mendukung ekonomi keluarga, meskipun dengan keterbatasan. Dalam situasi sosial seperti ini, solidaritas rumah tangga menjadi modal harapan. Ketika peran tidak hanya dibebankan pada satu pihak (dalam hal ini perempuan), maka stabilitas sosial keluarga menjadi lebih kokoh, dan harapan bisa disusun dengan lebih realistis.

Aspek kultural juga ikut membentuk ekspektasi. Selvi berasal dari Madura dan ditinggal ibunya sejak kecil. Pengalaman hidupnya tidak membuatnya larut dalam keterbatasan. Selvi dan masyarakat rentan lainnya membalik kondisi menjadikan hal tersebut sebagai energi untuk tidak mengulang siklus yang sama bagi anak-anaknya. Inilah yang dikenal sebagai resilience-driven aspiration atau harapan yang muncul dari luka, tetapi tetap diarahkan untuk pertumbuhan. Mereka menyebut dirinya ingin agar anak-anak tidak menjadi "pekerja kasar" seperti dirinya dan suaminya sekarang. Harapan ini menunjukkan adanya orientasi masa depan yang transgenerasional.

Perspektif bantuan pemerintah, warga di Jayengan umumnya telah menerima bantuan sosial seperti PKH dan BPNT. Dampak bantuan ini tidak selalu secara langsung memperkuat ekspektasi. Sebagian warga justru mengeluh karena kartu BPJS mereka mendadak tidak aktif. Hal ini memunculkan ketidakpastian dan kegelisahan tentang masa depan kesehatan anak-anak. Maka, ekspektasi terhadap masa depan bukan hanya terkait pendidikan atau pekerjaan, tetapi juga menyangkut rasa aman akan jaminan sosial dan layanan dasar.

Akses informasi, partisipasi dalam komunitas menjadi saluran penting yang memperluas cakrawala harapan. Pertemuan warga, Posbindu, dan pelatihan, dan sosialisasi program-program baru, dapat membantu anaknya mengakses beasiswa atau informasi sekolah lanjutan. Ini menunjukkan bahwa ekspektasi masa depan bukan hanya dibentuk oleh intensi pribadi, tetapi juga oleh ekosistem sosial yang menghubungkan warga dengan informasi, jaringan, dan peluang.

Ekspektasi masa depan keluarga dan anak-anak di kalangan kelompok bawah di Surakarta tidak utopis, tetapi sangat realistis dan kontekstual. Warga menginginkan kestabilan penghasilan, pendidikan yang berkelanjutan, dan layanan dasar yang memadai. Harapan mereka bersifat konkret: bisa menyekolahkan anak hingga lulus, bekerja di sektor formal, dan hidup tidak tergantung pada bantuan. Jika kebijakan publik mampu menjembatani kesenjangan ini, terutama dalam akses kerja, pendidikan vokasi, dan usaha kecil, maka harapan ini tidak hanya akan hidup, tapi juga terwujud secara nyata.

Tabel 5.18 Analisis Ekspektasi Masa Depan Keluarga dan Anak-anak

Aspek/Subtema	Temuan Lapangan	Sumber Data	Catatan/Kesimpulan Awal
Harapan terhadap Anak	Informan memiliki anak yang masih sekolah (SMK dan SMP). Ia sangat mendorong mereka untuk tidak putus sekolah dan melanjutkan hingga perguruan tinggi.	Wawancara Mendalam	Komitmen tinggi terhadap pendidikan anak, namun keterbatasan ekonomi tetap menjadi tantangan utama.
Peran Perempuan sebagai Penopang Harapan	Informan menjadikan masa depan anak-anak sebagai motivasi utama untuk bekerja keras dan aktif dalam komunitas.	Wawancara Mendalam	Perempuan berperan sebagai motor penggerak optimisme keluarga, bahkan dalam kondisi ekonomi yang rapuh.

Aspek/Subtema	Temuan Lapangan	Sumber Data	Catatan/Kesimpulan Awal
---------------	-----------------	-------------	-------------------------

Keterlibatan Sosial Meningkatkan Harapan	Informan aktif dalam Posbindu, Sub-PPKBG, dan Posyandu untuk tetap terhubung dengan informasi sosial, sekaligus memperluas jejaring peluang.	Wawancara Mendalam	Partisipasi dalam jejaring sosial meningkatkan ekspektasi warga terhadap masa depan yang lebih baik.
Akses Pendidikan sebagai Simbol Harapan	Anak-anak Informan tetap bersekolah, namun biaya pendidikan dan fasilitas masih menjadi beban, terutama bagi keluarga berpenghasilan Rp1–3 juta/bulan.	Wawancara Mendalam	Pendidikan dipandang sebagai kunci masa depan yang lebih baik, namun perlu dukungan biaya dan sarana prasarana memadai.
Harapan atas Kualitas Hidup Lebih Baik	Informan berharap anak-anaknya tidak perlu mengalami nasib serupa, dan bisa hidup mandiri dengan pekerjaan tetap dan pendapatan stabil.	Wawancara Mendalam	Cita-cita warga kelas menengah bawah cenderung realistis: pekerjaan layak, ekonomi stabil, dan kemandirian keluarga.
Faktor Penghambat: Ketimpangan Sosial	Informan pernah ditolak saat hendak berdagang di CFD, menandakan adanya eksklusi sosial yang menghambat semangat membangun usaha.	Wawancara Mendalam	Ketimpangan struktural dan sosial menjadi penghalang warga dalam menciptakan masa depan yang lebih sejahtera dan inklusif.
Peran Pasangan atau Dukungan Keluarga	Informan ikut membantu urusan rumah tangga, memungkinkan ia tetap bekerja dan menyekolahkan anak-anak.	Wawancara Mendalam	Dukungan pasangan atau keluarga berperan penting dalam memperkuat harapan dan stabilitas kehidupan rumah tangga.

Analisis Spasial dan Ketimpangan Wilayah Berdasarkan Ekspektasi Masa Depan Keluarga dan Anak menunjukan Wilayah Mapan seperti Pajang dan Karangasem (Kecamatan Laweyan) menunjukkan ekspektasi masa depan yang tinggi dan terencana dimana orang tua memiliki kesiapan finansial dan pendidikan yang baik. Perempuan memiliki otonomi lebih besar dalam pengambilan keputusan rumah tangga dan ekonomi keluarga.

Dukungan sosial dan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan sangat terstruktur. Harapan terhadap masa depan lebih bersifat *aspiratif* (kuliah, karier, kemandirian), bukan sekadar bertahan hidup. Pendidikan dipandang sebagai *investasi*, bukan beban.

Wilayah Transisi yaitu Kadipiro (Kecamatan Banjarsari) mencerminkan wilayah kelas menengah rentan yaitu akses terhadap pendidikan dan kesehatan tersedia, tetapi terbatas secara kualitas dan kuantitas, harapan tetap tinggi, tetapi sangat bergantung pada keberadaan beasiswa atau dukungan eksternal. Perempuan dan keluarga menunjukkan inisiatif tinggi, tetapi dibatasi oleh ketidakpastian ekonomi. Wilayah ini menjadi target ideal untuk intervensi penguatan sosial, seperti literasi digital, pelatihan kerja perempuan, dan sistem pendataan bantuan yang lebih tepat sasaran.

Wilayah Rentan: Mojosongo, Joyotakan, Panularan (Kecamatan Jebres, Serengan, Pasarkliwon) menunjukkan ketimpangan paling akut dalam hal ekspektasi masa depan. Banyak warga, mengandalkan diri sendiri dan lingkungan komunitas karena sistem formal tidak mendukung. Meskipun ada keinginan kuat untuk menyekolahkan anak dan hidup lebih baik, hal ini terhambat oleh kemiskinan struktural, stigma sosial, dan minimnya akses. Ketergantungan pada bantuan sosial tinggi, namun tidak diiringi dengan mekanisme pemberdayaan. Ekspektasi masa depan di wilayah ini bersifat defensif, berfokus pada bertahan hidup, bukan berkembang. Intervensi kebijakan harus bersifat lintas sektor yaitu pendidikan, perlindungan sosial, dan penguatan komunitas.

Analisis spasial terhadap ekspektasi masa depan menunjukkan bahwa harapan keluarga di Surakarta sangat dipengaruhi oleh lokasi tempat tinggal, struktur sosial, dan ekonomi wilayah. Ketimpangan tidak hanya terletak pada perbedaan penghasilan, tetapi juga dalam akses terhadap dukungan sosial, kapasitas personal (self-efficacy), dan lingkungan yang memberdayakan.

5.1.7.7 Tingkat Optimisme Sosial Ekonomi Antar Kelompok Responden

Optimisme sosial ekonomi warga Surakarta menunjukkan wajah yang beragam tergantung pada latar belakang sosial, jenis pekerjaan, dan akses terhadap sumber daya. Pada kelompok perempuan pekerja informal, dari Kelurahan Jayengan, optimisme muncul bukan karena ketiadaan tantangan, melainkan justru karena keuletan untuk keluar dari keterbatasan. Rata-rata pendapatan sekitar Rp2,2 juta per bulan mereka tetap yakin bahwa anak-anaknya harus bisa hidup lebih baik. Harapan ini menjadi sumber kekuatan utama yang menopang aktivitas hariannya. Optimisme itu bukan tanpa luka dan batas. Beberapa pengalaman misalnya pernah ditolak saat berjualan di ruang publik seperti CFD karena dianggap bukan bagian dari

komunitas pedagang resmi. Hal ini menunjukkan bahwa ruang ekonomi di kota masih belum sepenuhnya inklusif. Ketika seseorang memiliki semangat dan daya juang, tetapi tidak diberi akses yang adil, maka optimisme yang semula tinggi bisa tergerus oleh pengalaman eksklusi. Para pejuang ekonomi keluarga bertahan dan mencari jalan lain melalui media sosial, meskipun kurang percaya diri untuk berjualan secara digital. Optimisme dalam kasus ini adalah optimisme yang bertahan, bukan yang melambung tinggi.

Kontras dengan hal itu, aparaturnya kelurahan seperti Plt Lurah Serengan justru menunjukkan pesimisme terhadap kelompok warga miskin. Ia menyatakan bahwa banyak warga enggan “naik kelas” karena takut kehilangan bantuan sosial. Warga lebih memilih tetap dianggap miskin demi dapat bansos rutin daripada mandiri dan kehilangan hak atas bantuan. Perspektif ini membentuk penilaian negatif terhadap daya juang warga. Optimisme di mata aparaturnya ini lebih bersifat skeptis, di mana ia merasa masyarakat justru nyaman dalam kemiskinan. Padahal, dalam realitas di lapangan, banyak faktor struktural yang membuat warga sulit mandiri bukan semata mentalitas.

Beberapa warga lain yang tinggal di bantaran sungai, mengungkapkan pandangan yang lebih hati-hati terhadap masa depan ekonomi. Penghasilan rata-rata Rp1–3 juta per bulan dan pengalaman sebagai penerima bantuan sosial, menyebutkan bahwa pendidikan anak adalah fokus utama. Keterbatasan sanitasi (belum punya WC pribadi) dan ketergantungan pada BPJS menjadi beban psikologis yang besar. Mereka merasa tidak sepenuhnya aman secara sosial. Optimisme warga seperti ini bersifat defensif yaitu berharap yang terbaik, tetapi juga waspada akan kemungkinan kehilangan hak sosial.

Kalangan kelas menengah dan pekerja formal, seperti Ibu Upi dari PDAM, tampak tingkat optimisme yang lebih stabil. Sebagai asisten manajer dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, ia menyatakan bahwa banyak warga sebenarnya menolak pemasangan air bersih gratis hanya karena tidak ingin dicap miskin. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebanggaan sosial dan harga diri yang besar, meskipun kadang menghambat akses bantuan. Sisi lain dari perspektif warga tetap memiliki harapan untuk maju asal tidak distigma. Ini menunjukkan bahwa di kalangan pekerja dan tokoh komunitas, optimisme tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga mencerminkan keinginan menjaga martabat kolektif.

Hal menarik lainnya adalah bagaimana keterlibatan sosial berperan dalam memperkuat atau melemahkan optimisme. Beberapa aktivitas sosial seperti aktivis PKK, Posyandu dan

Musrenbang menyebut bahwa keikutsertaannya membuat warga tahu lebih banyak tentang program pemerintah. Informasi ini membuatnya merasa sedikit lebih percaya diri untuk memperjuangkan masa depan anak. Ketimpangan dalam akses terhadap partisipasi menjadi faktor penting yang membedakan tingkat optimisme antar kelompok responden.

Optimisme sosial-ekonomi bukan sekadar tentang pendapatan atau bantuan yang diterima, melainkan tentang sense of control, rasa bahwa seseorang dapat mempengaruhi masa depannya. Warga meskipun menghadapi keterbatasan, tetap merasa bisa melakukan sesuatu untuk memperbaiki kehidupan mereka dan keluarga. Sebaliknya, jika warga merasa keputusan masa depan mereka sepenuhnya berada di tangan negara atau pihak lain, maka optimisme cenderung melemah, maka, agency atau kapasitas bertindak menjadi kunci utama.

Optimisme sosial-ekonomi antar kelompok responden di Surakarta bersifat kompleks, tidak linier, dan sangat kontekstual. Faktor struktural seperti akses ke pasar, inklusivitas layanan publik, dan keberlanjutan program pemberdayaan menjadi penentu utama. Kelompok dengan jaringan sosial luas dan partisipasi aktif cenderung memiliki optimisme yang lebih kuat, sementara kelompok yang bergantung sepenuhnya pada bansos memiliki optimisme yang rapuh. Pemerintah daerah perlu merancang intervensi kebijakan yang tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga membangun daya juang dan harga diri warga.

Membangun optimisme sosial-ekonomi berarti membangun ekosistem sosial yang memungkinkan setiap warga merasa berdaya, terhubung, dan dihargai. Sekecil apapun bantuan atau pelatihan yang diberikan, tidak akan menciptakan harapan jangka panjang yang sehat. Surakarta memiliki potensi sosial yang besar tetapi perlu ruang inklusif agar harapan-harapan itu tidak berhenti hanya sebagai impian, melainkan menjadi jalan menuju kesejahteraan yang nyata.

Tabel 5.19

Analisis Tingkat Optimisme Sosial-Ekonomi Antar Kelompok Responden

Kelompok Responden	Kondisi Ekonomi	Akses Peluang	Sikap terhadap Masa Depan	Catatan Khusus
Perempuan pekerja	Pendapatan rendah, informal, tanpa jaminan penuh (2,2 jt)	Terbatas, ditolak komunitas CFD, modal kecil, kendala promosi	Optimis moderat; berjuang demi pendidikan anak, aktif di komunitas untuk memperluas jaringan	Berasal dari keluarga broken home, menikah ulang, suami mendukung, aktif sosial
Warga penerima bantuan	Penghasilan Rp1–3 juta/bulan, pernah menerima bantuan	Aset terbatas (usaha kecil), sempat terputus bantuan, tergantung BPJS	Optimis berhati-hati; masih khawatir kehilangan bantuan, pendidikan anak jadi prioritas utama	Tidak punya WC pribadi, tinggal di bantaran sungai, ikut Musrenbang
Aparatur kelurahan	Pendapatan baik (10 juta/bulan), jabatan struktural	Akses penuh ke peluang, jejaring luas	Pesimis terhadap mentalitas warga miskin; menilai mereka bergantung dan "tidak mau naik kelas"	Mengkritisi program bansos sebagai sumber ketergantungan sosial
Pegawai PDAM	Menengah (asisten manajer), mapan	Akses luas, keterlibatan dalam organisasi (Ketua Dawis)	Optimis dan proaktif; menyadari masih ada ketimpangan, tetapi aktif dalam mendorong warga terlibat di program sosial	Menyadari banyak warga menolak label "miskin", meskipun butuh layanan air bersih

5.1.7 Ketimpangan Antar Wilayah Administratif

5.1.7.1 Perbandingan Indikator Kesejahteraan Antar Kecamatan

- Kecamatan Laweyan (Kelurahan Pajang dan Karangasem): Stabil dan Mapan**
Wilayah ini menjadi klaster paling sejahtera dalam temuan wawancara.

Sebagian besar warga berstatus sebagai ASN, guru, pensiunan, atau pekerja formal, yang memiliki pendapatan tetap dan stabilitas sosial yang kuat.

Kepemilikan aset seperti rumah dan tanah cukup merata, bahkan beberapa keluarga memiliki aset warisan yang telah dimanfaatkan secara produktif. Seperti halnya Pak Supyanto di Pajang, seorang lurah menyampaikan bahwa rumah dan tanah yang dimiliki keluarga telah menjadi penopang ekonomi sejak lama. Keluarga Bu Ratnadyah Kusumawati di Karangasem juga mencerminkan kestabilan ekonomi karena kombinasi dari pekerjaan tetap dan anak-anak yang sudah mandiri secara finansial.

Anak-anak dari wilayah ini rata-rata dapat mengakses jenjang SMA dan perguruan tinggi, meskipun beberapa masih menghadapi kendala sistem zonasi. Sementara akses kesehatan terjaga melalui BPJS aktif, dan kesadaran lingkungan cukup tinggi tercermin dari keberhasilan beberapa RW mengikuti Program Kampung Iklim (ProKlim) nasional. Secara keseluruhan, Laweyan merepresentasikan wilayah dengan daya tahan sosial ekonomi tinggi, dengan keberadaan pekerjaan formal, warisan aset, serta kesadaran kolektif mendukung terciptanya kesejahteraan.

2. Kecamatan Banjarsari (Kelurahan Kadipiro): Cukup Stabil, tapi Hadapi Tantangan Lingkungan

Kadipiro mewakili wilayah dengan kesejahteraan menengah. Mayoritas responden memiliki rumah pribadi dan beberapa memiliki usaha rumahan (seperti jualan atau konter). Namun, pekerjaan mereka tidak sepenuhnya berasal dari sektor formal. Ada yang bekerja sebagai pegawai honorer atau menjalankan usaha kecil, yang membuat pendapatan keluarga tidak sepenuhnya stabil, tetapi cukup untuk bertahan. Salah satu responden, Bu Yena Anggarwijaya, menyebutkan bahwa dirinya merasa cukup secara ekonomi karena penghasilan suami yang bekerja tetap dan adanya usaha sampingan dari rumah. Meskipun demikian, ia juga menyebutkan adanya kendala pendidikan akibat sistem zonasi, di mana anak-anak kesulitan masuk sekolah negeri terdekat. Akses terhadap fasilitas kesehatan dan BPJS tergolong baik. Namun, wilayah ini memiliki risiko banjir musiman, terutama di daerah Joglo dan Sambirejo, yang menjadi faktor gangguan lingkungan yang memengaruhi kualitas hunian dan kesehatan masyarakat. Kadipiro menunjukkan bahwa meskipun aset dan layanan dasar

tersedia, faktor lingkungan dan ketimpangan pendidikan masih menjadi tantangan.

3. Kecamatan Jebres (Kelurahan Mojosongo): Rentan dan Tertinggal Secara Struktural

Mojosongo merupakan wilayah dengan kerentanan sosial-ekonomi paling tinggi. Responden seperti Ibu Katarina dan Kuspriyanto menyampaikan realitas kehidupan yang keras: pekerjaan tidak menentu, lingkungan tidak mendukung, serta akses layanan dasar yang buruk. Banyak warga bekerja sebagai buruh serabutan, tenaga lepas, atau telah terkena PHK, terutama dari sektor pabrik. Kepemilikan rumah di wilayah ini sangat terbatas. Banyak warga tinggal di rumah petak warisan, yang telah terbagi menjadi unit-unit kecil. Kondisi hunian sering tidak layak: sempit, minim ventilasi, dan rawan penyakit. Sanitasi buruk, air bersih tidak stabil, dan BPJS tidak aktif saat dibutuhkan menjadikan warga sangat rentan terhadap krisis. Kondisi sosial di Mojosongo juga sangat kompleks. Ibu Katarina menyoroti bahwa pengaruh narkoba, pelecehan seksual, dan kekerasan rumah tangga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sebagian warga. Anak-anak cenderung putus sekolah, dan partisipasi dalam kegiatan sosial rendah. Stabilitas sosial sangat rapuh, dan ketimpangan tampak mencolok bahkan antar rumah tangga dalam satu RT.

4. Kecamatan Serengan (Kelurahan Joyotakan): Aset Minim, Layanan Dasar Lemah Joyotakan merupakan contoh kawasan urban padat dengan kualitas hidup yang rendah.

Responden dari wilayah ini menyampaikan bahwa sebagian besar warga tinggal di rumah kontrak atau rumah kecil, dengan fasilitas dasar yang tidak memadai. Air bersih masih menggunakan sumur dan tandon hujan, sementara sanitasi belum terpenuhi secara merata. Pekerjaan warga sebagian besar di sektor informal: berdagang, buruh harian, atau pekerja rumah tangga. Penghasilan tidak tetap, dan banyak warga tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Anak-anak menghadapi hambatan biaya dan jarak, sehingga akses pendidikan lanjutan sangat terbatas. Selain itu, keterlibatan sosial juga rendah, dan kegiatan

kemasyarakatan kurang berjalan. Joyotakan mencerminkan tipikal kantong kemiskinan perkotaan yang kompleks, bukan hanya soal pendapatan, tapi juga akses ruang, kualitas infrastruktur, dan keterbatasan literasi sosial.

5. Kecamatan Pasar Kliwon (Kelurahan Panularan): Kerentanan Ganda Ekonomi dan Sosial

Panularan menjadi wilayah rentan yang khas, dengan ketimpangan yang terjadi tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga dalam akses layanan dasar dan perlindungan sosial. Banyak warga tidak memiliki rumah sendiri, tinggal di kontrakan sempit, dan belum memiliki WC pribadi atau akses PDAM. Pekerjaan warga sebagian besar tidak tetap. Pak Kuspriyanto adalah pekerja lepas yang tidak memiliki penghasilan pasti dan sangat bergantung pada pekerjaan informal. Banyak warga menggunakan BPJS PBI (KIS), namun akses layanan sering bermasalah, terutama dalam situasi darurat. Stabilitas sosial juga rendah seperti solidaritas warga lemah, peran RT/RW dalam distribusi bantuan sosial tidak optimal, dan beberapa keluarga yang layak menerima bantuan justru tidak terdata dalam DTKS.

5.1.7.2 Ketimpangan Akses dan Tingkat Kemiskinan

Hasil wawancara mendalam dari berbagai wilayah administratif di Kota Surakarta secara konsisten menunjukkan adanya korelasi kuat antara ketimpangan akses terhadap layanan dasar dan tingkat kemiskinan masyarakat. Ketimpangan ini tidak bersifat kebetulan, tetapi merupakan hasil dari struktur sosial dan spasial yang telah berkembang secara bertahap dan sistemik. Akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, pendidikan, dan kesehatan menjadi indikator kunci untuk memahami seberapa besar ketimpangan itu terjadi dan seberapa dalam kemiskinan itu mengakar.

1. Akses Baik Menurunkan Risiko Kemiskinan

Kasus Pajang dan Karangasem Kelurahan Pajang dan Karangasem, yang termasuk dalam Kecamatan Laweyan, merupakan contoh konkret wilayah dengan ketimpangan akses rendah dan tingkat kesejahteraan tinggi. Berdasarkan wawancara, mayoritas warga memiliki akses penuh terhadap layanan PDAM untuk air bersih, jaringan sanitasi rumah tangga yang layak, serta fasilitas

kesehatan seperti puskesmas dan klinik swasta yang mudah dijangkau. Pendidikan anak-anak juga relatif tidak terganggu karena tersedianya akses ke sekolah menengah, baik negeri maupun swasta.

Kondisi ini berjalan beriringan dengan tingginya kepemilikan rumah dan tanah, serta jenis pekerjaan yang lebih stabil, seperti ASN, guru, pegawai kantor, dan pensiunan. Pendapatan yang tetap, ditambah dengan keterampilan mengelola keuangan keluarga, membuat kelompok ini tidak hanya bertahan secara ekonomi, tetapi juga memiliki daya dukung sosial yang kuat. Anak-anak dari keluarga ini cenderung mampu melanjutkan pendidikan tinggi, dan partisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat sangat aktif. Warga seperti Bu Ratnadyah Kusumawati, seorang guru, menggambarkan kesejahteraan keluarganya sebagai hasil dari kombinasi antara akses layanan yang stabil, penghasilan tetap, dan lingkungan yang mendukung. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan akses yang rendah menghasilkan resiliensi ekonomi yang tinggi, sekaligus menurunkan risiko jatuh ke dalam kemiskinan struktural.

2. Ketimpangan Akses Meningkatkan Kerentanan: Kasus Panularan, Mojosongo, dan Joyotakan

Wilayah seperti Panularan (Laweyan), Mojosongo (Jebres), dan Joyotakan (Serengan) menunjukkan keterputusan akses yang sangat serius, yang secara langsung berhubungan dengan tingginya tingkat kemiskinan dan kerentanan warga. Ketiga wilayah ini, banyak warga tidak memiliki sambungan air PDAM, dan masih mengandalkan sumur dangkal atau tadahan air hujan sebagai sumber utama air bersih. Hal ini tentu menimbulkan risiko kesehatan tinggi, terutama pada musim kemarau. Sanitasi juga menjadi persoalan serius banyak rumah belum memiliki WC pribadi, dan buang air besar masih dilakukan di sungai, selokan, atau fasilitas umum terbatas. Responden dari Panularan menyebut bahwa lingkungan tempat tinggal mereka tidak memiliki saluran pembuangan limbah yang baik, sehingga seringkali terjadi genangan air kotor, yang memperburuk kondisi sanitasi.

Hampir semua warga di wilayah ini terdaftar sebagai peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau pemegang KIS, tetapi dalam praktiknya, akses terhadap layanan kesehatan masih bermasalah. Banyak warga

mengeluhkan ketidaksesuaian data antara sistem Pandawa (pusat) dengan puskesmas atau rumah sakit lokal. Seperti yang disampaikan oleh seorang warga Panularan: "KIS saya aktif di Pandawa, tapi di puskesmas malah dinyatakan tidak aktif. Akhirnya harus bayar sendiri." Kondisi ini menggambarkan bahwa akses administratif belum tentu menjamin akses fungsional, apalagi dalam situasi darurat. Ketimpangan digitalisasi data, kurangnya literasi warga terhadap prosedur, serta lambannya respons sistem, membuat program jaminan sosial yang semestinya inklusif justru memperkuat frustrasi sosial.

Warga di wilayah rentan ini bekerja di sektor informal seperti buruh lepas, dagang kecil, atau ojek *online*. Penghasilan yang diperoleh tidak menentu, fluktuatif, dan tanpa perlindungan sosial. Banyak dari mereka yang tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan, dan tidak memiliki tabungan atau aset cadangan. Ketika salah satu anggota keluarga sakit atau terjadi pengeluaran mendesak (misalnya biaya sekolah), mereka terpaksa meminjam uang atau menjual barang pribadi. Kondisi ini juga berdampak pada pendidikan anak. Di Mojosongo, misalnya, anak-anak cenderung putus sekolah lebih awal atau memilih kerja sebelum lulus SMA. Lingkungan sekitar mereka kurang mendukung cita-cita pendidikan, bahkan dalam beberapa kasus terdapat pengaruh narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, dan pelecehan seksual, yang semakin memperparah siklus kemiskinan lintas generasi.

3. Ketimpangan Data: Bantuan Sosial Tak Tepat Sasaran

Korelasi ketimpangan akses dan kemiskinan juga diperparah oleh masalah pada sistem distribusi bantuan sosial. Banyak warga mengaku telah mengajukan diri sebagai penerima manfaat, tetapi tidak terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Sebaliknya, ada tetangga yang menurut mereka "lebih mampu" justru menerima bansos secara rutin. Fenomena ini menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidakpercayaan terhadap aparaturnya lokal, seperti RT atau kelurahan. Responden menyebut bahwa faktor kedekatan sosial-politik masih mempengaruhi siapa yang mendapat dan siapa yang tidak mendapat bantuan. "Kami sudah daftar PKH, tapi tidak pernah masuk data. Katanya kuota penuh. Tapi yang rumahnya lebih bagus malah dapat". Kondisi ini membuktikan bahwa

ketimpangan akses bukan hanya soal fisik dan ekonomi, tetapi juga menyangkut akses terhadap sistem informasi dan keadilan distribusi program pemerintah.

5.1.7.3 Identifikasi Klaster Wilayah Tertinggal Secara Sosial-Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan di berbagai kelurahan Kota Surakarta, dapat diidentifikasi bahwa terdapat klaster wilayah tertinggal yang mengalami tekanan multidimensi mencakup ekonomi, infrastruktur, sosial, budaya, dan layanan dasar. Wilayah-wilayah ini tidak hanya mengalami kemiskinan material, tetapi juga ketertinggalan sistemik yang melekat pada lingkungan tempat tinggal, hubungan sosial, serta struktur pekerjaan dan perlindungan sosial. Tiga wilayah yang menonjol sebagai klaster kemiskinan dan keterpinggiran urban adalah: Mojosongo (Jebres), Panularan (Laweyan), dan Joyotakan (Serengan). Ketiganya memiliki ciri khas sebagai kawasan marginal urban padat penduduk, infrastruktur terbatas, dan tekanan sosial tinggi. Berikut ini adalah deskripsi rinci berdasarkan temuan lapangan.

1. Klaster 1: Mojosongo (Kecamatan Jebres) Kawasan Eks-Pekerja, Rawan Sosial Mojosongo

Wilayah ini dihuni oleh banyak keluarga yang dulunya menggantungkan hidup pada pekerjaan pabrik, namun kini menghadapi kenyataan PHK massal dan menurunnya kapasitas industri. Banyak warga kini bekerja serabutan atau menganggur, tanpa jaminan kerja, tanpa BPJS ketenagakerjaan, dan tanpa akses terhadap pelatihan ulang. Kondisi perumahan mencerminkan kemiskinan struktural, banyak keluarga tinggal di rumah warisan yang sudah dibagi-bagi menjadi unit-unit kecil, dengan kondisi sempit dan kurang ventilasi. Beberapa bahkan tinggal di bantaran sungai atau gang-gang sempit tanpa fasilitas sanitasi yang layak.

Masalah sosial sangat menonjol di Mojosongo. Berdasarkan hasil wawancara warga dari ditemukan bahwa penyalahgunaan narkoba merajalela di kalangan remaja, kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) kerap terjadi dan jarang dilaporkan, anak-anak putus sekolah karena tekanan ekonomi dan minimnya motivasi belajar dari lingkungan sekitar, partisipasi sosial sangat rendah, kegiatan RT atau karang taruna hampir tidak berjalan. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan yang tidak hanya berlangsung dalam satu generasi, tetapi diwariskan dari

orang tua ke anak. Akses terhadap fasilitas kesehatan dan bantuan sosial seringkali tersendat, karena lemahnya pendataan dan kepastian warga dalam proses administrasi.

2. Klaster 2: Panularan (Kecamatan Pasar Kliwon) Sanitasi Buruk, Perlindungan Lemah

Panularan adalah wilayah dengan infrastruktur dasar yang tertinggal, khususnya dalam hal air bersih dan sanitasi. Sebagian besar rumah belum tersambung ke PDAM dan masih mengandalkan sumur tanah sebagai sumber air utama. Banyak rumah tangga tidak memiliki WC pribadi, dan harus bergantian memakai toilet umum atau menggunakan sistem pembuangan langsung ke tanah. Warga Panularan mayoritas bekerja di sektor informal pekerja lepas, buruh cuci, pedagang asongan, atau pekerja rumah tangga.

Pendapatan harian rendah, tidak menentu, dan tanpa jaminan sosial. Hanya sebagian kecil warga yang memiliki BPJS Kesehatan, dan lebih sedikit lagi yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Permasalahan bertambah rumit karena program bantuan sosial tidak merata. Banyak warga yang sebenarnya tergolong miskin tidak masuk dalam DTKS, akibat: data tidak diperbarui secara berkala, kurangnya pendampingan dari rt atau kelurahan dan adanya dugaan praktik nepotisme atau kedekatan sosial-politik dalam proses pendataan. Salah satu responden menyampaikan kekecewaannya: *“Saya kerja serabutan, punya dua anak sekolah, nggak dapat bantuan napa tetangga yang punya warung malah dapat PKH.”* Fenomena ini memperlihatkan bahwa ketimpangan akses tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga bersifat administratif dan sosial, memperkuat ketidakpercayaan terhadap sistem distribusi bantuan publik.

3. Klaster 3: Joyotakan (Kecamatan Serengan) Padat, Terjepit, dan Terlupakan

Joyotakan menggambarkan tipikal kawasan padat urban yang secara geografis terjepit oleh jalan besar dan bangunan komersial, namun secara sosial terlupakan oleh program pemberdayaan. Banyak rumah di wilayah ini berukuran sangat kecil dan berhimpitan, menciptakan suasana lembab, minim pencahayaan, dan sirkulasi udara buruk. Akses terhadap sanitasi dan air bersih tergolong rendah. Warga masih menggunakan sumur gali, dan tidak semua rumah memiliki fasilitas MCK pribadi. Beberapa warga berbagi toilet atau membuat saluran pembuangan darurat

yang mencemari lingkungan sekitar. Kondisi pendidikan juga memprihatinkan. Banyak anak-anak tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah karena terbatasnya biaya dan lokasi sekolah negeri yang jauh.

Sementara itu, akses ke sekolah swasta tidak terjangkau karena biaya masuk yang tinggi dan ongkos transportasi. Pelayanan kesehatan juga tidak optimal. Beberapa warga memiliki BPJS, namun sering mengeluhkan lamanya antrean, prosedur rujukan yang rumit, dan status kepesertaan yang tidak sinkron antara pusat dan faskes lokal. Hal ini membuat akses terhadap kesehatan menjadi hambatan tersendiri, terutama bagi lansia dan ibu dengan balita. Joyotakan juga memiliki tingkat partisipasi sosial yang rendah, serta minim kegiatan komunitas yang dapat memperkuat solidaritas dan pemberdayaan warga. Warga cenderung individualistis karena tekanan ekonomi, dan belum banyak inisiatif kolektif untuk memperbaiki lingkungan.

5.1.8 Kelompok Rentan dan Ketimpangan Sosial

1. Lansia, Perempuan Kepala Keluarga, Disabilitas, Dan Anak Terlantar

Kota Surakarta sebagai kota budaya dan kota ramah lansia memiliki potensi sosial yang besar dalam mengembangkan pembangunan berbasis komunitas. Salah satu potret keberhasilan peran sosial masyarakat dapat dilihat melalui sosok Ibu Pulkeria, seorang perempuan kepala keluarga yang mampu menyeimbangkan berbagai tanggung jawab. Selama masa aktif bekerja, meskipun dihadapkan pada tantangan seperti pulang malam karena beban pekerjaan, Ibu Pulkeria tetap menunjukkan komitmen tinggi dalam mengelola rumah tangga, menyelesaikan pekerjaan profesional, serta aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Keterlibatan Ibu Pulkeria dalam organisasi di tingkat RT/RW dan kelurahan merupakan representasi dari kapasitas kepemimpinan perempuan dalam masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting, mengingat data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Surakarta menunjukkan jumlah kategori rentan yang cukup tinggi. Data PMKS yang bersumber dari satu data Jawa Tengah, terdapat 181 anak dengan kedisabilitas, termasuk 87 anak dengan disabilitas fisik, serta 116 anak dari keluarga tidak mampu yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan sosial. Jumlah lansia terlantar tercatat sebanyak 160 orang, dan jumlah perempuan terlantar mencapai 5 orang.

Fakta ini menunjukkan perlunya pendekatan kolaboratif dalam penanganan kelompok rentan, dengan mendorong peran serta warga secara aktif.

Ibu Pulkeria saat ini telah memasuki masa pensiun sebagai guru, ia tetap aktif menjalankan aktivitas sosial dan keagamaan sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan bentuk penguatan spiritualitas. Fenomena ini mencerminkan bahwa warga lanjut usia, khususnya perempuan, masih memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat urban. Keteladanan ini menjadi model inspiratif yang perlu diarusutamakan dalam penyusunan program pemberdayaan lansia produktif dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan komunitas. Melalui integrasi data dan studi kasus, dapat disimpulkan bahwa upaya penanganan PMKS di Kota Surakarta memerlukan sinergi antara kebijakan pemerintah dan peran aktif warga.

2. Akses terhadap Bantuan Sosial, Layanan Dasar

Hasil wawancara yang telah dilakukan di lapangan serta pelaksanaan yang berlangsung, bahwa proses distribusi bantuan sosial (bansos) di Kota Surakarta dilaksanakan secara bertahap dan terstruktur guna menjamin ketepatan sasaran. Kelurahan Pajang yang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Kecamatan Laweyan tahapan identifikasi penerima dilakukan secara teliti, dimulai dari kunjungan rumah, penyampaian daftar sementara dalam forum publik, hingga verifikasi ulang sebelum nama-nama akhir dimasukkan ke dalam sistem klasifikasi penerima prioritas. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pihak kelurahan dalam menjaga keakuratan data dan keterbukaan dalam proses penyaluran kepada 483 warga penerima bantuan yang telah terdata.

Wilayah Kecamatan Banjarsari mencatatkan 150.649 orang sebagai penerima bantuan sosial pada tahun 2024. Alur identifikasi dilakukan secara berjenjang, dimulai dari usulan yang disampaikan oleh RT di masing-masing kelurahan, kemudian diverifikasi oleh aparat kelurahan, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan kunjungan langsung oleh petugas dari Dinas Sosial. Kecamatan memiliki peran penting dalam merapikan dan mengelompokkan data penerima sesuai lokasi dan tingkat prioritas, sehingga proses distribusi bantuan oleh Dinsos dapat lebih terarah. Bantuan yang disalurkan meliputi beras, bantuan uang tunai dan non-tunai, bantuan bagi anak yatim piatu, serta layanan melalui

Kartu Indonesia Sehat (KIS), dengan proses pendataan di lapangan yang turut melibatkan kader masyarakat.

Kelurahan Mojosongo, pada tahun yang sama, bantuan disalurkan kepada sekitar 2.400 warga. Pendistribusian dilakukan oleh PT Pos setelah adanya proses survei oleh petugas terhadap calon penerima di wilayah tersebut. Fakta ini menggambarkan bahwa tiap kelurahan di Surakarta menerapkan pola verifikasi yang relatif serupa, namun tetap mempertimbangkan kondisi dan kapasitas masing-masing wilayah dalam pelaksanaannya.

Sistem identifikasi hingga pendistribusian bantuan sosial di Kota Surakarta menunjukkan adanya keterlibatan lintas pihak, mulai dari warga, pengurus kelurahan, kecamatan, hingga instansi teknis di tingkat kota. Pola ini menegaskan pendekatan yang partisipatif dan akuntabel dalam tata kelola program bantuan, serta memastikan bahwa penyaluran benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan.

3. Efektivitas Program Pemerintah Terhadap Kelompok Rentan

Efektivitas program pemerintah dalam menjangkau kelompok rentan melalui bantuan sosial masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun sudah ada mekanisme resmi seperti pengusulan lewat SKKG dan integrasi data melalui sistem DTSEN, pelaksanaannya di lapangan belum berjalan dengan lancar. Beberapa prosedur administratif seperti tanda tangan bermaterai dan persetujuan RT sering menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Banyak warga mengira bahwa tanda tangan tersebut menjamin mereka akan menerima bantuan, padahal belum tentu. Ketidak konsistenan prosedur antar wilayah turut menjadi pemicu ketimpangan dalam pembaruan data. Perubahan kondisi ekonomi warga yang berlangsung cepat tidak selalu tercatat secara tepat, sehingga masih ada penerima bantuan yang sebenarnya sudah tidak layak, sementara mereka yang membutuhkan justru belum tercakup dalam daftar penerima.

Agar bantuan dapat disalurkan secara tepat, pembaruan data yang rutin sangat diperlukan. Pelaksanaan di lapangan masih dihadapkan pada berbagai kendala teknis, kurangnya koordinasi antara instansi, serta kualitas pendataan yang belum maksimal. Keterlibatan petugas seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan dukungan dari Dukcapil seharusnya bisa membantu, namun fungsinya belum berjalan optimal karena keterbatasan tenaga dan pengaruh dari pihak luar. Beberapa penerima sulit dijangkau untuk diverifikasi, dan tidak sedikit yang khawatir bantuan mereka akan dihentikan setelah proses tersebut.

Warga yang merasa memenuhi syarat untuk mendapatkan program seperti PKH belum semuanya masuk dalam daftar penerima, karena belum sesuai dengan kriteria teknis yang ditetapkan. Pelaksanaan program bantuan sosial belum menunjukkan hasil yang sepenuhnya efektif. Masih diperlukan sistem yang lebih transparan, adil, dan terkoordinasi lintas sektor agar bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.

5.1.9 Analisis Tematik dan Refleksi Teoritis

1. Ketimpangan dalam Pendekatan Core–Periphery

Pendekatan *core-periphery* menjadi kerangka teoritis penting untuk memahami ketimpangan spasial dan kesejahteraan di Kota Surakarta. Dalam model ini, wilayah “inti” atau *core* cenderung menyerap lebih banyak modal, sumber daya manusia terampil, serta investasi infrastruktur, sementara wilayah “pinggiran” atau *periphery* mengalami keterbatasan dalam akses ekonomi, layanan dasar, dan perhatian kebijakan. Surakarta sebagai kota dengan pertumbuhan terpusat di Banjarsari dan Laweyan menunjukkan karakteristik khas wilayah inti, dengan ketersediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur publik yang lebih baik dibandingkan kawasan seperti Serengan dan Jebres.

Paundra et al. (2020) menunjukkan bahwa pendekatan *core-periphery* efektif untuk memetakan pertumbuhan urban di Jawa, termasuk Kota Surakarta. Pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang terpusat ini berkontribusi pada marginalisasi wilayah- wilayah perifer, memperparah ketimpangan kesejahteraan antar kelurahan. Fenomena ini juga diamini oleh Putri & Wahyuni (2023) yang menekankan dampak eksklusi sosial di kota sekunder akibat terpusatnya pembangunan.

Data dari BPS (2023) memperlihatkan bahwa angka kemiskinan di kecamatan perifer lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah *core*. Kecamatan Pasar Kliwon dan Serengan masih mengalami defisit dalam akses air bersih, sanitasi, dan pendidikan dasar, berbeda jauh dari kondisi di Banjarsari. Hal ini mencerminkan perbedaan kualitas hidup yang tajam, sejalan dengan gagasan bahwa wilayah perifer mengalami keterbelakangan struktural sebagai dampak dari ketidakseimbangan pembangunan.

Refleksi teoretis terhadap pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan yang terpusat tanpa pemerataan akan memperbesar jurang kesejahteraan antar wilayah. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga memperlemah kohesi sosial

dan menciptakan ketegangan antar komunitas. Urbanisasi yang tidak merata dapat menghasilkan segregasi spasial dan eksklusi sosial, yang pada akhirnya memperumit upaya integrasi pembangunan.

Pendekatan core-periphery menegaskan perlunya strategi desentralisasi pembangunan yang berbasis wilayah dan data spasial. Pemerataan fasilitas, pengembangan kawasan penyangga, serta investasi di wilayah pinggiran menjadi solusi kunci untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih adil dan inklusif di Kota Surakarta. Hal ini juga mendukung prinsip *balanced development* sebagaimana disampaikan oleh Nurulia Azizah & Muhammad Arif (2022), yang menekankan pentingnya kolaborasi regional dalam mengatasi ketimpangan (Azizah & Arif, 2022).



Gambar 5.2 Ketimpangan Spasial Surakarta

2. Ketimpangan Spasial dan Mobilitas Sosial

Ketimpangan spasial di Kota Surakarta tidak hanya tercermin dari distribusi infrastruktur dan layanan publik yang tidak merata, tetapi juga berdampak langsung pada keterbatasan mobilitas sosial bagi kelompok masyarakat tertentu. Masyarakat yang tinggal di kawasan pinggiran seperti Mojosongo atau Semanggi mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan berkualitas, lapangan pekerjaan formal, dan fasilitas kesehatan yang memadai. Hal ini menciptakan siklus ketimpangan sosial yang berulang dari generasi ke generasi.

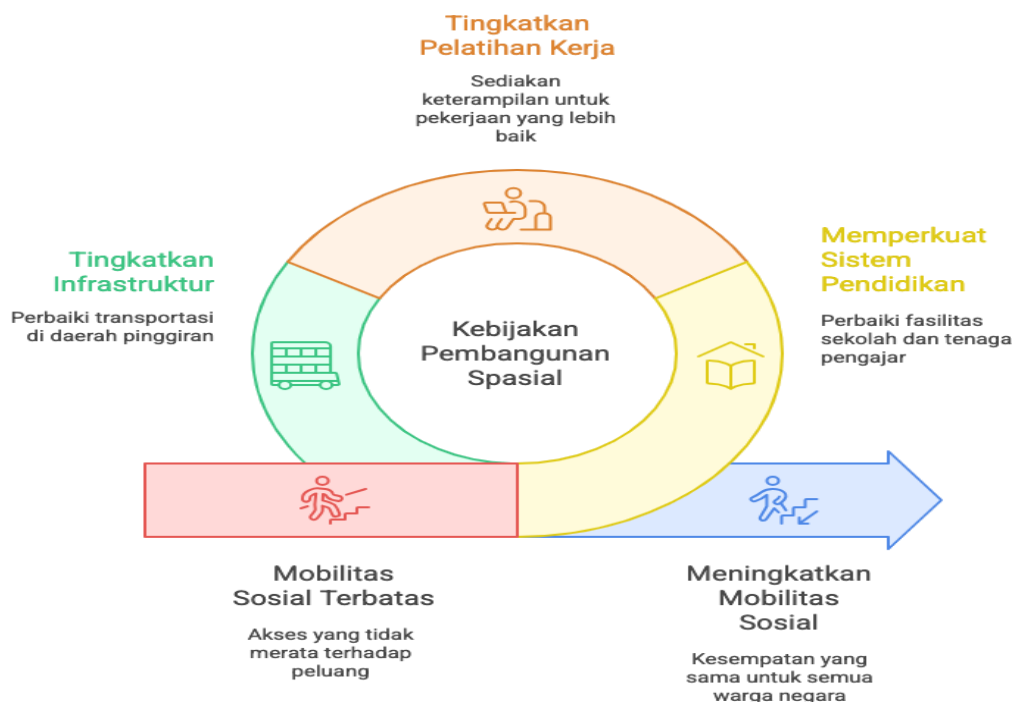
Ashri et al., mencatat bahwa pendidikan adalah salah satu faktor penting yang dapat mendorong mobilitas sosial vertical (Ashri et al., 2021). Ketimpangan dalam kualitas pendidikan antar kelurahan di Surakarta menghambat upaya tersebut. Sekolah di daerah dengan status ekonomi rendah memiliki keterbatasan sarana-prasarana, tenaga pendidik yang kurang, serta tingkat partisipasi siswa yang rendah. Akibatnya, kesempatan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan menjadi semakin sulit dicapai.

Data BPS Kota Surakarta (2023) menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah di wilayah inti lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah pinggiran. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa lokasi geografis sangat memengaruhi peluang untuk meningkatkan kualitas hidup. Ketika akses pendidikan, pelatihan kerja, dan teknologi tidak tersebar merata, maka peluang peningkatan taraf hidup pun ikut terhambat.

Mobilitas sosial juga dibatasi oleh akses terhadap pekerjaan yang layak. Wilayah pinggiran Surakarta, sektor informal mendominasi, dengan pendapatan yang rendah dan kondisi kerja yang tidak aman. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan jaringan sosial dan ekonomi yang dapat mendukung mobilitas. Sebaliknya, penduduk di pusat kota memiliki akses terhadap jaringan bisnis dan lembaga keuangan yang memudahkan mereka bergerak naik secara sosial.

Kebijakan pembangunan kota harus mempertimbangkan dimensi spasial dari mobilitas sosial. Intervensi berbasis wilayah yang memperkuat sistem pendidikan, pelatihan kerja, dan infrastruktur transportasi di kawasan perifer dapat meningkatkan peluang mobilitas sosial. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Fadjar Hari Mardiansjah et al. (2018) yang menyoroti pentingnya keterpaduan spasial dalam pembangunan kota.

Meningkatkan Mobilitas Sosial Melalui Keadilan Spasial



Gambar 5.3 Kebijakan Pembangunan

3. Ketimpangan dan Eksklusi Sosial

Ketimpangan sosial-ekonomi yang tinggi di wilayah perkotaan seperti Surakarta berbanding lurus dengan meningkatnya risiko eksklusi sosial, yaitu kondisi di mana individu atau kelompok terpinggirkan dari partisipasi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Eksklusi sosial tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan semata, tetapi juga oleh sistem dan struktur sosial yang tidak inklusif. Dalam konteks Surakarta, eksklusi sosial terjadi ketika kelompok miskin kota, seperti pekerja sektor informal atau masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh, tidak memiliki akses yang sama terhadap fasilitas publik, pengambilan keputusan, dan peluang peningkatan kualitas hidup.

Putri dan Wahyuni (2023) menjelaskan bahwa pertumbuhan kota sekunder seperti Surakarta cenderung menciptakan ruang-ruang eksklusif, di mana kelompok elit mendominasi ruang ekonomi dan simbolik, sementara kelompok marjinal didorong ke pinggiran baik secara geografis maupun sosial. Fenomena seperti perumahan syariah eksklusif dan gentrifikasi menjadi penyebab munculnya segregasi sosial yang semakin tajam. Akibatnya, solidaritas sosial dan kohesi antarkelompok masyarakat menjadi

rapuh, dan ini berpotensi menimbulkan konflik sosial laten atau terbuka. Eksklusi sosial diperkuat oleh disparitas akses digital dan informasi. Penelitian oleh U. Ningsih et al. (2024) menunjukkan bahwa masyarakat dengan akses terbatas terhadap teknologi digital mengalami keterbatasan informasi dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam ekonomi modern. Di Surakarta, daerah-daerah dengan penetrasi internet rendah umumnya berlokasi di kelurahan-kelurahan dengan angka kemiskinan yang relatif tinggi. Ketidakseimbangan ini menyebabkan kesenjangan sosial semakin melebar dalam berbagai dimensi.

Dampak dari eksklusi sosial juga terlihat dalam rendahnya representasi kelompok marjinal dalam proses perencanaan kota. Studi Safira et al. (2023) menyoroti bahwa perumusan kebijakan pembangunan di Surakarta masih bersifat top-down dan belum sepenuhnya melibatkan suara warga miskin atau kelompok minoritas. Padahal, keterlibatan aktif masyarakat adalah kunci untuk menghasilkan kebijakan yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Ketika kelompok tertentu terus-menerus tidak dilibatkan, mereka semakin teralienasi dari proses sosial-politik yang berlangsung di kotanya sendiri.

Eksklusi sosial bukan hanya akibat dari ketimpangan ekonomi, melainkan juga merupakan mekanisme reproduksi ketimpangan itu sendiri. Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan di Surakarta harus mencakup kebijakan anti-diskriminasi, peningkatan partisipasi masyarakat marginal, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar. Hal ini penting untuk membangun kota yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip SDGs dan *Right to the City*.

Memahami eksklusi sosial melalui tingkat partisipasi



Gambar 5.4 Kaitan Antara Ketimpangan dan Eksklusi Sosial

4. Relevansi Indikator dengan Realitas Lokal Surakarta

Indikator-indikator kesejahteraan seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran merupakan alat ukur yang penting dalam memahami kondisi sosial-ekonomi suatu wilayah. Namun demikian, dalam konteks lokal seperti Kota Surakarta, indikator-indikator tersebut perlu direfleksikan secara kritis untuk melihat sejauh mana mereka benar-benar mencerminkan realitas lapangan. Misalnya, meskipun IPM Surakarta tahun 2024 menunjukkan angka tinggi (84,41), angka tersebut belum tentu menggambarkan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah kota.

Nugroho et al. (2022) dalam studi berbasis spasial menemukan adanya disparitas kesejahteraan yang cukup signifikan antar-kelurahan di Surakarta. Beberapa kelurahan memiliki IPM mikro yang jauh di bawah rata-rata kota, menunjukkan bahwa indikator makro seperti IPM kota tidak cukup sensitif untuk menangkap variasi lokal. Selain itu, indikator pengeluaran per kapita yang menjadi komponen IPM sering

kali tidak menggambarkan beban pengeluaran riil, terutama di kawasan urban dengan biaya hidup yang tinggi.

Realitas lapangan juga menunjukkan bahwa indikator garis kemiskinan (Rp 638.102 per kapita per bulan pada 2024) tidak mencakup dimensi non-moneter dari kemiskinan, seperti kerentanan sosial, eksklusi, atau akses terhadap layanan publik. Banyak warga Surakarta yang mungkin tidak tergolong "miskin" secara statistik, namun tetap mengalami deprivasi dalam pendidikan, perumahan, dan lingkungan hidup yang layak. Di sinilah pendekatan multidimensi seperti yang dikembangkan oleh Alkire dan Foster (2011) menjadi relevan dan kontekstual.

Indikator seperti angka pengangguran terbuka sering tidak menangkap realitas sektor informal yang sangat besar di kota seperti Surakarta. Banyak warga bekerja secara informal, tanpa perlindungan sosial dan upah layak, sehingga tidak tercatat dalam statistik resmi sebagai "pengangguran", padahal tingkat kerentanannya sangat tinggi. Dibutuhkan indikator tambahan yang mampu menangkap kondisi kerja informal dan ketimpangan antar sektor pekerjaan.

Refleksi atas penggunaan indikator ini menekankan perlunya pendekatan data-aware dan kontekstual dalam perencanaan pembangunan kota. Pemerintah Kota Surakarta perlu memperkuat sistem data mikro spasial berbasis kelurahan, serta mengembangkan indikator kesejahteraan komposit yang mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih akurat, responsif, dan adil terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat kota.

Implikasi pertama dari temuan ketimpangan kesejahteraan di Kota Surakarta adalah perlunya pergeseran paradigma pembangunan daerah dari pendekatan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro menuju pendekatan yang lebih berbasis keadilan spasial dan inklusi sosial. Selama ini, pembangunan cenderung terfokus di wilayah-wilayah inti seperti Kecamatan Banjarsari dan Laweyan, yang memiliki infrastruktur dan fasilitas publik yang lebih lengkap (Safira et al., 2023). Ketimpangan ini menyebabkan wilayah seperti Serengan dan Jebres tertinggal dalam berbagai aspek kesejahteraan. Pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan alokasi sumber daya yang lebih adil secara geografis, dengan intervensi yang terfokus pada wilayah-wilayah perifer dan rentan yang selama ini terpinggirkan dari arus utama pembangunan.

Implikasi kedua adalah perlunya penggunaan pendekatan multidimensi dan spasial dalam pengukuran dan pemantauan kesejahteraan masyarakat kota. Indikator-indikator konvensional seperti IPM atau tingkat kemiskinan absolut tidak lagi memadai untuk menangkap kompleksitas ketimpangan yang terjadi di lapangan (Alkire & Foster, 2011; Nugroho et al., 2022). Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surakarta disarankan untuk mengembangkan sistem pemantauan berbasis data mikro dan peta spasial kesejahteraan di tingkat kelurahan, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan lokal. Pemanfaatan teknologi informasi dan geospasial dalam perencanaan wilayah akan sangat membantu dalam menargetkan intervensi kebijakan secara lebih efektif dan efisien.

Implikasi ketiga berkaitan dengan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*). Banyak program pemerintah yang gagal mencapai sasaran karena lemahnya koordinasi antar instansi dan minimnya pelibatan masyarakat dalam tahap perencanaan dan evaluasi (BRIDA Kota Surakarta, 2022). Model tata kelola kolaboratif yang menggabungkan peran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil (Ansell & Gash, 2007; Voets et al., n.d.) perlu diadaptasi dalam konteks lokal untuk memastikan bahwa kebijakan benar-benar berpihak kepada kelompok yang selama ini terpinggirkan. Misalnya, dalam pengembangan UMKM, perlu dibangun forum multipihak yang melibatkan pelaku usaha mikro di kawasan pinggiran kota, bukan hanya asosiasi yang berbasis di pusat kota.

Implikasi keempat menyentuh kebutuhan akan reformasi kebijakan perlindungan sosial yang lebih adaptif terhadap konteks perkotaan. Temuan dari studi Bustamam et al. (2021) dan World Bank (2022) menunjukkan bahwa ketimpangan yang tidak dikelola akan memperburuk siklus kemiskinan antar generasi dan meningkatkan kerentanan sosial, terutama di masa krisis. Sektor informal masih mendominasi struktur ekonomi di Kota Surakarta, namun perlindungan sosial terhadap pekerja informal masih sangat terbatas. Pemerintah kota perlu mendesain skema jaminan sosial yang inklusif bagi pekerja informal, dengan pendekatan berbasis komunitas dan teknologi digital untuk mengurangi beban administratif dan meningkatkan cakupan.

Pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dan partisipatif harus menjadi pilar utama dalam setiap kebijakan daerah. Dengan mempertimbangkan kerentanan ekologi, seperti yang ditunjukkan oleh Rahayu (2023) terkait risiko banjir dan degradasi lingkungan di daerah pinggiran, kebijakan harus terintegrasi antara dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kota Surakarta perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang lebih responsif terhadap ketimpangan dan eksklusi sosial, melalui penyediaan ruang publik inklusif, transportasi terjangkau, dan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, program edukasi publik tentang hak-hak warga kota juga penting untuk membangun masyarakat yang sadar dan berdaya dalam proses pembangunan.

Mengatasi Ketimpangan Kesejahteraan di Surakarta



Gambar 5.5 Relevansi Indikator dengan Realitas Lokal Surakarta

Tabel 5.20 Implikasi Kebijakan Ketimpangan Kesejahteraan di Kota Surakarta

Isu Temuan Utama	Implikasi Kebijakan	Rekomendasi Strategis
Konsentrasi pembangunan pada wilayah inti kota (core) (Safira et al., 2023;	Pemerataan pembangunan wilayah menjadi prioritas agar manfaat pembangunan tidak hanya dinikmati oleh pusat kota (Banjarsari, Laweyan), tetapi	Alokasikan belanja modal daerah secara afirmatif untuk infrastruktur dasar di wilayah periferal. Lakukan <i>zoning planning</i> berbasis kebutuhan lokal.

Isu Temuan Utama	Implikasi Kebijakan	Rekomendasi Strategis
Keterbatasan indikator konvensional dalam menangkap ketimpangan lokal (Nugroho et al., 2022)	Perlu reformulasi sistem pemantauan kesejahteraan berbasis indikator multidimensi dan spasial yang relevan dengan karakteristik kelurahan.	Integrasikan pendekatan Alkire-Foster dalam penyusunan kebijakan lokal. Bangun sistem dashboard spasial berbasis kelurahan menggunakan data BPS dan RT/RW.
Lemahnya koordinasi antar perangkat daerah dan minimnya partisipasi masyarakat (BRIDA, 2022)	Diperlukan tata kelola kolaboratif (collaborative governance) untuk memastikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bersifat partisipatif dan lintas sektor.	Bentuk forum pembangunan inklusif tingkat kecamatan/kelurahan. Perkuat kolaborasi antara dinas, akademisi, LSM, dan warga berbasis mandat dan peran yang jelas.
Ketimpangan perlindungan sosial bagi pekerja informal (Bustamam et al., 2021; World Bank, 2022)	Reformasi perlindungan sosial di level kota sangat dibutuhkan untuk menjangkau kelompok pekerja informal yang rentan namun belum terlindungi sistem formal.	Kembangkan sistem jaminan sosial berbasis komunitas dan digital. Integrasikan data DTKS dengan data mikro kelurahan untuk targeting bansos dan jaminan sosial lebih tepat sasaran.
Kerentanan lingkungan dan eksklusi spasial di daerah pinggiran (Rahayu, 2023;	Pembangunan harus mengintegrasikan dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan untuk mencegah eksklusi dan krisis ekologis.	Terapkan prinsip kota inklusif dalam RPJMD. Kembangkan hunian terjangkau, ruang terbuka hijau, dan transportasi publik terintegrasi di wilayah rentan.

5.2 Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan

5.2.1 Ketimpangan Ekonomi dan Aset Produktif

Ketimpangan ekonomi di Kota Surakarta sangat erat kaitannya dengan distribusi aset produktif, yang mencakup kepemilikan rumah tinggal, lahan, modal usaha, kendaraan, serta simpanan atau tabungan. Aset-aset tersebut merupakan fondasi penting bagi kestabilan ekonomi keluarga, dan sekaligus menjadi penentu daya tahan mereka terhadap guncangan ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara lapangan, ditemukan bahwa kelompok masyarakat di wilayah seperti Kelurahan Pajang dan Karangasem (Kecamatan Laweyan) umumnya berada pada posisi ekonomi yang lebih stabil karena memiliki rumah milik pribadi, baik sebagai hasil kerja mandiri maupun warisan keluarga. Aset ini tidak hanya mengurangi beban pengeluaran rutin, tetapi juga

memberi jaminan keamanan tempat tinggal, serta membuka ruang untuk perencanaan masa depan seperti investasi pendidikan anak atau pengembangan usaha mikro.

Mojosongo (Jebres) dan Panularan (Laweyan) menunjukkan profil yang sangat berbeda. Di daerah-daerah ini, kepemilikan rumah sangat rendah. Banyak warga tinggal di rumah kontrakan, rumah petak sempit, atau bangunan semi permanen warisan orang tua yang sudah terbagi-bagi antargenerasi. Rumah-rumah tersebut seringkali berada di gang-gang sempit, lingkungan padat penduduk, atau bahkan di area rawan banjir dan sanitasi buruk. Ketika rumah tangga tidak memiliki aset produktif seperti rumah atau lahan, maka seluruh penghasilan bulanan terserap untuk biaya hidup harian, tanpa ruang untuk ditabung atau diinvestasikan. Hal ini menciptakan ketergantungan terhadap penghasilan harian dan bantuan sosial, serta mempersulit proses akumulasi kekayaan dan mobilitas sosial antar generasi.

Kesenjangan ini semakin dalam karena akses terhadap modal usaha dan layanan keuangan formal juga tidak merata. Di wilayah seperti Pajang dan Karangasem, warga cenderung lebih mudah mendapatkan akses pinjaman dari koperasi, bank, atau lembaga pembiayaan mikro. Mereka juga memiliki jaringan sosial yang mendukung, seperti asosiasi usaha kecil atau komunitas ibu-ibu pengusaha. Sementara itu, di wilayah miskin kota, warga sering kali dianggap tidak bankable karena tidak memiliki jaminan aset, serta dianggap berisiko tinggi untuk meminjam. Ini membuat banyak keluarga terpaksa bergantung pada pinjaman informal atau rentenir, yang justru memperburuk kondisi ekonomi mereka.

Ketimpangan ini juga bersifat gender, terutama dalam konteks perempuan kepala keluarga atau perempuan pelaku usaha informal. Banyak perempuan seperti Ibu Selvi dari Serengan, yang memiliki semangat tinggi untuk berwirausaha namun terhambat oleh keterbatasan tempat berjualan, modal, dan stigma sosial. Mereka seringkali harus memulai usaha kecil-kecilan dari rumah atau berjualan door-to-door, tanpa dukungan pelatihan atau pembinaan formal. Walaupun memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan, keterbatasan aset dan akses tetap menjadi penghalang dalam memperluas usaha.

Ketimpangan ekonomi ini membentuk pola teritorial yang sangat jelas. Wilayah barat dan barat daya kota (Laweyan, Pajang, Karangasem) berkembang sebagai klaster ekonomi menengah ke atas, dengan kepemilikan aset dan pekerjaan formal yang kuat. Sementara wilayah timur dan timur laut (Jebres, Pasar Kliwon, Serengan) berkembang menjadi klaster marginal

urban yang menghadapi beban ganda dari kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya akses ke layanan dasar.

Implikasinya adalah munculnya siklus ketimpangan antar generasi, di mana keluarga yang miskin akan cenderung tetap miskin karena tidak memiliki alat produksi atau aset yang bisa diturunkan kepada anak-anaknya. Anak-anak dari keluarga miskin pun tumbuh dalam kondisi perumahan yang tidak layak, dengan keterbatasan ruang belajar, fasilitas sanitasi yang minim, dan lingkungan yang kurang mendukung perkembangan. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk mengejar pendidikan tinggi atau mendapatkan pekerjaan formal di masa depan.

Intervensi kebijakan yang bersifat multidimensi dan berbasis wilayah sangat diperlukan. Pemerintah daerah perlu memperluas program kepemilikan rumah bersubsidi, penguatan akses permodalan berbasis komunitas, serta pemberdayaan ekonomi lokal melalui pelatihan usaha dan literasi keuangan. Upaya ini harus disertai dengan perlindungan sosial yang bersifat produktif, agar keluarga miskin tidak hanya bergantung pada bantuan konsumtif, tetapi juga memiliki peluang untuk mengembangkan aset dan menciptakan kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.

5.2.2 Ketimpangan Pendidikan

Ketimpangan pendidikan di Kota Surakarta bukan hanya tercermin dalam angka statistik seperti Angka Partisipasi Sekolah (APS) atau Rata-rata Lama Sekolah (RLS), tetapi juga sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari warga, sebagaimana tergambar dari hasil wawancara mendalam. Akses pendidikan yang tidak merata, kualitas sekolah yang berbeda antarkabupaten, serta kemampuan keluarga dalam membiayai pendidikan menjadi faktor dominan penyebab ketimpangan ini. Kabupaten seperti Pajang dan Karangasem menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan yang tinggi. Sebagian besar anak di kabupaten ini berhasil menamatkan pendidikan hingga SMA bahkan melanjutkan ke perguruan tinggi. Ini terjadi karena beberapa kondisi pendukung, seperti kepemilikan kendaraan pribadi, kedekatan geografis dengan sekolah negeri unggulan, dan stabilitas pendapatan orang tua yang mayoritas adalah ASN, guru, atau pensiunan. Kabupaten seperti Mojosongo (Kec. Jebres), Panularan (Pasarkliwon), dan Joyotakan (Serengan) menunjukkan kondisi yang kontras. Di kabupaten-kabupaten ini, banyak anak yang hanya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SD atau SMP, dan tidak melanjutkan ke SMA/SMK karena berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain: keterbatasan biaya, tidak tersedianya sekolah negeri dalam zona tempat tinggal (terkait sistem zonasi), kurangnya transportasi umum murah, serta tekanan sosial untuk segera bekerja membantu keluarga. Di Mojosongo, misalnya,

responden menyebut bahwa sistem zonasi sering membuat anak-anak dari gang-gang sempit atau bantaran sungai tidak diterima di sekolah negeri, sementara biaya sekolah swasta di luar jangkauan ekonomi mereka.

Ketimpangan pendidikan ini juga diperkuat oleh tingkat pendidikan orang tua yang rendah, terutama di kawasan marginal. Banyak keluarga yang masih menganggap bahwa pendidikan menengah tidak terlalu penting. Di beberapa kasus, orang tua bahkan mendorong anak untuk segera bekerja atau menikah dini, karena melihat pendidikan sebagai beban, bukan investasi. Hal ini sangat berbeda dengan keluarga di Pajang dan Karangasem, yang menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama. Bahkan, mereka menyisihkan tabungan khusus untuk keperluan sekolah anak sejak dini.

Ketimpangan juga muncul dalam hal kualitas fasilitas pendidikan dan partisipasi dalam kegiatan belajar tambahan. Anak-anak dari keluarga ekonomi mapan memiliki akses terhadap les privat, bimbingan belajar, kursus daring, dan perlengkapan digital (laptop, kuota internet). Sementara anak-anak dari wilayah ekonomi lemah sering belajar di rumah dengan keterbatasan buku, ruangan sempit, atau bahkan tanpa dukungan digital. Ketimpangan ini sangat menonjol selama pandemi COVID-19, dan meskipun sekolah sudah kembali offline, dampaknya masih terasa.

Dari aspek gender, meskipun data menunjukkan bahwa partisipasi anak laki-laki dan perempuan relatif seimbang di tingkat SD dan SMP, namun ada kecenderungan anak perempuan dari keluarga miskin lebih sering mengalami putus sekolah. Beberapa kasus menunjukkan bahwa anak perempuan justru didorong untuk bekerja membantu ibu di rumah, atau dinikahkan muda untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Narasi ini sangat kuat di wilayah seperti Joyotakan dan Panularan, dan hampir tidak ditemukan di Pajang atau Karangasem.

Pola spasial ketimpangan pendidikan ini menciptakan klaster wilayah dengan “*lingkaran pendidikan rendah*”, di mana satu generasi dengan pendidikan terbatas melahirkan generasi berikutnya dengan kesempatan yang lebih kecil pula. Ketika anak-anak tumbuh tanpa role model pendidikan, motivasi mereka pun menurun. Wilayah-wilayah tersebut membutuhkan intervensi kebijakan yang lebih spesifik dan berbasis komunitas—misalnya melalui relawan pendidikan, program rumah belajar warga, atau dukungan sekolah alternatif yang tidak terhambat zonasi.

Dari sisi kebijakan, intervensi yang perlu dilakukan mencakup:

- a. Reformulasi kebijakan zonasi agar lebih adil bagi anak-anak dari wilayah padat atau bantaran.

- b. Bantuan pendidikan berbasis kebutuhan, bukan hanya administrasi, untuk memastikan keluarga yang benar-benar tidak mampu tetap dapat menyekolahkan anaknya.
- c. Penguatan peran tokoh masyarakat dan kader lokal untuk mendorong kesadaran pendidikan.
- d. Pembentukan pusat belajar komunitas di kawasan dengan risiko putus sekolah tinggi.
- e. Insentif bagi sekolah negeri untuk menerima anak dari keluarga rentan, disertai pendampingan psikososial.

Tabel 5.21 Ringkasan Ketimpangan Pendidikan per Wilayah

Kecamatan/Kelurahan	Akses Sekolah	Partisipasi SMA/SMK	Dukungan Keluarga	Hambatan Utama
Pajang (Laweyan)	Baik (radius dekat, banyak sekolah negeri)	Tinggi (banyak lanjut kuliah)	Tinggi (ASN, pensiunan)	Zonasi SMA
Karangasem (Laweyan)	Baik, meski terbatas SMA negeri	Sedang–Tinggi	Tinggi	Biaya sekolah swasta
Kadipiro (Banjarsari)	Cukup baik untuk SD/SMP	Sedang	Sedang	Transportasi & biaya tambahan
Mojosongo (Jebres)	Terbatas (jauh dari sekolah negeri)	Rendah	Rendah	Zonasi, biaya, motivasi
Panularan (Pasarkliwon)	Terbatas	Rendah	Rendah	Transportasi, KIP tidak aktif
Joyotakan (Serengan)	SD mudah, lanjutannya sulit	Sangat rendah	Sangat rendah	Lingkungan negatif, ekonomi

5.2.3 Ketimpangan Akses Pekerjaan dan Perlindungan Sosial

Ketimpangan akses terhadap pekerjaan layak dan perlindungan sosial merupakan salah satu akar dari ketimpangan kesejahteraan di Kota Surakarta. Hasil wawancara menunjukkan bahwa struktur pekerjaan warga sangat bergantung pada latar belakang pendidikan, lokasi tempat tinggal, serta akses terhadap pasar kerja formal. Warga di wilayah seperti Pajang dan Karangasem umumnya memiliki pekerjaan yang relatif stabil, seperti ASN, guru, atau pensiunan. Pekerjaan ini memberikan pendapatan tetap, jaminan sosial, tunjangan pensiun, serta rasa aman ekonomi. Kondisi ini memungkinkan mereka merencanakan keuangan keluarga, termasuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak-anak secara jangka panjang.

Wilayah Panularan, Joyotakan, dan Mojosongo, mayoritas warga bekerja di sektor informal seperti buruh harian, pedagang keliling, tukang ojek, atau pekerja lepas. Pekerjaan ini tidak hanya berpenghasilan rendah dan fluktuatif, tetapi juga tidak memberikan perlindungan

jaminan sosial formal. Banyak keluarga hidup dalam kondisi ketidakpastian ekonomi, bergantung pada pendapatan harian yang tidak tetap. Hal ini membuat mereka rentan terhadap guncangan ekonomi seperti kenaikan harga bahan pokok, sakit mendadak, atau kehilangan pekerjaan. Sebagaimana dicontohkan oleh Pak Kuspriyanto dari Panularan, ia bekerja sebagai penagih lepas, dan hanya memperoleh penghasilan jika ada proyek. Jika tidak, tidak ada pemasukan sama sekali. Pekerja informal ini, meskipun jumlahnya besar, sering tidak terdaftar dalam sistem jaminan sosial negara. Meskipun banyak yang memiliki kartu BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) atau KIS (Kartu Indonesia Sehat), kenyataannya banyak dari mereka tidak bisa menggunakan layanan tersebut karena kartu tidak aktif, prosedur rujukan yang sulit, atau kendala administratif lainnya. Beberapa responden bahkan menyebut harus membayar biaya sendiri meskipun memiliki kartu, terutama dalam kondisi darurat. Hal ini mencerminkan kesenjangan antara kepesertaan formal dan akses nyata terhadap manfaat perlindungan sosial.

Perlindungan sosial non-kesehatan seperti bantuan sosial (PKH, BPNT, dan BLT) juga menunjukkan ketimpangan dalam penyaluran. Beberapa warga menyatakan bahwa mereka tidak menerima bantuan meskipun tergolong miskin, sedangkan yang secara ekonomi relatif mampu justru mendapatkannya. Hal ini disebabkan oleh kelemahan dalam akurasi data dan seleksi penerima bantuan oleh perangkat RT/RW. Bahkan, sebagian warga enggan mengusulkan diri sebagai penerima karena takut "dicap miskin", menunjukkan adanya stigma sosial yang justru memperburuk eksklusi terhadap perlindungan sosial.

Sistem ketenagakerjaan juga memperlihatkan ketimpangan spasial. Di wilayah yang lebih terhubung dengan pusat kota seperti Laweyan, akses terhadap informasi pekerjaan, pelatihan kerja, dan jaringan sosial lebih tinggi. Sementara itu, di pinggiran seperti Jebres dan Serengan, warga kurang memiliki akses terhadap pelatihan keterampilan atau program padat karya. Padahal, di wilayah ini angka pengangguran tinggi, termasuk pengangguran terbuka dan terselubung. Kelompok perempuan juga mengalami hambatan ganda karena keterbatasan waktu, beban domestik, serta minimnya dukungan sosial.

Sebagian warga mengembangkan usaha mikro atau informal (warung, jualan online, menjahit) sebagai strategi bertahan. Namun, keterbatasan modal, literasi digital, dan pasar membuat usaha ini sulit berkembang. Responden seperti Ibu Selvi bahkan menyebut pernah ditolak berdagang di area Car Free Day (CFD) karena tidak punya izin atau dianggap tidak sesuai dengan standar komunitas ekonomi tertentu. Ini menegaskan adanya penghalang kultural dalam akses terhadap kesempatan ekonomi.

Dari dimensi ini, kita bisa melihat bahwa ketimpangan akses pekerjaan dan perlindungan sosial tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga administratif, spasial, dan kultural. Masyarakat yang sudah memiliki pekerjaan formal akan semakin terlindungi, sementara masyarakat informal terjebak dalam siklus rentan. Ketimpangan ini memperkuat jurang sosial, karena akses terhadap pekerjaan layak juga menentukan akses ke pendidikan dan layanan dasar lainnya.

Tabel 5.22 Ringkasan Ketimpangan Akses Pekerjaan dan Perlindungan Sosial

Wilayah/Kelurahan	Jenis Pekerjaan Dominan	Status Penghasilan	Akses Jaminan Sosial	Hambatan Utama
Pajang (Laweyan)	ASN, guru, pensiunan	Tetap, stabil	Tinggi (BPJS aktif, pensiun)	Tidak signifikan
Karangasem	PNS, pekerja tetap	Tetap, cukup	Tinggi (juga untuk keluarga)	Terbatas pada biaya anak kuliah
Kadipiro (Banjarsari)	Pekerja sektor formal dan informal	Campuran, cenderung stabil	Sedang (tidak semua keluarga terlindungi)	Rawan banjir, zonasi SMA
Mojosongo (Jebres)	Buruh pabrik, serabutan	Tidak tetap	Rendah, sering tidak aktif	PHK massal, ketergantungan bansos
Panularan (Pasarkliwon)	Serabutan, freelance	Tidak tetap	Rendah, KIS/BPJS bermasalah	Administrasi rumit, minim modal
Joyotakan (Serengan)	Buruh, tukang, IRT	Fluktuatif, rendah	Rendah, bergantung pada PKH	Stigma miskin, data tidak valid

5.2.4 Ketimpangan Akses terhadap Layanan Dasar dan Sanitasi

Ketimpangan kesejahteraan di Kota Surakarta tidak hanya tercermin dalam ekonomi dan pendidikan, tetapi juga sangat kasat mata dalam akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan perumahan layak. Data lapangan menunjukkan bahwa wilayah-wilayah dengan status sosial ekonomi menengah ke atas, seperti Pajang dan Karangasem (Kecamatan Laweyan), secara umum memiliki akses penuh terhadap fasilitas dasar. Sebagian besar warga di dua wilayah ini sudah terhubung dengan jaringan PDAM, memiliki kamar mandi pribadi, sistem pembuangan limbah yang tertutup, serta hunian yang layak dan sehat.

Wilayah Mojosongo (Jebres), Panularan (Pasarkliwon), dan Joyotakan (Serengan) menghadapi tantangan serius dalam hal sanitasi dan infrastruktur dasar. Di Mojosongo, masih ditemukan rumah tangga yang tidak memiliki WC pribadi, menggunakan air sumur dangkal, atau bahkan masih membuang limbah langsung ke tanah atau selokan terbuka. Tidak hanya memperburuk kualitas lingkungan, kondisi ini juga meningkatkan risiko kesehatan warga,

terutama anak-anak dan lansia. Bahkan, terdapat rumah yang digunakan oleh beberapa keluarga secara bersamaan, dengan fasilitas dasar yang dibagi dan kualitas hunian yang sangat terbatas.

Salah satu penyebab ketimpangan akses layanan dasar ini adalah ketimpangan spasial dan kepadatan penduduk. Daerah-daerah padat seperti Panularan dan Joyotakan sering mengalami kesulitan akses infrastruktur karena keterbatasan ruang serta status kepemilikan tanah yang tidak jelas (tanah warisan atau tidak bersertifikat). Kondisi ini menyulitkan intervensi program pemerintah, seperti pemasangan saluran air bersih atau sanitasi. Bahkan dalam beberapa kasus, seperti yang ditemukan dalam wawancara, warga menolak bantuan air bersih gratis karena takut dicap sebagai “warga miskin”, menunjukkan adanya pengaruh faktor sosial dan stigma terhadap status penerima manfaat.

Ketersediaan layanan kesehatan dasar juga mengalami ketimpangan. Di Laweyan dan Banjarsari, terdapat Puskesmas yang aktif, tenaga medis memadai, dan layanan kesehatan terjangkau. Namun di wilayah lain seperti Mojosongo dan Serengan, warga mengalami kendala akses jarak, jumlah fasilitas terbatas, dan keterbatasan layanan rujukan. Beberapa warga menyebut bahwa meskipun memiliki BPJS Kesehatan, proses penggunaan kartu untuk rujukan rumah sakit masih rumit dan kadang tidak direspons oleh fasilitas kesehatan. Situasi ini menyebabkan warga terpaksa membayar sendiri biaya pengobatan, atau lebih buruknya, menunda perawatan karena tidak punya uang.

Air bersih menjadi isu yang sangat menentukan dalam ketimpangan kesejahteraan. Di wilayah dengan sambungan PDAM yang lancar, seperti Pajang dan Karangasem, air bersih tersedia 24 jam, dan kualitasnya dijamin. Namun di Panularan dan Joyotakan, akses air bersih masih terbatas, bahkan ada warga yang harus bergantian menyedot air dari sumur kolektif. Dalam beberapa kasus, air dari sumur mengandung kadar besi tinggi dan tidak layak untuk dikonsumsi langsung. Situasi ini memperlihatkan bahwa kualitas lingkungan fisik dan infrastruktur dasar sangat memengaruhi kualitas hidup warga dan memperkuat ketimpangan jangka panjang.

Lebih jauh lagi, keterbatasan akses terhadap sanitasi dan layanan dasar tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga menurunkan partisipasi sosial dan kepercayaan diri warga. Dalam wawancara dengan warga perempuan di Serengan, disebutkan bahwa keterbatasan fasilitas membuat mereka enggan menerima tamu atau mengikuti kegiatan sosial, karena merasa malu dengan kondisi rumah. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan layanan dasar juga berdampak psikososial, memperkuat isolasi sosial, dan mengurangi peluang warga untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat.

Tabel 5.23 Ringkasan Ketimpangan Layanan Dasar dan Sanitasi

Wilayah/Kelurahan	Akses Air Bersih	Sanitasi (WC Pribadi)	Sistem Limbah	Hunian Layak	Akses Kesehatan	Catatan Tambahan
Pajang (Laweyan)	PDAM penuh	Mayoritas punya	Tertutup	Rumah milik sendiri, luas	Puskesmas aktif, layanan baik	Fasilitas mendukung partisipasi sosial
Karangasem	PDAM tersedia	Sebagian sudah baik	Baik	Rumah pribadi warisan	Layanan cukup memadai	Akses transportasi mendukung
Kadipiro (Banjarsari)	Sebagian PDAM, sebagian sumur	Cukup merata	Beberapa masih terbuka	Sebagian rumah sewa/warisan	Masih ada zona rawan banjir	Potensi berkembang
Mojosongo (Jebres)	Sumur dangkal	Banyak tanpa WC pribadi	Terbuka	Rumah petak/kontrakan padat	Rujukan BPJS sulit, puskesmas jauh	Rentan penyakit lingkungan
Panularan (Pasarkliwon)	Sumur kolektif	Banyak berbagi WC	Buang ke tanah	Rumah tidak bersertifikat	BPJS tidak aktif, transportasi buruk	Stigma sosial kuat
Joyotakan (Serengan)	Air sumur terbatas	Sanitasi rendah	Terbuka	Sempit, berbagi ruang	Akses rujukan buruk	Isolasi sosial, perempuan terdampak

5.2.5 Ketimpangan Partisipasi Sosial dan Politik

Ketimpangan kesejahteraan di Kota Surakarta juga tercermin dalam tingkat partisipasi sosial dan politik di berbagai wilayah. Partisipasi ini merujuk pada keterlibatan warga dalam kegiatan komunitas, organisasi kemasyarakatan, program pembangunan kelurahan, serta akses terhadap pengambilan keputusan publik. Berdasarkan data wawancara dan temuan lapangan, wilayah seperti Pajang, Karangasem, dan sebagian Kadipiro menunjukkan tingkat partisipasi sosial yang tinggi. Warga aktif dalam kegiatan RT, PKK, posyandu, karang taruna, hingga forum musrenbang. Mereka juga menunjukkan pemahaman yang baik tentang hak-hak sebagai warga negara dan secara aktif menyampaikan aspirasi melalui jalur formal.

Sebaliknya, di wilayah seperti Mojosongo, Panularan, dan Joyotakan, ditemukan bahwa tingkat partisipasi sosial dan politik rendah, terutama pada kelompok perempuan, warga miskin, dan warga muda. Banyak warga yang tidak terlibat dalam kegiatan sosial karena faktor ekonomi

(harus bekerja sepanjang hari), atau karena keterbatasan ruang sosial—misalnya warga kontrakan atau rumah petak yang tidak memiliki akses komunikasi yang baik dengan tetangga. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan rasa percaya diri juga menjadi penghalang utama bagi warga untuk menyuarakan kebutuhan mereka di forum publik. Hal ini membuat sebagian besar program pembangunan menjadi tidak inklusif, karena hanya menjangkau kelompok yang sudah mapan dan terlibat secara aktif.

Perempuan di wilayah marginal seperti Panularan dan Joyotakan sering mengalami hambatan ganda. Tidak hanya karena beban kerja domestik dan pengasuhan yang berat, tetapi juga karena adanya stigma bahwa perempuan tidak perlu aktif di luar rumah. Padahal, sebagaimana ditunjukkan oleh tokoh seperti Ibu Selvi di Panularan, keterlibatan perempuan dalam kegiatan sosial bisa menjadi alat pemberdayaan dan membuka akses informasi serta jejaring ekonomi baru. Namun tidak semua warga perempuan memiliki dukungan keluarga seperti itu. Banyak dari mereka yang merasa tidak percaya diri untuk bicara di forum RT atau kelurahan, apalagi mengakses program pelatihan atau penguatan kapasitas.

Keterlibatan dalam proses politik formal seperti pemilihan umum, musyawarah kelurahan, atau kegiatan rembug warga juga menunjukkan pola yang timpang. Warga di wilayah mapan lebih mengetahui alur pengambilan keputusan dan jaringan pengurus lokal, sehingga aspirasi mereka lebih sering diakomodasi dalam kebijakan lokal seperti pembangunan infrastruktur atau program pemberdayaan ekonomi. Sementara warga dari wilayah rentan cenderung pasif dan tidak percaya diri, bahkan ada yang merasa bahwa suara mereka tidak berarti. Hal ini memperdalam eksklusi sosial dan menciptakan lingkaran marginalisasi yang sulit diputus.

Salah satu temuan menarik adalah adanya penolakan terhadap bantuan atau program sosial karena takut dicap "warga miskin". Ini menunjukkan adanya konflik antara kebutuhan ekonomi dan harga diri sosial. Misalnya, ada warga yang menolak program pemasangan air bersih gratis karena takut "status miskin" mereka tercatat dan diketahui publik. Ini memperlihatkan bagaimana stigma sosial dapat menghambat warga untuk mengakses hak-hak dasar, sekaligus memperkuat ketimpangan partisipasi.

Faktor lain yang memperkuat ketimpangan adalah minimnya representasi dari kelompok rentan dalam struktur pengurus lingkungan (RT/RW). Sebagian besar pengurus berasal dari kelompok yang sudah mapan secara ekonomi dan sosial, sehingga prioritas program dan pembagian sumber daya cenderung tidak menyentuh kebutuhan warga marginal. Tanpa

perubahan dalam struktur partisipasi dan mekanisme inklusi sosial, ketimpangan ini akan terus berlanjut dan memperdalam ketidaksetaraan di tingkat lokal.

Tabel 5.24 Ringkasan Ketimpangan Partisipasi Sosial dan Politik

Wilayah/Kelurahan	Partisipasi Warga	Keterlibatan Perempuan	Representasi Warga Miskin	Akses Musrenbang	Kendala Utama
Pajang (Laweyan)	Tinggi	Aktif di PKK, posyandu	Cukup terwakili	Aktif	Hampir tidak ada
Karangasem	Tinggi	Tinggi	Terfasilitasi	Tinggi	Isu zonasi pendidikan
Kadipiro	Menengah	Mulai aktif	Cukup terwakili	Cukup	Masih ada ketimpangan lingkungan
Mojosongo (Jebres)	Rendah	Terbatas	Minim	Rendah	Akses informasi rendah
Panularan (Pasarkliwon)	Rendah	Terhambat stigma	Tidak terwakili	Minim	Takut dicap miskin
Joyotakan (Serengan)	Sangat rendah	Hampir tidak terlibat	Tidak muncul dalam forum	Hampir tidak aktif	Faktor sosial dan lingkungan negatif

5.2.6 Ketimpangan Gender dan Relasi Kekuasaan dalam Rumah Tangga dan Komunitas

Dimensi ketimpangan berikutnya yang penting untuk dicermati dalam konteks Kota Surakarta adalah ketimpangan gender, yang tercermin dari relasi kuasa dalam rumah tangga, keterlibatan perempuan dalam komunitas, akses terhadap sumber daya, serta persepsi sosial terhadap peran gender. Meskipun banyak kebijakan afirmatif telah diterapkan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perempuan dari keluarga miskin dan wilayah marginal masih menghadapi banyak batasan, baik secara struktural maupun kultural.

Dalam wawancara, ditemukan bahwa perempuan dari wilayah seperti Pajang dan Karangasem cenderung lebih aktif secara sosial dan memiliki ruang pengambilan keputusan dalam keluarga yang lebih luas. Hal ini terkait dengan latar belakang pendidikan yang relatif lebih baik, penghasilan keluarga yang stabil, serta dukungan pasangan atau lingkungan. Sebaliknya, di wilayah seperti Mojosongo, Panularan, dan Joyotakan, perempuan menghadapi tekanan ekonomi, stigma sosial, serta beban ganda pekerjaan rumah tangga dan ekonomi informal. Banyak yang bekerja sebagai penjual keliling, pembantu rumah tangga, atau buruh rumahan tanpa pengakuan formal.

Kasus Ibu Selvi dari Panularan menjadi contoh perempuan yang mampu membalik keterbatasan menjadi kekuatan. Sebagai ibu tunggal, ia membesarkan anak-anaknya dengan mengandalkan penghasilan mandiri, aktif dalam kegiatan sosial, dan terus belajar memperbaiki keterampilan ekonomi. Namun, ini merupakan pengecualian. Sebagian besar perempuan dari kelompok rentan menyampaikan bahwa mereka tidak dilibatkan dalam keputusan rumah tangga yang penting, seperti alokasi pendapatan atau pendidikan anak. Masih banyak yang tergantung secara ekonomi kepada pasangan, sehingga kehilangan posisi tawar dalam keluarga.

Di tingkat komunitas, perempuan dari wilayah rentan juga jarang terlibat dalam struktur kepemimpinan lokal, seperti RT, RW, atau lembaga kemasyarakatan. Hambatan ini bukan hanya berasal dari budaya patriarkis, tetapi juga karena waktu mereka habis untuk urusan domestik dan pekerjaan informal. Beberapa perempuan menyatakan takut berbicara di forum publik, merasa tidak cukup pintar, atau tidak punya jaringan sosial yang kuat. Kurangnya pelatihan kepemimpinan dan pendampingan juga memperkuat ketimpangan ini.

Ketimpangan gender juga terlihat dalam akses terhadap program sosial dan ekonomi. Di beberapa wilayah, perempuan tidak tahu bahwa mereka bisa mendaftarkan diri untuk bantuan sosial, pelatihan keterampilan, atau program pemberdayaan ekonomi. Bahkan ada kasus di mana suami atau keluarga melarang istri untuk ikut pelatihan, karena dianggap mengganggu tugas rumah tangga. Ini menandakan bahwa ketimpangan gender bukan hanya soal peluang yang tidak tersedia, tetapi juga soal norma dan kendali sosial atas tubuh dan waktu perempuan.

Beberapa program sosial seperti Posbindu, Posyandu, dan kegiatan PKK masih menjadi ruang penting pemberdayaan perempuan. Tempat ini bukan hanya untuk layanan kesehatan atau administrasi, tetapi juga menjadi arena diskusi, pertukaran informasi, dan solidaritas. Sayangnya, keberhasilan kegiatan ini sangat tergantung pada keberadaan tokoh perempuan lokal yang aktif dan dihormati. Tanpa mereka, kegiatan cenderung stagnan atau dikuasai oleh kelompok elite sosial setempat.

Ketimpangan relasi kuasa gender ini harus dilihat sebagai bagian dari struktur kemiskinan yang lebih luas. Perempuan dari kelompok rentan bukan hanya mengalami kemiskinan ekonomi, tetapi juga kemiskinan akses, suara, dan kontrol atas hidupnya sendiri. Kebijakan intervensi perlu memasukkan aspek transformasi gender secara eksplisit tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan, tetapi juga dengan mengubah norma, memperkuat kepercayaan diri, dan menciptakan ruang aman bagi perempuan untuk berkembang.

Tabel 5.25 Ringkasan Ketimpangan Gender dan Relasi Kuasa

Wilayah/Kelurahan	Peran Perempuan dalam Rumah Tangga	Keterlibatan di Komunitas	Akses ke Program Sosial	Relasi Gender	Catatan Kunci
Pajang (Laweyan)	Tinggi (berbagi keputusan)	Aktif dalam PKK, Posyandu	Terinformasi & aktif	Relatif setara	Dukungan suami kuat
Karangasem	Tinggi	Baik, meski usia tua mendominasi	Cukup kuat	Setara	Ada regenerasi kader
Kadipiro	Menengah	Ada beberapa kader aktif	Cukup	Mulai inklusif	Isu banjir mengganggu kegiatan komunitas
Mojosongo	Rendah	Terbatas, hanya kelompok elite	Minim akses	Relasi timpang	Beban ganda perempuan
Panularan	Bervariasi, tergantung dukungan pasangan	Ada contoh tokoh kuat	Lemah	Timpang	Perempuan kepala keluarga butuh penguatan jaringan
Joyotakan	Rendah	Hampir tidak terlibat	Minim sekali	Patriarkal	Norma membatasi gerak perempuan

5.2.7 Ketimpangan Akses terhadap Masa Depan dan Aspirasi Sosial

Ketimpangan kesejahteraan tidak hanya tampak pada dimensi material seperti pekerjaan, pendidikan, atau aset, tetapi juga pada akses terhadap masa depan—yakni sejauh mana keluarga memiliki harapan, aspirasi, dan kemampuan merencanakan kehidupan yang lebih baik bagi generasi berikutnya. Aspirasi sosial ini mencerminkan dimensi simbolik dan psikologis dari kesejahteraan, yang sayangnya kerap terabaikan dalam kebijakan publik.

Berdasarkan hasil wawancara dalam studi ini, terlihat bahwa keluarga dari wilayah dengan tingkat kesejahteraan relatif tinggi (seperti Pajang dan Karangasem) umumnya memiliki visi jangka panjang yang lebih jelas. Mereka tidak hanya mendorong anak-anak untuk menyelesaikan pendidikan hingga SMA, tetapi juga berinvestasi secara finansial dan emosional agar anak dapat masuk perguruan tinggi, bekerja di sektor formal, dan hidup lebih baik dari orang tuanya. Banyak keluarga menyisihkan tabungan untuk dana pendidikan, bahkan sejak anak masih

usia SD. Hal ini menunjukkan bahwa aspirasi masa depan mereka ditopang oleh kestabilan ekonomi, akses informasi, serta jejaring sosial yang mendukung.

Mojosongo, Joyotakan, dan Panularan, aspirasi sosial warga jauh lebih terbatas. Harapan terhadap masa depan anak sering kali bersifat realistis-pragmatis—asal anak tidak putus sekolah dan bisa bekerja apa saja sudah cukup. Hal ini tidak berarti bahwa mereka tidak peduli terhadap masa depan anak, tetapi lebih mencerminkan keterbatasan struktur peluang dan pengalaman hidup mereka sendiri. Wawancara dengan beberapa responden menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang tidak menentu, trauma sosial (perceraian, PHK, kekerasan), serta isolasi informasi membuat mereka sulit membayangkan jalan hidup yang lebih baik bagi anak-anak mereka.

Kasus Ibu Selvi dari Panularan menjadi contoh menarik. Ia menunjukkan semangat tinggi dalam mendorong anak-anaknya untuk berpendidikan tinggi dan hidup mandiri, meskipun ia sendiri menghadapi berbagai keterbatasan. Namun, kasus seperti ini masih tergolong langka. Banyak orang tua di wilayah rentan yang bahkan tidak mengetahui prosedur pendaftaran beasiswa, informasi pendidikan lanjutan, atau peluang pelatihan vokasional.

Dimensi aspirasi masa depan juga dipengaruhi oleh keterlibatan dalam komunitas sosial dan kegiatan partisipatif. Warga yang aktif di Posyandu, karang taruna, PKK, atau kegiatan keagamaan cenderung memiliki kepercayaan diri lebih tinggi dan merasa bagian dari jejaring sosial yang bisa membantu anak-anak mereka. Sebaliknya, warga yang terisolasi secara sosial—baik karena stigma, status miskin, atau tekanan budaya—mengalami kemiskinan ekspektasi, yakni tidak memiliki cukup keyakinan bahwa masa depan bisa lebih baik.

Hal yang menarik, ketimpangan aspirasi ini bersifat menular antar-generasi. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan dengan harapan rendah cenderung menginternalisasi nilai-nilai survival, bukan mobilitas. Mereka terbiasa bekerja sejak remaja, tidak berminat sekolah tinggi, dan merasa tidak layak bersaing. Hal ini menciptakan lingkaran ketimpangan struktural yang sulit diputus hanya dengan bantuan ekonomi semata.

Dimensi aspirasi masa depan harus dilihat sebagai indikator kunci dari kesejahteraan inklusif. Membangun ketahanan masa depan tidak hanya soal menyalurkan bantuan, tetapi juga menciptakan ekosistem sosial yang mampu menumbuhkan harapan, mendorong perencanaan hidup, dan menghubungkan warga dengan peluang nyata.

Tabel 5.26 Ringkasan Ketimpangan Aspirasi Masa Depan dan Mobilitas Sosial

Wilayah/Kelurahan	Aspirasi Pendidikan Anak	Harapan Sosial	Akses Informasi Peluang	Dukungan Komunitas	Tantangan Utama
Pajang (Laweyan)	Tinggi (kuliah)	Mobilitas menengah ke atas	Baik (akses digital dan komunitas)	Kuat (PKK, RT aktif)	Zonasi SMA & biaya kuliah
Karangasem	Tinggi	Stabil dan progresif	Baik	Cukup kuat	Akses SMA favorit
Kadipiro	Sedang	Terbatas tapi realistis	Parsial (akses digital terbatas)	Cukup aktif	Biaya dan zonasi pendidikan
Mojosongo	Rendah	Cenderung statis	Minim (kurang info beasiswa/BLK)	Lemah, komunitas tidak menyatu	Putus sekolah & isolasi sosial
Panularan	Variatif, tergantung tokoh lokal	Bertumpu pada tokoh	Rendah tanpa pendampingan	Bergantung pada tokoh seperti Ibu Selvi	Stigma & eksklusivitas sosial
Joyotakan	Rendah	Pesimis, pasrah	Lemah, minim informasi	Minim (fragmentasi sosial)	Pengaruh lingkungan negatif

5.3 Alternatif Kebijakan Mengurangi Ketimpangan

Ketimpangan dalam kepemilikan aset produktif menjadi akar struktural dari ketimpangan kesejahteraan. Banyak warga miskin di wilayah seperti Mojosongo, Joyotakan, dan Panularan tidak memiliki rumah sendiri atau tinggal di rumah warisan yang tidak layak. Alternatif kebijakan untuk dimensi ini adalah reformasi akses terhadap aset dan modal melalui pendekatan *redistributif dan produktif*. Pemerintah daerah dapat menggulirkan program subsidi kepemilikan rumah untuk keluarga muda dan ibu rumah tangga miskin, serta mendorong koperasi berbasis RT/RW untuk membangun tabungan kolektif. Skema hibah ringan modal mikro dan pelatihan manajemen usaha juga perlu dikembangkan berbasis komunitas dan kewilayahan.

Akses terhadap pendidikan menengah dan tinggi masih terkendala zonasi, biaya tersembunyi, serta minimnya aspirasi keluarga miskin. Sebagai kebijakan alternatif, Pemerintah Kota bisa mengembangkan skema *jalur afirmasi zonasi berbasis RW*, ditambah program “*Orang Tua Asuh Berbasis Komunitas*” agar anak-anak dari keluarga tidak mampu tetap dapat melanjutkan ke jenjang SMA/SMK. Selain itu, revitalisasi fasilitas belajar informal di kampung seperti rumah baca, mentoring

pelajar, dan relawan guru bantu bisa mengurangi ketertinggalan belajar yang selama ini memperkuat siklus kemiskinan.

Dimensi ketimpangan pekerjaan terkait erat dengan dominasi sektor informal dan lemahnya perlindungan sosial. Alternatif kebijakan mencakup integrasi BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal, pembentukan bank data pekerja rentan tingkat kelurahan, serta pelatihan sertifikasi berbasis kebutuhan lokal (contoh: pelatihan tukang listrik, sablon, pengemudi). Program *Recognition of Prior Learning (RPL)* dapat menjadi jembatan untuk mengakui keterampilan pekerja informal dan memperluas peluang kerja formal. Ini akan mempersempit jurang antara pekerja ASN/pegawai tetap dan pekerja lepas.

Layanan dasar seperti air bersih, WC, listrik, dan transportasi publik menjadi pembeda nyata antara kawasan mapan dan kawasan padat-miskin. Program *Peta Sanitasi Berbasis RT* perlu disusun untuk memetakan kebutuhan nyata warga. Pemerintah kota bisa menjalankan intervensi *komunal berbasis lingkungan* seperti WC umum yang dikelola oleh warga, insentif pemasangan air PDAM untuk keluarga rentan, dan intervensi penyambungan listrik bersubsidi. Ketimpangan ini sangat penting diselesaikan agar tidak memperbesar masalah kesehatan dan kualitas hidup.

Kemampuan mengakses peluang di era digital menjadi syarat penting untuk keluar dari kemiskinan. Alternatif kebijakan yang bisa dilakukan adalah pelatihan digital praktis untuk kelompok rentan seperti ibu rumah tangga dan lansia dan penguatan kepercayaan diri warga dalam mengelola usaha daring. Kampung Digital berbasis RW bisa dibentuk sebagai pusat pelatihan, akses internet, dan promosi produk warga. Inisiatif semacam *Digital Family Champion* akan memungkinkan keluarga memiliki satu anggota yang melek digital dan dapat mendukung ekonomi rumah tangga.

Ketimpangan bukan hanya tentang aset dan layanan, tetapi juga soal harapan dan keyakinan terhadap masa depan. Di komunitas miskin, banyak anak tidak memiliki aspirasi tinggi karena tidak melihat contoh sukses di sekitar mereka. Pemerintah bisa mengembangkan *program mentorship lintas generasi*, menghadirkan role model dari komunitas sendiri, serta memperkuat budaya belajar melalui kegiatan informal. Pembangunan narasi “masa depan bisa diraih” perlu diperkuat lewat cerita warga inspiratif, dokumenter kampung, dan forum remaja lokal.

Ketimpangan dalam pengambilan keputusan memperkuat ketergantungan terhadap bantuan sosial. Solusi kebijakannya meliputi pembentukan *Sekolah Warga* untuk edukasi hak dan tanggung jawab sosial, reformasi sistem targeting bansos berbasis musyawarah kelurahan, dan penguatan kelembagaan RT/RW agar menjadi penyaring dan pelindung yang efektif. Partisipasi warga miskin harus difasilitasi bukan hanya sebagai penerima, tetapi sebagai pengambil keputusan.

Tabel 5.27 Kebijakan Lintas Dimensi Ketimpangan Kota Surakarta

Dimensi Ketimpangan	Masalah Utama	Strategi Intervensi Kebijakan	Aktor Pelaksana	Catatan Implementasi
Ekonomi dan Aset Produktif	Ketimpangan kepemilikan rumah, tanah, dan akses modal usaha	- Program <i>Aset Recovery</i> untuk warga miskin (hibah sertifikasi rumah, subsidi sewa) - Dana bergulir produktif (koperasi berbasis RT/RW) - Revitalisasi UMKM berbasis rumah tangga	Dinas Sosial, Dinas Koperasi & UMKM, Bapenda	Perlu data terpilah berbasis aset dan bukan hanya penghasilan
Pendidikan dan Aspirasi Sosial	Putus sekolah di jenjang SMP-SMA, rendahnya aspirasi pendidikan	- Beasiswa berbasis komunitas RW (selain KIP) - Program “Orang Tua Asuh Komunitas” - Sekolah bina lingkungan dengan jalur afirmasi zonasi	Dinas Pendidikan, CSR Dunia Usaha, Komunitas Relawan	Pentingnya penjangkauan sosial bukan hanya bantuan uang
Pekerjaan dan Perlindungan Sosial	Pekerjaan informal dominan, rendahnya jaminan sosial	- Skema jaminan sosial terintegrasi untuk pekerja informal - Sertifikasi keterampilan Recognition of Prior Learning (RPL) - Basis data pekerja informal tingkat kelurahan	Dinas Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, Kelurahan	Pendataan sangat penting, potensi kolaborasi dengan RT dan karang taruna
Akses Layanan Dasar dan Sanitasi	Ketimpangan air bersih, sanitasi, dan fasilitas dasar lainnya	- Peta kebutuhan sanitasi berbasis RT - Insentif air PDAM untuk rumah tangga rawan - Program WC komunal + pelatihan PHBS	Dinas PU, Dinas Kesehatan, PDAM	Libatkan kader Posyandu dan Sub-PPKBD dalam pemetaan kebutuhan

Dimensi Ketimpangan	Masalah Utama	Strategi Intervensi Kebijakan	Aktor Pelaksana	Catatan Implementasi
Literasi Digital dan Dukungan Sosial	Rendahnya kapasitas digital dan isolasi sosial warga miskin	• Pelatihan digital berbasis gender dan usia • Program Digital Family Champion (pelatihan ibu rumah tangga) • Ruang Komunitas RW sebagai pusat kegiatan	Dinas Kominfo, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), RW/RT	Targetkan kelompok marjinal, termasuk perempuan kepala keluarga dan lansia
Ketimpangan Aspirasi dan Harapan Masa Depan	Minimnya motivasi dan role model pendidikan/ekonomi	• Program Jejak Hidup Positif (cerita inspiratif lokal) • Dialog antar generasi di sekolah dan kampung • Mentoring anak dari keluarga marginal	Bappeda, Komunitas Literasi, Dinas Pendidikan	Menyasar akar kultural dari kemiskinan berulang
Partisipasi dan Pengambilan Keputusan	Ketergantungan bantuan & minimnya ruang pengambilan keputusan warga	• Sekolah Warga (Social Empowerment Class) • Reformasi targeting bansos berbasis partisipasi warga • Pemberdayaan RT sebagai lembaga advokasi warga	Dinas Sosial, Kelurahan, LPMK	Penguatan kapasitas kelembagaan lokal menjadi kunci

Tabel 5.28 Alternatif Kebijakan Mengurangi Ketimpangan Berdasarkan Dimensi

Dimensi Ketimpangan	Alternatif Kebijakan Utama	Level Implementasi	Target Sasaran
Ekonomi dan Aset Produktif	Subsidi rumah, koperasi RW, modal usaha mikro	Kota/Kelurahan	Keluarga tanpa aset
Pendidikan	Jalur afirmasi zonasi RW, orang tua asuh komunitas	Kecamatan/Kelurahan	Anak rentan putus sekolah
Pekerjaan dan Jaminan Sosial	Sertifikasi informal, integrasi jaminan, basis data pekerja	Kota/Kelurahan	Pekerja sektor informal

Dimensi Ketimpangan	Alternatif Kebijakan Utama	Level Implementasi	Target Sasaran
Layanan Dasar dan Sanitasi	WC komunal, subsidi air & listrik, pemetaan sanitasi RT	Kelurahan/RT	Warga di zona padat & kumuh
Literasi Digital dan Konektivitas Sosial	Pelatihan digital praktis, kampung digital RW	RW/Kelurahan	IRT, lansia, remaja
Aspirasi dan Harapan Masa Depan	Mentorship warga, narasi inspiratif kampung	Sekolah/Kelurahan	Anak dan remaja dari keluarga miskin
Partisipasi dan Kemandirian	Sekolah warga, reformasi bansos partisipatif	Kelurahan/RT-RW	Penerima bantuan sosial

5.4 Strategi Jangka Panjang Menjaga Kestinambungan Program-Program Pengurangan Ketimpangan Kesejahteraan

1. Capaian Program Penanggulangan Kemiskinan

Berbagai langkah terus diupayakan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam menanggulangi kemiskinan, khususnya melalui program dukungan sosial dan pemberdayaan ekonomi warga. Sejumlah bentuk bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), distribusi pangan, Kartu Indonesia Sehat (KIS), hingga beasiswa untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu telah digulirkan sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap kelompok rentan. Berbagai pencapaian tersebut menjadi cerminan dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat jaringan perlindungan sosial.

Pengelolaan data terkait kemiskinan juga mulai diarahkan pada pendekatan yang lebih terpadu dengan mengacu pada sistem DTSEN. Kendati sistem ini telah diterapkan, proses pemutakhiran data masih menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya partisipasi warga dalam pelaporan kondisi terkini, serta keterbatasan petugas dalam melakukan verifikasi faktual di lapangan. Sebagai strategi jangka panjang, pemerintah juga fokus pada pengembangan sektor usaha kecil melalui pemberdayaan UMKM. Meskipun banyak warga yang telah memulai usaha, sebagian besar dari mereka masih memerlukan pendampingan intensif, terutama dalam hal pemasaran, akses pembiayaan, dan pengelolaan usaha agar dapat berkembang secara berkelanjutan.

Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta sudah menunjukkan perkembangan positif, terutama dalam memperluas jangkauan bantuan serta memperkuat perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Meski demikian, dibutuhkan sinergi lintas sektor yang lebih kuat, pemutakhiran data yang lebih teratur, dan

peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu mencapai kemandirian ekonomi. Hasil evaluasi ini penting untuk dijadikan pijakan dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

2. Efektivitas Intervensi Berbasis Komunitas (PKH, UMKM, Infrastruktur Sosial)

Upaya penguatan ekonomi masyarakat, diketahui bahwa banyak warga yang telah memulai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keberadaan pelaku UMKM ini masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam hal kapasitas pengetahuan dan keterampilan pengelolaan usaha. Selama ini, program sosialisasi yang diselenggarakan belum sepenuhnya diikuti dengan tindak lanjut yang konkret dalam bentuk pendampingan berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan peningkatan kapasitas pelaku UMKM berjalan lambat, dan potensi pengembangan usaha belum dapat dimaksimalkan secara optimal.

Pendampingan yang berkesinambungan menjadi faktor penting dalam menunjang keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM. Peran pendampingan bukan hanya sebagai sarana penyampaian materi teknis, melainkan juga sebagai wadah pembelajaran mengenai pengelolaan keuangan, pemanfaatan teknologi pemasaran, serta akses terhadap permodalan dan perizinan usaha. Untuk itu, diperlukan rancangan program yang lebih aplikatif dan menyentuh langsung kebutuhan pelaku UMKM, bukan sekadar kegiatan formalitas.

Masih banyak masyarakat dengan pendapatan di bawah Upah Minimum Kota yang membutuhkan perlindungan sosial. Tercatat sebanyak 19.644 keluarga menjadi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2024, dengan jumlah terbanyak berada di wilayah Mojosongo sebanyak 1.375 keluarga. Pada tahun 2025, jumlah penerima sementara tercatat meningkat menjadi 29.151 keluarga. Angka tersebut mencerminkan tingginya kebutuhan intervensi sosial ekonomi, sekaligus menunjukkan perlunya penguatan sinergi antara bantuan sosial dan program pemberdayaan agar masyarakat tidak sekadar bergantung pada bantuan pemerintah, melainkan terdorong menjadi mandiri secara ekonomi.

Melalui integrasi antara pelatihan usaha dan dukungan pasca bantuan sosial, program pemberdayaan masyarakat dapat difokuskan untuk mendorong peningkatan taraf hidup dan kemandirian rumah tangga. Strategi ini diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang adil, menyeluruh, dan berbasis potensi lokal. Masyarakat yang termasuk dalam kelompok rentan memiliki persepsi yang positif terhadap keberadaan program bantuan sosial yang

diselenggarakan oleh pemerintah. Beragam jenis bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), asuransi kesehatan, hingga beasiswa untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, dirasakan memberikan dampak langsung terhadap keberlangsungan hidup dan keberlanjutan pendidikan anak-anak mereka. Bantuan ini dinilai sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar serta meringankan beban ekonomi rumah tangga. Pelaksanaan program bantuan sosial di tingkat lokal dinilai cukup tertib dan berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan. Warga menilai bahwa proses pengusulan data yang dilakukan oleh aparat kelurahan, dengan dukungan aktif dari pengurus RT/RW, telah meningkatkan ketepatan identifikasi kelompok rentan. Keterlibatan struktur komunitas dalam proses ini menciptakan rasa kepercayaan terhadap sistem yang ada, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung keberlanjutan program.

Warga juga menyadari bahwa proses pembaruan data masih menjadi tantangan tersendiri. Tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga masih terbatas, sehingga pembaruan data sering kali tidak berjalan optimal. Hal ini dapat berdampak pada kurang akuratnya sasaran penerima bantuan dan berisiko menimbulkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat. Permintaan terhadap bantuan sosial cukup tinggi, pengelolaan data penerima yang dilakukan oleh kader dan perangkat lingkungan dinilai sudah mendekati akurat. Validasi data yang dilakukan bersama warga menunjukkan adanya kemauan kolektif dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penyaluran. Masyarakat juga mulai memahami bahwa program bantuan sosial merupakan bagian dari kebijakan pembangunan yang lebih luas, yang bertujuan mendorong kemandirian dan peningkatan kesejahteraan secara bertahap.

Persepsi warga terhadap bantuan sosial dan kebijakan pembangunan cenderung positif, selama pelaksanaan dilakukan secara adil, terbuka, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dukungan terhadap keberlanjutan program sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, transparansi data, serta komitmen semua pihak dalam menjaga kepercayaan publik terhadap program-program sosial pemerintah.

3. Strategi Jangka Panjang

Pengurangan ketimpangan tidak bisa dilakukan melalui program sektoral yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, strategi jangka panjang harus dimulai dari pembangunan ekosistem kesejahteraan, yakni keterkaitan yang terintegrasi antara dimensi pendidikan,

kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi sosial. Ini membutuhkan peta sistem yang menghubungkan akar masalah (seperti kemiskinan aset) dengan dampaknya (seperti putus sekolah atau ketidakaktifan sosial). Pemerintah Kota Surakarta dapat menginisiasi model *Kampung Sejahtera* yang memetakan, mengintervensi, dan mengevaluasi program secara terpadu di wilayah prioritas.

Kesinambungan program sangat tergantung pada keberlanjutan dukungan sosial dan kelembagaan di tingkat komunitas. Oleh karena itu, program penanggulangan ketimpangan harus dilembagakan melalui unit sosial seperti Forum RT/RW Inklusif, Sekolah Warga, dan Dewan Kampung Sejahtera. Dengan melibatkan warga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, rasa kepemilikan terhadap program meningkat, sehingga ketergantungan terhadap APBD bisa dikurangi secara bertahap. Forum semacam ini juga menjadi sarana kaderisasi pemimpin warga dan regenerasi agen perubahan.

Agar tidak semata-mata bergantung pada dana pemerintah, strategi jangka panjang harus mencakup diversifikasi pendanaan. Pemerintah Kota bisa membentuk Unit Layanan Filantropi Daerah yang mengelola CSR perusahaan lokal, zakat produktif, dana umat, dan kolaborasi dengan universitas atau yayasan. Program seperti Beasiswa RW, Modal Usaha Kolektif, atau Digital Training Grant bisa dibiayai secara berkelanjutan melalui skema filantropi sosial. Kemitraan ini bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang memperluas jangkauan dan memperdalam keberlanjutan dampak.

Strategi digitalisasi bukan sekadar alat bantu administratif, tetapi motor utama menjaga akuntabilitas dan keberlanjutan. Diperlukan Sistem Informasi Kesejahteraan Terpadu yang mengintegrasikan data pendidikan, pekerjaan, kependudukan, dan bantuan sosial berbasis NIK. Data ini bisa digunakan untuk memantau keluarga rentan, mengevaluasi efektivitas program, serta merespons perubahan dengan cepat. Pengembangan dasbor kampung oleh kelurahan atau RW akan memperkuat partisipasi warga dalam menganalisis dan merumuskan solusi mereka sendiri.

Kesinambungan program sangat bergantung pada perubahan budaya dan nilai di masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan karakter dan transformasi aspirasi warga muda perlu menjadi pilar penting. Pemerintah bisa mengembangkan program Kampus RW, pelatihan kepemudaan, dan mentoring lintas profesi di tingkat lokal. Anak-anak dan remaja dari keluarga miskin harus disiapkan untuk menjadi generasi pemutus rantai ketimpangan melalui

peningkatan literasi masa depan, digital, dan kewirausahaan. Agar program tidak stagnan atau mengulang kesalahan lama, strategi jangka panjang harus mencakup mekanisme evaluasi yang adaptif dan transparan. Dibutuhkan “social audit” yang melibatkan warga dalam menilai capaian program, serta mekanisme pengaduan dan feedback berbasis komunitas. Setiap kelurahan atau RW dapat memiliki Tim Pemantau Masyarakat yang dilatih untuk melakukan penilaian kualitatif dan kuantitatif, serta merumuskan rekomendasi bagi pembuat kebijakan.

Kunci kesinambungan adalah kemampuan pemerintah untuk terus belajar dan beradaptasi. Kota Surakarta dapat membentuk Unit Belajar Kebijakan (*Policy Learning Unit*) di bawah Bappeda, yang mengkaji program pengurangan ketimpangan, melakukan eksperimen kebijakan (pilot), dan menyusun panduan replikasi. Kegiatan ini dapat bekerja sama dengan universitas lokal dan pusat studi. Desain kebijakan yang fleksibel dan berbasis bukti akan memungkinkan setiap program merespons dinamika sosial dan ekonomi secara kontekstual.

Tabel 5.29 Strategi Jangka Panjang Pengurangan Ketimpangan Kesejahteraan

Pilar Strategis	Fokus Aksi	Implementor	Tujuan
Ekosistem Sejahtera Terpadu	Integrasi lintas dimensi (pendidikan, pekerjaan, kesehatan)	Pemkot + Lurah + RW	Reduksi fragmentasi program
Kelembagaan Komunitas	Forum warga, sekolah warga, dewan kampung	Lurah + RW + PKK	Membangun rasa kepemilikan
Diversifikasi Pendanaan	Dana zakat, CSR, hibah komunitas	Baznas + CSR + Yayasan	Dana alternatif berkelanjutan
Sistem Informasi Terpadu	Dasbor kesejahteraan RW/Kelurahan	Disdukcapil + Dinsos	Respons cepat dan akurat
Investasi Generasi Muda	Mentoring, kampus RW, pelatihan digital	Pemuda, Dindik, Komunitas	Mobilisasi aktor perubahan
Evaluasi Berbasis Warga	Social audit, feedback publik	RW + RT + NGO	Akuntabilitas sosial
Policy Learning Unit	Kajian & eksperimentasi kebijakan	Bappeda + Perguruan Tinggi	Adaptasi & replikasi kebijakan

5.5 Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan

1. Pemerintah perlu memperluas akses terhadap modal produktif berbasis komunitas bagi kelompok miskin dan rentan. Program bantuan tidak lagi berbasis konsumsi semata, tetapi diarahkan pada *asset-based empowerment*, seperti hibah alat usaha, pelatihan kewirausahaan, dan koperasi

kelurahan. Pendekatan inklusif seperti *bank sampah*, *tabungan kelompok*, atau *wirausaha ibu rumah tangga* juga bisa diperluas. Intervensi ini penting untuk memutus ketergantungan pada sektor informal dan meningkatkan daya tahan ekonomi keluarga.

2. Intervensi pendidikan tidak cukup hanya pada aspek fisik (sekolah, seragam), tetapi harus menyentuh *motivasi, aspirasi, dan pendampingan anak dari keluarga miskin*. Pemerintah bisa mengembangkan program *Mentoring Anak RW*, *Beasiswa Non-Akademik*, dan *Sekolah Masa Depan* yang dirancang oleh kader lokal dan relawan pendidikan. Intervensi zonasi perlu dievaluasi dan diperluas agar anak-anak dari kelurahan padat bisa tetap masuk sekolah negeri berkualitas di luar zona.
3. Pemerintah Kota harus mendorong skema perlindungan sosial yang inklusif dan fleksibel. Banyak pekerja serabutan dan informal tidak tercakup dalam jaminan BPJS ketenagakerjaan maupun kesehatan karena kendala administrasi. Solusinya adalah penerbitan "Kartu Pekerja Rentan" di tingkat kota yang menghubungkan mereka dengan subsidi BPJS, akses pelatihan kerja, dan pendampingan legal formal. Selain itu, revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) harus disesuaikan dengan kebutuhan riil di kecamatan rentan.
4. Untuk menjamin layanan dasar yang merata, perlu ada program ProSanitasi RW dan Air Bersih Berbasis Komunitas di wilayah seperti Panularan dan Mojosongo. Warga bisa didorong membentuk kelompok kerja sanitasi dengan pendampingan teknis dari Dinas PU dan bantuan hibah dari CSR. Di samping itu, layanan air bersih PDAM harus diperluas hingga ke kawasan padat yang saat ini masih bergantung pada sumur dangkal. Pemerintah juga harus mempercepat program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) berbasis warga.
5. Kesenjangan dalam partisipasi sosial perlu dijawab dengan revitalisasi lembaga sosial kampung seperti PKK, Karang Taruna, dan Posyandu. Warga yang semula pasif bisa diaktivasi melalui pelatihan partisipatif, pelibatan dalam musyawarah kelurahan, dan kegiatan komunitas tematik (misal: koperasi ibu tunggal, komunitas difabel, pemuda anti putus sekolah). Diperlukan pendamping sosial lokal di setiap kelurahan yang berfungsi sebagai fasilitator dan penghubung antara warga dan layanan pemerintah.
6. Perempuan menjadi aktor kunci dalam ketahanan keluarga dan ekonomi, tetapi masih menghadapi hambatan kultural, status hukum, dan akses terhadap peluang. Maka, diperlukan program afirmatif seperti Modal Usaha Perempuan Kepala Keluarga, Pusat Konseling Perempuan, dan Beasiswa Anak Perempuan. Selain itu, perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan atau stigma sosial (seperti janda muda atau ibu tunggal) perlu dijamin melalui regulasi tingkat kota dan peran

aktif P2TP2A.

7. Memutus siklus ketimpangan jangka panjang, penting membangun ekosistem mobilitas sosial melalui pendidikan tinggi, pelatihan teknologi, dan program pemuda pemutus kemiskinan. Pemerintah bisa menciptakan Program Afirmasi Kuliah RW, Magang Komunitas, atau Digital Fellowship Anak Miskin Kota. Harapan harus diperkuat lewat narasi kolektif, keterlibatan tokoh teladan lokal, dan akses pada impian hidup yang realistis namun progresif.

Tabel 5.30 Rekomendasi Alternatif Berdasarkan Dimensi Ketimpangan

Dimensi Ketimpangan	Rekomendasi Utama	Target Utama	Implementor
Ekonomi dan Aset Produktif	Program wirausaha berbasis kelompok; koperasi RW	Keluarga miskin dan perempuan	Dinkop UKM, Dinsos, CSR
Pendidikan	Mentoring anak RW; perluasan zonasi dan beasiswa non-akademik	Anak dari keluarga tidak mampu	Dindik, Sekolah, RW
Pekerjaan dan Perlindungan Sosial	Kartu Pekerja Rentan; integrasi dengan BPJS dan pelatihan BLK	Pekerja informal	Disnaker, BPJS, Bappeda
Layanan Dasar dan Sanitasi	Air Bersih Komunal; Hibah sanitasi; STBM berbasis RW	Warga permukiman padat	Dinas PU, PDAM, RW
Partisipasi Sosial dan Kelembagaan	Revitalisasi PKK, Karang Taruna; pelibatan dalam musyawarah kampung	Warga pasif dan marginal	Kelurahan, Bappeda, NGO lokal
Gender dan Kesejahteraan Perempuan	Pusat layanan hukum dan ekonomi perempuan; modal usaha janda & ibu tunggal	Perempuan rentan & kepala keluarga	DP3A, Bappeda, Dinsos
Harapan dan Mobilitas Sosial Anak	Afirmasi Kuliah; Fellowship digital; Magang kampung	Remaja miskin dan putus sekolah	Dindik, Kampus, Komunitas Pemuda

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa ketimpangan kesejahteraan di Kota Surakarta bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan mencakup dimensi sosial, spasial, dan kelembagaan yang saling terkait. Meskipun secara makro indikator pembangunan seperti IPM dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan, realitas di tingkat mikro khususnya antar- kelurahan menunjukkan disparitas yang signifikan. Ketimpangan tersebut tercermin dalam perbedaan akses terhadap layanan dasar, infrastruktur, serta peluang sosial-ekonomi antara wilayah inti dan pinggiran kota. Data BPS Kota Surakarta (2023) menunjukkan bahwa meskipun angka kemiskinan menurun menjadi 8,31%, kesenjangan spasial dalam distribusi manfaat pembangunan masih tinggi.

Temuan penelitian juga menegaskan relevansi pendekatan core-periphery dalam memahami ketimpangan struktural yang terjadi. Wilayah inti seperti Banjarsari berkembang dengan cepat karena dukungan fasilitas dan jaringan ekonomi, sedangkan wilayah periferial seperti Jebres dan Serengan tertinggal dalam aksesibilitas dan integrasi pembangunan (Safira et al., 2023; Paundra et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan kota yang tidak seimbang secara spasial berisiko menciptakan ruang-ruang eksklusif sosial yang memarginalkan kelompok tertentu.

Ketimpangan kesejahteraan di Surakarta juga tidak terlepas dari masalah mobilitas sosial yang stagnan di sebagian wilayah. Keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, dan pekerjaan layak menyebabkan sebagian warga kota khususnya dari kelompok miskin dan pekerja informal terjebak dalam siklus ketidakberdayaan struktural. Hal ini diperkuat oleh kajian Mujiburrohman & Putri (2024) yang menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran vital dalam membuka peluang mobilitas vertikal, yang belum merata di semua kecamatan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan bukan hanya menghasilkan perbedaan kesejahteraan, tetapi juga menimbulkan pemisahan sosial dan spasial yang memperlemah kohesi sosial. Ketidaksetaraan akses terhadap ruang publik, perumahan, dan layanan kota memperbesar risiko eksklusif sosial terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan, lansia, dan

pekerja sektor informal. Urbanisasi yang tidak terkendali turut memperburuk ketegangan sosial dan memicu konflik laten di masyarakat.

Penelitian ini menyoroti pentingnya *evidence-based policy* yang berbasis data spasial dan indikator multidimensi. Indikator konvensional seperti PDRB atau kemiskinan absolut belum cukup menangkap kompleksitas kesejahteraan masyarakat urban. Kebijakan perlu dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi lokal secara granular, khususnya melalui pemetaan spasial di tingkat kelurahan yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Temuan ini juga memperlihatkan bahwa *collaborative governance* menjadi salah satu pendekatan potensial dalam menjembatani kelemahan tata kelola pembangunan. Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, lemahnya evaluasi program, dan minimnya pelibatan masyarakat menjadi hambatan utama dalam efektivitas intervensi kebijakan. Melibatkan aktor lintas sektor dan memperkuat kapasitas kelembagaan, tata kelola pembangunan kota dapat diarahkan untuk lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam memahami hubungan antara ketimpangan kesejahteraan, struktur kota, dan dinamika sosial. Selain itu, kajian ini memberikan dasar empiris untuk mendorong reformasi kebijakan lokal berbasis keadilan spasial dan sosial. Dengan pemetaan ketimpangan yang komprehensif dan refleksi terhadap kebijakan yang ada, pemerintah daerah memiliki peluang untuk menyusun strategi pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan dan keadilan antar wilayah dan antar kelompok sosial.

6.2. Saran

1. Kepada Pemerintah Daerah Kota Surakarta:

Perlu menyusun ulang kebijakan pembangunan kota dengan pendekatan spasial yang lebih adil, termasuk afirmasi anggaran untuk kelurahan-kelurahan yang tertinggal serta pengembangan indikator kesejahteraan multidimensi sebagai dasar perencanaan.

2. Kepada BAPPEDA dan BRIDA Kota Surakarta:

BAPPEDA dan BRIDA perlu mengembangkan sistem informasi geospasial kesejahteraan (SIG-Kesejahteraan) berbasis kelurahan, guna memperkuat pengambilan keputusan berbasis bukti dan memudahkan pemantauan program secara real-time.

3. Kepada Akademisi dan Peneliti:

Perlu dilakukan kajian lanjutan terkait hubungan antara ketimpangan spasial dan mobilitas sosial di Surakarta, serta uji kebijakan melalui simulasi spasial dan pendekatan kuantitatif berbasis data longitudinal.

4. Kepada Organisasi Masyarakat Sipil dan Komunitas Lokal:

Ormas dan komunitas lokal harus berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan dan evaluasi program kesejahteraan, serta memperkuat advokasi atas hak-hak warga miskin kota dalam memperoleh layanan dasar yang setara.

5. Kepada Pemerintah Provinsi dan Nasional:

Penting untuk mereplikasi pendekatan pemetaan ketimpangan dan kolaboratif yang dilakukan di Surakarta sebagai model praktik baik untuk diterapkan di kota-kota sekunder lainnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and Multidimensional Poverty Measurement. *Journal of Public Economics*, 95(7-8), 476–487
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Azzahra, R., Nurmandi, A., & Supriyati, Y. (2022). Spatial Inequality and Urban Service Delivery: Evidence from Secondary Cities in Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 45(7), 610–623. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1868503>
- Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. (2023). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Surakarta 2023*. [https://surakartakota.bps.go.id/publication/2023/12/28/899c1629ab70c779ebd61250/statistik-kesejahteraan-rakyat-kota-surakarta-2023.html:contentReference\[oaicite:2\]{index=2}](https://surakartakota.bps.go.id/publication/2023/12/28/899c1629ab70c779ebd61250/statistik-kesejahteraan-rakyat-kota-surakarta-2023.html:contentReference[oaicite:2]{index=2})
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2023*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/11/06/7807339c2dfaed0ca8e0beaa/indikator-kesejahteraan-rakyat-2023.html> Badan Pusat Statistik Indonesia+1 Badan Pusat Statistik Indonesia+1
- BRIDA Kota Surakarta. (2022). *Laporan Akhir Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah*. <https://brida.surakarta.go.id>
- Bustamam, N., Yulyanti, S., & Dewi, K. S. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indikator Kesejahteraan Masyarakat di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 32(1), 85–92.
- Choiri, A., Wibowo, W., Arifa, I., & Aminuddin, A. (2025). Dampak Pengangguran dan Ketimpangan Sosial Terhadap Stabilitas Ekonomi, Sosial, dan Politik di Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 947-955.
- Dwiningwarni, S. (2020). Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 4(1), 1-20.
- Farhan, M. & Sugianto. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa, *Sibatik Journal*, 1(4), 243-257.
- Hababil, M. P., Firdaus, M. K., Nazhmi, N., Hamdani, M. D., Alghifary, M. R., & Fadilla, A. (2024). Analisis Pengaruh Pemerataan Ekonomi Dalam Upaya Menghapus Ketimpangan Sosial-Ekonomi Antar Masyarakat. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1-9.

- Hababil, M. P., Firdaus, M. K., Nazhmi, N., Hamdani, M. D., Alghifary, M. R., & Fadilla, A. (2024). Analisis Pengaruh Pemerataan Ekonomi Dalam Upaya Menghapus Ketimpangan Sosial-Ekonomi Antar Masyarakat. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1-9.
- Hidayat, S. A. (2020). Kajian Pustaka Meta Analisis. IAIN Kendari Repository.
- Khatima, K. (2024). Strategi Pembangunan Inklusif untuk Mengurangi Kesenjangan Sosial dan Ekonomi di Indonesia. Universitas Airlangga.
- Mu'minah, S., & Tjenreng, M. Z. (2025). Desentralisasi dan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(1), 342-351.
- Mu'minah, S., & Tjenreng, M. Z. (2025). Desentralisasi dan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(1), 342-351.
- Mu'minah, S., & Tjenreng, M. Z. (2025). Desentralisasi dan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(1), 342-351.
- Mujiburrohman, A., & Putri, D. (2024). Ketimpangan Pendidikan dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Sosial di Surakarta. *Jurnal Sosiologi dan Pendidikan*, 9(1), 21–35. <https://journal.ar-raniry.ac.id>
- Nababan, T. J. A., & Robertus, M. H. (2024). Pengaruh Aglomerasi, Jumlah Penduduk, Dana Perimbangan, dan Belanja Pemerintah terhadap Ketimpangan antar Wilayah di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022. *Diponegoro Journal of Economics*, 13(2), 41-51.
- Ningsih, U., Alpendi, A., & Dewi, A. S. (2024). Kesenjangan Sosial Ekonomi di Indonesia: Penyebab, Dampak, dan Solusi Kebijakan. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 5(3), 426-445.
- Nugroho, H. A., Wulandari, D., & Putra, A. (2022). *Spatial Analysis of Urban Welfare Inequality in Central Java: A Micro-Level Approach*. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 33(2), 145–158. <https://doi.org/10.14710/jpwk.v33i2.28497>
- Nugroho, H. A., Wulandari, D., & Santoso, B. (2023). Mapping Urban Inequality using Spatial Welfare Indicators: Case of Surakarta. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 34(1), 45–59. <https://doi.org/10.14710/jpwk.v34i1.31570>
- Nurrohim, M. D., Aghil, M. S., Alazhari, M. A., Fahrezi, M. H., & Fadilla, A. (2024). Analisis Dinamika Ketimpangan Ekonomi terhadap Era Globalisasi di Indonesia. *Journal of Regional Economics and Development*, 1(3), 1-7.

- Panda.id. (2025). Pendekatan Holistik dalam Mengintegrasikan Program Bantuan Sosial untuk Masyarakat Rentan di Desa.
- Paundra, J., Arifin, H. S., & Setiawan, D. (2020). *Core-Periphery Model and Urban Growth in Java: Empirical Evidence from Spatial Econometric Models*. Indonesian Journal of Geography, 52(1), 23–34. <https://doi.org/10.22146/ijg.46768>
- Pratama, M. R., & Pramono, T. (2021). Pelayanan Publik di Daerah: Menguk Kesenjangan Pelayanan Dasar. Jurnal Mediasosian, 3(2).
- Prima, I. T., & Khoirunurrofik. (2019). *Economic Inequality, Regional Development, and Internal Migration in Indonesia*. Economics and Finance in Indonesia, 65(1), 53–66
- Putri, N. P., & Yuliani, T. (2021). *Disparitas Akses Infrastruktur Perkotaan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan*. Jurnal Sosial Humaniora, 14(1), 85–97
- Putri, S., & Wahyuni, D. (2023). *Urban Exclusion and the Threat to Social Cohesion in Secondary Cities: A Case Study of Surakarta*. Journal of Urban Social Development, 6(3), 112–130.
- Rianto, A. (2018). Pelayanan Publik dalam Konteks Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat. SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat dan Komunikasi, 12(2).
- Safira, L., Samudro, B. R., & Mulyanto. (2023). *Determination of the Center for Economic Growth in Surakarta City, Indonesia: Geospatial Approach*. International Journal of Sustainable Development and Planning, 18(9), 2801–2810. [https://doi.org/10.18280/ijstdp.180918:contentReference\[oaicite:5\]{index=5}](https://doi.org/10.18280/ijstdp.180918:contentReference[oaicite:5]{index=5})
- Safira, N., Hidayat, A., & Wicaksono, B. (2023). Spatial Inequality and Service Access in Solo City. *Journal of Urban and Regional Planning*, 12(1), 33–48.
- Sastiono, P., & Nuryakin, C. (2019). Inklusi Keuangan Melalui Program Layanan Keuangan Digital dan Laku Pandai. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 19(2), 242–262.
- Setyono, J. S., Yunus, H. S., & Giyarsih, S. R. (2016). *The Spatial Pattern of Urbanization and Small Cities Development in Central Java: A Case Study of Semarang-Yogyakarta-Surakarta Region*. Geoplanning: Journal of Geomatics and Planning, 3(1), 53–66. <https://doi.org/10.14710/geoplanning.3.1.53-66>
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiri, A., & Nuraini. (2013). Kesenjangan spasial dan kegagalan keadilan pada fungsi distribusi manfaat pembangunan di Wilayah Blitar. Neliti.
- Sukmono, A. (2020). *Pemetaan Ketimpangan Wilayah di Kota Surakarta Menggunakan Indeks Pembangunan Berbasis Kelurahan*. Jurnal Wilayah dan Lingkungan, 8(2), 191–202.

- Supardi, H., & Jacky, M. (2019). Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan. *Paradigma*, 7(3)
- Suryanto, A. (2020). Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kota Surakarta. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(2), 145–160. <https://jurnal.surakarta.go.id>
- The Prakarsa. (2024). Mengintegrasikan Negara Pembangunan dan Institusi Inklusif.
- The SMERU Research Institute. *Dinamika Ketimpangan dan Penghidupan di Perdesaan Indonesia*. Working Paper, 2018. Diakses dari https://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/wptifa1ketimpangandesas_id.pdf
- UN-Habitat. (2020). *World Cities Report 2020: The Value of Sustainable Urbanization*. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme. <https://unhabitat.org>
- Watif, M., JT, A. R., Tahir, L. S. A., & Hikmah, N. (2024). Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan Pada Masyarakat Perkotaan. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3(4), 536-547.
- Widyaningsih, L. (2018). Pendekatan Partisipatif dalam Metode Penelitian Arsitektur
- World Bank. (2022). *Reducing Inequalities for Shared Prosperity in Cities*. Washington, D.C.: World Bank Group. <https://www.worldbank.org>